



PEMERINTAH KAB. BOJONEGORO

Jl. P. Mas Tumapel No. 01 Bojonegoro

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 2024-2026





**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 10.A TAHUN 2023**

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 260 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 263 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menyusun Rencana Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, telah ditentukan untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024;
- c. bahwa pada pokoknya masa bakti Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro berikut periode waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2023 berakhir pada bulan September tahun 2023;
- d. bahwa agar pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan dengan baik dan lancar dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro, maka perlu menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah periode tahun 2024-2026;

- e. bahwa sebagaimana ketentuan Diktum KESATU huruf c, Diktum KEDUA, dan Diktum KETIGA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 agar menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sebagai pedoman bagi Pj. Kepala Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

22. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 8);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 Nomor 2), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 Nomor 1);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RPDes adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

12. Prioritas Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang diutamakan dan didahulukan dari yang lain dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang berkorelasi dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi dan Nasional.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.
16. Program dan Kegiatan Prioritas Daerah adalah program dan kegiatan utama dan harus didahulukan dari yang lainnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPD Tahun 2024-2026.
17. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud penyusunan RPD adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen Daerah yang terdiri dari Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan cita-cita masyarakat di Daerah sesuai dengan tujuan, sasaran dan program pembangunan Daerah periode 2024-2026, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan berkesinambungan dalam satu pola sikap dan pola tindak dengan mengacu kepada RPD.

Pasal 3

Tujuan penyusunan RPD antara lain sebagai berikut:

- a. merumuskan gambaran umum kondisi Daerah sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun, sehingga RPD dapat digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-PD;
- b. merumuskan pedoman pengelolaan terhadap kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan pembangunan Daerah tahun 2024-2026;

- c. merumuskan dan menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2024-2026; dan
- d. merumuskan indikator kinerja sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja tahunan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Daerah;
- c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
- d. BAB IV : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah;
- e. BAB V : Tujuan dan Sasaran;
- f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
- g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
- h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- i. BAB IX : Penutup.

BAB III PELAKSANAAN RPD

Pasal 5

RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. seluruh Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target sebagaimana yang telah ditetapkan RPD;
- b. seluruh Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program sebagaimana dalam RPD dengan sebaik-baiknya;
- c. seluruh Perangkat Daerah agar menyusun Renstra-PD dengan berpedoman pada RPD; dan
- d. seluruh Pemerintah Desa dalam menyusun RPDes harus mempedomani RPD.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD dilakukan dalam rangka menjamin dan memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPD.

- (2) Bupati melalui Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, indikasi program prioritas, dan kebutuhan pendanaan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indikasi rencana program prioritas, kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara evaluasi dan pengendalian pelaksanaan RPD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 31 Maret 2023

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 31 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM
BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2023 NOMOR 10.A

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19690405 198809 2 001

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR 10. TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan peran serta masyarakat. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan amanat tersebut, maka perencanaan pembangunan di daerah disusun dalam tahapan-tahapan baik dalam jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta dengan memperhatikan beberapa peraturan pelaksanaannya antara lain : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam hal ini menggunakan istilah Rencana Pembangunan Daerah atau RPD (sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan.

Tujuan, sasaran, dan program pembangunan yang ditetapkan dalam RPD harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024 serta RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Penetapan sasaran dan program-program pembangunan yang ditetapkan dalam RPD disesuaikan dengan prediksi kemampuan sumber daya dan dana serta hasil-hasil (keluaran dan dampak) yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut yang ditetapkan secara indikatif. Keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku, dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dimuat dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD).

RPD Tahun 2024-2026 merupakan perspektif masa depan daerah tentang apa yang ingin dicapai dalam masa 3 (tiga) tahun ke depan sesuai sasaran pokok RPJPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005 – 2025.

Dalam upaya mencapai perspektif masa depan tersebut secara terencana, terarah, dan terukur serta dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan, maka disusunlah RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026.

Adapun maksud dari penyusunan Peraturan Bupati tentang RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 adalah untuk memberikan pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat Daerah) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dan perumusan prioritas pembangunan daerah, strategi, arah kebijakan, program, indikator kinerja, sasaran, lokasi, total kebutuhan, target kinerja, dan indikasi pendanaan selama Tahun 2024-2026.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024–2026 dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Dokumen RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 merupakan lanjutan dari dokumen Rancangan Akhir RPD yang telah disusun sebelumnya.

Pada dokumen RPD ini memuat kolaborasi dari 3 (tiga) pendekatan, yakni: teknokratik, partisipatif serta Top Down dan Bottom Up. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 47 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan dokumen RPD ini mencakup penyempurnaan Rancangan Akhir RPD, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, perumusan program pembangunan Daerah dan perumusan program Perangkat Daerah.

Adapun dokumen RPD ini telah disempurnakan berdasarkan masukan-masukan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik yang dituangkan dalam Berita Acara dan telah disempurnakan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Renstra.

Harapan kami, dokumen ini dapat menjadi pijakan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026. Tak lupa kritik dan saran yang membangun akan senantiasa kami terima demi hasil yang lebih baik di masa depan.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	I -1
1.1 LATAR BELAKANG.	I - 1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN	I - 6
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I-12
1.3.1 Hubungan RPD Kabupaten Bojonegoro dengan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Timur	I-12
1.3.2 Hubungan RPD dengan RPJPD, RENSTRA PD, RKPD dan RENJA PD Kabupaten Bojonegoro	I-17
1.3.3 Hubungan RPD dengan RTRW Kabupaten Bojonegoro	I-21
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN	I-40
1.4.1 Maksud	I-40
1.4.2 Tujuan.	I-40
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	I-40
1.6 PELAKSANAAN RPD	I-42
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	II-1
2.1.1. Kondisi Geografi Wilayah	II-1
2.1.1.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi	II-1
2.1.1.2. Topografi	II-2
2.1.1.3. Geologi.	II-4
2.1.1.4. Hidrologi	II-4
2.1.1.5. Klimatologi	II-8
2.1.1.6. Penggunaan Lahan	II-9
2.1.1.7. Arah Pemanfaatan Ruang	II-10
2.1.1.8. Wilayah Rawan Bencana	II-11
2.1.2. Kondisi Demografi	II-13
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II-17
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-17
2.2.1.1. Fokus Kesejahteraan	II-17
2.2.1.1.1. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi	II-17
2.2.1.1.2. PDRB Per Kapita.	II-21
2.2.1.1.3. Inflasi	II-21
2.2.1.2. Pemerataan Ekonomi	II-23
2.2.1.2.1. Indeks Gini.	II-23
2.2.1.2.2. Indek Wiliamson	II-23
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II-24
2.2.2.1. Tingkat Kemiskinan	II-24
2.2.2.2. Indeks Pembangunan Manusia	II-27

2.2.2.3. Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender .	II-31
2.2.2.4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja .	II-32
2.2.2.5. Tingkat Pengangguran Terbuka .	II-33
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga .	II-34
2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM .	II-35
2.3.1. Fokus Urusan Layanan Wajib .	II-35
2.3.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar .	II-35
2.3.1.1.1. Bidang Pendidikan .	II-36
2.3.1.1.2. Bidang Kesehatan .	II-39
2.3.1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. .	II-48
2.3.1.1.4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	II-56
2.3.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar .	II-65
2.3.1.2.1. Urusan Bidang Tenaga Kerja .	II-65
2.3.1.2.2. Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .	II-66
2.3.1.2.3. Urusan Bidang Pangan .	II-68
2.3.1.2.4. Urusan Bidang Pertanahan .	II-69
2.3.1.2.5. Urusan Bidang Lingkungan Hidup .	II-70
2.3.1.2.6. Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil .	II-72
2.3.1.2.7. Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa .	II-73
2.3.1.2.8. Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .	II-74
2.3.1.2.9. Urusan Bidang Perhubungan .	II-75
2.3.1.2.10. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika .	II-76
2.3.1.2.11. Urusan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro .	II-77
2.3.1.2.12. Urusan Bidang Penanaman Modal. .	II-78
2.3.1.2.13. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga .	II-79
2.3.1.2.14. Urusan Bidang Statistik .	II-82
2.3.1.2.15. Urusan Bidang Persandian .	II-83
2.3.1.2.16. Urusan Bidang Kebudayaan. .	II-83
2.3.1.2.17. Urusan Bidang Perpustakaan .	II-84
2.3.1.2.18. Urusan Bidang Kearsipan .	II-84
2.3.1.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan .	II-85
2.3.1.3.1. Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan .	II-86
2.3.1.3.2. Pariwisata .	II-87
2.3.1.3.3. Urusan Bidang Pertanian .	II-88
2.3.1.3.4. Urusan Bidang Perdagangan .	II-90
2.3.1.3.5. Urusan Bidang Perindustrian .	II-91
2.3.1.3.6. Urusan Bidang Transmigrasi .	II-93
2.3.1.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan .	II-93
2.3.1.4.1. Unsur Perencanaan .	II-93
2.3.1.4.2. Unsur Keuangan .	II-94
2.3.1.4.3. Unsur Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan .	II-95
2.3.1.4.4. Unsur Penelitian dan Pengembangan .	II-96
2.3.1.5. Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan .	II-96
2.3.1.5.1. Sekretariat Daerah .	II-96

2.3.1.5.2. Sekretariat DPRD	II-99
2.3.1.5.3. Pengawasan.	II-99
2.3.1.5.4. Bakesbangpol	II-100
2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH	II-101
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-101
2.4.2. Fokus Wilayah/Infrastruktur.	II-103
2.4.3. Fokus Iklim Investasi	II-103
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia	II-104
 BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	 III-1
3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	III-1
3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi . . .	III-2
3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi	III-3
3.1.3 Inflasi	III-6
3.1.4 Angkatan Kerja	III-7
3.1.5 Kemiskinan	III-8
3.1.6 Ketimpangan Regional	III-8
3.1.7 Ketimpangan Pendapatan	III-9
3.1.8 Proyeksi Indikator Makro	III-10
3.1.9 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah	III-11
3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.	III-13
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-14
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-21
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-27
 BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	 IV-1
4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	IV-1
4.2 ISU-ISU STRATEGIS	IV-10
4.2.1 Isu-Isu Strategis Internasional	IV-10
4.2.2 Isu- Isu Strategis Nasional	IV-17
4.2.3 Isu- Isu Strategis Regional	IV-20
4.2.4 Isu- Isu Strategis Kabupaten Bojonegoro	IV-27
 BAB V TUJUAN DAN SASARAN	 V
 BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	 VI
6.1. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1
6.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	VI-17
6.3. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-35
 BAB VII KERANGKA PENDANAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	 VII-1
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VIII-1
BAB IX PENUTUP	IX-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penyelarasan tujuan dan sasaran antara RPJMN 2020 - 2024 dengan RPD Kabupaten Bojonegoro 2024 – 2026.....	I-14
Tabel 1. 2	Penyelarasan tujuan dan sasaran antara RPJMD Jawa Timur 2019 – 2024 dengan RPD Kabupaten Bojonegoro 2024 – 2026	I-16
Tabel 1. 3	Penyelarasan antara RPJPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005 - 2025 dengan RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 – 2026.....	I-17
Tabel 1. 4	Penyelarasan antara RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 dengan Renstra PD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026	I-18
Tabel 1. 5	Penyelarasan Tujuan RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024–2026 dengan Tujuan, Kebijakan dan Strategi RTRW Bojonegoro Tahun 2021–2041.....	I-22
Tabel 1. 6	Keselarasan Program Prioritas RPD dengan RTRW Kabupaten Bojonegoro	I-26
Tabel 2. 1	Luas wilayah menurut kemiringan tanah	II-3
Tabel 2. 2	Luas wilayah menurut ketinggian tempat	II-3
Tabel 2. 3	Luas areal menurut jenis tanah di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.....	II-4
Tabel 2. 4	Profil anak sungai bengawan solo di Kabupaten Bojonegoro .	II-5
Tabel 2. 5	Potensi air waduk di Kabupaten Bojonegoro	II-7
Tabel 2. 6	Jumlah embung dan bendung/check DAM di Kabupaten Bojonegoro, 2022	II-7
Tabel 2. 7	Potensi sumber daya air di Kabupaten Bojonegoro	II-8
Tabel 2. 8	Penggunaan lahan Kabupaten Bojonegoro.	II-9
Tabel 2. 9	Jumlah penduduk Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 - 2022	II-14
Tabel 2. 10	Indikator kependudukan Kabupaten Bojonegoro 2018-2022	II-15
Tabel 2. 11	Jumlah dan kepadatan penduduk per kecamatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.....	II-15
Tabel 2. 12	PDRB Kabupaten Bojonegoro ADHK menurut lapangan usaha Tahun 2018 – 2022 (milyar rupiah)	II-17
Tabel 2. 13	Laju pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Bojonegoro menurut lapangan usaha Tahun 2018 - 2022	II-19
Tabel 2. 14	Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur dan nasional Tahun 2018 - 2022	II-20
Tabel 2. 15	PDRB dan PDRB per kapita Kabupaten Bojonegoro 2017-2021.....	II-21
Tabel 2. 16	Laju inflasi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 - 2022	II-22

Tabel 2. 17	Angka harapan hidup Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022	II-28
Tabel 2. 18	Angka rata-rata lama sekolah usia 25 Tahun keatas di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022	II-29
Tabel 2. 19	Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022	II-29
Tabel 2. 20	Harapan lama sekolah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022	II-30
Tabel 2. 21	Harapan lama sekolah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022	II- 30
Tabel 2. 22	Pengeluaran per kapita Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022	II-30
Tabel 2. 23	Indikator ketenagakerjaan Kabupaten Bojonegoro 2018 – 2022	II-33
Tabel 2. 24	Indikator tingkat pengangguran terbuka 2018 – 2022	II-34
Tabel 2. 25	Perkembangan organisasi kesenian di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 – 2022	II-34
Tabel 2. 26	Perkembangan klub dan gedung olahraga di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 – 2022	II-35
Tabel 2. 27	Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD dan SMP Kabupaten Bojonegoro	II-35
Tabel 2. 28	APK PAUD/SD/MI dan SMP/MTS 2018 – 2022	II-36
Tabel 2. 29	Angka Putus Sekolah jenjang SD dan SMP Tahun 2017-2022	II-37
Tabel 2. 30	Rasio ketersediaan sekolah dengan jumlah penduduk usia pendidikan dasar Kabupaten Bojonegoro Tahun ajaran 2020/2021 dan 2021/2022	II-37
Tabel 2. 31	Persentase Penduduk 15 Tahun keatas menurut kemampuan baca tulis dan jenis kelamin Kabupaten Bojonegoro	II-38
Tabel 2. 32	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	II-39
Tabel 2. 33	Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Bojonegoro	II-42
Tabel 2. 34	Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Tahun 2018-2022	II-44
Tabel 2. 35	Persentase Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap kepada Bayi di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022	II-44
Tabel 2. 36	Kejadian TB dihitung per 100.000 Penduduk di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022	II-45
Tabel 2. 37	Kejadian HIV dihitung per 100.000 penduduk di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022	II-45
Tabel 2. 38	Persentase Desa Siaga Aktif di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020-2022	II-46
Tabel 2. 39	Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022	II-46

Tabel 2. 40	Capaian Indikator Kesehatan Lainnya Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022 .	II-47
Tabel 2. 41	Kondisi jalan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022	II-49
Tabel 2. 42	Kondisi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022 .	II-50
Tabel 2. 43	Perkembangan Peningkatan Sumber Daya Air Beku di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2022 .	II-51
Tabel 2. 44	Perkembangan Jaringan Irigasi di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2022 .	II-51
Tabel 2. 45	Drainase Wilayah Ibukota di Kabupaten Bojonegoro yang dibangun .	II-52
Tabel 2. 46	Indikator Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan Sumber Daya Air Minum Layak Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022 .	II-53
Tabel 2. 47	Data Pembangunan Sistem Pengolahan air limbah setempat Tahun 2018-2022 .	II-54
Tabel 2. 48	Perkembangan Inventarisasi Produk Tata Ruang Ibu Kota Kecamatan beserta Perda di Kabupaten Bojonegoro s/d Tahun 2018-2022.	II-55
Tabel 2. 49	Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2018-2022 .	II-56
Tabel 2. 50	Perkembangan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bojonegoro s/d Tahun 2018-2022 .	II-56
Tabel 2. 51	Perkembangan Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022	II-57
Tabel 2. 52	Perkembangan Kondisi Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022.	II-57
Tabel 2. 53	Persentase Rumah Tangga yang mempunyai Akses Sanitasi yang layak di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022	II-58
Tabel 2. 54	Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2022	II-59
Tabel 2. 55	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2022.....	II-60
Tabel 2. 56	Cakupan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2022	II-60
Tabel 2. 57	Perkembangan Organisasi Partai Politik dan Kemasyarakatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022	II-61
Tabel 2. 58	Kinerja Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2018-2022	II-62
Tabel 2. 59	Kejadian Bencana Kebakaran di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2022 .	II-62
Tabel 2. 60	Realisasi SPM Bidang Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat .	II-63
Tabel 2. 61	Perkembangan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bojonegoro	II-63
Tabel 2. 62	Realisasi SPM Bidang Sosial	II-64

Tabel 2. 63	Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2022	II-65
Tabel 2. 64	Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Latar Belakang Mata Pencarian Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2022	II-66
Tabel 2. 65	Perkembangan Peranan Perempuan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2022.....	II-67
Tabel 2. 66	Perkembangan Peranan Perempuan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022	II-67
Tabel 2. 67	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022	II-68
Tabel 2. 68	Perkembangan Lahan Bersertifikat Kabupaten Bojonegoro	II-69
Tabel 2. 69	Perkembangan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun 2018-2022	II-70
Tabel 2. 70	Indikator Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022	II-70
Tabel 2. 71	Volume sampah yang terkelola dan berhasil di tangani Tahun 2020 s/d 2022	II-71
Tabel 2. 72	Penerbitan Akta-akta Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2022	II-72
Tabel 2. 73	Penerbitan Dokumen Kependudukan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2022	II-72
Tabel 2. 74	Status IDM Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022.....	II-73
Tabel 2. 75	Laju Pertumbuhan Penduduk dan Total Fertility Rate Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022	II-75
Tabel 2. 76	Perkembangan Sarana dan Perlengkapan Jalan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2022	II-75
Tabel 2. 77	Perkembangan Jumlah Koperasi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022	II-78
Tabel 2. 78	Perkembangan Sektor UMKM Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022.....	II-78
Tabel 2. 79	Data Perkembangan PMA/PMDN dan Non PMA/PMDN Tahun 2018-2022.	II-79
Tabel 2. 80	Perkembangan Jenis Cabang Olah raga Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2022	II-80
Tabel 2. 81	Jumlah Prasarana Olahraga di Kabupaten Bojonegoro	II-81
Tabel 2. 82	Jumlah Atlet Berprestasi Tahun 2019-2022 di Kabupaten Bojonegoro	II-81
Tabel 2. 83	Persentase Pemuda yang mendapat pelatihan Tahun 2019-2022	II-82
Tabel 2. 84	Persentase Pemuda Berprestasi Tahun 2019-2022 di Kabupaten Bojonegoro	II-82
Tabel 2. 85	Indikator Aspek Statistik Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022	II-82
Tabel 2. 86	Jumlah Cagar Budaya di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2022	II-83
Tabel 2. 87	Perkembangan perpustakaan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2022	II-84
Tabel 2. 88	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Kearsipan . .	II-85
Tabel 2. 89	Perkembangan Produksi Perikanan Kabupaten Bojonegoro	

	Tahun 2019-2022.	II-87
Tabel 2. 90	Perkembangan Produksi Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022	II-88
Tabel 2. 91	Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022	II-89
Tabel 2. 92	Perkembangan Data Ekspor dan Impor Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2022	II-91
Tabel 2. 93	Jumlah unit usaha sektor industri tahun 2018-2022	II-92
Tabel 2. 94	Capaian kinerja urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022	II-94
Tabel 2. 95	Capaian Kinerja Urusan Penunjang Keuangan Kabupaten Bojonegoro 2017-2021	II-95
Tabel 2. 96	Capaian Indek Profesionalitas ASN Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2021	II-95
Tabel 2. 97	Capaian Indikator Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022	II-96
Tabel 2. 98	Capaian Indikator IKM Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2021.....	II-97
Tabel 2. 99	Data BUMD di Kabupaten Bojonegoro sampai dengan Tahun 2023.....	II-97
Tabel 2.100	Frekuensi Kegiatan DPRD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2022.....	II-99
Tabel 2.101	Perkembangan Hasil Pengawasan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2022.....	II-100
Tabel 2.102	Capaian Indikator Ketertiban Umum Kabupaten Bojonegoro.	II-101
Tabel 2.103	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022	II-102
Tabel 2.104	Ekspor Impor Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2022	II-102
Tabel 2.105	Fasilitasi Wilayah/ Insfrastruktur Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2021.....	II-103
Tabel 2.106	Sumber Daya Manusia Kabupaten Bojonegoro	II-105
Tabel 3. 1	Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022	III-7
Tabel 3. 2	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022	III-8
Tabel 3. 3	Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 - 2023	III-11
Tabel 3. 4	Realisasi Pendapatan Tahun 2018-2022 dan Target Pendapatan Kabupaten Bojonegoro	III-16
Tabel 3. 5	Persentase Komponen Pendapatan terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2018-2022	III-17
Tabel 3. 6	Target Pendapatan 2023 dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2024-2026 Kabupaten Bojonegoro	III-20
Tabel 3. 7	Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022	III-23
Tabel 3. 8	Proporsi Jenis Belanja terhadap Total Belanja Daerah	III-24
Tabel 3. 9	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026.....	III-26
Tabel 3.10	Realisasi SILPA Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022....	III-28

Tabel 3.11	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026.....	III-29
Tabel 3.12	Proyeksi Pagu Indikatif RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026	III-30
Tabel 3.13	Proyeksi pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama selama tahun 2024-2026.....	III-33
Tabel 3.14	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah selama Tahun 2024-2026	III-34
Tabel 4. 1	Relevansi Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Bojonegoro Berdasarkan Telaah SDGs yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bojonegoro	IV-12
Tabel 5.1.	Jumlah Tujuan, Sasaran dan Indikator Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 – 2026	V-1
Tabel 5.2.	Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 – 2026	V-3
Tabel 6.1	Perumusan Strategi Tujuan Ke 1	VI-1
Tabel 6.2	Perumusan Strategi Tujuan Ke 2	VI-2
Tabel 6.3	Perumusan Strategi Tujuan Ke 3	VI-2
Tabel 6.4	Perumusan Strategi Tujuan Ke 4	VI-3
Tabel 6.5	Perumusan Strategi Tujuan Ke 5	VI-4
Tabel 6. 6.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 – 2026.....	VI-6
Tabel 6. 7	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 – 2026	VI-17
Tabel 6. 8	Rumusan Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026.....	VI-18
Tabel 6. 9	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 – 2026	VI-36
Tabel 7. 1	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 – 2023 (Rp. Miliar)	VII-3
Tabel 7. 2	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 – 2026.....	VII-4
Tabel 7. 3	Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 – 2026	VII-5
Tabel 8. 1	Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 – 2026	VIII-2
Tabel 8. 2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 – 2026	VIII-5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Tahapan Pembangunan Dan Arahkan Kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025	I-5
Gambar 1. 2	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	I-21
Gambar 2. 1	Peta Wilayah Kabupaten Bojonegoro	II-1
Gambar 2. 2	Peta Wilayah Rawan Bencana Kabupaten Bojonegoro	II-11
Gambar 2. 3	Indeks Gini Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022	II-23
Gambar 2. 4	Indeks Wiliamson Kabupaten Bojonegoro	II-24
Gambar 2. 5	Angka Kemiskinan Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Dan Nasional Tahun 2018-2022	II-25
Gambar 2. 6	Kedalaman Dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022	II-25
Gambar 2. 7	IPM Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur Dan Nasional Tahun 2018-2022.	II-27
Gambar 2. 8	Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Nasional, Provinsi Jawa Timur Dan Kab Bojonegoro Tahun 2018-2022	II-31
Gambar 2. 9	IPG Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur Dan Nasional Tahun 2018-2021	II-32
Gambar 2. 10	IDG Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur Dan Nasional Tahun 2017-2021	II-32
Gambar 2. 11	TPT Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur Dan Nasional Tahun 2018-2022.	II-34
Gambar 2. 12	Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Bojonegoro	II-41
Gambar 2. 13	Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2018 - 2022	II-42
Gambar 2. 14	Prevalensi Stunting Tahun 2018 - 2022	II-43
Gambar 2. 15	Jumlah OPD yang terlayani internet dan intranet yang di sediakan oleh Dinas Komunikasi dan Infomartika	II-77
Gambar 2. 16	Jumlah Wisatawan Tahun 2018 – 2022.	II-88
Gambar 2. 17	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (Dalam Jutaan)	II-90
Gambar 2. 17	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri	II-91
Gambar 2. 18	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri.	II-92
Gambar 2. 19	Jumlah Investasi.	II-104
Gambar 3. 1	Grafik Perbandingan PDRB ADHK dan ADHB Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 – 2022	III-2
Gambar 3. 2	Persentase Kontribusi Tiga Besar Sektor Lapangan Usaha PDRB Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022	III-3
Gambar 3. 3	Grafik perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dengan migas dan tanpa migas Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022	III-4
Gambar 3. 4	Grafik Pertumbuhan dan Distribusi Lapangan Usaha PDRB ADHK Tahun 2022	III-5
Gambar 3. 5	Tingkat Inflasi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022	III-6
Gambar 3. 6	Grafik Perkembangan Indeks Williamson Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022	III-9

Gambar 3. 7 Indeks Gini Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022 III-10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara nasional serentak pada tahun 2024. Merujuk pada peraturan perundangan tersebut, maka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro baru akan dilaksanakan tahun 2024 (jadwal nasional tanggal 27 November 2024). Perkiraan jadwal pelantikan Kepala Daerah definitif akan dilakukan pada bulan Februari 2025. Dengan demikian, untuk mengisi kekosongan Kepala Daerah di Kabupaten Bojonegoro periode tahun 2023 – 2025 akan diisi oleh Penjabat (Pj) Bupati. Penjabat (Pj) Bupati dilakukan diajukan oleh Gubernur dan dipilih oleh Menteri Dalam Negeri.

Implikasi dari pilkada serentak tahun 2024, juga berdampak pada kekosongan rencana pembangunan daerah. Penetapan RPJMD kabupaten/kota periode Tahun 2025 – 2030 yang baru akan ditetapkan sekitar pertengahan tahun 2025. Dalam rangka untuk mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Dalam Inmendagri 52 Tahun 2022 tersebut, dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mengintruksikan bahwa: (DIKTUM KESATU huruf c)

“Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026, yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 – 2026 (RPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 – 2026), serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2024 – 2026”.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 merupakan salah satu dokumen perencanaan yang wajib dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam rangka melanjutkan roda pemerintahan dengan kondisi belum adanya Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) yang dipilih melalui pemilu. Masa bakti Bupati dan Wakil Bupati dan masa berlaku RPJMD Kabupaten Bojonegoro periode tahun 2018-2023 akan segera berakhir pada tahun 2023.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, bagi daerah yang masa bakti kepala daerahnya dan masa berlaku RPJMD telah habis sebelum pemilu serentak tahun 2024, akan diberlakukan 3 (tiga) hal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:

- 1) Bagi Daerah yang Kepala Daerahnya masa bakti telah habis sebelum pemilu serentak tahun 2024, maka akan dipilih melalui pemilu serentak tahun 2024.
- 2) Selama masa menunggu Kepala Daerah yang baru hasil pemilu serentak tahun 2024, maka Kepala Daerah akan diisi oleh Penjabat (Pj) Gubernur/Bupati/Walikota yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.
- 3) RPJMD yang telah habis masa berlakunya sebelum pemilu serentak tahun 2024, maka dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sesuai Inmendagri Nomor 52 tahun 2022.

Dokumen RPD ini memiliki kedudukan yang sejajar atau sama dengan RPJMD, yaitu merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang harus ada dalam penyelenggaraan Pemerintahan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah. Hal tersebut perlu memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Proses penyusunan RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 dilaksanakan dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Jangka Menengah Daerah (dalam hal ini RPD) merupakan penjabaran secara strategik terhadap tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan strategi serta program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan selama masa bakti 2024-2026, maka dalam penyusunan RPD harus tetap memperhatikan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

1. Pertama adalah pendekatan Teknokratik, perencanaan dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, yang merupakan suatu proses pemikiran strategis dan diskusi dengan tenaga ahli sesuai dengan substansi. Melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan adanya kerangka pikir komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

2. Kedua adalah Pendekatan Partisipatif, perencanaan dilakukan dengan mengikut sertakan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan dalam forum konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh Gambaran aspirasinya serta dapat menciptakan rasa memiliki. Oleh karena itu dalam proses penyusunannya telah diselenggarakan forum konsultasi publik untuk menampung aspirasi dari masyarakat.
3. Ketiga adalah Pendekatan *Top Down* dan *Bottom Up*, perencanaan secara top down dilaksanakan dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan, perencanaan pembangunan Nasional, perencanaan Provinsi Jawa Timur, mandat maupun intruksi lain yang berhubungan dengan pembangunan Kabupaten Bojonegoro, dan menggali aspirasi dari seluruh Perangkat Daerah serta Desa dalam rangka menyusun strategi dan kebijakan untuk menyukseskan visi misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.

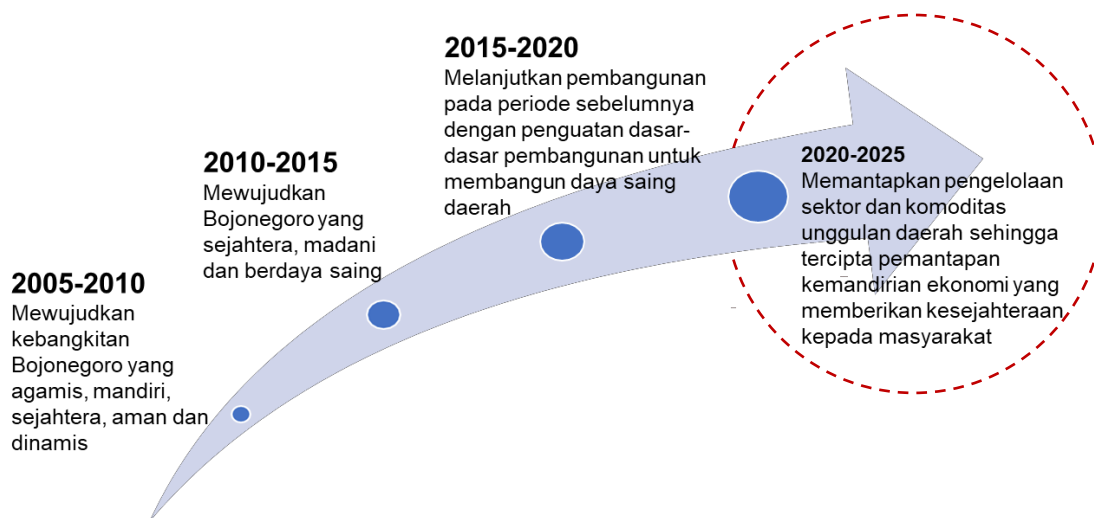
Sedang dalam pendekatan politik tidak dilakukan dalam penyusunan RPD karena Kepala Daerah hanya sebagai Penjabat (Pj) dan tidak diperkenankan memiliki visi misi. Dalam proses penyusunan dokumen RPD tidak harus (tidak wajib) dikonsultasikan dan dibahas dengan anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro untuk mendapatkan kesepakatan awal dan persetujuan akhir.

Kedudukan RPD terhadap RPJPD sangat penting untuk menjaga kesinambungan dari suatu periode 5 (lima) tahun pemerintahan ke periode 5 (lima) tahun berikutnya. RPJPD tahun 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), yang masing-masing tahapan telah memuat rumusan indikatif arahan prioritas kebijakan. Secara ringkas, tahapan pembangunan dan arahan dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dijelaskan bahwa dokumen RPD Tahun 2024-2026 masuk pada tahapan ke IV dari RPJPD Kabupaten Bojonegoro yaitu periode tahun 2020-2025. Arah kebijakan pembangunan tahap IV, yaitu:

“Pembangunan pada periode ini diarahkan untuk melanjutkan fokus pembangunan pada periode sebelumnya yang memantapkan pengelolaan

Pembangunan. Pada periode ini diarahkan untuk melanjutkan fokus pembangunan pada memantapkan pengelolaan sektor dan komoditas unggulan daerah yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perekonomian berbasis industri migas dan turunannya yang memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara merata; peningkatan peran agrobisnis sebagai penggerak ekonomi perdesaan; peningkatan peran jasa kesehatan dan pendidikan sebagai penggerak perekonomian perkotaan; dan peningkatan kinerja birokrasi. Tujuan akhir dari arah kebijakan pembangunan pada tahap ini diarahkan pada pemantapan kemandirian ekonomi yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pemantapan agroindustri yang menyentuh seluruh wilayah; pemantapan jasa kesehatan dan pendidikan sebagai penggerak perekonomian; dan pemantapan standar pelayanan minimal (SPM) kebutuhan dasar kepada masyarakat.”



Gambar 1.1 Tahapan Pembangunan dan Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025
Sumber: RPJPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2025

Adapun arah kebijakan pembangunan pada dokumen RPJPD Kabupaten Bojonegoro tahun 2005-2025 diharapkan menjadi pedoman substansi dalam penyusunan dokumen RPD tahun 2024-2026 untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dilakukan penyusunan RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 sampai dengan 2026 dan juga merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bojonegoro.

Kedudukan RPD Kabupaten Bojonegoro tahun 2024-2026 juga merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro setiap tahunnya. RPD juga merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD).

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Perubahan RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun

- 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845)
 13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 21. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 23. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo- Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

- Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
 34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
 35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
 36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024, (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 Nomor 2, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro

Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 Nomor 1);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2041 Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 5;

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan daerah harus saling terintegrasi dan sinergi dengan perencanaan pembangunan nasional. RPD Kabupaten Bojonegoro sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan dimana penyusunannya harus berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bojonegoro dan RPJMD Provinsi Jawa Timur serta memperhatikan RPJM Nasional. Selanjutnya RPD dijabarkan menjadi RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan dan mengacu pada RKP serta sebagai pedoman Renstra Perangkat Daerah.

1.3.1 Hubungan RPD Kabupaten Bojonegoro dengan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Timur

Penyusunan RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 harus memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024 (khususnya tahun 2024) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Hal tersebut dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan serta pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah.

RPJMN Tahun 2020-2024 sebagaimana diatur dalam Perpres 18 Tahun 2020 mengamanatkan program prioritas untuk Kabupaten Bojonegoro antara lain:

- Program Pembangunan jalan tol Ngawi – Bojonegoro – Tuban – Lamongan – Manyar – Bunder;
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan yaitu Pengurangan risiko krisis Kesehatan;
- Pembangunan Desa Terpadu, Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu pendampingan dan pengendalian penggunaan dana desa, pembangunan sarana prasarana desa digital (P3PD), pengembangan sumber daya air minum berkelanjutan berbasis masyarakat, usaha ekonomi desa yang dikembangkan terintegrasi dengan BUMDes, penetapan batas desa, pelatihan aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional.
- Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien melalui infrastruktur jaringan gas kota untuk 4 juta sambungan rumah.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional berdasarkan Perpres 80 Tahun 2019 mengamanatkan program prioritas untuk Kabupaten Bojonegoro antara lain:

- Pembangunan Jalan Tol Ngawi-Bojonegoro-Tuban-Lamongan-Manyar-Bunder;
- Pengembangan SPAM Regional Pantura (sumber air baku dari sungai bengawan solo);
- Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko;
- Pengendalian Banjir Sungai Bengawan Solo di Kanor;
- Pengembangan SMK Negeri 5 (migas) Bojonegoro.

Tabel 1.1. Penyelarasan Tujuan dan Sasaran antara RPJMN 2020 – 2024 dengan RPD Kabupaten Bojonegoro 2024 – 2026

No	RPJM Nasional Tahun 2020 - 2024	RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026
	7 (Tujuh) Agenda Pembangunan	Tujuan
1	Agenda Ke-7: Kondisi POLHUKHANKAM yang Kondusif - Penyederhanaan regulasi - Penyederhanaan birokrasi - Stabilitas politik dan pertahanan keamanan	Tujuan 1: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman dan tertib
		Tujuan 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, bertanggung jawab dan inovatif
2	Agenda Ke-3: SDM berkualitas dan berdaya saing Agenda Ke-4: Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan	Tujuan 3: Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ketahanan pangan
3	Agenda Ke-1: Transformasi ekonomi Agenda Ke-3: SDM berkualitas dan berdaya saing	Tujuan 4: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor migas dan non migas
4	Agenda Ke-2: Wilayah sebagai basis pembangunan Agenda Ke-5: Pembangunan infrastruktur Agenda Ke-6: Lingkungan hidup dan kerentanan bencana	Tujuan 5: Mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan ekonomi antar wilayah berbasis risiko dan pembangunan berkelanjutan

Selanjutnya, sebagai salah satu Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro bersama kabupaten/kota yang ada di provinsi ini harus membangun sistem perencanaan yang terintegrasi. Selain itu sinkronisasi perencanaan pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota menjadi suatu keharusan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan, penyusunan RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 berpedoman kepada P-RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan provinsi.

Beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan dari RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 antara lain terkait dengan arah pengembangan kewilayahan, isu-isu strategis yang sedang berkembang, kawasan strategis dan juga indikator beserta target yang harus didukung pencapaiannya oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Visi Provinsi Jawa Timur yang tercantum dalam P-RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 adalah: “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”. Visi tersebut dilaksanakan dengan 4 misi yang terdiri dari:

- 1) Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah;
- 2) Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan;
- 3) Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan;
- 4) Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Kabupaten Bojonegoro telah berupaya untuk menyelaraskan tujuan RPD kabupaten Bojonegoro tahun 2024-2026 dengan visi misi (tujuan) yang tercantum dalam dokumen perencanaan Provinsi Jawa Timur (P-RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2024).

Tabel 1.2.
Penyelarasan Tujuan dan Sasaran antara RPJMD Jawa Timur 2019 – 2024
dengan RPD Kabupaten Bojonegoro 2024 – 2026

No	RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024	RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026
1	Tujuan Misi 3 6) Terwujudnya Pemerintahan yang Baik 7) Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi dalam Kehidupan Sosial Masyarakat.	Tujuan 1: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman dan tertib
		Tujuan 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, bertanggung jawab dan inovatif
2	Tujuan Misi 2 2) Menurunnya Angka Kemiskinan 3) Meningkatnya Kesetaraan Gender 4) Terpenuhinya Kebutuhan Dasar 5) Menurunnya Pengangguran	Tujuan 3: Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ketahanan pangan
3	Tujuan Misi 1 1) Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar Wilayah	Tujuan 4: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor migas dan non migas
4	Tujuan Misi 1 1) Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar Wilayah Tujuan Misi 4 8) Terwujudnya Pembangunan Berwawasan Lingkungan	Tujuan 5: Mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan ekonomi antar wilayah berbasis risiko dan pembangunan berkelanjutan

1.3.2 Hubungan RPD dengan RPJPD, RENSTRA PD, RKPD dan RENJA PD Kabupaten Bojonegoro

A. Hubungan Antara RPD Kabupaten Bojonegoro dengan RPJPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2025

RPJPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2025 yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 tahun merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD. RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan Tahap IV RPJPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2025.

Tabel 1.3. Penyelarasan antara RPJPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005 - 2025 dengan RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 – 2026

No	RPJPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005 - 2025	RPD Kabupaten Bojonegoro 2024-2026
1	Misi 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berlandaskan keimanan dan ketaqwaan.	Tujuan 1: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman dan tertib
2	Misi 7. Mewujudkan tata pemerintahan yang profesional, akuntabel dan demokratis.	Tujuan 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, bertanggung jawab dan inovatif
3	Misi 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berlandaskan keimanan dan ketaqwaan. Misi 2. Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing. Misi 3. Meningkatkan perekonomian berbasis industri migas dan agrobisnis terpadu Misi 4. Mewujudkan Kabupaten Bojonegoro sebagai pusat rujukan kesehatan dan pendidikan bagi wilayah sekitarnya	Tujuan 3: Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ketahanan pangan
4	Misi 2. Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing. Misi 5. Mengembangkan infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan mendukung pengembangan ekonomi wilayah	Tujuan 4: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor migas dan non migas
5	Misi 4. Mewujudkan Kabupaten Bojonegoro sebagai pusat rujukan kesehatan dan pendidikan bagi wilayah sekitarnya Misi 5. Mengembangkan infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan	Tujuan 5: Mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan ekonomi antar wilayah berbasis risiko dan pembangunan berkelanjutan

No	RPJPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005 - 2025	RPD Kabupaten Bojonegoro 2024-2026
	mendukung pengembangan ekonomi wilayah Misi 6. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang menjamin ketersediaan sumberdaya yang berkelanjutan bagi pembangunan.	

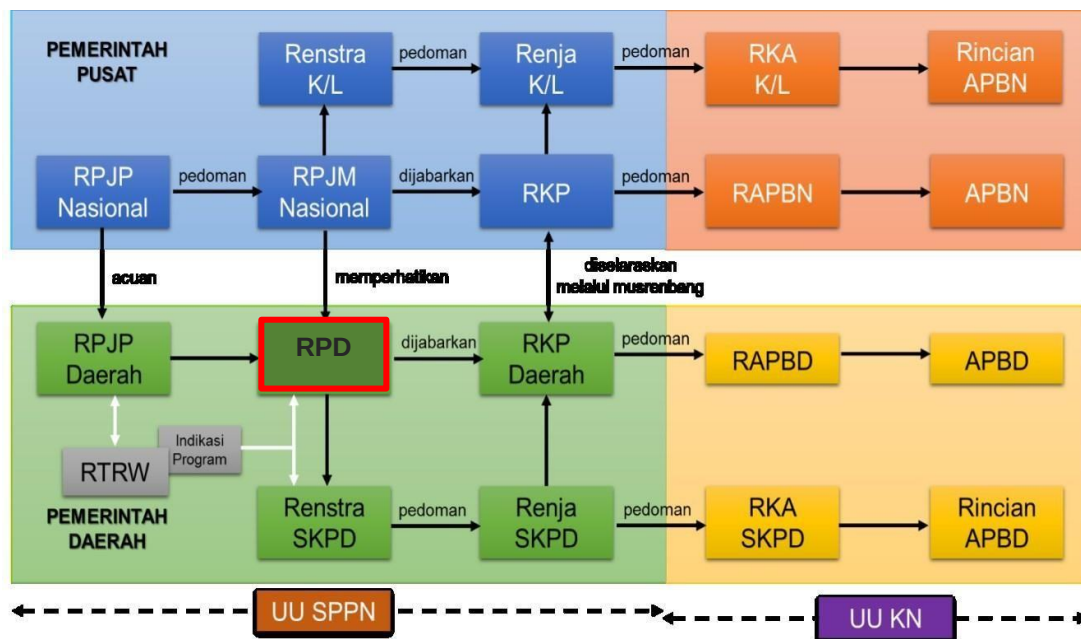
B. Hubungan Antara RPD Kabupaten Bojonegoro dengan Renstra PD

Selanjutnya, RPD menjadi pedoman bagi penyusunan RENSTRA PD. RENSTRA PD merupakan rencana kerja lima tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan lima tahunan sebagaimana termuat dalam dokumen RPD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, serta kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272. Proses penyusunan Renstra PD dilakukan secara simultan dengan proses penyusunan RPD Kabupaten. Namun, proses penyusunan Renstra PD harus mengacu pada RPD, sehingga penetapan Renstra PD dilakukan paling lambat dua minggu setelah RPD ditetapkan (sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022).

C. Hubungan Antara RPD Kabupaten Bojonegoro dengan RKPD Kabupaten Bojonegoro

RPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tiga tahunan dijabarkan dalam RKPD sebagai perencanaan tahunan daerah. Dalam pelaksanaan tahunannya, RPD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan RAPBD setiap tahun sampai tahun 2026. RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Daerah Kabupaten Bojonegoro yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kel, Kecamatan dan Kabupaten. Di bawah ini Gambar I.1 yang

menjelaskan hubungan RPD Kabupaten Bojonegoro dengan dokumen perencanaan lain.



Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

D. Hubungan Antara RPD Kabupaten Bojonegoro dengan Renja PD

Penjabaran rencana tahunan perangkat daerah termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD). Proses penyusunan Renja PD mengacu pada dokumen RKPD. Sehingga Renja juga harus selaras dengan dokumen RPD.

1.3.3 Hubungan RPD dengan RTRW Kabupaten Bojonegoro

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW) suatu kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari rencana operasional pembangunan wilayah kabupaten sesuai dengan peran dan fungsi wilayah yang telah ditetapkan dan yang akan menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kabupaten. RTRW Kabupaten Bojonegoro juga telah dilakukan peninjauan kembali dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 - 2041.

Tujuan dari penataan ruang wilayah Kabupaten Bojonegoro adalah “Mewujudkan Ruang Kabupaten Bojonegoro yang Mampu Mempertahankan Sektor Pertanian, Mendukung Pengembangan Pariwisata, Perindustrian Pertambangan dan Energi yang Selaras Dengan Keberlanjutan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Pembangunan”. Sinkronisasi antara tujuan RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 dengan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang RTRW Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2041 perlu dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tabel 1.4. Selain itu keselarasan program prioritas pembangunan daerah dengan RTRW juga perlu dilakukan untuk terlaksananya program prioritas tersebut sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 1.4. Penyelarasan Tujuan RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024–2026 dengan Tujuan, Kebijakan dan Strategi RTRW Bojonegoro Tahun 2021–2041

RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026	RTRW Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 – 2041
Tujuan 3 Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ketahanan pangan Tujuan Ke 4 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor migas dan non migas Tujuan Ke 5 Mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan ekonomi antar wilayah berbasis risiko dan pembangunan berkelanjutan	Tujuan Penataan Ruang (pasal 3): Mewujudkan Ruang Kabupaten Bojonegoro yang Mampu Mempertahankan Sektor Pertanian, Mendukung Pengembangan Pariwisata, Perindustrian Pertambangan dan Energi yang Selaras Dengan Keberlanjutan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Pembangunan. Kebijakan penataan ruang (pasal 4): - Pengembangan sektor pertanian dan sistem agropolitan yang produktif dan ramah lingkungan - Pengembangan dan peningkatan potensi pariwisata berbasis masyarakat - Pengembangan dan peningkatan kawasan peruntukan industri bernilai ekonomis - Pengembangan dan peningkatan kawasan pertambangan bernilai ekonomis - Pengendalian secara ketat pada kawasan hutan - Pengembangan dan peningkatan pembangunan yang ramah lingkungan - Pemerataan pembangunan sektor ekonomi dan infrastruktur wilayah Perwujudan kawasan permukiman mencakup kegiatan pengembangan kawasan permukiman berkelanjutan yang dilengkapi dukungan sarana prasarana permukiman yang memadai dan pengembangan kawasan pendidikan dan pemanfaatan permukiman

RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026	RTRW Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 – 2041
	ruang di sekitarnya yang mendukung aktivitas pendidikan (pasal 35 ayat 14). - Sesuai dengan kebijakan penataan ruang (pasal 4 ayat 2) yaitu Pengembangan dan peningkatan kawasan peruntukan industri bernilai ekonomis - Strategi pengembangan kawasan peruntukan industri bernilai ekonomis (pasal 5 ayat 4) meliputi : a. Mengembangkan dan memberdayakan industri kecil dan industri rumah tangga b. Mengembangkan peruntukan industri menengah besar c. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan kegiatan industri d. Mengembangkan industri agrobisnis yang mendukung komoditas agrobisnis unggulan dengan teknologi ramah lingkungan e. Mengembangkan kawasan industri f. Mengembangkan kawasan peruntukan industri saling bersinergi dan terpadu g. Mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil - Sesuai dengan kebijakan penataan ruang antara lain (pasal 4 ayat 2) a. Pengembangan sektor pertanian dan sistem agropolitan yang produktif dan ramah lingkungan b. Pengembangan dan peningkatan potensi pariwisata berbasis masyarakat c. Pengembangan dan peningkatan kawasan pertambangan bernilai ekonomis - Strategi pengembangan sektor pertanian dan sistem agropolitan yang produktif dan ramah lingkungan (pasal 5 ayat 2) meliputi: a. mengembangkan sistem pemasaran hasil pertanian sesuai tingkat skala layanan sampai ekspor b. mengembangkan sarana prasarana produksi pertanian c. mengembangkan pusat ekonomi agropolitan dan pusat bisnis d. mengendalikan secara ketat fungsi lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan e. mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan untuk hasil pertanian f. mengembangkan sistem infrastruktur sumber daya air guna meningkatkan produktivitas pertanian g. memulihkan lahan yang rusak atau alih komoditas pertanian

RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026	RTRW Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 – 2041
	h. meningkatkan produktivitas, diversifikasi dan pengolahan hasil pertanian - Strategi pengembangan dan peningkatan potensi pariwisata berbasis masyarakat (pasal 5 ayat 3) meliputi : a. mengembangkan daya tarik wisata andalan prioritas b. membentuk kawasan pariwisata disertai pengembangan paket wisata c. meningkatkan sarana dan prasarana wisata yang ada di masing-masing daya tarik wisata d. melakukan diversifikasi program dan produk wisata e. meningkatkan potensi agroekowisata dan ekowisata f. mengembangkan sarana dan prasarana mendukung budaya lokal - Strategi pengembangan dan peningkatan kawasan pertambangan bernilai ekonomis (pasal 5 ayat 5) meliputi : a. menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan kegiatan tambang b. memberdayakan usaha tambang batuan serta minyak dan gas bumi c. mengembangkan kawasan pertambangan batuan dan minyak dan gas bumi d. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan yang saling bersinergi dan terpadu - Sesuai dengan kebijakan penataan ruang (pasal 4 ayat 2) antara lain : a. Pengembangan dan peningkatan pembangunan b. Pemerataan pembangunan sektor ekonomi dan infrastruktur wilayah - Strategi pengembangan kegiatan ekonomis dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup (pasal 5 ayat 4&5) antara lain: a. Menyediakan jalur hijau sebagai kawasan penyangga pada tepi luar kawasan peruntukan industri, kawasan pertambangan b. Menangani dan mengelola limbah yang dihasilkan industri dengan penyediaan IPAL secara individu maupun komunal. c. Melakukan upaya reklamasi pasca pengambilan bahan batuan dan migas di kawasan pertambangan

RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026	RTRW Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 – 2041
	- Strategi pengendalian secara ketat pada kawasan hutan (pasal 5 ayat 6) antara lain: a. Mengendalikan dan memulihkan fungsi hutan b. Mengelola hutan yang berorientasi pada seluruh potensi sumber daya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat dengan sistem pengelolaan hutan bersama c. Mengolah hasil hutan produksi yang memiliki nilai ekonomi tinggi tanpa mengabaikan fungsi perlindungan - Strategi pengembangan dan peningkatan pembangunan yang ramah lingkungan (pasal 5 ayat 7) berupa pengembangan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar untuk menjaga fungsi ekologis. - Strategi pemerataan pembangunan sektor ekonomi dan infrastruktur wilayah (pasal 5 ayat 8) antara lain: a. Mengembangkan pusat pertumbuhan kegiatan perdagangan, jasa dan industri b. Mengembangkan dan meningkatkan prasarana dan sarana wilayah di seluruh kabupaten.

Tabel 1.6. Keselarasan Program Prioritas RPD dengan RTRW Kabupaten Bojonegoro

RPD Kabupaten Bojonegoro			RTRW Kabupaten Bojonegoro 2021-2041		
No	Program Prioritas	Lokasi	Rencana Pola Ruang/ Rencana Struktur / Indikasi Program	Lokasi	Telaah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program peningkatan kesadaran kehidupan sosial masyarakat berlandaskan kearifan lokal				Merupakan program non fisik
2	Program peningkatan kinerja pemerintah dan kualitas pelayanan publik	Kab Bojonegoro	Perwujudan Sistem Prasarana		
			Jaringan Telekomunikasi		
			a. Jaringan Tetap		
			Pengembangan jaringan serat optik	Kab Bojonegoro	Sesuai
			b. Jaringan Bergerak		
			- Pengembangan jaringan teresterial berupa jaringan telepon	Kab Bojonegoro	Sesuai
			- Pengembangan jaringan nirkabel, telekomunikasi selular yang dimanfaatkan dalam bentuk telepon genggam yang memanfaatkan menara Base Transceiver Station (BTS) bersama	Kab Bojonegoro	Sesuai
3	Program peningkatan kualitas pendidikan, pemuda dan olahraga, peningkatan kualitas kesehatan	Kab Bojonegoro	Perwujudan Kawasan Budidaya Permukiman		didukung program penyediaan sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan olahraga
			a. Penataan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan	Kab Bojonegoro	Sesuai
			Pengembangan kawasan pendidikan dan pemanfaatan permukiman ruang di sekitarnya yang mendukung aktivitas pendidikan	Kab Bojonegoro	Sesuai
			Pengembangan kawasan permukiman yang berkelanjutan yang dilengkapi dukungan sarana prasarana permukiman yang memadai	Kab Bojonegoro	Sesuai
			b. Penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial permukiman	Kab Bojonegoro	Sesuai
4	Program peningkatan daya beli masyarakat				Merupakan program non fisik

RPD Kabupaten Bojonegoro			RTRW Kabupaten Bojonegoro 2021-2041		
No	Program Prioritas	Lokasi	Rencana Pola Ruang/ Rencana Struktur / Indikasi Program	Lokasi	Telaah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Program peningkatan perlindungan terhadap perempuan, anak dan penyandang disabilitas				Merupakan program non fisik
6	Program peningkatan perlindungan sosial terhadap penduduk miskin				Merupakan program non fisik
7	Program peningkatan taraf sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan				Merupakan program non fisik
8	Program peningkatan ekonomi, lapangan kerja dan daya saing daerah	Kab Bojonegoro	Perwujudan Pusat-pusat Kegiatan		
			a. Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Perkotaan Bojonegoro	Sesuai
			b. Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Perkotaan Baureno, Perkotaan Temayang, Perkotaan Padangan	Sesuai
			c. Pemantapan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Perkotaan Kalitidu, Perkotaan Kedungadem, Perkotaan Ngraho, Perkotaan Sumberrejo	Sesuai
			d. Pemantauan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Kecamatan Kedewan (Desa Kedewan, Hargomulyo, Wonocolo)	Sesuai
				Kecamatan Trucuk (Desa Sranak, Sumberrejo)	Sesuai
				Kecamatan Ngambon (Desa Ngambon, Bondol, Sengon)	Sesuai
				Kecamatan Sekar (Desa Sekar, Miyono, Klino)	Sesuai
			Perwujudan Kawasan Pertanian		
			a. Penyusunan potensi lahan pertanian pangan	Kec. Balen, Baureno, Bojonegoro, Bubulan, Dander, Gayam, Gondang, Kalitidu, Kanor, Kapas, Kasiman, Kedewan, Kedungadem, Kepohbaru, Malo, Margomulyo, Ngambon, Ngasem, Ngraho, Padangan, Purwosari, Sekar, Sugihwaras, Sukosewu, Sumberrejo, Tambakrejo, Temayang, Trucuk	Sesuai
			b. Identifikasi dan penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B)		Sesuai
			c. Mengendalikan secara ketat fungsi lahan yang ditetapkan sebagai LP2B		Sesuai
			d. Pelestarian budidaya pertanian berbasis organik		Sesuai
			e. Meningkatkan produktivitas, diversifikasi, dan pengolahan hasil pertanian		Sesuai
			f. Mengembangkan prasarana dan sarana serta infrastruktur meningkatkan produktivitas pertanian		Sesuai
			g. Mengembangkan penyediaan bibit unggul, pupuk serta sarana prasarana produksi pertanian		Sesuai
			h. Mengembangkan kapasitas dan SDM petani dan kelompok petani		Sesuai

RPD Kabupaten Bojonegoro			RTRW Kabupaten Bojonegoro 2021-2041		
No	Program Prioritas	Lokasi	Rencana Pola Ruang/ Rencana Struktur / Indikasi Program	Lokasi	Telaah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Perwujudan Kawasan Budidaya Pariwisata		
			a. Inventarisasi dan penegasan kawasan obyek daya tarik wisata	Kec. Balen, Baureno, Bojonegoro, Bubulan, Dander, Gayam, Gondang, Kalitidu, Kanor, Kapas, Kasiman, Kedewan, Kedungadem, Kepohbaru, Malo, Margomulyo, Ngambon, Ngasem, Ngraho, Padangan, Purwosari, Sekar, Sugihwaras, Sukosewu, Sumberrejo, Tambakrejo, Temayang dan Trucuk	Sesuai
			b. pengembangan obyek wisata andalan prioritas		Sesuai
			c. meningkatkan potensi agroekowisata		Sesuai
			d. membentuk zona wisata dengan disertai pengembangan paket wisata		Sesuai
			e. meningkatkan sarana dan prasarana wisata yang ada di masing-masing objek wisata		Sesuai
			Perwujudan kawasan budidaya hortikultura		
			a. Pengembangan sistem agropolitan dan pengembangan kawasan perdesaan khususnya pada pusat sentra produksi pertanian	Kec. Bubulan, Dander, Gayam, Kalitidu, Kedungadem, Kepohbaru, Ngambon, Ngasem, Ngraho, Purwosari, Sekar, Sukosewu, Sumberrejo, Tambakrejo, Temayang dan Trucuk	Sesuai
			b. Pengembangan sektor pertanian untuk kegiatan agribisnis, agrowisata dan industri pengolahan hasil pertanian menjadi makanan dan sejenisnya		Sesuai
			c. Pengembangan dan optimalisasi budidaya perikanan darat		Sesuai
			Perwujudan kawasan budidaya pertambangan dan energi		
			a. Identifikasi potensi sumber daya mineral dan pertambangan	Kec. Baureno, Bubulan, Temayang, Gayam, Gondang, Kalitidu, Kasiman, Kedewan, Kedungadem, Malo, Margomulyo, Sekar, Padangan, Purwosari, Tambakrejo, Trucuk, dan Ngraho	Sesuai
			b. Penataan kawasan pertambangan		Sesuai
			c. Pemantauan dan pengendalian kawasan pertambangan		Sesuai
			d. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pertambangan		Sesuai
			e. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan		Sesuai
			f. Mengembangkan SDM di bidang pertambangan minyak melalui pembangunan SMK Negeri 5 Bojonegoro		Sesuai
			Perwujudan kawasan budidaya peruntukan industri		
			a. Identifikasi potensi industri	Kec. Balen, Baureno, Bojonegoro, Dander, Gayam, Kalitidu, Kanor, Kapas, Kasiman, Kedungadem, Kepohbaru, Kedewan,	Sesuai
			b. Perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan industri		Sesuai
			c. Perencanaan, pembangunan dan pengembangan sentra industri kecil dan menengah		Sesuai

RPD Kabupaten Bojonegoro			RTRW Kabupaten Bojonegoro 2021-2041		
No	Program Prioritas	Lokasi	Rencana Pola Ruang/ Rencana Struktur / Indikasi Program	Lokasi	Telaah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			d. Mengembangkan dan memberdayakan industri kecil dan industri rumah tangga	Padangan, Purwosari, Sugihwaras, Sukosewu, Sumberrejo, Temayang, Trucuk, Malo, Margomulyo	Sesuai
			e. Mengembangkan peruntukan industri menengah-besar		Sesuai
			f. menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri		Sesuai
			g. Pengembangan kawasan berikat		Sesuai
			h. Mengembangkan pusat sentra industri kerajinan		Sesuai
			Perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi		
			a. penyusunan DED prasarana kawasan agropolitan	Kec. Kapas, Dander, Kalitidu, Trucuk	Sesuai
			b. pembangunan prasarana dan sarana penunjang kawasan agropolitan	Kec. Kapas, Dander, Kalitidu, Trucuk	Sesuai
			c. penyusunan DED prasarana pusat pengembangan kawasan industri	Kec. Balen, Baureno, Bojonegoro, Dander, Gayam, Kalitidu, Kanor, Kapas, Kasiman, Kedungadem, Kepohbaru, Kedewan, Padangan, Purwosari, Sugihwaras, Sukosewu, Sumberrejo, Temayang, Trucuk, Malo, Margomulyo	Sesuai
			d. pembangunan prasarana dan sarana penunjang pusat pengembangan kawasan industri		Sesuai
			e. penyusunan DED prasarana kawasan kayangan api	Kec. Ngasem	Sesuai
			f. pembangunan prasarana dan sarana penunjang kawasan kayangan api	Kec. Ngasem	Sesuai
			Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya		
			a. penyusunan studi kawasan strategis kawasan sosial budaya masyarakat samin	Kec. Margomulyo	Sesuai
			b. penyusunan rencana kegiatan pelestarian budaya	Kec. Margomulyo	Sesuai
9	Program peningkatan infrastruktur yang merata dan ramah lingkungan	Kab Bojonegoro	a. Sistem jaringan Jalan		
			- Pengembangan jaringan nasional (jalan bebas hambatan)	Ngawi - Bojonegoro - Tuban - Lamongan - Manyar - Bunder	Sesuai
			- Pemantapan jaringan jalan nasional, jalan kolektor primer satu (JKP-1)	1. Babat - batas kota Bojonegoro 2. Jalan A. Yani 3. Jalan Gajah Mada 4. Jalan Untung Suropati 5. Jalan Rajekwesi	Sesuai

RPD Kabupaten Bojonegoro			RTRW Kabupaten Bojonegoro 2021-2041		
No	Program Prioritas	Lokasi	Rencana Pola Ruang/ Rencana Struktur / Indikasi Program	Lokasi	Telaah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				6. Jalan MT Haryono 7. Jalan Batas Kota Bojonegoro-Padangan 8. Jalan Padangan-batas Kabupaten Ngawi 9. Jalan Padangan-Cepu (batas Jawa Tengah)	
			- Penguoptimalan jaringan provinsi, jalan kolektor primer dua (JKP-2)	1. Jalan Sawunggaling 2. Jalan Basuki Rahmad 3. Jalan Jaksa Agung Soeprapto 4. Jalan HOS Cokroaminoto 5. Jalan KH R Moch Rosyid 6. Jalan batas kota Bojonegoro-(Pajeng) batas Kabupaten Nganjuk 7. Jalan Bojonegoro-batas Kabupaten Tuban	Sesuai
			- Pemeliharaan jaringan jalan kewenangan kabupaten	a. Jaringan lokal primer b. Jaringan jalan arteri sekunder c. Jaringan jalan kolektor sekunder d. Jaringan jalan lokal sekunder	Sesuai
			- Peningkatan/ pemeliharaan jaringan jalan status kabupaten	Jaringan jalan kolektor primer empat (JKP-4) status kabupaten	Sesuai
			- Peningkatan status jalan desa menjadi jalan kabupaten	seluruh kecamatan di wilayah kabupaten Bojonegoro	Sesuai
			- Peningkatan status jalan lokal primer	1. Jalan Simorejo-Baureno 2. Jalan Kanor-Simorejo 3. Jalan Kanor-Semambung 4. Jalan Kanor-Luwihaji 5. Jalan Betek-Senganten 6. Jalan Senganten-Klino 7. Jalan Klino-Saradan 8. Jalan Klino-Sekar 9. Jalan Sekar-Bobol 10. Jalan Bobol-Karangjati 11. Jalan lingkaran selatan luar perkotaan bojonegoro 12. Jalan lintas selatan kabupaten	Sesuai
			- Pengembangan dan pemeliharaan jaringan jalan lokal perbatasan dengan wilayah kabupaten	1. Jalan Semambung-Rengel Tuban 2. Jalan Sumberejo-Margorejo Tuban 3. Jalan Banjarsari-Menilo Tuban	

RPD Kabupaten Bojonegoro			RTRW Kabupaten Bojonegoro 2021-2041		
No	Program Prioritas	Lokasi	Rencana Pola Ruang/ Rencana Struktur / Indikasi Program	Lokasi	Telaah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				4. Jalan Ngudal Kedungrejo-Wonosari Tuban 5. Jalan Ledok Tinawun-Wonosari Tuban 6. Jalan Kedewan-Kaligede Tuban 7. Jalan Mlideg-Bajang Ngluyu Nganjuk 8. Jalan Sukun Sambongrejo-Tritik Nganjuk 9. Jalan Krondonan-Bendoasri Nganjuk 10. Jalan Klino-Saradan Madiun 11. Jalan Bobol-Rejuno Ngawi 12. Jalan Margomulyo-Gunungsari Ngawi 13. Jalan Kasiman-Gianti Blora 14. Jalan Gajah-Karangkembang Lamongan 15. Jalan Simorejo-Kedungpengaron Lamongan	
			- Pembangunan dan peningkatan status jalan strategis kabupaten	1. Jembatan layang atau lintas bawah di Kec Baureno, Kepohbaru, Sumberrejo, Balen, Kapas, Bojonegoro, Kalitidu, Gayam, Purwosari, Padangan 2. Jalan frontage sisi selatan jalur kereta api di Kec Baureno, Kepohbaru, Sumberrejo, Balen, Kapas, Bojonegoro, Kalitidu, Gayam, Purwosari, Padangan	Sesuai
			- Pengembangan prasarana dan sarana jaringan jalan	Seluruh jaringan jalan di Kabupaten Bojonegoro	Sesuai
			- Pengembangan dan peningkatan pelayanan terminal penumpang tipe A	Terminal Rajekwesi di Kec Bojonegoro	Sesuai
			- Pengembangan dan peningkatan pelayanan penumpang tipe B	Terminal Padangan, Terminal Betek Gondang, Terminal Temayang	Sesuai
			- Pengembangan dan peningkatan pelayanan penumpang tipe C	Terminal Kedewan	Sesuai
			- Pengembangan terminal barang	Kec Bojonegoro, Dander, Kapas	Sesuai
			- Pemantapan jembatan timbang	Kec Baureno	Sesuai

RPD Kabupaten Bojonegoro			RTRW Kabupaten Bojonegoro 2021-2041		
No	Program Prioritas	Lokasi	Rencana Pola Ruang/ Rencana Struktur / Indikasi Program	Lokasi	Telaah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			- Pembangunan dan pemeliharaan jembatan lintas Sungai Bengawan Solo, anak sungai bengawan solo dan seluruh jaringan jalan	- Pemeliharaan jembatan : a. Padangan-Kasiman b. Kalitidu-Malo c. Bojonegoro-Trucuk d. Padangan-Cepu/Kab Blora e. Kaliketek (Bojonegoro-Banjarsari) a. f. Glendeng (Bojonegoro-Soko/Kab Tuban)	Sesuai
				- Pembangunan Jembatan:a. Kanor- Rengel Tubanb. Luwihaji-Medalem/ Kab Blorac. Baureno-Plumpang/ Kab Tuban- Pembangunan dan pemeliharaan jembatan di seluruh anak sungai bengawan solo-Pembangunan dan pemeliharaan jembatan lintas solo valley werken-Pembangunan dan pemeliharaan jembatan di seluruh jaringan jalan yang tersebar di seluruh kabupaten bojonegoro	
			- Pengoptimalan unit pengujian kendaraan bermotor	Desa Sukowati Kec Kapas	Sesuai
			b. Sistem Jaringan Kereta Api		
			- Pemantapan jaringan jalur kereta api ganda	Jaringan kereta api ganda lintas utara Jakarta-Surabaya	Sesuai
			- Pembangunan jalur kereta api semi cepat	Jakarta-Surabaya melintasi Kec Padangan-Purwosari-Gayam-Kalitidu-Dander-Bojonegoro-Kapas-Balen-Sumberrejo-Kepohbaru-Baureno	Sesuai
			- Rencana pembangunan jalur kereta api	Jalur Surabaya (Pasar Turi)-Lamongan- Babat-Bojonegoro-cepu	Sesuai
			- Reaktifasi jaringan kereta api khusus	Jalur Semarang-Demak Kudus-Pati- Juwana Rembang-Lasem-Jatirogo-Bojonegoro	Sesuai
			- Konservasi jalur perkeretaapian mati	Jalur perkeretaapian mati Jatirogo	Sesuai
			- Pengembangan trayek rute jalur kereta api komuter	Stasiun Kec Bojonegoro, Kapas, Sumberrejo, Kalitidu, Baureno, Padangan. Stasiun kereta api besar di Kec Bojonegoro, stasiun kereta api	Sesuai
			- Pemantapan stasiun kereta api		

RPD Kabupaten Bojonegoro			RTRW Kabupaten Bojonegoro 2021-2041		
No	Program Prioritas	Lokasi	Rencana Pola Ruang/ Rencana Struktur / Indikasi Program	Lokasi	Telaah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				kecil di Kec Baureno, Kapas, Sumberrejo, Kalitidu dan Padangan	
			c. Jaringan Sungai, danau dan penyeberangan		
			- Pengembangan pelabuhan sungai danau dan penyeberangan pengumpul	Kec Balen, Baureno, Bojonegoro, Gayam, Kalitidu, Kanor, Kasiman, Malo, Margomulyo, Ngraho, Padangan, Trucuk	Sesuai
			d. Jaringan energi Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi	- jaringan pipa minyak dan gas bumi Gresik-Semarang berupa ruas Babat- Bojonegoro - jaringan pipa minyak dan gas melalui Kec Gayam-Ngasem-Dander- Bojonegoro-Kapas - jaringan pipa minyak dan gas Bojonegoro-Tuban (kilang minyak) melalui Kec Gayam, Kalitidu, Malo, dan Trucuk - jaringan pipa minyak dan gas melalui Kec Bojonegoro-Kapas - jaringan gas rumah tangga tersebar di seluruh wil kab - jaringan pipa minyak dan gas sesuai dengan rencana kerja dan hasil eksplorasi migas - jaringan pipa minyak dan gas bumi Gresik-Semarang	Sesuai
			e. Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan		
			- Pengembangan pembangkit tenaga listrik	- Jaringan Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi (SUTET) di Kec Kepohbaru, Kedungadem, Sukosewu, Sugihwaras, Temayang, Dander, Ngasem, Tambakrejo, Ngraho - Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di Kec Baureno, Kepohbaru, Sumberrejo, Balen, Kapas, - Bojonegoro, Dander, Kalitidu, Ngasem, Gayam, Purwosari, Padangan - Jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) di	Sesuai

RPD Kabupaten Bojonegoro			RTRW Kabupaten Bojonegoro 2021-2041		
No	Program Prioritas	Lokasi	Rencana Pola Ruang/ Rencana Struktur / Indikasi Program	Lokasi	Telaah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				26 kecamatan, kecuali Kec Gondang, Sekar - Jaringan SUTR di 28 kecamatan	
			- Pengembangan Gardu Induk	Kec Baureno, Bojonegoro	Sesuai
			- Pengembangan Gardu Penyulang (distribusi)	Kec Dander, Kalitidu, Sumberrejo, Sugihwaras, Padangan, Trucuk, Bojonegoro	Sesuai
			- Peningkatan pelayanan listrik	kawasan industri	Sesuai
			- Peningkatan dan pengoptimalan pelayanan listrik	kawasan permukiman	Sesuai
			- Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik	Kec Kepohbaru, Kedungadem, Sukosewu, Sugihwaras, Temayang, Dander, Ngasem, Tambakrejo, Ngraho	Sesuai
			- Rencana pengembangan alternatif pembangkit sumber tenaga baru	Seluruh wilayah perdesaan yang belum teraliri listrik	Sesuai
			f. Jaringan prasarana sumber daya air		
			- Pengelolaan sumber daya air	Sumber air permukaan 17 (tujuh belas) titik anak sungai bengawan solo yang merupakan wilayah sungai lintas provinsi Sumber air tanah yaitu CAT Randublatung, CAT Ngawi-Ponorogo, CAT Surabaya-Lamongan	Sesuai
			- Pembangunan dan pemeliharaan embung, bendung dan waduk	a. Solo valley werken b. Bendung Gerak Bojonegoro c. Bendungan Belah d. Waduk Pacal e. Waduk Nglambangan f. Bendungan Gongseng g. Bendung Gerak Karangnongko h. Waduk Kedung Tete i. Waduk Pejok j. Waduk Kerjo k. Waduk Mundu l. Waduk Belung m. mata air yang tersebar di seluruh kabupaten n. embung yang tersebar di seluruh kabupaten	Sesuai
			- Perlindungan dan pemeliharaan mata air	Seluruh mata air embung di Kab Bojonegoro	Sesuai

RPD Kabupaten Bojonegoro			RTRW Kabupaten Bojonegoro 2021-2041			
No	Program Prioritas	Lokasi	Rencana Pola Ruang/ Rencana Struktur / Indikasi Program	Lokasi	Telaah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
			- Pembangunan dan pemeliharaan Solo Valley Werken	Kec Balen, Baureno, Bojonegoro, Dander, Kalitidu, Kanor, Trucuk	Sesuai	
			- Pemantapan Jaringan Irigasi	Seluruh jaringan irigasi	Sesuai	
			- Pengembangan infrastruktur pengendali banjir	Solo Valley Werken dan mitigasi struktural lainnya di Kec Balen, Baureno, Bojonegoro, Dander, Kalitidu, Kanor, Trucuk	Sesuai	
			- Pengelolaan perlindungan air baku	Sumber air bakku dan jaringan air baku di seluruh Kab Bojonegoro	Sesuai	
			- Pengelolaan air minum kelompok pengguna	Seluruh wilayah kerawanan banjir	Sesuai	
			g. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			
			- Pengembangan dan pemeliharaan jaringan perpipaan	Unit Baku a. SPAM Regional Pantura b. Sumber mata air Ngunut, sumberarum dan Jono c. Sumur Bor di Kec Padangan, Bojonegoro, Dander, Bubulan, Balen, Kanor	Sesuai	
				Unit Produksi berupa Ground Reservoir dan instalasi pengolahan air di Kec Padangan, Purwosari, Kalitidu, Trucuk, Bojonegoro, Balen, Kanor, Dander, Bubulan, Sugihwaras	Sesuai	
				Unit Distribusi a. pelayanan SPAM di Kec Bojonegoro,Trucuk, Dander, Bubulan, Padangan, Purwosari, Kapas, Balen, Sumberrejo, Baureno, Kalitidu, Kanor, Sugihwaras, Kedungadem b. jaringan SPAM di Kec Kepohbaru, Ngasem, Kasiman, Kedewan, Sukosewu, Malo, Ngraho, Margomulyo, Ngambon, Tambakrejo, Sekar, Gondang, Temayang, Gayam	Sesuai	
			- Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pada jaringan bukan perpipaan	Seluruh Kab Bojonegoro	Sesuai	
h. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)						

RPD Kabupaten Bojonegoro			RTRW Kabupaten Bojonegoro 2021-2041		
No	Program Prioritas	Lokasi	Rencana Pola Ruang/ Rencana Struktur / Indikasi Program	Lokasi	Telaah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			- sistem pembuangan air limbah, pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	kegiatan industri, rumah sakit, hotel dan restoran yang tersebar di wilayah Kabupaten Bojonegoro	Sesuai
			- pengembangan sistem pembuangan air limbah rumah tangga berupa IPAL Komunal	Banjarejo, Sukorejo, Semenpinggir, Banjarnayar, Kedungdowo, Sidobandung, Kemamang, Penganten, Mayangkawis, Ngujung dan Pancur	Sesuai
			- pembangunan sistem pembuangan air limbah dan sistem pembuangan air limbah rumah tangga	tersebar di seluruh Kabupaten Bojonegoro	Sesuai
			i. Sistem Pengelolaan Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)		
			- sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)		Sesuai
			- penyediaan fasilitas pengelolaan limbah medis cair dan padat		Sesuai
			- penyediaan fasilitas pengelolaan limbah industri cair		Sesuai
			j. Sistem Jaringan Persampahan		
			- pemantapan dan pengembangan tempat pemrosesan akhir (TPA)	a. Ekstensifikasi TPA Banjarsari b. TPA Bandungrejo di Kec Ngasem c. TPA Kec Ngraho d. TPA Kec Kepohbaru e. TPA Kec Temayang f. TPA Kec Sugihwaras g. g. TPA Kec Sumberrejo	Sesuai
			- pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS Terpadu)	seluruh kecamatan di wilayah kabupaten Bojonegoro	Sesuai
			- pengembangan sistem pengangkutan sampah	kawasan permukiman perkotaan dan pusat-pusat kegiatan masyarakat	Sesuai
			- pengembangan sistem composing	kawasan pedesaan dan permukiman berkepadatan rendah	Sesuai
			k. Sistem Jaringan Drainase		
			- Pengembangan prasarana dan sarana sistem jaringan drainase	seluruh Kab Bojonegoro	Sesuai
			- Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan drainase	seluruh Kab Bojonegoro	Sesuai
			- Pengelolaan sistem drainase	seluruh Kab Bojonegoro	Sesuai
10	Program peningkatan kualitas perumahan dan permukiman	Kab Bojonegoro	Perwujudan kawasan budidaya permukiman		

RPD Kabupaten Bojonegoro			RTRW Kabupaten Bojonegoro 2021-2041		
No	Program Prioritas	Lokasi	Rencana Pola Ruang/ Rencana Struktur / Indikasi Program	Lokasi	Telaah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			a. Penataan kawasan permukiman perkotaan		
			1. Penataan permukiman kumuh di sempadan sungai dan pusat perkotaan	Perkotaan di 28 Kecamatan	Sesuai
			2. Pengadaan RTH publik 20% di kawasan permukiman		Sesuai
			3. Penerapan ketentuan tata bangunan meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, serta GSB terhadap jalan		Sesuai
			4. Pembangunan kawasan permukiman perkotaan yang efisien dan integrasi dengan sistem transportasi		Sesuai
			5. Pengembangan kawasan permukiman yang berkelanjutan dilengkapi dukungan sarana dan prasarana permukiman yang memadai		Sesuai
			6. Pengembangan kawasan pendidikan dan pemanfaatan permukiman ruang di sekitarnya yang mendukung aktivitas pendidikan		Sesuai
			b. Penataan kawasan permukiman pedesaan		
			a. Penataan permukiman pedesaan yang bersinergi dengan lingkungan	Perdesaan di 27 Kecamatan kecuali Kecamatan Bojonegoro	Sesuai
			b. Pengadaan RTH publik 20% di kawasan permukiman		Sesuai
			c. Penerapan ketentuan tata bangunan meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, serta GSB terhadap jalan		Sesuai
			d. Pembangunan kawasan permukiman pedesaan yang efisien dan integrasi dengan sistem transportasi pertanian dan perkebunan		Sesuai
			e. Pengembangan kawasan permukiman yang berkelanjutan dilengkapi dukungan sarana dan prasarana permukiman yang memadai		Sesuai
			c. Relokasi permukiman rawan bencana		Sesuai
			d. Rehabilitasi rumah tidak layak huni		Sesuai
			e. Penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial permukiman		Sesuai
11	Program peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kab Bojonegoro	Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup		
			Konservasi hulu DAS Bengawan Solo	DAS Bengawan Solo	Sesuai
			Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan DAS Bengawan Solo	DAS Bengawan Solo	Sesuai

RPD Kabupaten Bojonegoro			RTRW Kabupaten Bojonegoro 2021-2041		
No	Program Prioritas	Lokasi	Rencana Pola Ruang/ Rencana Struktur / Indikasi Program	Lokasi	Telaah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	Program peningkatan kesiapsiagaan penanganan resiko bencana	Kab Bojonegoro	Pengembangan jalur evakuasi bencana		
			Jalur Evakuasi Bencana Sesar	1. Jalan Kedungadem-Nglinggo 2. Jalan Drokilo-Kepohbaru 3. Jalan Balen-Sugihwaras 4. Jalan Sugihwaras-Temayang 5. Jalan Batas Kota Bojonegoro- (pajeng) batas kab Nganjuk 6. Jalan Dander-Bubulan 7. Jalan Ngasem-Trenggulunan 8. Jalan Glagah-Ngambon 9. Jalan Purwosari-Malingmati 10. Jalan Ngraho-Taji 11. Jalan Taji-Bakalan 12. Jalan Malingmati-Bakalan 13. Jalan Turi-Malingmati 14. Jalan Taji-Tinggang 15. Jalan Padangan-Batas Kabupaten Ngawi	Sesuai
			Jalur Evakuasi Bencana Gempa Bumi	Jalan Babat-Batas Kota Bojonegoro	Sesuai
			Jalur Evakuasi Bencana Longsor	1. Jalan Sambeng-Kedewan 2. Jalan Tambakromo-Kawengan 3. Jalan Tambakromo-Malo 4. Jalan Malo-Selogabus 5. Jalan Dander-Bubulan 6. Jalan Ngasem-Trenggulunan 7. Jalan Glagah-Ngambon 8. Jalan Purwosari-Malingmati 9. Jalan Ngraho-Taji 10. Jalan Taji-Bakalan 11. Jalan Malingmati-Bakalan 12. Jalan Turi-Malingmati 13. Jalan Taji-Tinggang 14. Jalan Padangan-Batas Kabupaten Ngawi	Sesuai
			Jalur Evakuasi Bencana Banjir	1. Jalan Kapten Rameli 2. Jalan KH Mansyur 3. Jalan Serma Maun 4. Jalan Serma Kusman 5. Jalan Lettu Suyitno 6. Jalan Malo-Selogabus 7. Jalan MH Thamrin 8. Jalan Jaksa Agung Suprpto	Sesuai

RPD Kabupaten Bojonegoro			RTRW Kabupaten Bojonegoro 2021-2041		
No	Program Prioritas	Lokasi	Rencana Pola Ruang/ Rencana Struktur / Indikasi Program	Lokasi	Telaah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				9. Jalan Rajekwesi 10. Jalan Kapas-Glendeng 11. Jalan Sobontoro-Margomulyo 12. Jalan Sumberrejo-Kanor 13. Jalan Semambung-Kanor 14. Jalan Kanor-Simorejo 15. Jalan Simorejo-Baureno 16. Jalan Simorejo-Semambung 17. Jalan MT Haryono 18. Jalan batas kota bojonegoro-padangan 19. Jalan Talok-Malo 20. Jalan Padangan-Kasiman	
			Pengembangan ruang evakuasi bencana		
			Ruang evakuasi kawasan rawan bencana sesar dan gempa bumi	ruang terbuka dan fasilitas umum selain fasilitas pendidikan yang aman dari bencana yang berada pada sekitar daerah rawan bencana serta bebas dari bangunan sepanjang jalur bencana sekitar 10 m	Sesuai
			Ruang evakuasi kawasan rawan bencana longsor	ruang terbuka dan fasilitas umum selain fasilitas pendidikan yang aman dari bencana yang berada diluar kawasan rawan bencana longsor tinggi dan sedang	Sesuai
			Ruang evakuasi kawasan rawan bencana banjir	ruang yang aman dalam bentuk tempat evakuasi sementara (TES) yang berada di kawasan rawan bencana banjir tinggi dan sedang dan tempat evakuasi akhir (TEA) dapat berupa ruang terbuka hijau dan fasilitas umum selain fasilitas pendidikan yang berada di luar kawasan rawan bencana banjir	Sesuai

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1 Maksud

RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 ini disusun dengan maksud:

1. Sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan daerah dalam kurun waktu Tahun 2024-2026 serta dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama tiga tahun yang akan datang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Bojonegoro;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Bojonegoro serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan;
4. Sebagai dasar komitmen bersama antara eksekutif, legislatif dan pemangku kepentingan pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam kurun waktu tiga tahun.

1.4.2 Tujuan

RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 ini disusun dengan tujuan:

1. Tersedianya dokumen RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) PD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta sebagai indikator evaluasi kinerja tiga tahunan pemerintah daerah;
2. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan melalui penyusunan rencana kerja dalam mengisi kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;

4. Menjamin keterkaitan serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian;
5. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha;
6. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Menjaga kesinambungan pembangunan yang dilaksanakan secara tahunan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPD, dasar hukum penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi daerah saat ini meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan aspek kehidupan sosial ekonomi daerah yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program daerah dalam jangka waktu tiga tahun.

BAB III GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan gambaran umum keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan masa lalu serta kerangka pendanaan kedepan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam membiayai program-program pembangunan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini berisi uraian tentang identifikasi permasalahan pembangunan di masing-masing urusan pemerintahan daerah, kemudian fokus kepada isu-isu strategis internasional, nasional, regional dan kabupaten yang harus segera diselesaikan.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan rumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 beserta indikator dan target kinerja dalam kurun waktu Tahun 2024-2026.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya serta arah kebijakan yang menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah daerah dengan perangkat daerah terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program pembangunan daerah serta pagu indikatif untuk program- program yang berhubungan dengan pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Terdapat pula penjelasan target capaian pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan sasaran RPD Tahun 2024-2026 melalui IKU. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai.

BAB IX PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

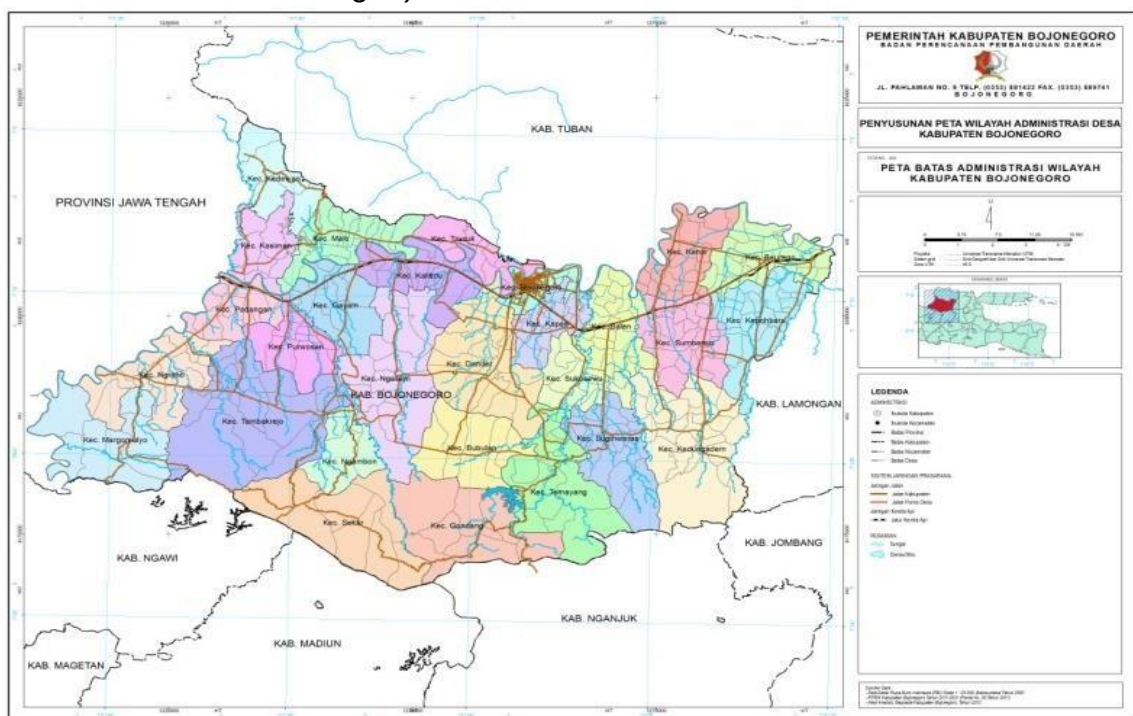
2.1.1. Kondisi Geografi Wilayah

2.1.1.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah yang berada di Wilayah Provinsi Jawa Timur yang terletak pada posisi $6^{\circ} 59'$ sampai $7^{\circ} 37'$ Lintang Selatan dan $112^{\circ} 25'$ sampai $112^{\circ} 09'$ Bujur Timur, dengan jarak ± 110 km dari ibu kota provinsi. Luas wilayah Kabupaten Bojonegoro adalah 231.125 ha terdiri dari 28 Kecamatan yang meliputi 11 kelurahan dan 419 desa.

Secara administratif, Kabupaten Bojonegoro batas wilayahnya, meliputi:

- Sebelah Utara : Kabupaten Tuban,
- Sebelah Selatan : Kabupaten Madiun, Nganjuk dan Jombang,
- Sebelah Timur : Kabupaten Lamongan, dan
- Sebelah Barat : Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Blora (Provinsi Jawa Tengah).



Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kabupaten Bojonegoro

Sebagian besar wilayah Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah pertanian, maka dalam konsep pengembangan perlu memperhatikan tentang ketersediaan lahan, letak geografis, jenis tanah, agroklimat, sumber daya wilayah, sarana dan prasarana. Sumber daya dan kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap perkembangan dan prospek terhadap perkembangan pembangunan wilayah.

2.1.1.2. Topografi

Keadaan topografi Kabupaten Bojonegoro bagian selatan disepanjang Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo merupakan daerah dataran rendah (*low land*) yang berada pada ketinggian 11 sampai dengan 25 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 2 sampai dengan 14,99 persen, sedangkan di bagian selatan merupakan dataran tinggi (*up land*) di sepanjang kawasan Gunung Pandan, Kramat, dan Gajah yang berada pada ketinggian di atas 25 meter di atas permukaan laut. Keadaan tanah yang berbukit yang berada di sebelah selatan (Pegunungan Kapur Selatan) dan sebelah utara (Pegunungan Kapur Utara) mengapit dataran rendah yang berada di sepanjang aliran Bengawan Solo yang merupakan daerah pertanian yang subur. Bagian selatan dari Kabupaten Bojonegoro adalah pegunungan kapur yang merupakan bagian dari rangkaian Pegunungan Kendeng, sedangkan bagian barat laut yang merupakan perbatasan dengan Jawa Tengah adalah bagian dari rangkaian Pegunungan Kapur Utara.

Di Kabupaten Bojonegoro tata guna lahan terdiri dari 2 (dua) Kawasan yaitu Kawasan Lindung meliputi Hutan Lindung seluas 1.530 Ha, Sempadan Sungai seluas 1.184 Ha, Kawasan sekitar danau/ waduk seluas 9 Ha, Sempadan mata air 42 Ha, sedangkan Kawasan Budidaya meliputi Hutan Produksi seluas 94.397 Ha, Kawasan Pertanian, Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 43.178 Ha, Non Kawasan Pertanian, Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebesar 34.535 Ha, Hortikultura seluas 10.484 Ha. Lebih jelas kondisi topografi di Kabupaten Bojonegoro, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Menurut Kemiringan Tanah

No	Kemiringan Tanah (%)	Luas (Ha)	(%)
1	0 – 2%	127.309	55,08
2	2% – 15%	83.648	36,19
3	15% – 40%	17.312	7,5
4	> 40%	2.856	1,24
	Jumlah	231.125	100

Sumber: Revisi Rencana Tata Ruang Kab Bojonegoro Tahun 2021-2041.

Wilayah Kabupaten Bojonegoro didominasi oleh kemiringan kurang dari 2% sebesar 55,08%, adapun kemiringan di atas 40% sebesar 1,24%. Dataran tinggi wilayah Kabupaten Bojonegoro merupakan dataran tinggi Zona Pegunungan Kendeng bagian barat. Menurut Van Bemmelen (1949), Pegunungan Kendeng dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian barat yang terletak di antara Gunung Ungaran dan Solo (sebelah utara Ngawi), bagian tengah yang membentang hingga Jombang dan bagian timur mulai dari timur Jombang hingga Delta Sungai Brantas dan menerus ke Teluk Madura. Kabupaten Bojonegoro termasuk dalam Zona Kendeng bagian barat.

Permukaan tanah di Kabupaten Bojonegoro rata-rata berada pada ketinggian dari permukaan laut yang relatif rendah, yaitu 81.04% (186.977 ha) berada pada ketinggian antara 25 - 500 m dari permukaan laut dan yang berada di atas 500 m dari permukaan air laut hanya 0,25% dari luas wilayah Kabupaten Bojonegoro. Luas wilayah berdasarkan ketinggian dari permukaan air laut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Luas Wilayah Menurut Ketinggian Tempat

No	Ketinggian Tempat (Mdpl)	Luas (Ha)	(%)
1.	< 25 m	43.274	18,72
2.	25m – 99,99m	104.729	45,31
3.	100m – 499,9m	82.448	35,67
4.	> 500	674	0,29
	Jumlah	231.125	100

Sumber: Revisi Rencana Tata Ruang Kab Bojonegoro Tahun 2021-2041.

2.1.1.3. Geologi

Jenis tanah di Kabupaten Bojonegoro terdiri dari alluvial, grumosol, litosol dan medeteran. Tanah jenis alluvial dan medeteran merupakan jenis tanah yang subur. Grumosol merupakan tanah yang tidak/kurang subur, sedangkan jenis tanah litosol merupakan tanah yang berbatu dengan lapisan tanah yang tidak begitu tebal. Luas tanah yang subur (alluvial dan medeteran) di Kabupaten Bojonegoro adalah 91.117 ha atau 39,41%. Jenis tanah grumosol 38,52%, dan sisanya merupakan tanah jenis litosol. Jenis-jenis tanah dan luasannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3 Luas Areal Menurut Jenis Tanah di Kabupaten Bojonegoro 2022

No.	JenisTanah	Luas (Ha)	Persen (%)
1	Alluvial	46.468	20,1
2	Grumosol	89.037	38,52
3	Litosol	50.971	22,05
4	Medeteran	44.649	19,31
	Jumlah	231.125	100

Sumber: Kabupaten Bojonegoro Dalam Angka 2022, BPS Kabupaten Bojonegoro.

2.1.1.4. Hidrologi

1) Daerah Aliran Sungai

Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu wilayah administratif hilir Sungai Bengawan Solo. Sungai yang panjangnya sekitar 548,53 km mengalir dua provinsi, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sungai Bengawan Solo yang mengalir dari selatan menjadi batas alam dari Provinsi Jawa Tengah, kemudian mengalir ke arah timur di sepanjang wilayah utara Kabupaten Bojonegoro. Bagian utara Kabupaten Bojonegoro merupakan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo yang cukup subur dengan pertanian yang ekstensif. Kawasan pertanian umumnya ditanami padi pada musim penghujan dan tembakau pada musim kemarau.

Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara

alami, batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas di daratan. Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo dengan luas kurang lebih 16.100 Km² dibagi menjadi 3 wilayah administratif, yaitu hulu, tengah, dan hilir. DAS Bengawan Solo merupakan DAS terluas di Wilayah Sungai Bengawan Solo yang meliputi Sub DAS Bengawan Solo Hulu (6.072 Km²), Sub DAS Kali Madiun (3.755 Km²) dan Sub DAS Bengawan Solo Hilir (6.273 Km²). Berdasarkan pemanfaatan ruang di wilayah sungai Bengawan Solo yang telah dikompilasikan dengan RTRW Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, maka Kabupaten Bojonegoro termasuk dalam zona kawasan andalan Tuban-Lamongan dan sekitarnya dengan nama DAS Bengawan Solo Hilir dan Pantura dengan potensi unggulan pertanian tanaman pangan, perikanan, industri, pariwisata, perdagangan/jasa dan pertambangan.

2) Sungai, Waduk dan Embung

Sungai utama yang terdapat di Kabupaten Bojonegoro yaitu Sungai Bengawan Solo dengan panjang 273 km membelah wilayah Bojonegoro menjadi 2 bagian, dimana sepanjang sungai tersebut terdapat anak-anak sungai yang mendistribusikan air dalam memenuhi kebutuhan air di wilayah Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro memiliki 21 sungai yang memiliki potensi untuk mendukung pertumbuhan sektor pertanian. Kehadiran sungai-sungai tersebut menyebabkan Kabupaten Bojonegoro memiliki luas resapan air yang cukup banyak. Adapun profil anak-anak sungai tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 4 Profil Anak Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro

No	Nama Sungai	Panjang (m)	Lebar (m)	Kedalaman (m)	Debit (m ³ /dtk)
1	Kaduk	12.000	15	4,5	20,00
2	Pandan	11.000	10	3,5	17,00
3	Tinggang	28.000	19	6,0	126,00
4	Gamongan	21.000	10	4,5	58,32
5	Gandong	45.000	15	5,0	233,64
6	Tidu	39.000	30	7,0	107,00
7	Tengah	10.000	20	6,0	17,00

No	Nama Sungai	Panjang (m)	Lebar (m)	Kedalaman (m)	Debit (m ³ /dtk)
8	Grogolan	22.000	22	6,0	17,00
9	Kedungbajul	20.000	12	4,5	80,64
10	Pacal	66.000	35	7,0	266,60
11	Loro	20.000	30	6,0	17,00
12	Besuki	32.000	23	6,0	135,00
13	Serning	8.700	15	4,5	22,00
14	Mekuris	43.000	18	6,0	90,20
15	Ngemplak	1.630	11	5,0	17,00
16	Deru	12.000	18	5,0	17,00
17	Ingas	19.000	24	4,0	127,28
18	Semarmendem	45.000	45	7,0	128,16
19	Pohwates	19.000	10	4,5	17,00
20	Pundung Kembar	1.600	10	4,5	10,00
21	Kedungsumber	7.000	11	5,0	21,00
Jumlah		482.930			

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Bojonegoro Tahun 2022

Selain sungai, kebutuhan air di Kabupaten Bojonegoro dipenuhi oleh tampungan air di waduk, embung dan mata air. Dari tabel berikut, didapat gambaran bahwa keberadaan waduk Nglambangan, Pejok dan Gongseng sangat berarti bagi keberlangsungan ketersediaan air di Kabupaten Bojonegoro untuk menjawab permasalahan rendahnya kecukupan air baku. Jumlah embung yang terdapat di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 513 embung yang tersebar di 28 kecamatan, sebagian besar embung menggunakan tanah kas desa yaitu sebanyak 353 titik atau 67,6%, 141 titik (27,5%) menggunakan tanah Solo Valey, dan sisanya menggunakan tanah perhutani, dan tanah aset pemerintah. Kehadiran waduk, embung, dan mata air merupakan suatu potensi yang jika dimanfaatkan secara baik akan memberikan dampak bagi pertumbuhan sektor pertanian secara umum. Kemudian, akan memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro yang secara profil ketenagakerjaan masih didominasi oleh sektor pertanian.

Tabel 2. 5 Potensi Air Waduk di Kabupaten Bojonegoro

No	Nama Waduk	Lokasi		Volume Air (m ³)		Luas Areal (Ha)
		Desa	Kec.	Kapasitas Maksimum	Volume Sekarang	
1	Pacal	Kedungsumber	Temayang	23.000.000	17.000.000	16.688
2	Purworejo	Purworejo	Padangan	250.000	250.000	165
3	Laren	Leren	Kalitidu	1.000.000	1.000.000	1.144
4	Tlogohaji	Tlogohaji	Sumberrejo	45.000	45.000	30
5	Pasinan	Pasinan	Baureno	49.200	49.200	36
6	Panjang	Panjang	Kedungadem	80.000	80.000	161
7	Nglambangan	Ngambon (Setren)	Ngambon (Ngasem)	4.000.000	-	-
8	Pejok	Pejok	Kepohbaru	2.708.700	-	-
9	Gonseng	Kedungsari	Temayang	14.750.000	-	-
Jumlah				28.424.200	18.424.200	18.224

Sumber: Dinas pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Bojonegoro, 2022

Tabel 2. 6 Jumlah Embung dan Bendung/Check Dam

Jenis Embung	Jumlah
Embung Tanah Kas Desa	353
Embung Tanah Solo Valei Werken	141
Embung Tanah Perhutani	2
Embung Tanah Asset Pemkab	22
Bendung/Check Dam	351
Total	513

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Bojonegoro, 2022.

3) Potensi Debit Sumber Daya Air

Potensi sumber daya air di Kabupaten Bojonegoro yang terbesar adalah air hujan yang pasokannya diperoleh pada saat musim penghujan. Air hujan sebagai bagian dari siklus hidrologi akan terdistribusi ke wilayah daratan dan perairan. Distribusi ini akan memunculkan beberapa sumber air yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Sumber air yang dimanfaatkan di Kabupaten Bojonegoro adalah air hujan, waduk, embung, mata air, sungai. Semakin banyak wilayah serapan yang tersedia maka semakin banyak air hujan yang dapat ditampung dan dialirkan untuk berbagai kepentingan. Berdasarkan analisa dan identifikasi sumber air di

Kabupaten Bojonegoro dapat disampaikan bahwa volume yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air baku sebesar 12.178.669.828 m³/tahun. Pada tabel 2.7 tergambar jika curah hujan hanya dapat digunakan pada Musim Tanam 1 saja, sedangkan Musim Tanam 2, Musim Tanam 3 mengandalkan dari waduk, embung dan lain-lain, sehingga dibutuhkan tampungan air yang banyak untuk meningkatkan ketersediaan air. Potensi sumber daya air di Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 7 Potensi Sumber Daya Air di Kabupaten Bojonegoro

No	Potensi Sumber Daya Air	Volume (M ³ /Thn)
1	Potensi Air Hujan	
	- Curah Hujan Termanfaatkan (4 Bulan Pertama Untuk Musim Tanam 1)	517.398.516
2	Tampungan	
	- Waduk	18.424.200
	- Embung	21.988.572
	- Mata Air	72.248.976
	- Sungai	-
	- Anak Sungai Bengawan Solo	1.899.728.640
	- Bengawan Solo	9.083.629.440
	- Air Tanah	1.082.650.000
Total		12.178.669.828

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Bojonegoro, 2021.

2.1.1.5. Klimatologi

Secara klimatologi, wilayah Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah yang beriklim tropis terdiri atas dua musim yaitu musim kemarau (April - Oktober) dan musim hujan (November - Maret). Untuk memonitor curah hujan, hingga tahun 2018 di Kabupaten Bojonegoro terdapat 22 buah stasiun penangkar hujan yang tersebar di 15 kecamatan. Data dari 22 stasiun penangkaran hujan diperoleh data bahwa pada bulan Juli - September tidak terdapat hujan. Namun secara rata-rata, jumlah curah hujan di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 2.103 mm³ dengan curah hujan tertinggi berada pada bulan Februari yaitu 5.603 mm³. Sedangkan, rata-rata hari hujan di Kabupaten Bojonegoro selama tahun 2018 yaitu 5 hari per bulan atau 58 hari hujan dalam

setahun. Berdasarkan data klimatologi tersebut dapat disimpulkan bahwa penguapan/evapotranspirasi di Kabupaten Bojonegoro sangat tinggi, sehingga berpengaruh kepada potensi hujan yang hilang dimana akan mengakibatkan berkurangnya ketersediaan air di tampungan – tampungan.

2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Bojonegoro secara garis besar dapat dibagi sebagai Kawasan Pertanian, Kawasan Hutan (Hutan Lindung dan Hutan Produksi), Kawasan Pemukiman, Kawasan Perkebunan, Kawasan Pertambangan Mineral bukan Logam, Badan Air, Ruang Terbuka Hijau, dan Sungai. Berdasarkan data Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro 2021–2041, penggunaan lahan di Kabupaten Bojonegoro paling luas adalah penggunaan lahan untuk lahan pertanian (kawasan pertanian) yaitu 48,21% atau seluas 111.788,67 Ha, kemudian hutan produksi seluas 85.469,38 Ha (36,86%), dan untuk kawasan pemukiman seluas 26.596,76 Ha atau 11,47% dari luas wilayah Kabupaten Bojonegoro, dan sisanya merupakan kawasan hutan lindung, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan mineral bukan logam, badan air, ruang terbuka hijau, dan sungai. Pada pemanfaatan lahan sering terjadi perubahan tata guna lahan yang disebabkan oleh proses perkembangan wilayah dan kebutuhan pergerakan masyarakat.

Tabel 2. 8 Penggunaan Lahan Kabupaten Bojonegoro

Penggunaan Lahan Eksisting	Luas Lahan (Ha)	Persen (%)
Badan Air	572,79	0,25
Kawasan Hutan Lindung	1.269,37	0,55
Kawasan Hutan Produksi	85.469,38	36,86
Kawasan Industri	139,76	0,06
Kawasan Perkebunan	2.059,76	0,89
Kawasan Permukiman	26.596,99	11,47
Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam	514,52	0,22
Kawasan Pertanian	111.788,67	48,21
Ruang Terbuka Hijau	471,22	0,20
Sungai	3.011,43	1,30

Sumber: RTRW Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021–2041.

2.1.1.7. Arah Pemanfaatan Ruang

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 - 2041 memuat tentang arah pemanfaatan ruang. Rencana pola ruang di Kabupaten Bojonegoro dibedakan menjadi kawasan peruntukan lindung, kawasan peruntukan budidaya. Arah pemanfaatan ruang wilayah kabupaten mencakup program-program dalam rangka pelaksanaan perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten, perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten, dan perwujudan kawasan-kawasan strategis kabupaten. Perwujudan rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bojonegoro, mencakup:

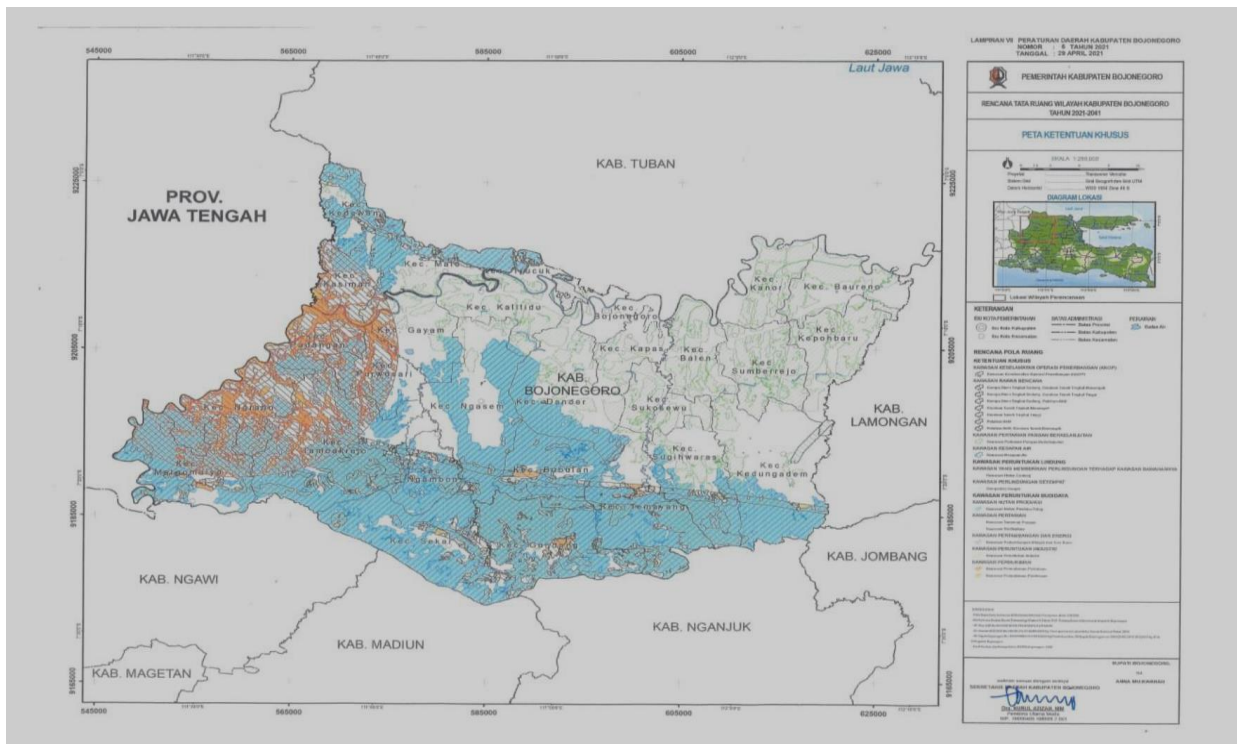
- 1) Perwujudan pusat kegiatan pelaksanaan pembangunan dalam wilayah kabupaten meliputi:
 - a) Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - b) Pemantapan Pusat Pengembangan Kawasan (PPK);
 - c) Pemantapan Pusat Pengembangan Lingkungan (PPL).
- 2) Perwujudan sistem jaringan prasarana kabupaten, yang mendukung keberadaan sistem prasarana nasional dan wilayah provinsi Jawa Timur di wilayah Kabupaten Bojonegoro, meliputi:
 - a) Perwujudan sistem jaringan transportasi jalan raya;
 - b) Perwujudan sistem jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
 - c) Perwujudan sistem jaringan transportasi kereta api;
 - d) Perwujudan sistem telekomunikasi;
 - e) Perwujudan sistem prasarana pengairan/irigasi;
 - f) Perwujudan sistem prasarana energi;
 - g) Perwujudan sistem prasarana air bersih;
 - h) Perwujudan sistem persampahan;
 - i) Perwujudan sistem prasarana drainase.

Perwujudan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bojonegoro, mencakup perwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budi daya. Selanjutnya adalah indikasi program utama dalam upaya perwujudan kawasan-kawasan strategis di Kabupaten Bojonegoro. Untuk mendukung terwujudnya

struktur ruang dan pola ruang sebagaimana diarahkan dalam RTRW, maka salah satu strategi yang harus dilaksanakan adalah optimalisasi pemanfaatan/ pengelolaan aset-aset pemerintah dan daerah, khususnya yang berupa lahan dan bangunan untuk difungsikan sesuai arahan rencana tata ruang, serta perlunya pencadangan lahan secara bertahap pada lokasi strategis, yang sangat vital dalam pengembangan daerah. Dengan demikian kinerja pembangunan daerah dapat terlihat melalui perkembangan pola pengembangan wilayah

2.1.1.8. Wilayah Rawan Bencana

Bencana merupakan serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat baik yang disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Berdasarkan RTRW Kab Bojonegoro terdapat 7 jenis pengelompokan bencana yang ada di Kabupaten Bojonegoro.



Gambar 2. 2 Peta Wilayah Rawan Bencana Kabupaten Bojonegoro

Sumber: RTRW Bojonegoro 2021-2041

Gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang tidak dapat diprediksi kapan akan terjadinya. Kajian bahaya gempa bumi di Kabupaten Bojonegoro menghasilkan potensi luas wilayah terpapar bahaya gempa bumi. Penentuan luasan terpapar bahaya menggunakan parameter ukur berdasarkan metodologi pengkajian risiko bencana. Adapun hasil kajian bahaya gempa bumi di Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi luas bahaya sebesar 224.785 Ha yang berada pada kelas sedang. Penentuan kelas bahaya berdasarkan kelas bahaya maksimal per kecamatan terpapar bahaya gempa bumi.

Kajian bahaya tanah longsor menghasilkan potensi luas wilayah terpapar bahaya tanah longsor. Penentuan luasan bahaya menggunakan parameter ukur berdasarkan metodologi pengkajian risiko bencana. Adapun hasil kajian bahaya tanah longsor di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa potensi luas bahaya sebesar 17.739 Ha yang berada pada kelas tinggi.

Kajian bahaya banjir menghasilkan potensi luas wilayah terpapar bahaya banjir. Penentuan luasan bahaya menggunakan parameter ukur berdasarkan metodologi pengkajian risiko bencana. Adapun hasil kajian bahaya banjir di Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi luas bahaya di Kabupaten Bojonegoro dengan total 158.125 Ha yang berada pada kelas tinggi.

Kajian bahaya banjir bandang menghasilkan potensi luas wilayah terpapar bahaya banjir bandang. Penentuan luasan bahaya menggunakan parameter ukur berdasarkan metodologi pengkajian risiko bencana. Adapun hasil kajian bahaya banjir bandang di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan potensi luas bahaya sebesar 9.781 Ha yang berada pada kelas tinggi.

Kajian bahaya kekeringan menghasilkan potensi luas wilayah terpapar bencana kekeringan. Penentuan luasan bahaya menggunakan parameter ukur berdasarkan metodologi pengkajian risiko bencana. Parameter ukur untuk mengkaji luasan bahaya kekeringan, yaitu kekeringan meteorologi dengan menggunakan data curah hujan bulanan (TRMM periode 1998–2014) dari sumber data NOAA tahun 1998-2015. Adapun hasil kajian bahaya kekeringan di Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi luas bahaya sebesar 224.785 Ha yang berada pada kelas tinggi.

Kajian bahaya cuaca ekstrim menghasilkan potensi luas wilayah terpapar bencana cuaca ekstrim. Penentuan luasan bahaya menggunakan parameter ukur, berdasarkan metodologi pengkajian risiko bencana. Adapun hasil kajian bahaya cuaca ekstrim di Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi luas bahaya sebesar 184.281 Ha yang berada pada kelas tinggi.

Kajian bahaya kebakaran hutan dan lahan menghasilkan potensi luas wilayah terpapar bencana kebakaran hutan dan lahan. Penentuan luasan bahaya menggunakan parameter ukur berdasarkan metodologi pengkajian risiko bencana. Adapun hasil kajian bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi luas bahaya sebesar 79.057 Ha yang berada pada kelas tinggi.

Sebaran bencana di Kabupaten Bojonegoro antara lain untuk kecamatan tingkatan resiko tinggi tanah longsor ada 18 (delapan belas) kecamatan yaitu Baureno, Bubulan, Dander, Gondang, Kasiman, Kedewan, Kedungadem, Malo, Margomulyo, Ngambon, Ngasem, Ngraho, Padangan, Sekar, Sugihwaras, Tambakrejo, Temayang dan Trucuk. Sementara itu untuk wilayah yang rawan banjir bandang terdapat 16 (enam belas) kecamatan meliputi Balen, Baureno, Bubulan, Gondang, Kedungadem, Kepohbaru, Margomulyo, Ngambon, Ngasem, Ngraho, Sekar, Sugihwaras, Sukosewu, Sumberrejo, Tambakrejo dan Temayang

2.1.2. Kondisi Demografi

Aspek demografi atau kependudukan merupakan salah satu aspek penting yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam perencanaan daerah. Hal ini disebabkan karena penduduk merupakan subjek sekaligus sebagai objek dari pembangunan itu sendiri. Penduduk sebagai subjek artinya bahwa untuk menggerakkan pembangunan maka penduduk dibutuhkan sebagai motornya. Sedangkan sebagai objek, penduduk merupakan tujuan dari pembangunan itu sendiri yaitu peningkatan kesejahteraan mereka.

Jumlah penduduk Kabupaten Bojonegoro selama lima tahun terakhir secara fluktuatif mengalami kenaikan. Pada tahun Tahun 2018 jumlahnya 1.324.336 jiwa dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 sebesar

1.343.164 jiwa. Lebih lengkapnya kondisi perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Bojonegoro disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 9 Jumlah Penduduk Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Ngraho	46.814	46.993	45.976	47.505	47.922
2	Tambakrejo	54.611	54.970	54.478	56.182	55.941
3	Ngambon	11.612	11.574	11.624	11.879	11.816
4	Ngasem	60.039	60.673	59.605	61.650	62.194
5	Bubulan	15.212	15.343	15.005	15.517	15.684
6	Dander	84.306	85.035	83.979	86.056	86.290
7	Sugihwaras	47.238	47.333	46.439	47.080	47.509
8	Kedungadem	84.034	84.048	82.112	84.255	84.433
9	Kepohbaru	65.865	66.238	64.912	67.024	67.420
10	Baureno	81.460	82.206	80.183	83.225	83.659
11	Kanor	61.615	61.925	59.637	61.560	62.093
12	Sumberrejo	72.530	72.571	70.017	72.251	73.256
13	Balen	67.397	67.682	65.813	67.390	68.414
14	Kapas	55.959	56.467	54.975	56.093	57.015
15	Bojonegoro	87.300	87.875	84.967	87.563	87.959
16	Kalitidu	50.322	50.887	50.102	51.371	51.713
17	Malo	30.714	31.004	30.654	31.898	32.151
18	Purwosari	30.090	30.301	29.676	30.733	30.866
19	Padangan	44.595	44.709	43.479	44.737	45.206
20	Kasiman	31.558	31.603	30.731	31.914	32.140
21	Temayang	36.761	36.775	35.932	37.189	37.534
22	Margomulyo	22.897	22.902	22.798	23.285	23.193
23	Trucuk	38.906	38.967	38.150	39.264	39.511
24	Sukosewu	43.608	43.790	42.448	43.779	44.270
25	Kedewan	13.036	13.059	12.997	13.549	13.581
26	Gondang	25.203	25.344	24.980	25.933	26.190
27	Sekar	27.775	27.689	27.411	28.544	28.552
28	Gayam	32.879	33.411	32.555	33.833	34.138
Kab. Bojonegoro		1.324.336	1.331.374	1.301.635	1.341.259	1.350.650

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bojonegoro & BPS (Sensus Penduduk 2021), 2022

Pada tahun 2022, indikator kependudukan menunjukkan bahwa *sex ratio* laki-laki/perempuan sebesar 100,95. Artinya, setiap 100 penduduk perempuan terdapat 100-101 penduduk laki-laki. Indikator lain yaitu jumlah penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa mereka yang berada pada usia produktif (15-64 tahun) mendominasi sebesar 954.935 di tahun 2022 dan 956.703 di tahun 2021. Jika melihat piramida penduduk, maka Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi bonus demografi yang tinggi. Nilai *dependency ratio* dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami kecenderungan meningkat dari 38,48 pada tahun 2018 menjadi 40,66 pada tahun 2022.

Tabel 2. 10 Indikator Kependudukan Kabupaten Bojonegoro 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk	1.324.336	1.331.374	1.339.100	1.341.259	1.343.164
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin					
Laki-laki	66.727	70.008	673.266	673.766	674.765
Perempuan	57.609	61.366	665.834	667.493	668.399
Sex Ratio (L/P) (%)	101,39	101,31	101,12	100,94	100,95
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur					
0-14 tahun	211.046	227.786	247.014	258.751	265.172
15-64 tahun	956.333	951.559	960.751	956.703	954.935
> 65 tahun	156.956	152.029	131.335	125.805	123.057
Dependency Ratio	38,48	39,92	39,38	40,19	40,66

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bojonegoro, 2022.

Sementara itu kepadatan penduduk di Kabupaten Bojonegoro tahun 2022 sebanyak 5,81 jiwa per Ha. Kepadatan paling tinggi di Kecamatan Bojonegoro yaitu 34,00 jiwa per Ha, sedangkan paling rendah adalah Kecamatan Bubulan yaitu 2,01 jiwa per Ha. Selengkapnya ada pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 11 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
1	Ngraho	8.575,66	47.609	5,55
2	Tambakrejo	19.400,73	56.366	2,91
3	Ngambon	4.765,48	11.900	2,50
4	Ngasem	13.862,91	61.863	4,46
5	Bubulan	7.785,74	15.621	2,01
6	Dander	12.102,25	86.222	7,12

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
7	Sugihwaras	8.781,35	47.154	5,37
8	Kedungadem	15.411,23	84.187	5,46
9	Kepohbaru	7.717,08	67.162	8,70
10	Baureno	7.128,55	83.501	11,71
11	Kanor	6.292,01	61.574	9,79
12	Sumberrejo	7.641,55	72.248	9,45
13	Balen	6.327,55	67.548	10,68
14	Kapas	4.442,97	56.169	12,64
15	Bojonegoro	2.570,07	87.395	34,00
16	Kalitidu	6.784,67	51.395	7,58
17	Malo	5.478,99	32.053	5,85
18	Purwosari	5.632,30	30.784	5,47
19	Padangan	4.956,70	44.738	9,03
20	Kasiman	4.859,41	31.879	6,56
21	Temayang	11.714,12	37.264	3,18
22	Margomulyo	10.969,88	23.314	2,13
23	Trucuk	5.191,70	39.303	7,57
24	Sukosewu	4.919,74	43.770	8,90
25	Kedewan	5.785,86	13.574	2,35
26	Gondang	12.391,00	26.013	2,10
27	Sekar	13.317,48	28.604	2,15
28	Gayam	6.328,57	33.954	5,37
		231.125,57	1.343.164	5,81

Sumber: Hasil Pengolahan Data, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2022 dan BPS Kab Bojonegoro.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olah raga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Fokus Kesejahteraan

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, antara lain Pertumbuhan PDRB, PDRB per Kapita dan Laju Inflasi

2.2.1.1.1. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian di suatu daerah, baik yang dihitung melalui pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, maupun pendekatan pengeluaran. Dengan mengetahui perkembangan angka PDRB akan diketahui laju perkembangan ekonomi dan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat di kurun waktu tertentu.

Tiga sektor utama yang memberikan sumbangan terbesar dalam pertumbuhan PDRB (ADHK) tahun 2018-2022 yaitu Pertambangan dan penggalan, Pertanian, kehutanan dan perikanan, dan Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Perkembangan perekonomian berdasarkan Lapangan Usaha PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2018-2022 dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 12 PDRB Kabupaten Bojonegoro ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.953,73	5.966,56	6.005,31	5.932,64	6.097,92
B	Pertambangan dan Penggalan	38.905,07	41.654,60	41.664,22	36.827,70	31.118,84
C	Industri Pengolahan	3.176,61	3.362,08	3.339,66	3.435,16	3.654,28
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14,00	14,47	14,37	14,70	15,81
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Industri	18,28	18,98	20,01	21,38	21,58
F	Konstruksi	3.721,93	4.033,89	3.934,93	4.087,92	4.414,23

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparas	4.759,91	5.064,31	4.645,80	4.986,74	5.354,70
H	Transportasi dan Pergudangan	508,32	551,55	516,57	566,82	676,06
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	496,27	542,12	497,29	516,84	586,69
J	Informasi dan Komunikasi	3.697,06	3.989,15	4.330,85	4.645,29	4.881,90
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	749,10	785,14	785,08	794,70	823,38
L	Real Estate	669,44	716,39	734,80	755,41	800,01
M, N	Jasa Perusahaan	75,73	81,19	75,18	77,02	81,56
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.843,50	1.904,05	1.877,02	1.882,59	1.903,10
P	Jasa Pendidikan	570,51	613,40	625,56	631,97	638,60
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	211,44	225,12	247,91	260,81	270,88
R,S,T,U	Jasa lainnya	444,66	462,66	388,86	401,82	443,33
PDRB		65.815,56	69.985,68	69.703,42	65.839,51	61.782,87
PDRB TANPA MIGAS		26.910,49	26.888,06	28.001,46	28.994,80	30.745,47

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017-2021, BPS Kabupaten Bojonegoro, 2021, dan Kabupaten Bojonegoro Dalam Angka Tahun 2022, BPS Kabupaten Bojonegoro, 2023.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) dengan migas nilai rata-ratanya selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2018 – 2022 sebesar Rp. 66.625,41 miliar. Berturut-turut nilai PDRB ADHK dengan Migas pada tahun 2018-2022 yaitu sebesar Rp. 65.815,56 miliar, Rp. 69.985,68 miliar, Rp. 69.703,42 miliar, Rp. 65.839,51 miliar dan Rp. 61.782,87 miliar.

Pertumbuhan ekonomi Bojonegoro tahun 2021 berkontraksi sebesar - 5,54 persen, menurun dibanding tahun 2020 yang sebesar 0,40 persen. Begitu pula pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 berkontraksi sebesar - 6,16 persen. Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Bojonegoro, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Diantaranya kondisi ekonomi global yang belum membaik karena adanya pandemi Covid dan produksi migas yang turun walaupun harga komoditas minyak yang naik tinggi.

Pada tahun 2022 pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 19,23 persen, penyediaan akomodasi dan makanan minuman sebesar 13,51 persen dan jasa lainnya 10,33 persen. Sementara itu beberapa lapangan usaha lainnya masih tumbuh dibawah 10 persen Namun jika dilihat dari PDRB non migas pertumbuhan Kabupaten Bojonegoro tumbuh sebesar 3,55 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha, namun ada beberapa lapangan usaha yang berkontraksi yaitu pertanian kehutanan dan perikanan serta pertambangan dan penggalian masing-masing sebesar -1,21 persen dan -11,61 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 – 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. 13 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Bojonegoro menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2022

Uraian Lapangan Usaha		Pertumbuhan Ekonomi				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,00	0,22	0,65	-1,21	2,79
B	Pertambangan dan Penggalian	3,55	7,07	0,02	-11,61	-15,50
C	Industri Pengolahan	6,88	5,84	-0,67	2,86	6,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,95	3,33	-0,69	2,34	7,56
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	4,90	3,82	5,43	6,82	0,92
F	Konstruksi	7,89	8,38	-2,45	3,89	7,98
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	7,64	6,40	-8,26	7,34	7,38
H	Transportasi dan Pergudangan	8,49	8,51	-6,34	9,73	19,27
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,55	9,24	-8,27	3,93	13,51
J	Informasi dan Komunikasi	10,20	7,90	8,57	7,26	5,09
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,12	4,81	-0,01	1,22	3,61
L	Real Estate	8,14	7,01	2,57	2,80	5,90
M, N	Jasa Perusahaan	8,10	7,21	-7,41	2,45	5,89
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,03	3,28	-1,42	0,30	1,09
P	Jasa Pendidikan	6,32	7,52	1,98	1,02	1,05
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,28	6,47	10,12	5,20	3,86
R, S, T, U	Jasa lainnya	5,97	4,05	-15,95	3,33	10,33
	PDRB Dengan Migas	4,39	6,34	-0,40	-5,54	-6,16
	PDRB Tanpa Migas	5,64	5,29	-1,09	3,55	6,04

Sumber : Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022
BRS No.002/02/3522/Th.III, 28 februari 2023

Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi dengan migas turun cukup besar yaitu negatif sebesar -6,16 persen, sedangkan tanpa migas justru tumbuh positif sangat tinggi yaitu 6,04 persen. Sebenarnya pada tahun 2022, perekonomian Kabupaten Bojonegoro sudah mulai tumbuh positif khusus sektor non migas. Namun justru sektor migas yang menjadi sektor dominan dalam PDRB mengalami penurunan produksi sehingga pertumbuhan ekonomi turun.

Sektor yang memberikan kontribusi dominan terhadap PDRB Kabupaten Bojonegoro tahun 2021 yaitu sektor pertambangan dan penggalian sebesar 50,14%, disusul dengan pertanian sebesar 11,81% dan perdagangan besar dan reparasi sebesar 8,36%. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, maka ketiga sektor tersebut masih menjadi sektor dominan dalam PDRB Kabupaten Bojonegoro. Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB pada tiap sektor, maka nilai laju pertumbuhan distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2021 dibanding tahun 2020 relatif mengalami perlambatan hingga kontraksi akibat covid-19 seperti sektor pertambangan tumbuh -11,61%, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tumbuh sebesar -1,21%, informasi dan komunikasi mengalami kontraksi 7,26%.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro jika disandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2018-2022 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Di tahun 2018 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro sebesar 4,41%, Provinsi Jawa Timur sebesar 5,50% dan Nasional sebesar 5,17%. Pada tahun 2020 Kabupaten Bojonegoro mengalami kontraksi sebesar -0,40%. Sementara itu, pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro sebesar -5,54% dengan migas dan 3,55% tanpa migas sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh sebesar 3,69% dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dengan capaian sebesar 3,57%.

Tabel 2. 14 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Nasional	5,17	5,02	-2,07	3,69	5,31
Provinsi Jawa Timur	5,50	5,52	-2,39	3,57	5,34
Kabupaten Bojonegoro	4,41	6,34	-0,40	-5,54	-6,16

Sumber: Provinsi Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2023, BPS Provinsi Jawa Timur 2023.

2.2.1.1.2. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita dihitung dari seluruh nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi suatu daerah dibagi jumlah penduduk daerah tersebut. PDRB per kapita merupakan suatu indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. PDRB Per Kapita Kabupaten Bojonegoro dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik secara ADHB maupun ADHK sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 15 PDRB dan PDRB Per Kapita Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017-2021

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai PDRB (Miliar Rupiah)					
• PDRB ADHB	73.229	78.046	70.259	83.439	100.493
• PDRB ADHK 2010	65.816	69.986	69.703	65.840	61.782
• Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK 2010) (%)	4,39	6,34	-0,40	-5,54	-6,16
PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)					
• PDRB ADHB	58.727	62.446	54.048	64.393	76.413
• PDRB ADHK 2010	52.782	55.996	53.621	50.351	46.979
• Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	4,14	6,09	-4,24	-6,10	-6,69
Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	1.247	1.250	1.300	1.308	1.315
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)	0,24	0,23	4,01	0,59	0,53

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022, BPS Kabupaten Bojonegoro, 2022.

Dari tabel di atas untuk capaian 2021 merupakan proyeksi. Meskipun nilai PDRB baik ADHB maupun ADHK naik dari tahun 2020 tetapi PDRB perkapita turun dari tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan faktor pembagi jumlah penduduk menggunakan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro dimana tahun 2021 jumlah penduduk sebesar 1.341.259 jiwa lebih banyak dari jumlah penduduk versi BPS.

2.2.1.1.3. Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi merupakan kenaikan Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan

harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi merupakan kenaikan. Laju inflasi di Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2015 sampai tahun 2018 relatif stabil diangka 2,4 sampai dengan 2,9. Inflasi sebagai tolok ukur untuk menjaga kestabilan perekonomian daerah, serta tingkat harga barang dan jasa di Kabupaten Bojonegoro. Secara umum di Kabupaten Bojonegoro tidak terdapat gejolak harga yang signifikan, pasokan barang dapat dicukupi baik dari kontribusi lokal maupun luar daerah.

Perhitungan nilai inflasi Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 menggunakan pendekatan *sister city*. Mengingat Kabupaten Bojonegoro bukan wilayah yang terpilih sampel SBH (Survey Biaya Hidup), maka dalam penghitungan IHK menggunakan diagram timbang Kota SBH yang memiliki pola konsumsi yang hampir sama, serta letaknya berdekatan secara geografis. Variabel lain yang juga menjadi pertimbangan adalah besaran PDRB dan jumlah penduduk dalam satu provinsi mitra kota (*sister city*) yang bersesuaian. Dari pendekatan Sister City yang sudah disusun oleh BPS RI, maka ditetapkan bahwa Kabupaten Bojonegoro mempunyai kemiripan pola konsumsi dengan Kota Kediri (Kota SBH).

Tabel 2. 16 Laju Inflasi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022

No.	Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nasional	3,13	2,48	1,68	1,87	5,51
2	Provinsi Jawa Timur	2,86	2,12	1,44	2,40	6,73
3	Kabupaten Bojonegoro	2,42	1,83	1,44	1,13	1,97

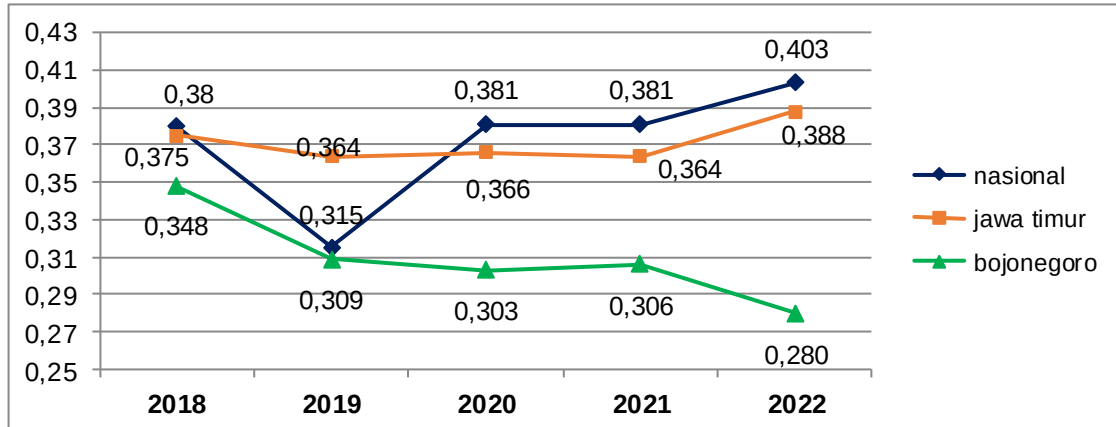
Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Bojonegoro, 2022

Inflasi Kabupaten Bojonegoro tahun 2022 sebesar 1,97 persen berada di bawah inflasi Provinsi Jawa Timur sebesar 6,73 persen dan Nasional sebesar 5,51 persen. Inflasi pada tahun 2022 ini menunjukkan angka yang selalu meningkat sejak pandemi Covid 19 tahun 2020 dan 2021. Kenaikan inflasi ini menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Bojonegoro sudah mulai pulih setelah kontraksi ekonomi dampak Pandemi Covid 19, sehingga daya beli masyarakat semakin meningkat.

2.2.1.2. Pemerataan Ekonomi

2.2.1.2.1. Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata, nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, Update s.d. 2022.

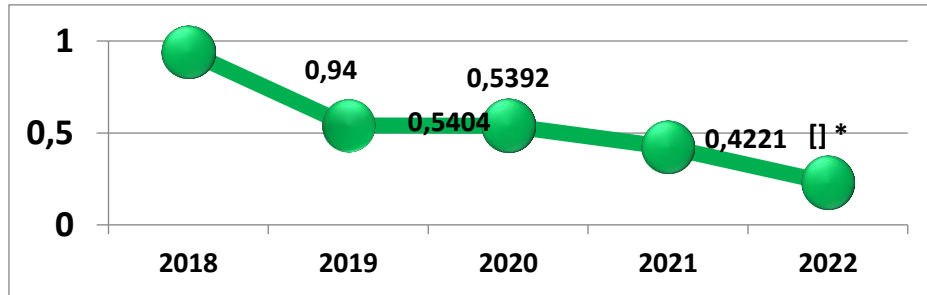
Gambar 2. 3 Indeks Gini Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018- 2022

Indeks gini pada tahun 2018 di Kabupaten Bojonegoro sebesar 0,348 kemudian pada tahun 2019 menurun menjadi 0,309 turun lagi pada tahun 2020 menjadi 0,303 kemudian tahun 2021 karena covid 19 naik menjadi 0,306, namun tahun 2022 turun kembali menjadi 0,280. Bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur maupun Nasional, Indeks Gini Kabupaten Bojonegoro masih lebih baik. Tingkat ketimpangan menjadi masalah yang perlu dituntaskan bersama, ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan di suatu daerah dapat menimbulkan masalah sosial. Oleh sebab itu pemerintah harus mendistribusikan pendapatan keseluruhan daerah agar tidak terjadi ketimpangan, dengan membangun infrastruktur dan memberdayakan masyarakat sekitarnya.

2.2.1.2.2. Indeks Williamson

Indeks Williamson merupakan pendekatan untuk mengukur derajat ketimpangan antar wilayah berdasarkan PDRB perkapita. Indeks Williamson berkisar antara $0 < IW < 1$, di mana semakin mendekati nol artinya wilayah

tersebut semakin tidak timpang. Sedangkan bila mendekati satu maka semakin timpang wilayah yang diteliti. Indeks Wiliamson Kabupaten Bojonegoro selama 4 tahun adalah sebagai berikut:



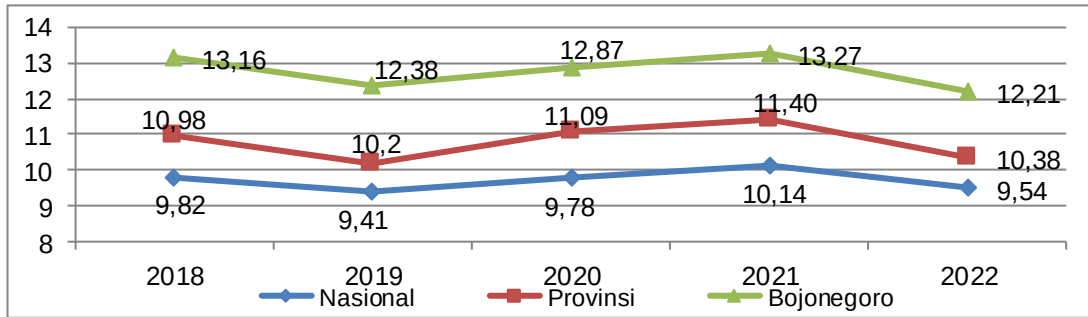
Gambar 2. 4 Indeks Wiliamson Kabupaten Bojonegoro

Dari gambar diatas terlihat ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Bojonegoro semakin tahun semakin menurun tahun 2018 sebesar 0,94 kemudian 2019 turun menjadi 0,5404 tahun 2020 turun lagi menjadi 0,5392 dan terakhir tahun 2022 menjadi 0,23.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Tingkat Kemiskinan

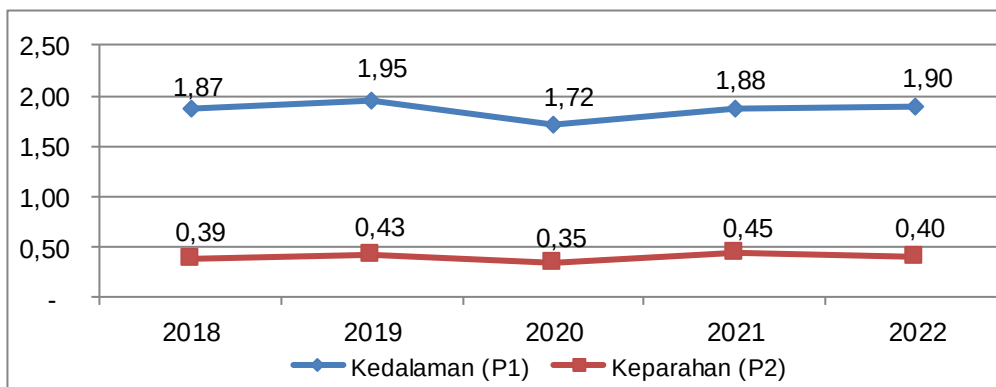
Capaian kinerja aspek kemiskinan diukur dari Persentase Penduduk Miskin. Kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 14,34%, pada tahun 2018 turun menjadi 13,16% dan terus mengalami penurunan sampai di tahun 2019 sebesar 12,38% penduduk miskin. Namun, akibat adanya pandemi covid-19 angka kemiskinan Kabupaten Bojonegoro naik menjadi 12,87% ditahun 2020 dan naik lagi menjadi 13,27% di tahun 2021, kemudian tahun 2022 kembali turun menjadi 12,21%. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur dan Nasional selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2018- 2022 disajikan pada tabel berikut.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Update s.d. 2022.

Gambar 2. 5 Angka Kemiskinan Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018 – 2022

Secara umum angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022 mengalami penurunan setiap tahunnya. Angka kemiskinan Kabupaten Bojonegoro masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur dan nasional. Hal ini selaras dengan kondisi Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Bojonegoro. Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Bojonegoro menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2018 P1 sebesar 1,87 dan pada tahun 2022 sebesar 1,90. Kondisi serupa juga terjadi pada Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Bojonegoro. Pada tahun 2018 Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,39 dan pada tahun 2022 sebesar 0,40. Justru pada tahun 2020 kedua indikator tersebut (P1 dan P2) mengalami penurunan yaitu menjadi 1,72 (P1) dan 0,35 (P2). Sebagaimana digambarkan dengan grafik perkembangan P1 dan P2 sebagai berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Bojonegoro, 2022.

Gambar 2. 6 Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 – 2022

Dengan kondisi capaian kinerja kemiskinan di atas, maka pada tahun 2021 Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu *pilot project* program pemerintah pusat yaitu ***kemiskinan ekstrem atau extreme poverty***. Kemiskinan ekstrem memiliki definisi yaitu Masyarakat yang memiliki pengeluaran perkapita per hari di bawah US \$ 1,9 PPP (Purchasing Power Parity). PPP di hitung oleh Bank Dunia dengan membandingkan harga komoditas antar negara. Untuk Indonesia US \$ 1,9 PPP. Garis kemiskinan Ekstrem Nasional Tahun 2021 sebesar 358.232,6 Rupiah/Kapita/bulan (konversi dari 1,9 \$PPP). Pada Rapat Terbatas Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Presiden RI memberikan arahan agar kemiskinan ekstrem (*extreme poverty*) pada 2024 dapat mencapai 0% dengan Fokus pada 3 kabupaten/kota di 7 Provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Maluku, Papua dan Papua Barat.

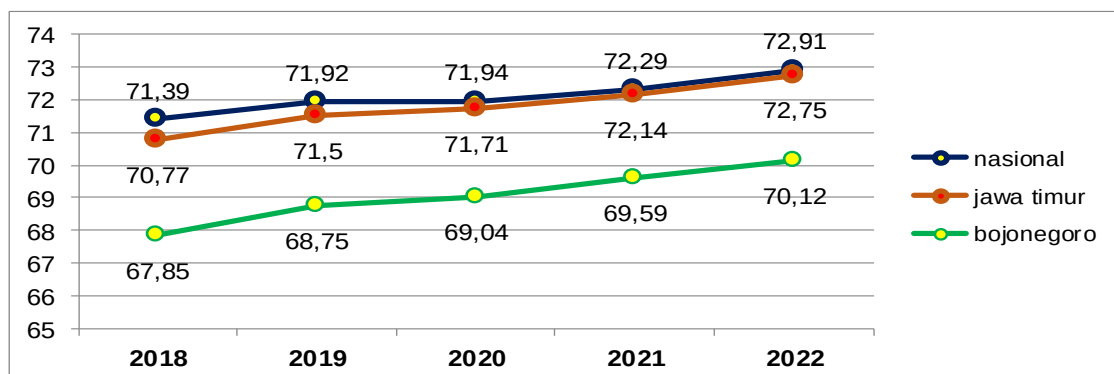
Kabupaten Bojonegoro masuk diantara 35 kabupaten/kota yang dijadikan sebagai *Pilot Project* penanggulangan kemiskinan tahap I Nasional. Di Provinsi Jawa Timur yang masuk dalam *Pilot Project* tahap I yaitu Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Sumenep. Di tahap I dikedepankan upaya konvergensi penanggulangan kemiskinan ekstrem, yaitu adanya pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama fokus pada penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2022 mengalami penurunan yang lebih cepat apabila dibandingkan dengan Nasional maupun Provinsi dimana Kabupaten Bojonegoro menurun sebesar 1,10%, Nasional sebesar 0,10% dan Provinsi Jawa Timur sebesar 0,43%. Penurunan tersebut dikarenakan adanya dukungan program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dimana sejak tahun 2020 telah merencanakan anggaran penanggulangan kemiskinan pada berbagai urusan seperti urusan pendidikan, kesehatan, perumahan dan kawasan pemukiman, sosial, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pengembangan usaha pertanian juga didukung dengan pembentukan kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten

Bojonegoro yang melaksanakan Pendataan Mandiri Kemiskinan Daerah (DAMISDA) guna memperoleh data yang akurat.

2.2.2.2. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Manfaat yang diperoleh dari pengukuran IPM ini adalah untuk (i) mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat/ penduduk, (ii) menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/ negara, dan (iii) IPM juga dapat digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM Kabupaten Bojonegoro selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, akan tetapi masih dibawah level provinsi dan nasional. Pada Tahun 2022 IPM Kabupaten Bojonegoro sebesar 70,12 meningkat 0,53 poin dari tahun 2021 sebesar 69,59. Namun, pertumbuhannya menjadi lebih lambat pada periode 2019-2020 dipengaruhi oleh pandemic covid-19. Capaian ini masih dibawah angka provinsi yaitu 72,75 dan nasional yaitu 72,91. Meskipun IPM Kabupaten Bojonegoro meningkat, tetapi masih dibawah provinsi dan nasional, sebagaimana digambarkan pada grafik berikut ini.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2023

Gambar 2. 7 IPM Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018 – 2022

Adapun perkembangan capaian masing-masing indikator komposit IPM Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:

1) Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup menggambarkan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Usia Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Usia Harapan Hidup merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir usia harapan hidup masyarakat Bojonegoro mengalami kenaikan tiap tahunnya dimana tahun 2018 sebesar 71,07, tahun 2019 sebesar 71,36 sementara itu tahun 2020 meningkat sebesar 71,56, tahun 2021 sebesar 71,72 dan 2022 sebesar 71,. Angka harapan hidup Kabupaten Bojonegoro mulai 2018 sampai dengan tahun 2022 lebih tinggi dibanding Jawa Timur dan Nasional.

Tabel 2. 17 Angka Harapan Hidup Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022

No	Keterangan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Bojonegoro	71,07	71,36	71,56	71,72	72,16
2	Provinsi Jawa Timur	70,80	71,18	71,30	71,38	71,74
3	Nasional	71,20	71,34	71,47	71,57	71,85

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2022.

2) Rata-rata Lama Sekolah

Lamanya bersekolah merupakan akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama bersekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun ke atas proses

pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standar internasional yang digunakan UNDP.

Tingginya angka Rata-rata Lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Berikut ini adalah tabel dan gambar perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022.

Tabel 2. 18 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Usia 25 Tahun keatas di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022

Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Usia 25 Th ke-atas	6,77	7,09	7,33	7,38	7,43

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2022.

Dari data di atas bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Bojonegoro meningkat dari 6,77 (2018) menjadi 7,43 (2022), artinya penduduk Kabupaten Bojonegoro rata-rata pendidikan yang ditamatkan hanya sampai kelas tujuh atau kelas 1 SMP. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Bojonegoro lebih rendah apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 19 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022

No	Keterangan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Bojonegoro	6,77	7,09	7,33	7,38	7,43
2	Jawa Timur	7,39	7,59	7,78	7,88	8,03
3	Nasional	8,17	8,34	8,48	8,54	8,69

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2022.

3) Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan lamanya sekolah (tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Perkembangan HLS Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 20 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2028-2022

No	Keterangan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Bojonegoro	12,35	12,36	12,39	12,68	12,84

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2022.

Capaian HLS Kabupaten Bojonegoro tersebut diartikan bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada 5 (lima) tahun terakhir memiliki peluang untuk bersekolah setara dengan SMA kelas 3. Bila dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Timur harapan lama sekolah kabupaten Bojonegoro masih berada dibawah nasional dan provinsi Jawa Timur.

Tabel 2. 21 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022

No	Keterangan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Bojonegoro	12,35	12,36	12,39	12,68	12,84
2	Jawa Timur	13,10	13,16	13,19	13,36	13,37
3	Nasional	12,91	12,95	12,98	13,08	13,10

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2022.

4) Pengeluaran Per Kapita disesuaikan

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Bojonegoro rata-rata mengalami peningkatan positif selama kurun waktu lima (5) tahun terakhir. Dimana tahun 2018 sebesar Rp. 9.926.000 meningkat di Tahun 2022 sebesar Rp. 10.323.000, meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp. 10.120.000 dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp. 10.265.000 karena Pandemi Covid 19. Hal ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya daya beli. Perkembangan capaian tingkat pengeluaran per kapita ditunjukkan oleh tabel dan gambar berikut ini.

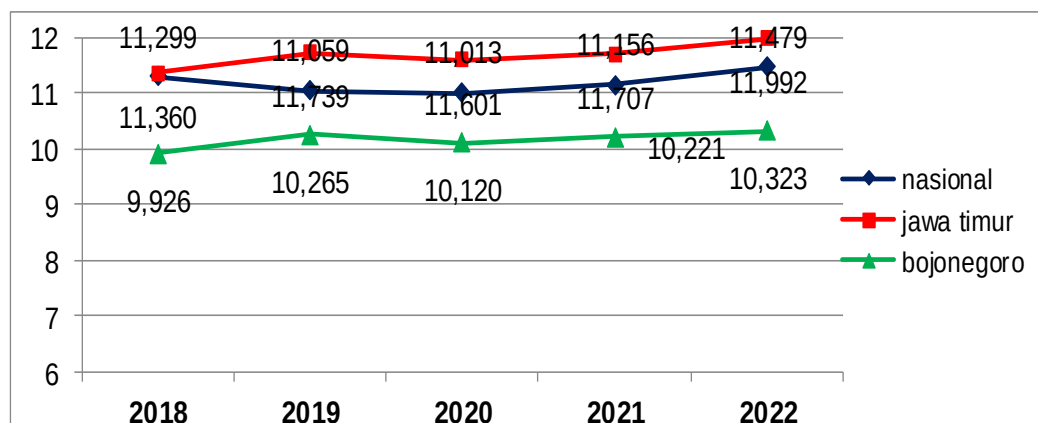
Tabel 2. 22 Pengeluaran Per Kapita Penduduk Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022

Tahun	Pengeluaran Perkapita (Rp.)
2018	9.926.000
2019	10.265.000
2020	10.120.000
2021	10.221.000

Tahun	Pengeluaran Perkapita (Rp.)
2022	10.323.000

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2022.

Jika dibandingkan dengan pengeluaran per kapita disesuaikan Jawa Timur dan Nasional, maka Kabupaten Bojonegoro berada di bawah realisasi Jawa Timur dan Nasional sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:

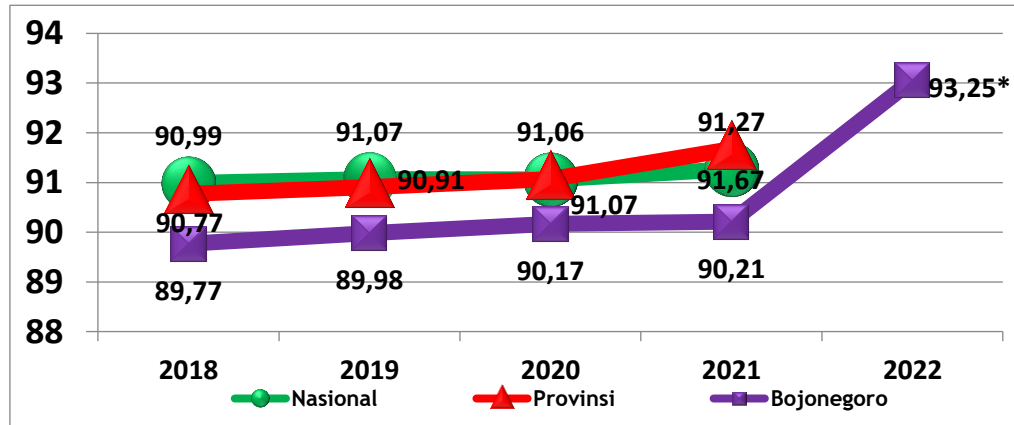


Sumber : BPS, BPS Provinsi Jawa Timur dan BPS Kab. Bojonegoro, tahun 2018 s.d. 2022.

Gambar 2. 8 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita disesuaikan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kab Bojonegoro Tahun 2018 – 2022

2.2.2.3. Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender

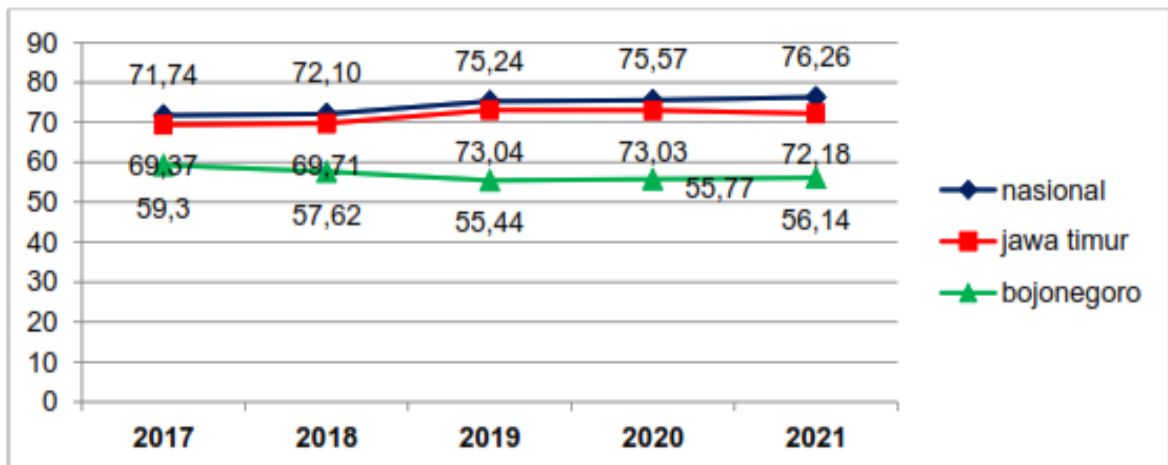
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bojonegoro selama 2 (dua) tahun terakhir menempati peringkat 16 (enam belas) tertinggi se Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Gambar 2.8 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2018-2021. Di tahun 2021 Indeks Pembangunan sebesar 90,21, sedangkan Hasil Proyeksi Kajian Daerah tentang Indeks Pembangunan Gender di tahun 2022 menunjukkan peningkatan 3,04 atau 93,25. Adapun trend pembangunan gender di Kabupaten Bojonegoro ditunjukkan pada grafik di bawah ini.



Sumber : BPS, BPS Provinsi Jawa Timur dan BPS Kab. Bojonegoro, tahun 2018 s.d. 2022.

Gambar 2. 9 IPG Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018 – 2021

Sementara itu capaian Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bojonegoro selama 5 (lima) tahun terakhir kategori rendah, yaitu pada tahun 2017 sebesar 59,30 sementara tahun 2021 sebesar 56,14, selama lima tahun terakhir angkanya masih di bawah provinsi dan nasional.



Sumber : BPS, BPS Provinsi Jawa Timur dan BPS Kab. Bojonegoro, tahun 2017 s.d. 2022.

Gambar 2. 10 IDG Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017 – 2021

2.2.2.4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan Kerja di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2022 sebanyak 755.603 jiwa dengan jumlah bekerja 803.000 jiwa. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2021 sebanyak 727.513 jiwa dengan jumlah bekerja mencapai 803.000 jiwa.

Tabel 2. 23 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022

Kegiatan Utama	2018	2019	2020	2021	2022
Angkatan kerja	661.169	704.639	737.001	727.513	755.603
Bukan angkatan kerja	323.803	285.743	302.408	289.005	308.526
Bekerja	633.437	678.571	695.746	692.456	803.000
- Laki-laki	385.969	406.487	343.203	466.146	538.000
- Perempuan	247.468	272.084	352.543	226.310	265.000
TPAK	67,13	71,15	74,60	71,84	72,16

Sumber: Keadaan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, BPS Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan angka tersebut, maka rasio penduduk yang bekerja dari angkatan kerja diatas umur 15 tahun di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2020 sebesar 94,49% menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 96,30%. Tingkat partisipasi angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2020 naik jika dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2020 TPAK sebesar 74,60% lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 sebesar 71,15%.

2.2.2.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat daerah. Alasannya jelas karena tingkat pengangguran yang tinggi mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah, dan demikian pula sebaliknya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka, terdiri dari:

- 1) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;
- 2) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
- 3) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;
- 4) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

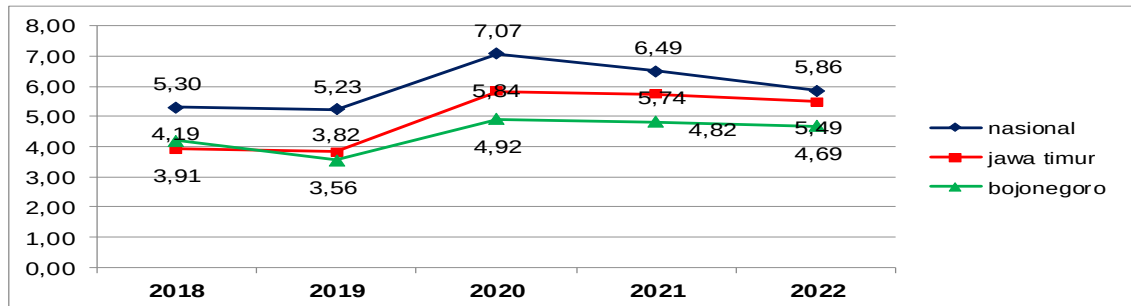
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bojonegoro mengalami perkembangan fluktuatif dimana tahun 2018 sebesar 4,19, tahun 2019 turun 3,56 kemudian tahun 2020 naik kembali menjadi 4,92 dan tahun 2021 turun menjadi 4,82 dan tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 4,69.

Tabel 2. 24 Indikator Tingkat Penangguran Terbuka 2018-2022

INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
TPT	4,19	3,56	4,92	4,82	4,69

Sumber: Keadaan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, BPS Provinsi Jawa Timur.

Apabila dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Timur. TPT Kabupaten Bojonegoro lebih bagus dari provinsi maupun nasional. Hal tersebut terlihat dari capaian tiap tahun yang berada di bawah nasional dan provinsi.



Sumber: Keadaan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, BPS Provinsi Jawa Timur, diolah kembali.

Gambar 2. 11 TPT Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018 – 2022

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pada fokus seni budaya dan olahraga, kinerja penyelenggaraan pemerintah antara dapat dilihat jumlah Organisasi kesenian di Kabupaten Bojonegoro, apabila dilihat dari jenisnya dapat dikelompokkan menjadi 10 kelompok, terdiri dari Wayang Kulit, Wayang Orang, Ludruk, Ketoprak, Waranggono Tayub, Kerawitan, Pramugari Tayub, Reog Jaranan, Orkes Melayu, dan Dalang Wayang Thengul. Sementara itu untuk olahraga indikatornya yaitu jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk. Perkembangan Organisasi Kesenian dan indikator olahraga, dapat dilihat sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 25 Perkembangan Organisasi Kesenian di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2022

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022
1	Electone/Orkes Melayu	Group	75	105	105	118
2	Waranggono	Orang	16	21	21	23
3	Campur Sari	Group	15	21	21	24
4	Dalang Purwo/ Thengul	Orang	12	29	30	33
5	Seni Reog	Group	20	28	31	34

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022
6	Pramugari Tayub	Orang	2	8	8	8
7	Seni Karawitan	Group	8	68	68	71
8	Seni Jaranan	Group	10	20	22	26
9	Seni Hadrah	Group	-	-	1	1
10	Sanggar Seni	Group	-	-	8	8
11	Band	Group	-	-	4	4
12	Sanggar Seni	Group	2	-	1	1
Jumlah			162	300	320	363

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bojonegoro, 2022.

Tabel 2. 26 Perkembangan Klub dan Gedung Olahraga di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2022

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	buah	4	4	4	4
2	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	buah	2	2	2	2
	Jumlah		6	6	6	6

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Bojonegoro, 2022.

Berdasarkan data di atas selama 3 (tiga) tahun baik jumlah klub maupun gedung olahraga tetap jumlahnya per 10 ribu penduduk yaitu jumlah klub olahraga 4 dan gedung olahraga 2, artinya baik klub maupun gedung masih kurang sesuai standar.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Fokus Urusan Layanan Wajib

2.3.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial. Adapun perkembangan capaian kinerja masing-masing urusan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

2.3.1.1.1. Bidang Pendidikan

Kinerja penyelenggaraan pembangunan pada urusan pendidikan ditunjukkan dengan capaian APM/APK SD dan SMP sederajat, angka kelulusan, angka melek huruf serta Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang Pendidikan.

a) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM jenjang SD sederajat dan SMP sederajat Kabupaten Bojonegoro lima tahun sebagai berikut.

Tabel 2. 27 Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD dan SMP Kabupaten Bojonegoro

Angka Partisipasi Murni (APM)	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
SD sederajat	97,01	93,82	94,70	98,95	99,84
SMP sederajat	81,15	77,80	88,11	85,90	98,69

Sumber: BPS Kabupaten Bojonegoro, 2022.

Dari tabel diatas ini menunjukkan bahwa peningkatan APM SD dan SMP ini memberikan gambaran adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya sekolah. Akan tetapi tantangan kedepan bagaimana angka APM SD, SMP sederajat bisa optimal bahkan sampai seratus persen.

b) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Bojonegoro dari tahun ke tahun mengalami pasang surut seperti terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. 28 APK PAUD/SD/MI dan SMP/MTs 2018 - 2022

APK	APK				
	2018	2019	2020	2021	2022
PAUD	98,02	94,80	93,92	96,62	96,65
SD/MI	105,70	102,97	107,90	107,39	107,41
SMP/MTs	103,24	98,91	99,05	99,27	99,30

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, 2022.

Pada tahun 2018 sampai dengan 2020, APK SD, SMP Kabupaten Bojonegoro mengalami pasang surut, bahkan tahun 2019 mengalami

penurunan untuk semua jenjang yaitu jenjang SD/MI tahun 2018 sebesar 105,70 menurun menjadi 102,97 dan SMP/MTs tahun 2018 dari 103,24 menurun menjadi 98,91 ditahun 2019. Namun, naik pada tahun 2020 dimana APK SD/MI sebesar 107,90 dan APK SMP/MTs sebesar 99,05. Sementara itu APK PAUD mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 98,02 menjadi 96,62 di tahun 2021.

d) Angka Kelulusan

Angka kelulusan selama dua tahun ajaran terakhir yaitu tahun pelajaran 2018/2019 dan 2019/2020 di kabupaten Bojonegoro baik SD maupun SMP mencapai 100% artinya tidak ada satupun siswa yang mengikuti Ujian Nasional (UNAS) yang tidak lulus. Sedangkan, angka putus sekolah dikabupaten Bojonegoro untuk jenjang SD dan SMP dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ajaran terakhir untuk jenjang SD naik turun sedangkan untuk jenjang SMP mengalami kenaikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 29 Angka Putus Sekolah Jenjang SD dan SMP Tahun 2017-2022

No	Tahun Ajaran	Angka Putus Sekolah	
		SD	SMP
1	2017/2018	0,01%	0,05%
2	2018/2019	0,03%	0,30%
3	2019/2020	0,01%	0,031%
4	2020/2021	0,00%	0,00%
5	2021/2022	0,01%	0,06%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, 2022.

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Kondisi rasio ketersediaan sekolah jenjang pendidikan dasar sembilan tahun di kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 30 Rasio ketersediaan Sekolah dengan Jumlah Penduduk Usia Pendidikan Dasar Kabupaten Bojonegoro Tahun Ajaran 2020/2021 dan 2021/2022

No	Uraian	Jumlah (Unit)	
		2020/2021	2021/2022
1	Jumlah lembaga SD	738	724
2	Jumlah Penduduk usia 7-12 tahun	95.986	69.576

No	Uraian	Jumlah (Unit)	
		2020/2021	2021/2022
3	Rasio SD	77	96
4	Jumlah lembaga SMP	105	109
5	Jumlah Penduduk usia 13-15 tahun	55.443	32.930
6	Rasio SMP	19	302

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, 2022.

Dari tabel di atas menunjukkan untuk jenjang SD dari 10 ribu penduduk usia 7-12 tahun tersedia 77 gedung sementara untuk jenjang SMP dari 10 ribu penduduk usia 13-15 tahun tersedia 19 gedung.

e) Angka Melek Huruf

Meskipun tidak lagi dijadikan sebagai indikator komponen pembentuk IPM, angka melek huruf masih relevan dalam mengukur capaian keberhasilan di bidang pendidikan. Angka ini untuk melihat seberapa besar kemampuan masyarakat dalam membaca dan menulis. Angka melek huruf ini diukur dengan menggunakan pendekatan penduduk berumur ≥ 15 tahun. Pada tahun 2019, angka melek huruf di Kabupaten Bojonegoro tercatat sekitar 90,78 persen, atau bila diukur dengan angka buta hurufnya sebesar 9,22 persen. Artinya dari setiap 100 penduduk Kabupaten Bojonegoro yang berumur ≥ 15 tahun, akan ditemukan 9 sampai 10 orang di antaranya belum bisa baca tulis atau buta huruf. Pada Tahun 2022 Angka Lama Sekolah di Kabupaten Bojonegoro sebesar 7,43, hal ini menggambarkan bahwa sudah 100% anak usia kurang atau sama dengan 15 tahun sudah lulus Sekolah Dasar, dengan demikian sudah tidak ada yang buta huruf.

Tabel 2. 31 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Kemampuan Baca Tulis dan Jenis Kelamin Kabupaten Bojonegoro

Kemampuan Baca Tulis	2018	2019	2020	2021
Melek Huruf				
Laki-laki	92,14	94,22	92,92	95,01
Perempuan	86,26	87,49	87,79	89,69
Laki-laki + Perempuan	89,16	90,78	90,30	92,30
Buta Huruf				
Laki-laki	7,86	5,78	7,08	4,99
Perempuan	13,74	12,51	12,21	10,31

Kemampuan Baca Tulis	2018	2019	2020	2021
Laki-laki + Perempuan	10,84	9,22	9,70	7,70

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Kab Bojonegoro, Tahun 2018 s.d. 2022,
Bappeda Kabupaten Bojonegoro

Secara total, pada tahun 2021 dari angka buta huruf sebesar 7,70 persen terdapat 4,99 persen penduduk laki-laki dan 10,31 persen penduduk perempuan usia di atas 15 tahun yang buta huruf mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2020. Dalam kurun waktu enam (6) tahun terakhir, angka buta huruf penduduk perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa meski capaian pembangunan manusia secara umum meningkat, masih terdapat disparitas antar gender. Idealnya, setiap individu mempunyai kesempatan dan pilihan yang sama, sehingga kesenjangan manusia yang ada harus mampu untuk dikurangi. Begitu pula dengan kesempatan dan pilihan yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Faktor hambatan yang ada di masyarakat mengakibatkan akses yang dimiliki individu dalam meningkatkan kualitas diri menjadi lebih sedikit. Dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab dalam menyetarakan kesempatan tiap individu dalam meningkatkan kualitas diri masing-masing.

f) SPM Bidang Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM Pendidikan) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. Capaian SPM bidang pendidikan Kabupaten Bojonegoro indikatornya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 32 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal					
1	Persentase APK PAUD	98,02	94,80	93,92	96,62	97,86
2	Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan dan Pusat Kegiatan Belajar (PKBM) terakreditasi	20	20	20	20	20
3	Persentase Angka Melek Huruf	91,06	90,91	91,58	100,00	-
	Pendidikan Dasar					
1	Persentase APK jenjang SD	103,53	101,92	107,30	107,39	107,41

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
2	Persentase APM jenjang SD	98,58	98,59	94,70	98,81	99,84
3	Angka Kelulusan	100	100	99,90	100	100
4	Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik Jenjang SD	-	-	83	85,92	86
	Pendidikan Menengah					
1	Persentase APK jenjang SMP	96,82	94,21	99,05	99,27	99,30
2	Persentase APM jenjang SMP	83,52	83,02	88,11	99,27	98,69
3	Angka Kelulusan	99,98	99,97	99,98	100	100
4	Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik Jenjang SMP	-	-	89	90,46	90,58

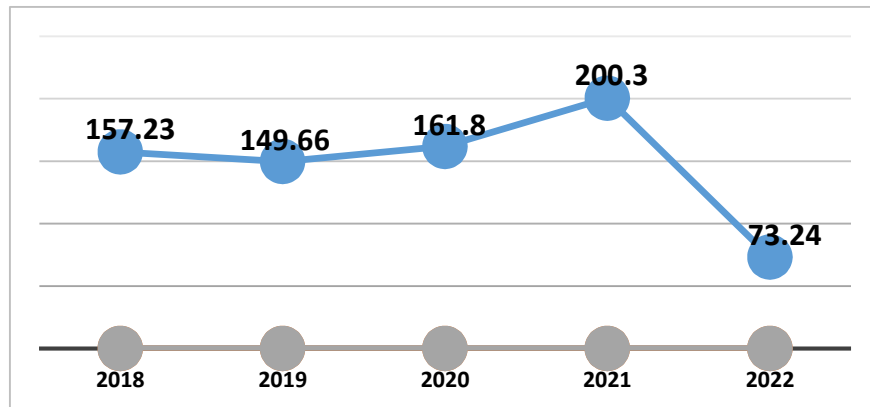
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, 2022.

2.3.1.1.2. Bidang Kesehatan

Penyelenggaraan pemerintahan pada urusan kesehatan ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), prevalensi balita gizi buruk, balita gizi kurang dan lainnya.

a) Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 meningkat menjadi 161,8 per 100.000 kelahiran hidup jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 149,66 per 100.000 kelahiran hidup (KH). Berikut AKI Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022.



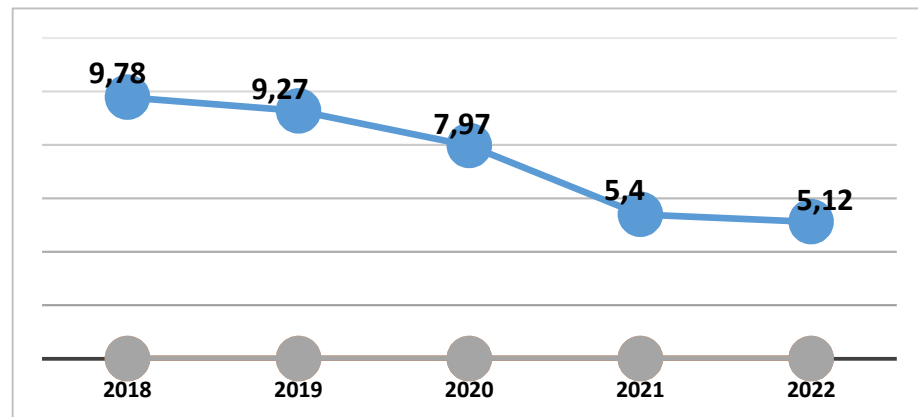
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 s.d. 2022, Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro.

Gambar 2. 12 Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Bojonegoro

Dari tabel diatas selama delapan tahun terakhir AKI kabupaten Bojonegoro secara umum angkanya fluktuatif dimulai tahun 2018. Tahun 2021 merupakan jumlah kematian ibu tertinggi yaitu 33 jiwa atau 200,3 per 100.000 Kelahiran Hidup. Faktor penyebab tingginya AKI di Kabupaten Bojonegoro disebabkan karena Covid-19 sebesar 21 kasus atau 63,63% sementara non Covid sebanyak 12 kasus karena pendarahan, pre eklamsi, penyakit jantung dan TBC.

b) Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi di kabupaten Bojonegoro dari tahun ke tahun mengalami penurunan, dimana tahun 2021 sebesar 5,40 per 1.000 kelahiran hidup. Tahun 2018 sebesar 9,30 per 1.000 Kelahiran Hidup (KH). Selama empat tahun ke belakang AKB tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu 9,73 per 1.000 KH. Tingginya AKI dan AKB di Kabupaten Bojonegoro disebabkan tidak ada manual dan SOP rujukan, terlambat deteksi dini diawal kehamilan karena kompetensi bidan dan fasilitas kesehatan kurang memadai. Permasalahan tersebut menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Daerah untuk menyelesaikannya. Tidak hanya tugas OPD yang menangani kesehatan saja tetapi juga harus semua sektor terkait untuk menyelesaikannya.



Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 s.d. 2022, Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro.

Gambar 2. 13 Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2018 sd 2022

c) Persentase Balita Gizi Buruk

Prevalensi Balita Kurang Gizi atau Angka Status gizi seseorang mempunyai hubungan yang erat dengan permasalahan kesehatan secara umum, disamping merupakan faktor predisposisi yang dapat memperparah penyakit infeksi secara langsung juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan individu. Status gizi pada janin/bayi sangat ditentukan oleh status gizi ibu hamil atau ibu menyusui. Dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, keluarga dan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting. Salah satunya melalui pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Gizi yang tidak terpenuhi dapat mengganggu pertumbuhan balita baik fisik, mental maupun kecerdasan. Jumlah Balita di Kabupaten Bojonegoro yang ditimbang selama Pemantauan Status Gizi Tahun 2020 mencapai 66.259 anak. Dari jumlah tersebut sebanyak 4.046 balita (6,1%) berstatus gizi kurang dan 32 balita (0,05%) berstatus gizi buruk. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 jumlah balita ditimbang sebanyak 79.187 anak. Balita berstatus gizi kurang sebanyak 4.028 anak (5,09%) atau naik sebesar 0,45%.

Tabel 2. 33 Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Bojonegoro

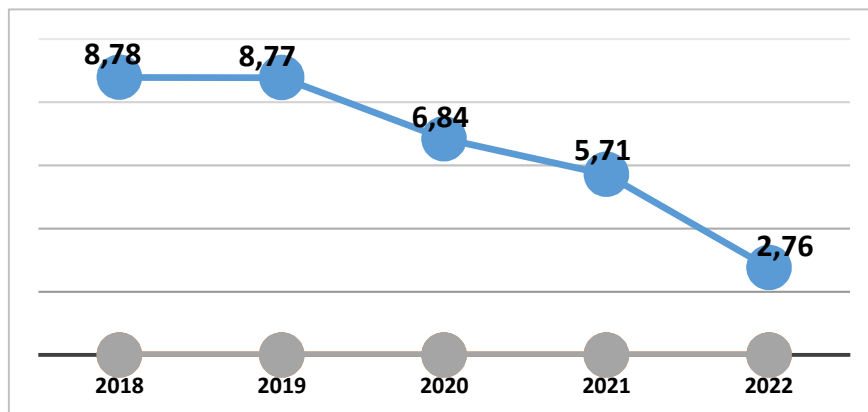
Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Balita Gizi Buruk	25	26	32	42	32
Jumlah Balita Gizi Kurang	4.331	4.028	4.046	3.792	3.147

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Balita	80.296	79.187	66.259	74.857	73.429
Persentase Balita Gizi Kurang	5,39%	5,09%	6,1%	5,07%	4,28%
Persentase Balita Gizi Buruk	0,03%	0,03%	0,05%	0,06%	0,04%

Sumber: *Profil Kesehatan Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 s.d. 2022, Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro.*

Sedangkan prevalensi *stunting* menunjukkan kekurangan gizi kronis yang terjadi selama periode paling awal pertumbuhan dan perkembangan anak. Tidak hanya tubuh pendek, *stunting* memiliki banyak dampak buruk untuk anak. Pada tahun 2020, survei membuktikan sekitar 30 persen balita Indonesia mengalami *stunting*. Kondisi ini bisa disebabkan oleh banyak aspek, mulai dari aspek pendidikan hingga ekonomi, *stunting* sangat penting untuk dicegah. Hal ini disebabkan oleh dampak *stunting* yang sulit untuk diperbaiki dan dapat merugikan masa depan anak.

Adapun perkembangan data *stunting* di Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada diagram berikut.



Sumber: *Profil Kesehatan Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 s.d. 2022, Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro.*

Gambar 2. 14 Prevalensi Stunting Tahun 2018 s.d 2022

Diagram di atas menunjukkan bahwa prevalensi *stunting* selama enam tahun terakhir fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2018 prevalensi *stunting* sebesar 8,78%. Pada tahun 2019 sebesar 8,77% atau menurun 0,01% dibandingkan tahun 2018, sedangkan tahun 2020

menurun sebesar 1,95% atau menjadi 6,84% sedangkan tahun 2021 menurun menjadi 5,71% dan tahun 2022 menurun menjadi 2,76%.

d) Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Persentase persalinan di fasilitas kesehatan di kabupaten Bojonegoro dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dimana tahun 2018 sebesar 98,41 persen, kemudian tahun 2019 meningkat menjadi 100,6 persen dan terakhir tahun 2020 menurun karena pandemic covid 19 menjadi 100,3 dan tahun 2021 meningkat lagi menjadi 101,54.

Tabel 2. 34 Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase persalinan di fasilitas Kesehatan	98,41	100,6	100,3	101,54	93,49

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 s.d. 2022, Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro.

e) Persentase Imunisasi Dasar Lengkap pada usia 12-23 Bulan

Tujuan diberikannya imunisasi dasar lengkap kepada bayi adalah agar bayi memiliki kekebalan dan mampu melawan serangan penyakit berbahaya. Jenis-jenis imunisasi yang diberikan kepada bayi diantaranya BCG, Hepatitis B, Folio, DPT dan Campak. Persentase pemberian imunisasi lengkap kepada bayi di Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 35 Persentase Pemberian Imunisasi Dasar lengkap kepada bayi di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap kepada Bayi	109,41	106,70	111,8	95	101,6

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 s.d. 2022, Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro.

i) Insiden TB per 100.000 Penduduk

Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit yang mudah menular lewat udara dan sering kali menginfeksi paru-paru. Faktanya, TBC juga dapat mengenai organ tubuh lain misalnya tulang belakang, kulit, otak, kelenjar getah bening, dan jantung. Selain menyerang paru-paru, kuman TBC juga

dapat menyerang organ lainnya, seperti ginjal, usus, otak, atau TBC kelenjar. Penyakit TBC pada organ selain paru-paru sering terjadi pada orang dengan kekebalan tubuh rendah, misalnya penderita AIDS. Kejadian TB dihitung per 100.000 penduduk, dimana untuk Kabupaten Bojonegoro datanya sebagai berikut.

Tabel 2. 36 Kejadian TB Dihitung per 100.000 Penduduk di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Kejadian TB dihitung per 100.000 penduduk	142,59	148	114	88,35	161,7

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 s.d. 2022, Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro.

j) Insiden HIV per 100.000 Penduduk

HIV (*human immunodeficiency virus*) adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh, dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah, sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*). AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Kasus HIV di Kabupaten Bojonegoro tiap tahun mengalami peningkatan, bila dihitung per 100 ribu penduduk kasus HIV dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 37 Kejadian HIV dihitung per 100.000 penduduk di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Kejadian HIV dihitung per 100.000 penduduk	47,58	82,67	88,83	72,04	24,17

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 s.d. 2022, Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro.

k) Cakupan Desa Siaga Aktif

Cakupan Desa Siaga Aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan dan surveillance berbasis masyarakat.

Empat ratus tiga puluh (430) desa dan kelurahan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 semuanya merupakan desa siaga dengan rincian 105 desa strata pertama, 194 desa strata madya, 123 desa strata purnama dan 8 desa strata mandiri, sementara tahun 2021 sebanyak 82 desa strata pertama, 204 desa strata madya, 135 strata purnama dan 9 desa strata mandiri. Lebih lengkapnya seperti tabel berikut.

Tabel 2. 38 Persentase Desa Siaga Aktif di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020-2022

No	Strata Desa	Satuan	2020	2021	2022
1	Pratama	Desa/kel	105	82	24
2	Madya	Desa/kel	194	204	258
3	Purnama	Desa/kel	123	135	127
4	Mandiri	Desa/kel	8	9	21
Jumlah		Desa/kel	430	430	430

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Bojonegoro tahun 2020 s.d. 2022, Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro.

I) SPM Bidang Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan adalah merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara. Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang kesehatan di Kabupaten Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut.

Tabel 2. 39 Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022

No	Indikator	Capaian Tahun (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ibu hamil (K4) di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	87,01	86,85	87,09	90,19	99,03
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	98,40	100,58	101,43	101,54	100
3	Persentasi bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100,90	102,36	103,72	101,62	97,31
4	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	94,76	90,31	85,57	102,70	99,12

No	Indikator	Capaian Tahun (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
5	Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	95,75	46,69	96,28
6	Persentase Warga Negara usia 15 - 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	71,63	77,76	64,64	70,30	83,28*
7	Persentase Warga Negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	65,75	61,82	49,77	77,82	89,80
8	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	60,73	59,01	51,03	62,48	71,99*
9	Persentase Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	64,97	88,67	90,60	89,68	100
10	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	83,01	101,98	90	100
11	Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	74,87	77,89	64,39	48,17	100
12	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	47,58	82,67	80,83	73,85	100

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 s.d. 2022, Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.

Dari data di atas capaian rata-rata SPM selama empat tahun terakhir sebagai berikut tahun 2018 sebesar 80,55 persen tahun 2019 naik menjadi 84,25 persen, sedangkan tahun 2020 turun karena pandemic covid 19 menjadi 81,40 persen. Sementara itu tahun 2021 turun lagi menjadi 79,58.

Sementara itu indikator kesehatan lainnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 40 Capaian Indikator Kesehatan lainnya Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022

No	Indikator	Capaian Tahun (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka orang dengan resiko terinfeksi HIV	47,58	82,67	80,83	72,04	100
2	Angka orang dengan resiko terinfeksi kusta	0,51	0,56	0,43	0,34	0,35*
3	Persentase ODF	73,02	78,60	83,70	99,77	100

No	Indikator	Capaian Tahun (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
4	Capaian IKM RSUD	85	86	87	84,38	86,26
5	Capaian Pemenuhan SPM RSUD	-	-	-	90,30	88,49
6	Angka Keberhasilan Pengobatan TB	93,36	96,7	93,60	97,90	95,1

Sumber: *Profil Kesehatan Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 s.d. 2022, Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro.*

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa angka resiko terinfeksi HIV dan kusta fluktuatif, angka orang dengan resiko terinfeksi HIV tahun 2018 sebesar 47,58 persen tahun 2019 naik 82,67 persen, sedangkan tahun 2020 turun menjadi 80,83 persen. Sedangkan angka orang dengan resiko terinfeksi kusta 0,51% tahun 2018, tahun 2019 naik menjadi 0,56 persen dan tahun 2020 turun menjadi 0,4 persen. Persentase ODF dari tahun ketahun mengalami kenaikan tahun 2018 sebesar 73,02 persen, tahun 2019 naik menjadi 78,60 persen dan tahun 2020 naik menjadi 83,70 persen.

2.3.1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum merupakan salah satu urusan yang menangani pemenuhan infrastruktur dasar pada suatu daerah. Pelayanan bidang pekerjaan umum difokuskan pada pelayanan urusan Jalan dan Jembatan, Sumberdaya Air, Perkotaan dan Perdesaan, Air Minum dan Air Limbah, Drainase, Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya, dan Jasa Konstruksi. Capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam aspek Pelayanan Umum dapat dilihat dari 5 indikator yaitu Persentase Jalan dalam Kondisi Baik. Urusan pekerjaan umum merupakan salah satu urusan yang menangani pemenuhan infrastruktur dasar pada suatu daerah. Pelayanan bidang pekerjaan umum difokuskan pada pelayanan urusan Jalan dan Jembatan, Sumberdaya Air, Perkotaan dan Perdesaan, Air Minum dan Air Limbah, Drainase, Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya, dan Jasa Konstruksi. Capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam aspek Pelayanan Umum dapat dilihat dari 5 indikator yaitu Persentase Jalan dalam Kondisi Baik.

a) Jalan dalam Kondisi Baik

Salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat krusial adalah tersedianya jalur transportasi berupa jaringan jalan yang baik. Kebutuhan jalan memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai.

Panjang jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten pada tahun 2022 sepanjang 813.266 km. Untuk jalan dalam kondisi baik pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021. Untuk jalan kondisi sedang dan rusak berkurang dibandingkan dengan tahun 2021. Perkembangan kondisi jalan sebagai sarana transportasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 41 Kondisi jalan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Kondisi Jalan Kabupaten (m)	813.266	813.266	813.266	813.266	813.266
- Baik	35.015	265.195	426.278	532.476	722.515
- Sedarang	281.003	265.195	237.496	134.793	33.326
- Rusak	497.248	292.926	149.489	145.997	57.425

Sumber: Dinas PU BMPPR Kab. Bojonegoro, 2022.

b) Jembatan dalam Kondisi baik

Pada tahun 2018 menjadi 1.247 buah, meningkat pada tahun 2020 sebesar 1.322 buah dan meningkat pada tahun 2022 sebesar 1.574. Adapun peningkatan jumlah jembatan ini merupakan sebagai konsekuensi dari peningkatan status jalan dan pelaksanaan inventarisasi yang secara bertahap, sehingga jumlahnya terus menerus meningkat. Untuk kondisi jembatan pada tabel 2.44 dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 terdapat 876 buah kondisi baik, untuk tahun 2019 menurun menjadi 795 buah kondisi baik dan tahun 2022 naik menjadi 880 buah. Penurunan jumlah jembatan kondisi baik disebabkan oleh konsekuensi penambahan jumlah

jembatan dari peningkatan ruas jalan dan pelaksanaan survey inventarisasi bertahap serta beberapa jembatan yang terdampak bencana banjir bandang di Kabupaten Bojonegoro.

Tabel 2. 42 Kondisi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Kondisi Jembatan (buah)	1.247	1.319	1.322	1.404	1.574
Baik	876	795	862	610	880
Sedang	364	116	103	482	454
Rusak	7	408	357	312	240

Sumber: Dinas PU BMPR Kab. Bojonegoro, 2022.

c) Penyediaan Sumber Daya Air Irigasi

Salah satu capaian kinerja pekerjaan umum dan penataan ruang adalah penyediaan sumber daya air irigasi. Kekeringan pada musim kemarau di Kabupaten Bojonegoro, membutuhkan keseimbangan dan kelestarian lingkungan dimana konversi lahan pertanian ke lahan terbangun mengakibatkan berkurangnya persediaan air tanah di wilayah DAS akibat berkurangnya ruang infiltrasi serta adanya perubahan iklim dan cuaca. Hal ini memberikan pengaruh pada ketersediaan air baku, apalagi akhir-akhir ini curah hujan yang sangat sedikit. Berdasarkan kondisi ini, membuat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengambil kebijakan untuk menampung sebanyak-banyaknya air yang ada baik dari hujan maupun dari luapan sungai bengawan solo. Hal ini dapat dilihat di tabel perkembangan peningkatan sumber daya air baku di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2022, dimana terjadi peningkatan volume air yang tersedia yang diakibatkan oleh peningkatan jumlah embung maupun dam yang dibangun dari tahun ke tahun. Disamping itu, hal lain yang berpengaruh dalam penyediaan air irigasi yaitu keberadaan jaringan irigasi yang harus dalam kondisi baik, dimana jika saluran kondisi baik maka air tidak akan banyak terbuang. Gambaran kondisi jaringan irigasi dapat dilihat lebih jelas pada tabel perkembangan jaringan irigasi di Kabupaten Bojonegoro 2019-2022, dimana dapat dilihat bahwa saluran irigasi yang sekunder dan tersier lebih banyak pada kondisi sedang dan rusak.

Tabel 2. 43 Perkembangan Peningkatan Sumber Daya Air Baku di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2022

No.	Sumber Daya Air Baku	Satuan	2019	2020	2021	2022
1	Waduk	Jml. Lokasi	2	2	3	3
	- Vol. Waduk	M3	22.000.000	22.000.000	44.430.000	49.900.000
	- Areal	Ha	17.513	17.513	17.513	19.994
2	Embung Tanah Solo Valley	Jml. Lokasi	141	141	143	143
	- Vol. Embung	M3	1.711.669	1.711.669	1.748.167	1.748.167
	- Area	Ha	1.192,30	1.192,30	1.202,728	1.202.728
3	Embung Tanah Desa	Jml. Lokasi	348	353	362	368
	- Vol Embung	M3	3.028.944	3.067.416	3.171.604	3.215.108
	- Area	Ha	1.767	1.770	1.800	1.829
4	Embung Tanah Perhutani	Jml. Lokasi	2	2	2	2
	- Vol Embung	M3	14.391	14.391	14.391	14.391
	- Area	Ha	8	8	8	8
5	Embung Tanah Aset Pemkab	Jml. Lokasi	4	4	4	4
	- Vol Embung	M3	133.630	133.630	133.630	133.630
	- Area	Ha	93	93	93	93
6	Bendung/ Chek Dam	Jml. Lokasi	348	351	361	364
	- Vol. Bendung/ Chek Dam	M3	2.729.294	2.750.294	2.841.607	2.892.157
	- Area	Ha	18.119	18.290	19.300	19.500
	Volume Total	M3	29.830.808	29.889.780	52.551.779	54.903.453
	Area	Ha	38.834	39.008,3	40.058,7	42.626,73

Sumber: Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Bojonegoro.

Tabel 2. 44 Perkembangan Jaringan Irigasi di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2022

No	Kebutuhan Air Baku	Sat	2019	2020	2021	2022
1	Luas Baku	Ha	26.636,00	26.636,00	26.636,00	26.636,00
2	Primer					
	- Panjang Saluran	m	41.527,92	41.527,92	41.527,92	41.527,92
	- Baik	m	35.096,72	35.096,72	35.096,72	35.096,72
	- Sedang	m	5.721,74	5.721,74	5.721,74	5.721,74
	- Rusak	m	709,46	709,46	709,46	709,46
3	Sekunder					
	- Panjang Saluran	m	67.732,00	75.850,30	82.133,51	96.009,11
	- Baik	m	21.056,41	39.174,7	36.998,91	54.821,11
	- Sedang	m	29.716,80	29.716,80	29.716,80	27.743,50
	- Rusak	m	16.958,80	16.958,80	15.417,80	13.444,50

No	Kebutuhan Air Baku	Sat	2019	2020	2021	2022
4	Tersier					
	- Panjang Saluran	m	36.226,90	36.226,90	36.226,90	36.226,90
	- Baik	m	30.538,10	30.538,10	30.538,10	30.538,10
	- Sedang	m	5.509,63	5.509,63	5.509,63	5.509,63
	- Rusak	m	178,81	178,81	178,81	178,81

Sumber: Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Bojonegoro

Selain sebagai sumber daya air terbesar yang ada di Kabupaten Bojonegoro, Sungai Bengawan Solo dengan panjang ± 195 km sering meluap pada saat curah hujan tinggi. Terjadinya banjir dari luapan Sungai Bengawan Solo masuk ke kali, afvoer, persawahan dan permukiman warga. Hal ini disebabkan oleh belum terbangunnya pintu pengendali banjir pada lokasi rawan banjir dan terjadinya kerusakan pintu pengendali banjir serta belum terbangunnya tanggul sungai dan terjadinya kerusakan/jebol tanggul sungai. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk pengendalian banjir di Kabupaten Bojonegoro adalah pembangunan/rehabilitasi pompa pengendali banjir, pembangunan/ pemeliharaan pelindung tebing, pembangunan checkdam, Sudetan kali dan normalisasi kali.

d) Drainase Kondisi Baik

Drainase merupakan salah satu unsur dari prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. Prasarana drainase berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air (sumber air permukaan dan bawah permukaan tanah) dan atau bangunan resapan. Berikut ini kondisi drainase yang di bangun khususnya di wilayah Ibukota Kecamatan.

Tabel 2. 45 Drainase Wilayah Ibukota di Kabupaten Bojonegoro yang dibangun

Indikator	Sat	2019	2020	2021	2022
Drainase yang dibangun di Ibukota Kecamatan	Meter	114.874,59	19.347	49.926	52.926

Sumber: Data Dinas PKP CK, 2022.

e) Cakupan Rumah Tangga yang Mendapatkan Pelayanan Air Minum

Air Minum merupakan air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Sehari-hari, kebutuhan pokok air minum untuk memenuhi kebutuhan hidup yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif. Nilai indikator cakupan rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum diperoleh dari perbandingan antara jumlah masyarakat yang terlayani dengan proyeksi total masyarakat. Capaian indikator ini menunjukkan peningkatan positif meningkat selama 2018-2021. Rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum adalah persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 46
Indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap
Layanan Sumber Air Minum Layak Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2018-2022

No	Indikator	Capaian Tahun (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak	59,71	59,93	60,14	60,36	60,72

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Update s.d. 2022.

Dari data di atas bahwa capaian rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum belum mencapai target seratus persen. Belum tercapainya seratus persen rumah tanggan yang mempunyai akses layanan sumber air minum layak faktor utamanya adalah tidak adanya sumber mata air di sebagian permukiman masyarakat khususnya di daerah pedalaman dekat.

f) Penangan Air Limbah

Disamping pemenuhan air minum diatas, pemenuhan pelayanan dasar perumahan juga memperhatikan penyelesaian air limbah. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta karya adalah pembangunan sistem pengolahan air limbah setempat. Berikut ini data pembangunan sistem pengolahan air limbah setempat selama lima tahun terakhir

Tabel 2. 47 Data Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat Tahun 2018-2022

No	Indikator	Sat	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Pembangunan sistem pengolahan air limbah setempat	Ruta	682	1.011	2.200	1.735	906

Sumber: Dinas PKP dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro, 2022.

Selama lima tahun pembangunan sistem pengolahan air limbah setempat yang dibangun Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sejumlah 4.713 rumah tangga yang dibangun.

g) Penataan ruang

Selain itu, dilihat dari kinerja penataan ruang sebagai suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang merupakan suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Produk perencanaan tata ruang diantaranya adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) Kawasan Perkotaan Kecamatan. Jika dilihat pada tabel dibawah ini, terdapat hanya 1 produk tata ruang yaitu RTRW Kabupaten Bojonegoro telah disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2041.

Tabel 2. 48 Perkembangan Inventarisasi Produk Tata Ruang Ibu Kota Kecamatan Beserta Perda di Kabupaten Bojonegoro s/d Tahun 2018-2022

No	Uraian	Sat	2018	2019	2020	2021	2022
1	RTRW Kabupaten Bojonegoro yang telah berkekuatan hukum (Perda)	Buah	1	1	1	1	1
2	Revisi RTRW Kabupaten	Buah	-	-	1	1	-
3	RDTR BWP Kawasan Perkotaan Kecamatan						
	➤ Yang telah ada	Buah	4	8	13	1	4
	➤ Yang telah ada dan berkekuatan hukum (Perda)	Buah	-	-	-	-	-
	➤ Yang belum berkekuatan hukum (Draft Perda)	Buah	4	8	13	1	4
	➤ Yang belum ada/terbentuk	Buah	24	20	15	7	4
	➤ Yang telah ada tapi perlu dilakukan revisi	Buah	4	4	4	-	-
4	Data Ketaatan RTRW	%	87,30	84,25	86,71	88,05	88,30

Sumber: DPU Bina Marga dan Penataan Ruang Kab Bojonegoro, 2022.

Sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2041, telah disusun RDTR sebanyak 13 perkotaan kecamatan meliputi:

1. Sampai dengan tahun 2018 disusun sebanyak 4 RDTR yang meliputi RDTR Kecamatan Bojonegoro, Kecamatan Kapas, Kecamatan Kalitidu, Kecamatan Ngasem;
2. Pada tahun 2019 disusun sebanyak 4 RDTR yang meliputi RDTR Kecamatan Baureno, Kecamatan Dander, Kecamatan Padangan, Sumberrejo.
3. Pada tahun 2020 disusun sebanyak 5 RDTR yang meliputi RDTR Kecamatan Balen, Kecamatan Gayam, Kecamatan Kedungadem, Kecamatan Ngraho, Kecamatan Temayang.

Bahwa sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2041, ketigabelas RDTR tersebut belum bisa ditetapkan dalam Perda dikarenakan harus ada penyesuaian substansi akibat perubahan regulasi yang mengatur pedoman penyusunan RDTR baik itu Peraturan Menteri maupun Peraturan Daerah RTRW yang baru disahkan.

g) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Capaian SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut:

Tabel 2. 49 Realisasi SPM bidang Pekerjaan Umum Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan pokok air sehari-hari	100	100	100	100	100
2	Persentase Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah Domestik	-	90	95,61	100	100

Sumber: Dinas PKP dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro, 2022.

2.3.1.1.4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**a) Rumah Tidak Layak Huni yang di tangani**

Menurut UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah layak huni, salah satu ukurannya adalah mempunyai bangunan yang kokoh. Salah satu indikator pelayanan pada sub urusan perumahan yaitu meningkatnya jumlah rumah layak huni.

Tabel 2. 50 Perkembangan penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bojonegoro s/d Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Sat	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pemugaran Rumah tidak layak Huni	Unit	1.194	1.558	3.743	6.669	5.108

Sumber: DPKP Cipta Karya Kab Bojonegoro, 2022.

Pemugaran rumah tidak layak huni dilakukan pada keluarga tidak mampu bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah menjadi rumah yang

sehat dan layak huni. Dari Jumlah rumah tidak layak huni sebesar 22.528 unit pada tahun 2018–2022 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mampu memugar Rumah tidak layak huni sebanyak 18.272 unit rumah selama 5 tahun tersebut.

b) Cakupan Kawasan Kumuh

Selain ketersediaan perumahan, air minum dan sanitasi layak, Kabupaten Bojonegoro juga memberikan perhatian dalam penanganan kawasan kumuh perkotaan. Sebagian besar kawasan kumuh ini memiliki area genangan, sanitasi yang tidak sesuai, ketidaklayakan bangunan hunian, serta rumah tangga tidak tercukupi air minum 60 liter per hari. Perkembangan penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Bojonegoro sesuai Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/131/412.11/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bojonegoro. Berikut ini data penanganan kumuh perkotaan tahun 2018 sampai dengan 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 51 Perkembangan Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022

Uraian	Sat	2018	2019	2020	2021	2022
Kawasan kumuh perkotaan yang tertangani	Hektar	35,83	19,67	2,08	44,54	48,65

Sumber: DPKP Cipta Karya Kab. Bojonegoro, 2022.

c) Urusan Permukiman Lainnya

Urusan keciptakaryaannya terkait penyediaan sarana prasarana permukiman meliputi air bersih, sanitasi, jalan lingkungan dan jaringan listrik. Kebutuhan pelayanan air bersih di Kabupaten Bojonegoro yang selama ini telah terlayani secara optimal dari sisi kualitas maupun dari kuantitas walaupun masih menghadapi berbagai kendala pengelolaan baik bersifat teknis, pendanaan maupun manajemen.

Tabel 2. 52 Perkembangan Kondisi Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022

No	Uraian	Sat	2018	2019	2020	2021	2022
1	Sarana Lingkungan Permukiman						
	a. Peningkatan jalan lingkungan Permukiman di	Meter	1.784	6.274	13.607	10.944	14.792,9

No	Uraian	Sat	2018	2019	2020	2021	2022
	perkotaan						
	b. Penerangan jalan umum	Titik	815	2.629	2.549	3.237	2.850
	c. Pertamanan	Lokasi	23	89	12	59	1
	d. Pemakaman	Lokasi	2	10,5	2	2	12
	e. Gedung RS	Paket	4	3,12	1	1	0
	f. Jaringan Listrik Desa	Lokasi	0	0	0	0	1.467
2	Penyehatan Lingkungan Permukiman						
	a. Prasarana air bersih						
	- Perpipaan	SR	2.197	861	858	871	1.416
	- Sumur bor dalam	Unit	47	109	61	79	22
	b. Pembangunan MCK	Unit	420	1.449	2.307	3.807	906
	c. Pembuatan saluran air permukiman Perkotaan	Desa/ Kec.	-	-	199	153	-
		Meter	19.347	49.926	37.216	32.623	52.926
	d. Pelayanan air bersih IKK Kec./ Pedesaan	Unit	47	109	91	90	32

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Kab. Bojonegoro, 2022.

Pembangunan layanan sanitasi di Kabupaten Bojonegoro tahun 2020 telah dibangun sebanyak 2.307 unit MCK dan tahun 2022 turun menjadi 906 unit. Sanitasi adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan sedemikian rupa sehingga munculnya penyakit dapat dihindari. Sehingga dapat dikatakan bahwa sanitasi adalah suatu usaha pengendalian faktor-faktor lingkungan untuk mencegah timbulnya suatu penyakit dan penularannya yang disebabkan oleh faktor lingkungan tersebut, sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat optimal (Depkes RI, 2002). Selain itu, untuk meningkatkan kualitas permukiman juga dilakukan pembangunan jalan lingkungan dipermukiman perkotaan yang mengalami peningkatan mulai tahun 2018 dari 2.981 m, pada tahun 2019 meningkat menjadi 6.274 m. Pembangunan sanitasi di kabupaten Bojonegoro yang tiap tahun mengalami peningkatan berdampak pada capaian rumah tangga yang memiliki akses sanitasi yang layak.

Tabel 2. 53 Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Sanitasi yang Layak di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Sat	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Rumah	%	88,02	88,35	88,87	89,74	89,94

No	Uraian	Sat	2018	2019	2020	2021	2022
	Tangga yang mempunyai akses sanitasi yang layak						

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Kab. Bojonegoro, 2022.

d) SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 29 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, antara lain penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi warga korban bencana dan warga yang terkena relokasi program pemerintah daerah. Berikut realisasi capaian target SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 s/d 2022.

Tabel 2. 54 Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2022

No	Indikator Capaian	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Ket
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	73,15%	100%	80%	100%	100%	-
2	Persentase warga yang terkena relokasi program pemerintah daerah yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak terdapat rumah tangga yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah

Sumber: Dinas PKP dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro, 2021.

Dari data di atas capaian SPM penanganan bencana mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya meskipun belum tercapai seratus persen.

2.3.1.1.5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat merupakan tugas pemerintah daerah dengan menegakkan peraturan daerah melalui perangkat daerahnya. Dalam hal perwujudan ketenteraman dan ketertiban umum, jumlah penyelesaian

pelanggaran K3 yang dilaksanakan pada tahun 2019 mencapai 1.489 kasus atau sebesar 88,16%, sedangkan tahun 2020 sebesar 1.718 kasus atau sebesar 89,11%.

Tabel 2. 55 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2022

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	1.489	1.718	994	974
2	Jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan/ dipantau/ ditemukan	1.689	1.928	1.038	1.007
3	Indeks ketentraman dan ketertiban umum	0,88	0,89	0,97	0,97

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab Bojonegoro, 2022.

Pelaksanaan tugas penegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk melaksanakan semua tugas tersebut, salah satunya, ditentukan dengan ketersediaan Polisi Pamong Praja. Selama kurun waktu 2019-2020 rasio Polisi Pamong Praja (PNS) di Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan untuk setiap 10.000 penduduk. Rasio tahun 2019 sebesar 1,62 per 10.000 penduduk sedangkan pada tahun 2020 rasio sebesar 1,81. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kamtramtibum merupakan salah satu alternatif upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan kurangnya jumlah personil aparat pengamanan. Upaya pemberdayaan yang dilakukan antara lain melalui perekrutan Linmas, sehingga pada tahun 2019 rasio linmas per 10.000 penduduk sebesar 100,74, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 111,31.

Tabel 2. 56 Cakupan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2022

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022
1	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	1,62	1,81	1,74	1,70
2	Jumlah pamong praja	216	235	233	229
3	Jumlah penduduk	1.331.077	1.301.635	1.341.259	1.343.164
4	Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	100,74	111,31	105,69	103,72
5	Jumlah Linmas	13.409	14.489	14.160	13.932

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab Bojonegoro, 2022.

Selain itu, kententeraman dan ketertiban umum akan mewujudkan kondusivitas daerah di Kabupaten Bojonegoro. Selama kurun waktu 5

(lima) tahun terakhir secara umum menunjukkan situasi yang aman dan tertib, meskipun masih terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, antara lain pemerkosaan, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan narkoba. Peningkatan terbesar adalah kasus narkoba dan psikotropika dan penadahan. Sedangkan kasus pencurian mengalami penurunan. Kondusivitas wilayah juga dipengaruhi oleh terjadinya konflik sosial yang terjadi. Berbagai upaya preventif telah dilakukan dalam rangka mencegah potensi kerawanan sosial menjadi konflik sosial.

Kondisi politik Kabupaten Bojonegoro dapat digambarkan melalui pelaksanaan Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, serta Pemilukada yang berjalan tertib dan demokratis tanpa disertai pengerahan massa yang berujung tindakan anarkis. Jumlah organisasi dan partai politik yang ada di Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan sehingga bantuan keuangan dari APBD untuk Parpol dan organisasi kemasyarakatan pun semakin meningkat sebagai upaya pendidikan politik, pembinaan dan pendayagunaan potensi.

Tabel 2. 57 Perkembangan Organisasi Partai Politik dan Kemasyarakatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Partai Politik	12	16	16	16	17
	Ormas:					
	• Berbadan Hukum	88	96	113	138	153
	• Belum Berbadan Hukum	155	155	153	150	156
3	Aliran Kepercayaan	4	5	4	4	4
3	Keberadaan Parpol yang mendapatkan kursi di DPRD	11	13	13	13	13
4	Parpol dan Organisasi kemasyarakatan yang sudah menerima Bantuan keuangan dari APBD antara lain:					
	- Parpol	11	13	13	13	13
	- Ormas	2	9	1	8	6
	- O K P	-	4	-	1	1

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab Bojonegoro, 2022.

Memberikan perlindungan masyarakat juga ada pada penanganan bencana baik bencana alam maupun non alam. Badan Penanggulangan

Bencana Daerah melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Capaian kinerja BPBD Kabupaten Bojonegoro diantaranya sebagai berikut.

Tabel 2. 58 Kinerja Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2018-2022

No	Indikator	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase pelayanan umum penanggulangan bencana daerah yang terlaksana sesuai kebutuhan	100%	100%	85,85%	85%	98,95%
2	Jumlah desa tangguh bencana	5 desa	5 desa	5 desa	5 desa	5 desa
3	Indeks Resiko Bencana	102,27	93,63	90,57	87,55	84,39

Sumber: BPBD Kabupaten Bojonegoro, 2022.

Sementara itu data perkembangan kejadian bencana kebakaran di Kabupaten Bojonegoro selama 2 (dua) tahun terakhir sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 59 Kejadian Bencana Kebakaran di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2022

No	Tahun	Lokasi	Jumlah Kejadian	Kerugian (Taksiran)
1	2019	27 kecamatan	224	4.540.400.000
2	2020	27 kecamatan	112	3.022.475.000
3	2021	24 kecamatan	150	5.314.805.000
4	2022	26 kecamatan	128	11.016.120.000

Sumber: Dinas Damkar Kabupaten Bojonegoro, 2022.

Dari tingginya jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten Bojonegoro selama tiga tahun terakhir, solusi yang dilakukan oleh Dinas Damkar Kabupaten Bojonegoro mengatasi permasalahan tersebut antara lain sinergitas Forkimka dan pihak kecamatan terkait penanganan kebakaran, peningkatan keterampilan kelompok peduli api di setiap desa, peningkatan kemampuan personil lapangan dan melaksanakan sosialisasi ke masyarakat tentang penanganan pencegahan kebakaran secara dini.

Sementara itu capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang ketenteraman ketertiban dan perlindungan masyarakat terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 60 Realisasi SPM Bidang Ketenteraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100	100	100	100	100
2	% Pelayanan informasi rawan bencana	100	100	100	100	100
3	% Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	100	100
4	% Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100	100
5	% Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100	100

Sumber: Satpol PP, Damkar dan BPBD Kabupaten Bojonegoro, 2022.

2.3.1.1.6. Bidang Sosial

Pembangunan urusan sosial diarahkan untuk peningkatan aksesibilitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terhadap pelayanan sosial dasar, peningkatan ketahanan sosial individu, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, penyandang cacat, eks kusta, keluarga miskin, wanita tuna susila dan komunitas masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial serta meningkatkan kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial, penanganan bencana alam dan jaminan kesejahteraan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Tabel 2. 61 Perkembangan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bojonegoro

No	Uraian	Sat	2019	2020	2021	2022
1	<i>Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</i>					
	▪ Anak Terlantar	Anak	1.420	945	945	928
	▪ Tuna Susila	Orang	34	32	32	34
	▪ Pengemis	Orang	71	68	68	71
	▪ Gelandangan	Orang	28	14	14	28
	▪ Korban Penyalahgunaan Narkotika	Orang	3	421	-	-
	▪ Anak Wanita dan Lanjut Usia Terlantar yang menjadi korban tindak kekerasan	Orang	2	5	5	-
	▪ Penyandang cacat dan penyakit kronis	orang	9.269	6.310	6.310	2.449
	▪ Lanjut usia produktif dan tidak produktif	Orang	11.916	10.924	10.924	12.103
	▪ Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Orang	6.197	5.433	5.433	4.990

No	Uraian	Sat	2019	2020	2021	2022
	▪ Keluarga Fakir Miskin	KK	86.809	99.744	99.744	82.532
	▪ Korban Bencana alam dan musibah lainnya	KK	6.921	745	1.000	742
	▪ Anak balita Terlantar	Orang	123	185	185	123
	▪ Anak jalanan	Orang	38	29	29	19
2	<i>Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial</i>					
	▪ Karang Taruna	Buah	430	430	430	430
	▪ Pekerja Sosial masyarakat	Orang	76	115	156	156
3	<i>Panti</i>					
	Panti Asuhan / LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak)	Unit	38	38	43	45

Sumber: Dinas Sosial Kab. Bojonegoro, 2022.

Penanganan PPKS di Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan, sehingga dapat menurunkan jumlah PPKS yang ada dari tahun 2019 ke tahun 2020. Penanganan PPKS pada tahun 2019 mampu menurunkan 0,6% jumlah PPKS yang ada, sedangkan tahun 2020 mampu menurunkan 0,74% dari jumlah PPKS yang ada. Peningkatan potensi dan sumber kesejahteraan sosial ditandai dengan peningkatan pekerja sosial masyarakat dari tahun 2019 sebanyak 76 orang menjadi 115 orang.

Terkait dengan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana Permendagri 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelerasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota disahkan melalui SK Bupati Nomor : 188/106/KEP/412.013/2021 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2023 yang mempunyai tugas melakukan koordinasi, perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro.

Sementara itu capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang sosial terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 62 Realisasi SPM Bidang Sosial

No	Indikator	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Persentase Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	38,99	6,41	92,38	100
2	Persentase Rehabilitasi sosial dasar anak	3,20	100	100	100

No	Indikator	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
	telantar di luar panti				
3	Persentase Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	29,08	100	100	100
4	Persentase Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	12,12	100	100	100
5	Persentase Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	91,43	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kab. Bojonegoro, 2022.

2.3.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari 18 (delapan belas) bidang yaitu 1). Tenaga kerja; 2). Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 3). Pangan; 4). Pertanahan; 5). Lingkungan hidup; 6). Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 7). Pemberdayaan masyarakat dan desa; 8). Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 9). Perhubungan; 10). Komunikasi dan informatika; 11). Koperasi, usaha kecil dan menengah; 12). Penanaman modal; 13). Kepemudaan dan olah raga; 14). Statistik; 15). Persandian; 16). Kebudayaan; 17). Perpustakaan; dan 18). Kearsipan.

2.3.1.2.1. Urusan Bidang Tenaga Kerja

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kualitas kerja produktif sebagai dasar perkembangan produktivitas tenaga kerja. Berkaitan dengan hal tersebut, tenaga kerja diharapkan mampu mengisi, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta memperluas kesempatan berusaha. Kondisi tentang ketenagakerjaan di Kabupaten Bojonegoro, perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 63 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2022

No	Uraian	Sat	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Penduduk	Orang	1.331.077	1.339.100	1.341.259	1.343.164

No	Uraian	Sat	2019	2020	2021	2022
2	Penduduk Bukan Usia kerja	Orang	295.388	302.408	289.005	279.035
3	Penduduk Usia Kerja	Orang	1.028.804	1.039.409	1.012.630	1.064.129
4	Angkatan Kerja	Orang	719.576	737.001	727.513	755.603
5	Angkatan Kerja tertampung	Orang	695.588	697.819	285.117	308.526
6	Pencari Kerja Terdaftar	Orang	2.351	1.170	1.549	2.063
7	Penganggur	Orang	23.724	41.255	35.057	28.758

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab Bojonegoro, 2022.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa potensi tenaga kerja sangat besar seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Hal ini membutuhkan penyerapan tenaga kerja yang besar pula melalui penciptaan peluang industri dan sektor ekonomi yang ada. Pada Tahun 2022 jumlah pengangguran turun sebesar 6.299 dari Tahun 2021.

Berdasarkan latar belakang mata pencaharian penduduk di Kabupaten Bojonegoro sebagian besar masih bekerja disektor pertanian. Kondisi ini dapat diamati sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 64 Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Latar Belakang Mata Pencaharian Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2022

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian	Orang	320.935	310.745	310.388	311.022
2	Buruh	Orang	125.180	115.080	114.723	115.342
3	Perdagangan	Orang	138.766	117.711	117.711	119.879
4	Industri	Orang	60.855	55.738	55.738	61.687
5	Jasa	Orang	160.545	160.004	159.647	162.072
6	Peg. Neg./ ABRI. Pensiunan	Orang	222.523	222.497	222.140	222.728
7	Tenaga Kerja Musiman	Orang				

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Bojonegoro, 2022.

2.3.1.2.2. Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan sangat diperlukan karena kualitas kehidupan perempuan masih jauh lebih rendah daripada laki-laki. Demikian pula halnya dengan anak, yang merupakan generasi penerus, perlu ditingkatkan kesejahteraan dan perlindungannya.

Secara umum, pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, tetapi berbagai permasalahan masih dihadapi, seperti masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta masih adanya kesenjangan pencapaian hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki, yang tercermin dari masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan ke layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan penyetaraan gender perlu adanya peningkatan SDM perempuan, sehingga menjadi insan yang mandiri agar tercapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Selain itu perlu partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pemberdayaan perempuan, serta peran lembaga-lembaga yang memiliki visi pemberdayaan perempuan terutama organisasi perempuan. Perkembangan peran Perempuan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 65 Perkembangan Peranan Perempuan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2022

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022
1	Peran serta Perempuan Dalam Pembangunan	Orang	41.507	41.092	40.569	40.974

Sumber: DP3AKB Kab Bojonegoro, 2022.

Perlindungan Perempuan dan Anak adalah upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Data kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Bojonegoro masih tinggi seperti dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 66 Perkembangan Peranan Perempuan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak	Kasus	20	20	23	35	35
2	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	Kasus	22	35	38	35	35

Sumber: DP3AKB Kab. Bojonegoro, 2022.

Berdasarkan tabel di atas kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan tahun 2018 sebanyak 20 kasus sementara tahun 2022 sejumlah 35 kasus, sementara itu untuk kekerasan terhadap perempuan meningkat juga mulai tahun 2018 sejumlah 22 kasus menjadi 35 kasus di tahun 2022. Kasus-kasus kekerasan di atas didominasi oleh kasus fisik, seksual dan psikis.

2.3.1.2.3. Urusan Bidang Pangan

Salah satu kinerja keberhasilan urusan pangan adalah dilihat dari indikator Pola Pangan Harapan atau PPH dan Angka Kecukupan Gizi (AKG). Pola Pangan Harapan merupakan susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. Sementara merupakan suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Skor pola pangan harapan dan AKG di Kabupaten Bojonegoro selama 5 (lima) tahun terakhir adalah.

Tabel 2. 67 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022

No	Uraian	Sat	2018	2019	2020	2021	2022
1	Skor Pola Pangan Harapan						
	- Ketersediaan		83,13	83,69	86,74	86,24	85,66
	- Konsumsi		85,70	84,60	82,10	82,10	84,40
2	Angka Kecukupan Gizi (AKG)	Kkal/ka/hari	110	103,1	100,8	101,5	106,6

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bojonegoro, 2022.

Ketersediaan Pangan di Kabupaten Bojonegoro tergolong cukup terlihat dari ketersediaan energi untuk dikonsumsi sebesar 3.035 kkal/kap per hari atau 137,9 % dari Angka Kecukupan Gizi (AKG) ditingkat ketersediaan sebesar 2.200 Kkal/kap/hari. Namun demikian besarnya ketersediaan energi tersebut masih didominasi dari kelompok pangan padi padian. Skor PPH ketersediaan sebagai penilaian mutu ketersediaan pangan sebesar 85,66. Konsumsi Pangan di Kabupaten Bojonegoro tergolong cukup dengan indikasi konsumsi energi sebesar 2.132 kkal/kap/hr atau sebesar 106,6 % dari Angka Kecukupan Gizi (AKG) ditingkat konsumsi sebesar 2.000 kkal/kap/hr.

Tingkat keberagaman konsumsi pangan tergambarkan dalam PPH Konsumsi Pangan sebagai indikator mutu pangan tercapai sebesar 84,4. Meskipun konsumsi energi sudah melebihi AKG namun keberagamannya perlu ditingkatkan utamanya konsumsi pangan hewani serta buah dan sayur. Distribusi Pangan di Kabupaten Bojonegoro tergolong lancar karena seluruh wilayah Desa/Kelurahan di Kabupaten Bojonegoro dapat dilalui kendaraan roda empat untuk angkutan distribusi pangan sepanjang tahun.

2.3.1.2.4. Urusan Bidang Pertanahan

Sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan tanah yang sah menurut hukum. Ada beberapa macam sertifikat hak atas tanah yang telah diklasifikasikan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, yaitu sertifikat hak milik (SHM) dan sertifikat hak guna bangunan. Adapun dengan berkembangnya pembangunan secara vertikal di perkotaan memunculkan sertifikat jenis baru yaitu sertifikat hak atas satuan rumah susun (SHSRS).

Kinerja urusan pertanahan pemerintah daerah sesuai Permendagri 86 tahun 2017 dapat dinilai dari dua indikator, antara lain lahan bersertifikat dan penyelesaian izin lokasi terkait kesesuaian pemanfaatan ruang maupun rekomendasi teknis IMB. Berikut adalah tabel perkembangan jumlah luas lahan bersertifikat dari tahun 2019-2022.

Tabel 2. 68 Perkembangan Lahan Bersertifikat Kabupaten Bojonegoro

Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021	2022
Jumlah Lahan Bersertifikat	Bidang	495	663	974	1.217
Jumlah lahan yang seharusnya bersertifikat	Bidang	757	684	373	130

Sumber: ATR / BPN Kantor Pertanahan Kab.Bojonegoro, 2022.

Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan lahan bersertifikat dari tahun 2019-2022. Hal ini menunjukkan kinerja BPN dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat melalui beberapa program. Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap(PTSL). PTSL adalah suatu

program serentak yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan hak atas suatu tanah milik masyarakat secara gratis.

Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP, ada peningkatan pemberian Izin Mendirikan Bangunan dari tahun 2018 hingga 2022. Berikut data perkembangan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tahun 2018-2022.

Tabel 2. 69 Perkembangan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun 2018-2022

Tahun	Jenis Perizinan	Jumlah
2018	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	155
2019	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	258
2020	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	410
2021	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	312**
2022	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	231

Sumber: DPMPTSP Kab.Bojonegoro, 2021.

2.3.1.2.5. Urusan Bidang Lingkungan Hidup

Salah satu keberhasilan pembangunan pada urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terletak pada Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKTL), Indek Kualitas Air (IKA), Indek Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). dimana untuk Indikator Kualitas Lahan di wakili oleh IKTL dikarenakan Kabupaten Bojonegoro tidak ada lahan gambut. Berdasarkan hasil perhitungan IKA dan IKU dari tahun 2018 hingga tahun 2020 terdapat peningkatan dan penurunan yang fluktuatif. Berikut ini Capaian IKA dan IKU Kabupaten Bojonegoro pada tiga tahun terakhir.

Tabel 2. 70 Indikator Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,89	69,01	72,38	64,95	68,25
2	Indeks Kualitas Air	71,25	76,25	75,56	51,21	55,12
3	Indeks Kualitas Udara	71,90	80,74	77,95	81,98	86,49
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	54,90	54,80	56,20	57,05	57,05

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab Bojonegoro, 2022.

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa secara umum Indek Kualitas Lingkungan Hidup mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar 64,89% dan

pada tahun 2022 sebesar 68,28%, hal tersebut dikarenakan faktor pendukung ketiga indeks mengalami kenaikan (IKA, IKU dan IKTL).

Selain Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKTL), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, pembangunan rendah karbon juga telah menjadi fokus pemerintah. Pembangunan rendah karbon merupakan kegiatan pembangunan yang rendah emisi. Emisi yang dimaksud adalah jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi atau proses produksi secara langsung atau tidak langsung dan proses lainnya dalam suatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam satuan ton CO₂ eq.

Kabupaten Bojonegoro telah melaksanakan dan melaporkan kegiatan penurunan emisi GRK melalui platform AKSARA. Berdasarkan kegiatan yang telah dilaporkan sejak 2019 hingga 2022 telah memiliki potensi dalam penurunan emisi sebesar 7.050,72 ton CO₂ eq. Beberapa kegiatan pembangunan rendah karbon yang telah dilaporkan antara lain penggunaan lampu hemat energi (LED), Car Free day, TPST/TPS3R, IPAL, penanaman pohon, penggunaan pupuk organik.

Sementara itu terkait pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan cara meningkatkan cakupan permukiman yang dilayani pengangkutan sampah dan meningkatkan sampah perkotaan yang terangkut ke TPA. Upaya tersebut telah meningkatkan volume sampah yang berhasil ditangani ditahun 2022 sebesar 20.370,48 ton atau 86,74% dari 23.484,13 ton volume sampah yang terkelola, sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut

Tabel 2. 71 Volume Sampah yang Terkelola dan Berhasil Di Tangani Tahun 2020 s/d 2022

No	Uraian	Sat	Tahun		
			2020	2021	2022
1	Volume sampah yang terkelola	Ton	11.768,12	12.595,16	23.484,13
2	Volume sampah yang berhasil ditangani	Ton	10.689,54	9.727,25	20.370,48

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab Bojonegoro, 2022

2.3.1.2.6. Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Keberhasilan pembangunan pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil salah satu penilaiannya adalah menjamin kepastian hukum kepada masyarakat melalui tertib administrasi kependudukan dengan menerbitkan akta-akta kependudukan sebagai status pendataan seseorang. Berikut di sajikan akta-akta dan dokumen kependudukan yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2022 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2. 72 Penerbitan Akta-Akta Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2022

No.	Jenis Akta	Jumlah			
		2019	2020	2021	2022
1	Kutipan Akta Perkawinan	45	41	46	35
2	Kutipan Akta Perceraian	9	5	5	7
3	Kutipan Akta Kelahiran	22.767	24.574	22.103	23.531
4	Kutipan Akta Kematian	922	5.130	11.366	12.185
5	Kutipan Akta Pengakuan Anak	-	1	1	3
6	Kutipan Akta Pengangkatan anak (Adopsi)	2	3	9	17
7	Kutipan Akta Pengesahan	-	8	14	22
8	Salinan Akta (Perkawinan, Perceraian, Kelahiran & Kematian)	-	-	-	-
9	Surat Keterangan, Kenal lahir, caping, izin perkawinan, dll	95	920	-	104
10	Kutipan Ke II	1.191	900	991	-
11	Perubahan Nama	-	36	39	62
12	Kutipan Ke II Perkawinan	1	2	-	2
13	Kesalahan Redaksional	1.253	921	1.092	948

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Bojonegoro, 2022.

Agar terwujud pelayanan administrasi kependudukan yang maksimal, bidang kependudukan terus berupaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan dokumen-dokumen kependudukan dalam Tahun 2019-2022 seperti yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 73 Penerbitan Dokumen Kependudukan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2022

No	Jenis Dokumen	Jumlah			
		2019	2020	2021	2022
1	Kartu Keluarga	437.203	76.730	437.203	443.981
2	Kartu Tanda Penduduk	61.769	98.591	1.009.991	1.015.370

No	Jenis Dokumen	Jumlah			
		2019	2020	2021	2022
	(KTP.el)				
3	Kartu Identitas Anak (KIA)	-	22.874	86.946	113.650

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Bojonegoro, 2022.

Selama Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mampu menyelesaikan permohonan dokumen 100%, pelayanan kartu keluarga Tahun 2022 mencapai 443.981 buah, KTP-el sebanyak 1.015.370 buah dan Kartu Identitas Anak sebanyak 113.650 buah. Dari 3 (tiga) dokumen tersebut semuanya mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya artinya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya identitas kependudukan semakin tinggi.

2.3.1.2.7. Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan proses membangun pola pikir dan kompetensi masyarakat desa agar menyamai masyarakat kota atau bahkan bisa melebihi mereka. Kinerja pembangunan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat dari Indikator Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun dikembangkan untuk memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan bertujuan untuk mengurangi jumlah desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri. Terdapat 5 (lima) status Indeks Desa Membangun yaitu sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju dan mandiri. Perkembangan status IDM Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 sampai dengan 2022 sebagai berikut.

Tabel 2. 74 Status IDM Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022

No	Status IDM	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Sangat Tertinggal	4	-	-	-	-
2	Tertinggal	79	19	-	-	-
3	Berkembang	299	323	210	62	13
4	Maju	34	74	171	254	251
5	Mandiri	3	3	38	103	155

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab Bojonegoro, 2022.

Dari tabel diatas terlihat status IDM di Kabupaten Bojonegoro dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, mulai tahun 2019 tidak ada desa dengan status sangat tertinggal dan mulai tahun 2020 tidak ada desa tertinggal. Jumlah desa status mandiri mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari 3 (tiga) desa ditahun 2018 menjadi 155 desa di tahun 2022.

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan melalui tiga cara yaitu pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas aparatur dan pengembangan BUMDesa bersama. Pembangunan infrastruktur desa dilaksanakan dengan sistem padat karya dengan melibatkan seratus persen tenaga dari lokal desa, sementara itu peningkatan kapasitas aparatur telah dianggarkan disetiap Tahun Anggaran melalui DPMD Kabupaten Bojonegoro, meskipun pelaksanaannya dilaksanakan secara bertahap mengingat yang termasuk Aparatur Pemerintahan Desa meliputi kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD. Selain itu peningkatan kapasitas yang dimaksud juga dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa sendiri yang dianggarkan melalui APBD Desa. Sementara itu keberhasilan BUMDesa dapat dilihat dari persentase lembaga ekonomi aktif (BumDes) kondisi eksisting Tahun 2021 sebesar 80%. Pada Tahun 2022 target 98 %, terealisasi sebesar 56,99%, sehingga target yang ditetapkan tercapai dengan tingkat capaian sebesar 58,15%.

2.3.1.2.8. Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Capaian kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat melalui indikator Laju Pertumbuhan Penduduk dan Angka *Total Fertility Rate* (TFR). Total Fertility Rate merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam ber-KB. Konsep Definisi TFR adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Berikut ini capaian laju pertumbuhan penduduk dan TFR Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 2. 75 Laju Pertumbuhan Penduduk dan Total Fertility Rate Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018–2021

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,37	0,37	0,36	0,29	0,44*
2	Total Fertility Rate	%	1,87	1,87	1,86	1,98*	1.94
3	Jumlah PUS	orang	295.669	291.163	206.438	215.892	226,453
4	Peserta KB Baru	orang	35.489	33.378	30.666	27.299	21.115
5	Peserta KB Aktif	orang	233.679	228.676	158.429	167.073	174,652
6	Peserta KB Mandiri	orang	96.466	90.469	56.310	57.090	52,888
7	Modern Contraceptive Prevalence Rate (MCPR)	%	79,03	78,54	76,74	77,38	77.13
8	Unmet Need KB	%	5,76	6,15	7,94	8,45	6.78
9	Age Specific Fertility Rate	%	39,92	27,49	27,49	-	28.7

*Angka Sementara

Sumber: Dinas P3AKB Kab Bojonegoro, 2022.

2.3.1.2.9. Urusan Bidang Perhubungan

Penyelenggaraan pemerintahan pada urusan perhubungan diukur dengan menggunakan satu indikator ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 76 Perkembangan Sarana dan Perlengkapan Jalan Kabupaten Tahun 2019-2022

No	Jenis/ sarana/ prasarana	Tahun /satuan	Jumlah		
			Total	Baik	Rusak
1	Rambu lalu lintas	2019/buah	1.278	1.278	-
		2020/buah	1.428	1.428	-
		2021/buah	1.629	1.629	-
		2022/buah	1.871	1.871	-
2	Traffic light	2019/buah	22	22	-
		2020/buah	22	22	-
		2021/buah	22	22	-
		2022/buah	25	25	-
3	Warning light	2019/buah	30	30	-
		2020/buah	31	31	-
		2021/buah	32	32	-
		2022/buah	43	43	-
4	Early warning system	2019/buah	4	4	-
		2020/buah	-	-	-
		2021/buah	-	-	-
		2022/buah	-	-	-
6	RPPJ	2019/buah	55	55	-
		2020/buah	71	71	-
		2021/buah	80	80	-
		2022/buah	103	103	-
7	Pelican Cross	2019/buah	7	7	-
		2020/buah	7	7	-

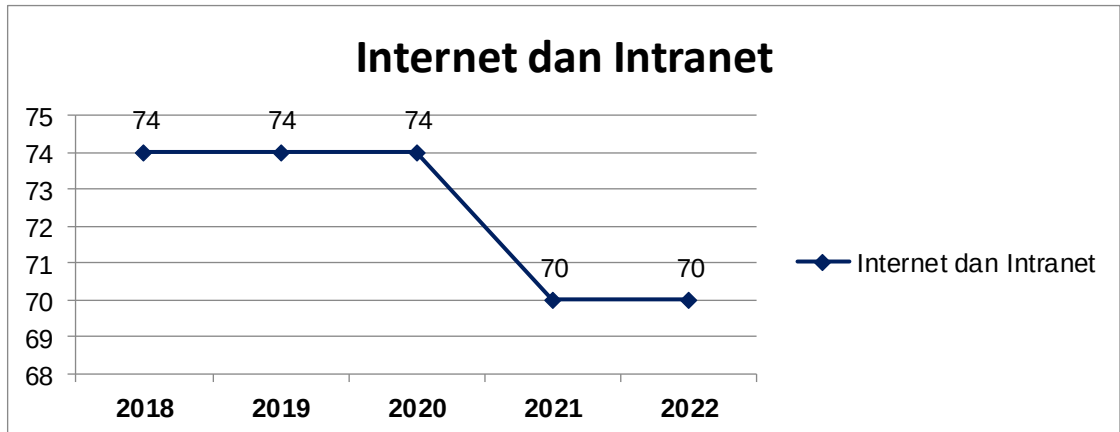
No	Jenis/ sarana/ prasarana	Tahun /satuan	Jumlah		
			Total	Baik	Rusak
		2021/buah	7	7	-
		2022/buah	9	9	-
8	ATCS (Area Traffic Control System)	2019/buah	1	1	-
		2020/buah	1	1	-
		2021/buah	3	3	-
		2022/buah	3	3	-
9	Guard Rail	2019/meter	2.000	2.000	-
		2020/buah	2.050	2.050	-
		2021/buah	2.050	2.050	-
		2022/buah	2.160	2.160	-
10	PJU Solar Cell Jalan	2019/buah	136	125	11
		2020/buah	136	125	11
		2021/buah	-	-	-
		2022/buah	-	-	-
11	PJU Solar Cell Tambangan	2019/buah	-	-	-
		2020/buah	22	22	-
		2021/buah	32	32	-
		2022/buah	32	32	-
12	Halte	2019/buah	28	28	-
		2020/buah	28	28	-
		2021/buah	28	28	-
		2022/buah	28	28	-
13	Cermin Tikung	2019/buah	-	-	-
		2020/buah	8	8	-
		2021/buah	8	8	-
		2022/buah	6	6	-
14	Patok Delineator	2019/buah	-	-	-
		2020/buah	30	30	-
		2021/buah	30	30	-
		2022/buah	30	30	-
15	Annauncer Voice	2019/buah	-	-	-
		2020/buah	7	7	-
		2021/buah	7	7	-
		2022/buah	7	7	-
16	CCTV	2019/buah	25	25	-
		2020/buah	26	26	-
		2021/buah	26	26	-
		2022/buah	27	27	-

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Bojonegoro, 2022.

2.3.1.2.10. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika

Teknologi mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan saat ini, khususnya dalam melakukan komunikasi serta berbagi informasi. Begitu pula bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dibutuhkan ketersediaan jaringan internet dan intranet yang memadai. Agar seluruh OPD dapat mengakses internet dengan cepat dan menginput data masing-masing melalui aplikasi dan website dengan lancar,

serta untuk mempermudah integrasi data di seluruh OPD, maka Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menyediakan layanan jaringan internet dan intranet kepada seluruh OPD melalui Dinas Komunikasi dan Informatika. Jumlah OPD yang terlayani internet dan intranet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro

Gambar 2. 15 Jumlah OPD yang terlayani internet dan intranet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika

Dari data diatas dapat diketahui bahwa seluruh OPD di Kabupaten Bojonegoro telah terlayani jaringan internet dan intranet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, terdapat penurunan jumlah OPD di tahun 2021 yakni dari 74 OPD menjadi 70 OPD karena terdapat beberapa OPD yang di merger (adanya perampangan Struktur Organisasi).

Sementara capaian indikator di tahun 2022 pada urusan Komunikasi dan Informatika meliputi indikator tujuan yakni Indeks SPBE tercapai 96,71% dengan kategori capaian **sangat tinggi**. Sedangkan untuk indikator sasaran Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan SPBE tercapai 100% dengan kategori capaian **sangat tinggi**.

2.3.1.2.11. Urusan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin

berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran.

Jumlah koperasi aktif pada Tahun 2018 di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 670 unit meningkat menjadi 748 unit di Tahun 2022. Peningkatan tersebut berdampak juga peningkatan persentase koperasi aktif terhadap jumlah koperasi, dimana pada tahun 2018 sebesar 53,09% menjadi 56,88% ditahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbaikan & perkembangan positif koperasi di Kabupaten Bojonegoro. Berikut ditampilkan grafik dan tabel perkembangan koperasi di Kabupaten Bojonegoro.

Tabel 2. 77 Perkembangan Jumlah Koperasi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 – 2022

Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Koperasi	1.262	1.264	1.276	1.302	1.315
Jumlah Koperasi Aktif	670	680	698	727	748
Persentase Koperasi Aktif (%)	53,09	53,80	54,70	55,83	56,88
Jumlah Koperasi yang bersertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi)	133	200	240	317	331
Persentase Koperasi yang bersertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi)	19,85	29,41	34,38	43,60	44,25

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Bojonegoro, 2022.

Sementara itu perkembangan sektor UMKM dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang ditandai dengan data tahun 2018 sampai dengan 2022 sebagai berikut:

Tabel 2. 78 Perkembangan Sektor UMKM Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah UMKM	78.506	79.030	78.012	80.637	86.860
Usaha Mikro	69.389	69.544	67.899	70.542	76.695
Usaha Kecil	8.242	8.512	9.131	9.131	9.143
Usaha Menengah	875	974	982	982	982

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Bojonegoro, 2022.

2.3.1.2.12. Urusan Bidang Penanaman Modal

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada urusan penanaman modal terlihat pada jumlah investasi yang ada di Kabupaten Bojonegoro, dimana

selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan dari 5,448 trilyun di tahun 2018 menjadi 11,358 trilyun di tahun 2020. Sementara untuk tahun 2021 investasi tanpa sektor migas sebesar 3,960 trilyun. Berikut Perkembangan Penanaman Modal baik Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Non PMA dan PMDN sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 79 Data Perkembangan PMA/PMDN dan Non PMA/PMDN Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	INVESTASI			JUMLAH TOTAL INVESTASI
		PMA	PMDN	NON PMA/PMDN	
1	Tahun 2018				
	Unit Usaha	1	941	2	944
	Investasi (Rp)	43.669.179.700	684.677.311.748	4.720.591.085.510	5.448.937.576.958
	Tenaga Kerja /Orang	1.520	3.598	1.673	6.791
2	Tahun 2019				
	Unit Usaha	2	4.786	4	4.792
	Investasi (Rp)	120.514.896.968	3.699.088.834.663	4.754.416.334.680	8.574.020.066.311
	Tenaga Kerja /Orang	3.022	22.135	1000	26.157
3	Tahun 2020				
	Unit Usaha	-	3,114	45	4.792
	Investasi (Rp)	-	5,878,821,798,693	5,479,403,681,014	11,358,225,479,707
	Tenaga Kerja /Orang	-	41,877	6,174	48,051
4	Tahun 2021				
	Unit Usaha	19	5.703	3	5.725
	Investasi (Rp)	368.584.623.943	5.789.988.679.913	5.727.151.200.013	11.885.724.503.869
	Tenaga Kerja /Orang	2.589	52.325	17.119	72.033
	Tahun 2022**				
	Unit Usaha	9	11.520	3	11.532
	Investasi (Rp)	65.564.828.831	3.982.623.789.603	5.727.151.200.013	9.775.339.818.447
	Tenaga Kerja /Orang	416	58.190	17.119	75.725

** Data Migas belum masuk

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kab. Bojonegoro, 2022.

Dari tabel diatas selama 5 tahun terakhir total investasi mengalami kenaikan kecuali tahun 2022 menurun dibandingkan tahun 2021, hal tersebut dikarenakan (1) belum adanya kawasan industri (2) adanya penetapan *Lahan Sawah Dilindungi (LSD)*.

2.3.1.2.13. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan Urusan Kepemudaan dan Olahraga diarahkan pada peningkatan peran pemuda dalam tahapan pembangunan dan menciptakan generasi muda untuk menjadi kader bangsa, yang bermoral, kreatif, inovatif dan prestatif serta meningkatkan peran di bidang keolahragaan dengan melakukan

pembinaan untuk menciptakan atlet- atlet yang berprestasi secara nasional dan internasional.

Pembinaan keolahragaan diarahkan pada pengembangan olahraga dengan berbagai cabang olahraga yang sudah tumbuh dan berkembang dimasyarakat. Sasaran pengembangan tersebut adalah terbentuknya manusia yang sportif, tangguh dan sehat disamping juga untuk pengembangan prestasi. Cabang olahraga yang telah berkembang di masyarakat Kabupaten Bojonegoro adalah 30 cabang olahraga sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 80 Perkembangan Jenis Cabang Olah Raga Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 – 2022

No	Jenis	Satuan	2019	2020	2021	2022
1	Pengurus Cabang Olahraga	Cabang	30	30	31	36
2	Sepak Bola (PSSI)	Club	35	41	41	41
3	Panahan (PERPANI)	Club	2	2	2	2
4	Atletik (PASI)	Club	5	5	5	5
5	Pencak Silat (IPSI)	Club	31	14	14	14
6	Sepak Takraw (PSTI)	Club	8	5	5	5
7	Tenis Lapangan (PELTI)	Club	32	20	20	20
8	Renang (PRSI)	Club	3	2	2	2
9	Catur (PERCASI)	Club	6	6	6	6
10	Selam (POSSI)	Club	3	1	1	1
11	Karate (FORKI)	Club	3	3	3	3
12	Tenis Meja (PTMSI)	Club	4	7	7	7
13	Panjat Tebing (FPTI)	Club	3	3	3	3
14	Bridge (GABSI)	Club	2	1	1	-
15	Judo (PJSI)	Club	4	1	1	1
16	Kempo (PERKEMI)	Club	1	3	3	3
17	Drum Band (PDBI)	Club	20	20	20	20
18	Bola Voli (PBVSI)	Club	29	12	12	15
19	Bola Basket (PERBASI)	Club	8	4	4	3
20	Bulu Tangkis (PBSI)	Club	31	4	4	4
21	Menembak (PERBAKIN)	Club	1	3	1	-
22	PERWOSI	Kelompok	1	3	3	28
23	Angkat Besi	Club	25	31	31	1
24	Binaraga	Club	2	0	3	1
25	Angkat Berat (PABBSI)	Club	3	5	5	1
26	Sport Sepeda (ISSI)	Club	2	0	3	3
27	Taekwondo	Club	3	5	5	5
28	APSI	Club	2	4	4	4
29	Pentaque	Club	2	3	3	3
30	Rugby	Club	2	4	4	4
31	Jujitsu	Club	1	1	1	1
32	Anggar	Club	1	1	1	1
33	FASI (Aero Modeling)	Club	1	1	1	1
34	Wushu	Club	-	-	-	2

No	Jenis	Satuan	2019	2020	2021	2022
35	Tarungdrajat	Club	-	-	-	2
36	Gateball	Club	-	-	-	1
37	Pikelball	Club	-	-	-	1

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab Bojonegoro, 2022.

Prasarana olahraga di Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2020 mengalami perkembangan yang cukup baik. Terutama untuk lapangan sepak bola dan lapangan bola volly yang mengalami kenaikan jumlah prasana terbanyak dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Adapun perkembangan jumlah prasarana olahraga di Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 81 Jumlah Prasarana Olahraga di Kabupaten Bojonegoro

No	Uraian	Sat	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Stadion	Buah	1	1	1	1	1
2	Gedung Olahraga	Unit	10	11	11	11	10
3	Lapangan Sepak Bola	Buah	66	92	95	95	158
4	Lapangan Tennis	Buah	12	12	12	12	12
5	Lapangan Volly Ball	Buah	76	100	110	110	155
6	Lapangan Basket	Buah	19	19	19	19	19
7	Lapangan Takraw	Buah	9	9	9	9	9
8	Kolam renang	Buah	12	12	14	14	24
9	Lapangan Pentaque	Lapangan	12	12	12	12	12

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab Bojonegoro, 2022

Pembangunan prasarana olahraga diharapkan sebanding prestasi atlet olahraga tersebut. Atlet berprestasi di Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 sampai dengan 2022 secara umum meningkat yaitu tahun 2018 sejumlah 63 atlet sedangkan tahun 2022 sejumlah 79 atlet, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 82 Jumlah Atlet Berprestasi Tahun 2019-2022 di Kab. Bojonegoro

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2019	2020	2021	2022
1	Atlet berprestasi	orang	63	17	44	79

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab Bojonegoro, 2022

Sementara itu untuk urusan kepemudaan indikator kinerja meliputi jumlah pemuda yang dibina dan pemuda yang berprestasi. Jumlah pemuda yang dibina merupakan pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan. Berikut ini

Tabel 2. 83 Persentase Pemuda yang mendapat Pelatihan Tahun 2019 – 2022

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022
Persentase pemuda yang dibina	%		0,16	0,29	0,38

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab Bojonegoro, 2022

Sedangkan perkembangan pemuda berprestasi di Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 84 Persentase Pemuda Berprestasi Tahun 2019 - 2022 di Kabupaten Bojonegoro

No	Uraian	Sat	Tahun			
			2019	2020	2021	2022
1	Pemuda berprestasi	%	20,12	66,67	61,64	26,51

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab Bojonegoro, 2022

2.3.1.2.14. Urusan Bidang Statistik

Statistik merupakan basis dasar yang diperlukan untuk perencanaan daerah. Tentunya semua bentuk perencanaan akan bertolak dari kondisi statistik pembangunan yang disajikan ke dalam data yang terstruktur. Oleh karena itu, semestinya buku statistik ini dapat terinformasikan secara progresif. Kendati buku statistik yang dibutuhkan belum lengkap, akan tetapi data semestinya disajikan secara progresif hingga satu bulan terakhir dalam setiap perjalanan waktu. Namun, sebaliknya yang terjadi, seringkali buku statistik terbit harus lengkap, sehingga data yang dijadikan dasar perencanaan menjadi kurang update.

Untuk mengolah data statistik, diperlukan indikator yang sesuai. Indikator pada aspek statistik meliputi tersedianya buku Kabupaten Bojonegoro dalam Angka dan buku PDRB Kabupaten Bojonegoro. Kedua dokumen tersebut telah terpenuhi.

Tabel 2. 85 Indikator Aspek Statistik Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dokumen Kabupaten Bojonegoro dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	PDRB Kabupaten Bojonegoro	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: BPS Kab. Bojonegoro, 2018 s.d. 2022.

Tabel di atas hanya menginformasikan bahwa buku statistik Kabupaten Bojonegoro telah tersedia, tetapi belum menjawab kebutuhan pengukuran dari indikator jumlah eksemplar buku yang tersedia. Sementara itu, tentunya penerbitan buku statistik ini merupakan pekerjaan yang melekat sebagai fungsi wajib yang harus dijalankan, yang bersifat periodik, dengan batasan anggaran yang jelas.

2.3.1.2.15. Urusan Bidang Persandian

Pengelolaan persandian di pemerintah daerah akan meningkatkan pengamanan data dan membantu fungsi pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, terhadap ancaman berupa interupsi, intersepsi, modifikasi, serta fabrikasi data dan informasi. Pengaturan persandian di pemerintah daerah diantaranya mengatur tata kelola persandian baik di pusat maupun di daerah, koordinasi persandian, penetapan informasi berklasifikasi, standar pengamanan sistem dan jaringan sandi, serta kualifikasi sumber daya manusia sandi. Tujuan kegiatan persandian diarahkan untuk menjaga kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), keaslian (*authentication*), dan tidak ada pengingkaran (*non repudiation*) informasi yang disandikan.

Pelaksanaan pembangunan urusan persandian di Kabupaten Bojonegoro diwujudkan dalam program pengembangan data/informasi persandian, yang terdiri dari dua kegiatan yaitu pengamanan komunikasi dan informasi, serta penyelenggaraan keamanan informasi

2.3.1.2.16. Urusan Bidang Kebudayaan

Salah satu kinerja pembangunan pada urusan Kebudayaan di Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat dari capaian kinerja cagar budaya yang dilestarikan meliputi *benda, Struktur, Bangunan, Situs dan Kawasan*, dapat dilihat sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 86 Jumlah Cagar Budaya di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2022

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022
1	Benda	Buah	7	7	7	7
2	Struktur	Buah	4	4	4	4
3	Bangunan	Buah	5	5	5	5
4	Situs	Buah	10	10	10	10

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022
5	Kawasan	Buah	0	0	0	0
Jumlah			26	26	26	26

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab Bojonegoro, 2022.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah cagar budaya di Kabupaten Bojonegoro masih sedikit, salah satu faktor adalah belum optimalnya pelestarian cagar budaya tersebut.

2.3.1.2.17. Urusan Bidang Perpustakaan

Kinerja pembangunan urusan perpustakaan dapat diketahui dari perkembangan perpustakaan yaitu dilihat dari jumlah pengunjung. Dimana pada tahun 2019 sebanyak 14.258 orang menjadi 9.622 orang ditahun 2020 kemudian tahun 2021 menurun lagi menjadi 5.027, ini terjadi karena wabah pandemi Covid-19 yang membuat perpustakaan di tutup untuk menghindari wabah tersebut. Sedangkan koleksi buku yang tersedia pada tahun 2019 sejumlah 36.107 eksemplar meningkat pada 2020 meningkat menjadi 37.495 eksemplar, sementara tahun 2021 kembali meningkat menjadi 38.084 eksemplar. Adapun jumlah perpustakaan desa pada tahun 2019 dan 2020 sejumlah 267 unit turun di 2021 menjadi 246 unit. Sedangkan SDM pengelola perpustakaan desa dan sekolah pada tahun 2022 sebesar 1.106 meningkat 541 orang dibandingkan tahun 2019.

Tabel 2. 87 Perkembangan Perpustakaan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2022

No	Uraian	Satuan	Perkembangan			
			2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pengunjung	Orang	14.258	9.622	5.027	7.810
2	Koleksi buku yang tersedia	Eksemplar	36.107	37.495	38.084	39.062
3	Jumlah Perpustakaan desa	Unit	267	267	246	208
4	SDM Pengelola Perpustakaan desa, sekolah	Orang	565	665	665	1.106

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab Bojonegoro, 2022.

2.3.1.2.18. Urusan Bidang Kearsipan

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN), Arsip adalah segala kertas, berkas, naskah, foto, film, mikro film, rekaman suara, gambar peta,

bagan atau dokumen lain dalam segala macam bentuk dan sifatnya atau salinan serta dengan segala cara penciptaanya, dan yang dihasilkan atau diterima oleh suatu badan, sebagai bukti dari tujuan organisasi, fungsi-fungsi kebijakan. Kebijakan, keputusan-keputusan, prosedur-prosedur, pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan lain pemerintah atau karena pentingnya informasi yang terkandung di dalamnya. Mengingat jumlah arsip yang semakin banyak dibuat dan diterima oleh lembaga, organisasi maupun badan, maka diperlukan manajemen pengelolaan arsip yang dikenal dengan sistem kearsipan melalui beberapa pekerjaan atau kegiatan untuk mengelola arsip yang ada.

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada urusan wajib kearsipan ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 88 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Kearsipan

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022
1	Tenaga Arsiparis	Orang	-	-	1	2
2	Tenaga Teknis Pengelola Kearsipan	Orang	842	932	932	932
3	Perangkat Daerah mendapatkan Supervisi Pengelola Arsip Dinamis	PD	-	11	31	31
4	Perangkat Daerah mendapatkan Supervisi Pengelola Arsip Dinamis	PD	-	11	31	31
5	Arsip Statis	Dokumen	572	650	717	717
6	Arsip Dinamis	Dokumen	12.110	16.064	16.137	17.943
7	Arsip Terlindungi	Dokumen	4	10	13	13
8	Arsip telah diduplikat dalam bentuk informatika	Dokumen	4	10	13	15

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab Bojonegoro, 2022.

2.3.1.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Pada fokus pelayanan urusan pilihan ada enam urusan yaitu Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi.

2.3.1.3.1. Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan

Pembangunan perikanan di Kabupaten Bojonegoro dilakukan melalui peningkatan efisiensi, produksi dan produktivitas usaha tani yang berbasis perikanan, meningkatkan investasi sub sektor perikanan serta mutu dan daya saing produk-produk perikanan. Selain itu kemampuan mengelola kelestarian sumber daya dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga perlu ada peningkatan guna menciptakan iklim usaha perikanan yang kondusif.

Pembangunan di sektor perikanan ditujukan pada peningkatan perluasan lahan perikanan, peningkatan produktivitas, peningkatan konsumsi ikan, peningkatan pendapatan, penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha di bidang perikanan. Upaya yang telah dilakukan adalah pengembangan perikanan darat (budi daya dan perairan umum).

Hasil kegiatan pembangunan perikanan, telah dapat memberikan motivasi terhadap pengembangan perikanan dengan pola budidaya. Produksi perikanan di Kabupaten Bojonegoro diperoleh dari hasil budidaya dan penangkapan dari perairan umum (sungai, waduk, dan lain-lain). Di bidang perikanan, walaupun perkembangannya belum sesuai yang diharapkan, namun telah memberikan peluang untuk memperoleh kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

Kontribusi pendapatan di bidang perikanan belum menunjukkan nilai yang memadai jika dibandingkan dengan bidang lainnya, kondisi ini dikarenakan oleh sistem penangkapan dan budidaya masih dilakukan dengan teknologi yang sangat sederhana.

Perkembangan budidaya perikanan dalam kurun waktu Tahun 2019 sampai Tahun 2022 memiliki luas lahan yang tetap hal ini disebabkan karena tidak ada penambahan lokasi baru, baik kolam, sawah tambak maupun waduk untuk meningkatkan produksi ikan, masyarakat pembudidayaan ikan menggunakan teknis intensifikasi yaitu meningkatkan padat tebar benih ikan. Perkembangan produksi perikanan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 89 Perkembangan Produksi Perikanan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2019	2020	2021	2022
1	<i>Penangkapan</i>		1.040,20	1.071,40	1.089,00	1.113,78
	Sungai	Ton	774,70	794,70	796,50	795,90
	- Waduk	Ton	265,20	276,70	292,50	317,88
2	<i>Budidaya</i>		4.398,65	4.573,74	4.713,58	4.875,20
	- Kolam	Ton	4.121,51	4.268,72	4.424,35	4.603,21
	- Mina Padi	Ton	257,81	282	269,67	245,69
	- Jaring Apung	Ton	19,34	23,01	19,57	26,30

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kab.Bojonegoro, 2022.

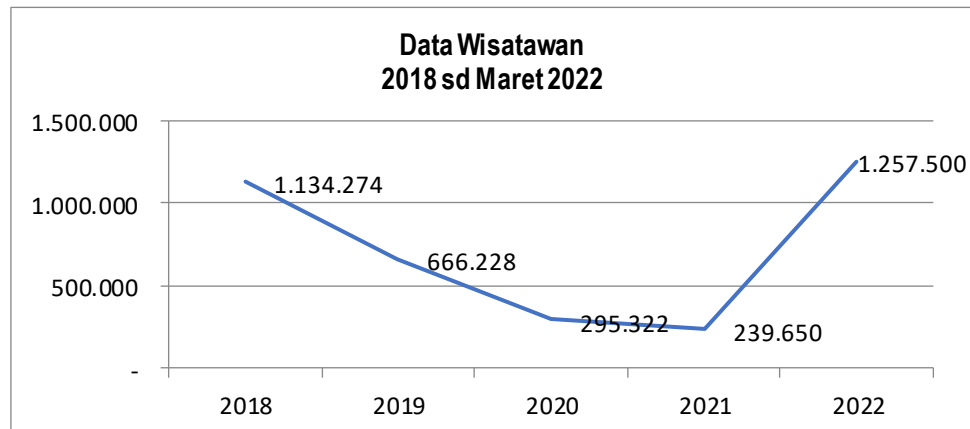
Produksi perikanan pada perikanan tangkap di Sungai mengalami peningkatan sebesar dimana pada tahun 2019 sebesar 774,70 ton meningkat di tahun 2020 menjadi sebesar 794,70 ton dan tahun 2022 sebesar 796,90 ton, demikian juga pada waduk mengalami peningkatan juga, hal ini disebabkan bantuan tebar benih dari Provinsi dan APBD. Produksi perikanan budidaya secara umum mengalami peningkatan dimana tahun 2019 sebesar 4.398,65 ton meningkat di tahun 2022 menjadi sebesar 4.875,20 ton. Peningkatan produksi perikanan budidaya dikarenakan peningkatan produksi pada sektor kolam.

2.3.1.3.2. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang kedepannya diharapkan dapat memberi kontribusi besar terhadap PDRB maupun peningkatan PAD. Sektor pariwisata akhir-akhir ini terlihat menggeliat, terutama dipengaruhi oleh promosi secara tidak langsung pada media sosial. Tak dapat dipungkiri bahwa maraknya media sosial memberikan efek positif bagi pengembangan wisata di Kabupaten Bojonegoro. Untuk itu pemerintah terus berbenah dan berupaya mengembangkan destinasi wisata baru.

Kinerja pembangunan pada urusan pariwisata diukur dengan menggunakan satu indikator, yaitu peningkatan wisatawan. Perkembangan indikator ini mulai tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami pasang surut terutama pada masa pandemic covid 19 yaitu tahun 2020 mengalami penurunan kunjungan wisata yang sangat drastis yaitu dari 666.228 wisatawan di tahun 2019 turun menjadi 295.322 wisatawan di tahun 2020 dan turun

kembali ditahun 2021 menjadi 239.650 wisatawan. Pada Tahun 2022 jumlah wisatawan naik menjadi 1.257.500 wisatawan. Berikut data kunjungan wisatawan tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.



Gambar 2. 16 Jumlah Wisatawan Tahun 2018 – 2022

2.3.1.3.3. Urusan Bidang Pertanian

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan pada Urusan Pertanian di Kabupaten Bojonegoro diukur dengan indikator produktivitas tanaman pangan dan perkembangan populasi ternak. Berikut ini Perkembangan Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan perkembangan populasi ternak di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 sampai dengan 2022 sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2. 90 Perkembangan Produksi Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022

No	Jenis Komoditi	2018 (Ton)	2019 (Ton)	2020 (Ton)	2021 (Ton)	2022 (Ton)
1	Padi	821.743	781.287	819.097	824.722	870.517,44
2	Jagung	242.587	334.069	274.014	311.685	336.799,07
3	Kedelai	17.069	9.223	14.594	21.390	16.218,47
4	Ubi Kayu	56.557	43.880	30.080	23.217	21.322,48
5	Ubi Jalar	2.090	2.348	1.330	3.304	1.616,00
6	Kacang Tanah	9.606	3.146	2.427	4.617	7.294,54
Hortikultura :						
7	Sayur – sayuran					
	a. Bawang Merah	18.032	27.108	35.679	36.102	33.669,48
	b. Kacang Panjang	300	131	253	124,62	235,10
	c. Cabe Rawit	24.615	25.637	20.454	2.403,15	4.176,80
	d. Tomat	218	215	844	588,40	397,90
	e. Terong	12.112	7.796	6.494	5.062,40	8.309,80
9	Buah - buahan:					

No	Jenis Komoditi	2018 (Ton)	2019 (Ton)	2020 (Ton)	2021 (Ton)	2022 (Ton)
	a. Belimbing	3.507	2.463	1.742	1.095,40	2.119,10
	b. Mangga	45.616	40.755	37.145	37.529,45	66.570,56
	c. Pisang	249.638	236.616	212.385	60.920,31	219.099,60
	d. Salak	24.663	3.062	1.620	9.445,85	9.439,60
	e. Jambu Biji	9.562	12.947	9.106	22.320,50	49.793,90
10	Perkebunan:					
	Tembakau	10.511,79	5.917,94	11.647,40	14.317,9	11.167,50
	Kelapa	64,88	33,5	22,89	18,4	17,80
	Tebu	128.769,25	92.726,35	92.816	120.183,63	119.601,23

Sumber: Dinas Pertanian Kab.Bojonegoro, 2022.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa komoditi utama pertanian yang menjadi penopang kebutuhan hidup mengalami peningkatan yaitu padi dan jagung. Produksi meningkat dari 824.722 ton di tahun 2021 menjadi 870.517 ton sementara itu produksi jagung juga mengalami peningkatan yaitu 311.685 ton di tahun 2021 menjadi 336.799 ton di tahun 2022. Produksi kacang tanah juga mengalami peningkatan. Sementara itu produksi yang menurun yaitu kedelai, ubi kayu dan ubi jalar, penurunan tersebut dikarenakan animo petani untuk menanam tanaman tersebut menurun disamping musim penghujan mendominasi disepanjang tahun 2022. Sementara sektor hortikultura baik sayuran maupun buah-buahan mengalami peningkatan kecuali buah tomat dan salak dikarenakan intensitas hujan yang tinggi dan berkurangnya lahan produksi salak. Sektor perkebunan produksinya menurun semua dikarenakan disamping intensitas hujan yang tinggi juga animo petani untuk menanam tanaman tersebut menurun.

Tabel 2. 91 Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022

No	Uraian	Sat	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	<i>Ternak Besar</i>						
	- Sapi	Ekor	231.120	240.665	249.624	258.563	274.253
	- Sapi Perah	Ekor	25	19	32	22	17
	- Kerbau	Ekor	857	540	344	369	354
	- Kuda	Ekor	110	87	61	39	37
2	<i>Ternak kecil</i>						
	- Kambing	Ekor	135.570	142.293	149.826	154.758	159.496
	- Domba	Ekor	169.990	181.075	189.515	198.149	197.259
3	<i>Ternak unggas</i>						
	- Ayam ras	Ekor	1.934.755	2.175.600	2.302.150	2.392.699	2.738.720

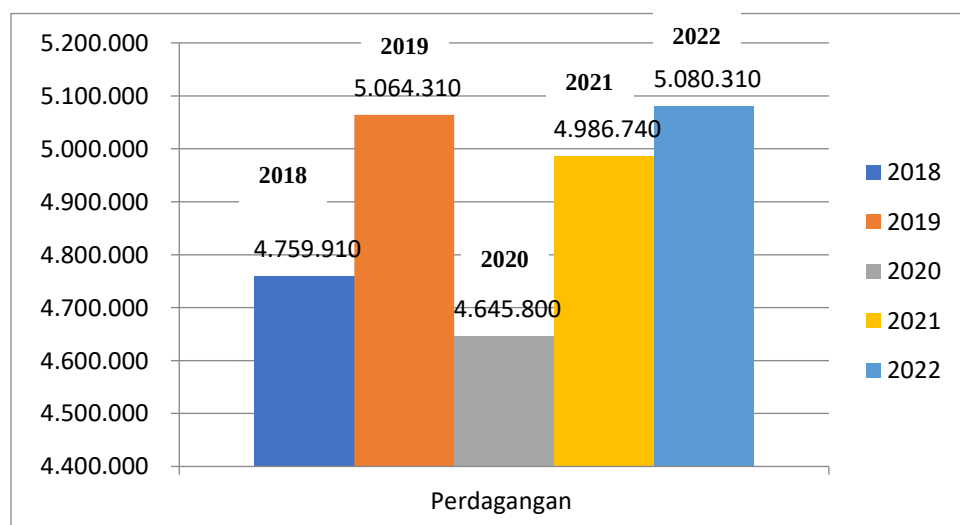
No	Uraian	Sat	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
	pedaging						
	- Ayam ras petelor	Ekor	68.242	98.601	104.559	107.495	124.675
	- Ayam buras	Ekor	1.578.729	1.599.145	1.613.526	1.633.128	1.716.896
	- Itik	Ekor	95.375	95.757	98.222	73.490	73.923
	- Mentok	Ekor	50.094	50.219	36.064	54.908	55.259

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kab.Bojonegoro, 2022.

Berdasarkan data diatas populasi ternak mengalami peningkatan kecuali sapi perah, kerbau, kuda dan domba. hal tersebut dikarenakan animo petenak terhadap hewan ternak tersebut menurun.

2.3.1.3.4. Urusan Bidang Perdagangan

Kinerja pembangunan pada urusan perdagangan, diukur dengan menggunakan satu indikator yaitu persentase pertumbuhan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Perkembangan realisasi indikator ini selama 2018-2022 sebagai berikut.



Gambar 2. 17 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (dalam jutaan)

Dari grafik di atas selama 5 (lima) tahun kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB mulai tahun 2018 sampai dengan 2022 naik yaitu tahun 2018 sebesar 4,759 trilyum menjadi 5.080 trilyun di tahun 2022,

meskipun tahun 2019 sampai dengan 2021 mengalami fluktuatif. Dimana tahun 2020 menurun dibanding 2019 dikarenakan pandemi covid 19.

Sementara itu kinerja sektor perdagangan juga dapat diketahui dari seberapa perkembangan nilai ekspor dan impor. Berikut ini nilai ekspor dan impor Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 92 Perkembangan Data Ekspor dan Impor Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2022

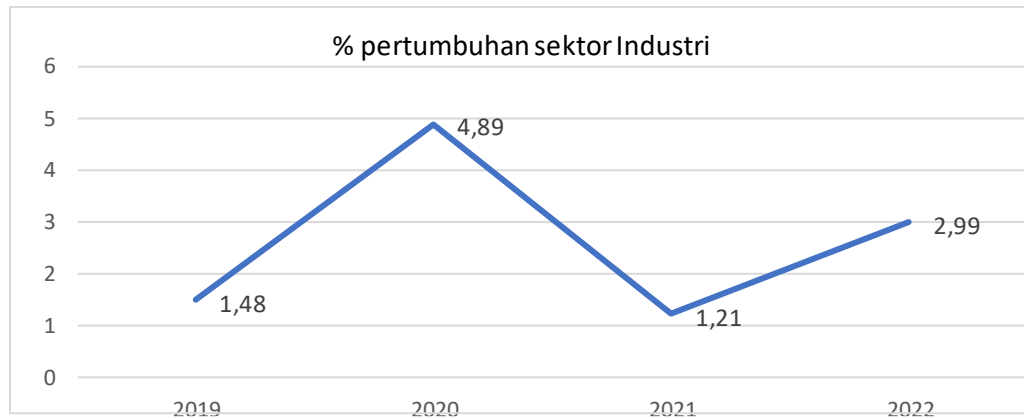
No	Uraian	Sat	Tahun			
			2019	2020	2021	2022
1	Nilai Ekspor	USD	24.701.708	38.999.624	1.601.283.686	1.200.892.492
2	Nilai Impor	Rp	304.475.360	316.675.660	48.320.106.258	1.888.490.515.524

Sumber: Dinas Perdagangan Koperasi dan UM

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa nilai ekspor tiap tahun mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar USD 24.701.708 menjadi USD 1.200.892.492, hal tersebut menunjukkan kinerja perdagangan yang semakin meningkat, disisi lain nilai impor juga mengalami kenaikan khususnya kenaikan yang signifikan di tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021. Dari data tersebut jelas bahwa tahun 2022 nilai impor lebih tinggi dari nilai ekspor menunjukkan terjadinya defisit perdagangan.

2.3.1.3.5. Urusan Bidang Perindustrian

Kinerja pelaksanaan pembangunan pada urusan perindustrian diukur dengan menggunakan indikator persentase pertumbuhan sektor industri dengan kondisi eksisting tahun 2019 sebesar 1,48% tahun 2020 sebesar 4,89% dan tahun 2021 sebesar 1,21% sementara tahun 2022 naik menjadi 2,99%.



Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Gambar 2. 18 Persentase Pertumbuhan Sektor Industri

Sementara itu untuk unit usaha industri pengolahan terdapat dua kelompok yaitu pertama kelompok industri kimia, agro dan hasil hutan kelompok kedua industri logam, mesin elektro dan aneka. Jumlah kelompok unit usaha dan penyerapan tenaga kerja serta kontribusi pendapatan kedua kelompok tersebut sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 93 Jumlah unit usaha sektor industri tahun 2018-2022

No	Uraian	Sat	Tahun			
			2018	2019	2020	2021
1	Industri kimia, agro dan hasil hutan	Unit usaha	24.505	24.889	9.388	8.372
		Orang (Tenaga Kerja)	73.154	73.922	27.905	24.865
		Pendapatan (Juta)	2.809.768	2.981.163	730.284	650.722
2	Industri logam, mesin elektro dan aneka	Unit usaha	2.357	2.915	1.952	3.105
		Orang (Tenaga Kerja)	5.771	6.608	5.680	9.005
		Pendapatan (Juta)	401.394	425.879	78.787	124.901

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Dari tabel diatas terjadi penurunan baik unit usaha maupun penyerapan tenaga kerja maupun kontribusi pendapatan dari kedua kelompok tersebut dikarenakan disamping kondisi perekonomian karena covid 19 juga karena keterbatasan modsal usaha.

2.3.1.3.6. Urusan Bidang Transmigrasi

Transmigrasi merupakan suatu program yang dibuat oleh pemerintah untuk memindahkan penduduk dari daerah yang padat penduduk ke daerah lain dalam wilayah Indonesia. Tujuan program ini adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di Pulau Jawa, memberikan kesempatan bagi orang yang mau bekerja, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di pulau-pulau lain seperti Papua, Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi. Urusan transmigrasi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.

2.3.1.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Penunjang urusan pemerintahan terdiri dari perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta fungsi lainnya.

2.3.1.4.1. Unsur Perencanaan

Keberhasilan pelaksanaan fungsi perencanaan diukur dengan menggunakan tiga indikator yaitu persentase konsistensi program dalam dokumen Renstra dengan Renja, persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD dan persentase konsistensi program RKPD ke dalam Renja PD.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota wajib menyusun dokumen perencanaan yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tingkat keselarasan antara Program RKPD dan RPJMD senantiasa mencapai 100% selama periode 2018-2023. Selengkapnya penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada bidang Perencanaan ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 94 Capaian kinerja urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase konsistensi program dalam dokumen Renstra dengan Renja	90	97,63	100	100	100
2	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	90	97,63	100	100	100
3	Persentase konsistensi program RKPD ke dalam Renja PD	100	100	100	100	100

Sumber: Bappeda Kab. Bojonegoro, 2022.

Disamping tugas dan fungsi Bappeda sebagai koordinasi perencanaan untuk sumber pembiayaan APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur dan APBN juga untuk sumber pembiayaan yang lain, salah satunya adalah koordinasi terkait *Corporate Sosial Rensponsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Jenis kegiatan CSR di Kabupaten Bojonegoro meliputi kegiatan fisik dan non fisik, sedangkan bidang kegiatannya yaitu bidang sarana prasarana, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, sosial dan pengentasan kemiskinan. Selama 5 (lima) tahun terakhir perusahaan pelaksana CSR antara lain ExxonMobile Cepu Limited, Pertamina Zona 11 dan 12, PT. Asri Dharma Sejahtera, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bojonegoro, PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro dan PT. BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur Cabang Bojonegoro.

2.3.1.4.2. Unsur Keuangan

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada fungsi keuangan, dinilai dengan menggunakan satu indikator, yaitu Hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Indikator Hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik terutama dalam bidang pengelolaan

keuangan daerah. Sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 Kabupaten Bojonegoro mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah. Tentu saja prestasi ini membanggakan dan harus senantiasa dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya, sehingga sampai pada tahun terakhir periode RPJMD dapat tercapai targetnya.

Tabel 2. 95 Capaian Kinerja Urusan Penunjang Keuangan Kabupaten Bojonegoro 2017-2021

No	Indikator	Capaian Kinerja					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Hasil opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPKAD Kab. Bojonegoro, 2022.

2.3.1.4.3 Unsur Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Sejalan dengan diterapkannya sistem desentralisasi, dimana pemerintah memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan, dilakukan berbagai upaya untuk mengembangkan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur.

Selanjutnya dengan bergulirnya reformasi, memberikan dorongan untuk melakukan perubahan pada SDM aparatur, yang dikenal dengan istilah reformasi birokrasi. Reformasi Birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan perubahan terencana terhadap tatanan penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam aspek penataan kelembagaan, penataan ketatalaksanaan, dan penataan manajemen sumber daya manusia aparatur. Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro diukur dengan *Indeks Profesionalitas ASN*, dimana capaian selama 3 tahun terakhir sebagai berikut.

Tabel 2. 96 Capaian Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2021

No	Indikator	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Indeks Profesionalitas ASN	58,33	63,61	64,74	53,18

Sumber: BKPP Kab. Bojonegoro, 2022.

Indeks Profesionalitas ASN semakin meningkat hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan, kompetensi, kinerja dan kinerja ASN semakin tahun juga semakin meningkat, kecuali tahun 2022 menurun sebesar 53,18 dikarenakan kurangnya peningkatan kapasitas ASN.

Sementara itu Indeks Reformasi Birokrasi di kabupaten Bojonegoro terus mengalami peningkatan, dimana berdasarkan evaluasi Kemenpan RB pada tahun 2020 sebesar 58,30 meningkat di tahun 2021 menjadi 60,64 dan tahun 2022 meningkat tajam sebesar 64,14. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan.

2.3.1.4.4 Unsur Penelitian dan Pengembangan

Urusan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Bojonegoro belum berdiri sendiri masih menjadi satu di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang di pimpin oleh Kepala Bidang. Indikator kinerja keberhasilan pembangunan urusan penelitian dan kelitbangan diukur dengan persentase hasil kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan, dimana capaian selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut.

Tabel 2. 97 Capaian Indikator Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase hasil kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	72	73,68	80	85	90

Sumber: Bappeda Kab Bojonegoro, 2022.

Dokumen kajian disusun Bappeda setiap tahun terjadi peningkatan dalam pemanfaatan pengambilan kebijakan semakin meningkat, hal tersebut terlihat dalam tabel di atas dimana tahun 2018 sejumlah 72% terakhir tahun 2021 sejumlah 85%.

2.3.1.5. Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan

2.3.1.5.1. Sekretariat Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan pada fungsi lainnya yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, antara lain menggunakan indikator kinerja Indeks

Kerukunan Beragama, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM). Capaian indikator tersebut yaitu berikut.

Tabel 2. 98 Capaian Indikator IKM Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2021

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	SAKIP	B	B	B	B	BB
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,23	3,28	3,82	3,54	3,33
3	Indeks Kerukunan Beragama	70	74,33	77,31	78,69	80,55

Sumber: Sekretariat Daerah Kab. Bojonegoro, 2022.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam rangka tercapainya kondusivitas kehidupan beragama yang ditandai dengan Indek Kesalehan Sosial (Indikator Provinsi Jawa Timur). Maka untuk mendukung tersebut dalam dokumen perencanaan telah ditetapkan Indeks Kerukunan Beragama sebagaimana tabel diatas. Berdasarkan data diatas secara umum menunjukan nilai baik dari ketiga indikator tersebut. Meskipun IKM mengalami penurunan 0,28 poin.

Disamping hal tersebut diatas Sekretariat Daerah melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pemantauan dan evaluasi serta pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sampai dengan tahun 2023 terdapat 5 (lima) BUMD di Kabupaten Bojonegoro yang memberikan kontribusi terhadap kinerja pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro yaitu sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 99 Data BUMD di Kabupaten Bojonegoro sampai dengan Tahun 2023

No	Nama BUMD	Dasar Hukum Pendirian	Bidang Usaha
1	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bojonegoro	Perda Nomor 19 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro telah diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buana Kabupaten Bojonegoro	• Penyediaan dan pelayanan air minum yang adil dan merata serta memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat
2	PD. BPR Bank	Perda Nomor 14 Tahun	• Menghimpun dana dari

No	Nama BUMD	Dasar Hukum Pendirian	Bidang Usaha
	Daerah Bojonegoro	1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro	masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka • Memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap pengusaha golongan ekonomi lemah • Beraktifitas melakukan kerjasama antar PD BPR dengan lembaga perbankan
3	Perseroan Terbatas Asri Dharma Sejahtera (PT. ADS)	Perda Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perseroan Daerah PT. Asri Dharma Sejahtera	• Mengelola <i>Participating Interest</i> di Blok Cepu
4	Perseroan Terbatas Bojonegoro Bangun Sarana (PT. BBS) Kabupaten Bojonegoro	Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. BBS	• Jasa kontraktor dengan klasifikasi usaha besar, termasuk proyek yang didanai APBD Bojonegoro • Menjalankan dan menyelenggarakan usaha-usaha perindustrian yang meliputi bidang tambang, minyak dan gas alam, industri makanan dan minuman serta pengalengan atau pembotolan (amatil)
5	Perusahaan Umum Daerah Bojonegoro Pangan Mandiri	Perda Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Bojonegoro Pangan Mandiri	• Membangun, menyelenggarakan dan mengelola area produksi bahan pangan untuk menjamin stabilitas pasokan bahan pangan • Menyenggarakan perdagangan umum bahan pangan dan sarana produksi pertanian, perdagangan antar daerah atau antar pulau termasuk ekspor impor • Membangun, menyelenggarakan dan mengelola industri pengolahan berbasis bahan pangan • Membangun, menyelenggarakan dan mengelola pergudangan bahan pangan

Sumber: Bagian Perekonomian dan SDA, 2023

2.3.1.5.2. Sekretariat DPRD

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada fungsi lainnya yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 100 Frekuensi Kegiatan DPRD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 – 2022

No	Sarana dan Keputusan	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Raperda yang disahkan	8	13	12	13
2	Surat keputusan DPRD	28	20	31	51
3	Surat Keputusan Pimpinan	19	14	60	50
4	Pelaksanaan Sosialisasi	0	0	4	1
5	Pelaksanaan FGD	2	2	3	2
6	Rapat-Rapat	117	93	95	87
	- Komisi A	26	19	8	4
	- Komisi B	20	25	10	6
	- Komisi C	38	25	23	10
	- Komisi D	33	24	7	12
	Badan Musyawarah	18	26	20	12
	Badan Anggaran/Eksekutif	8	8	27	26
	Panitia Khusus	28	13	14	17
7	Kunjungan kerja dalam daerah	48	175	31	20
	- Komisi A	10	47	10	3
	- Komisi B	8	44	5	4
	- Komisi C	18	44	4	3
	- Komisi D	12	40	12	10
8	Kunjungan Kerja Luar Daerah	234	239	332	291
9	Rapat Paripurna/Paripurna Istimewa	64	42	57	46
10	Aduan Masyarakat	15	6	7	16

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Bojonegoro, 2022.

Dari data di atas secara umum terjadi peningkatan kegiatan DPRD dari tahun-tahun sebelumnya diantaranya SK DPRD, SK Pimpinan, pelaksanaan sosialisasi, FGD, rapat-rapat komisi, badan musyawarah, badan anggaran, pansus, rapat paripurna. Sementara kegiatan yang lain seperti pengesahan Raperda, kunker dalam dan luar daerah mengalami penurunan kegiatan dikarenakan masih pandemi covid 19.

2.3.1.5.3. Pengawasan

Pembangunan di Urusan Pengawasan diarahkan pada peningkatan pendayagunaan aparatur negara dalam menjalankan tugas-tugas umum

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Hal tersebut dilakukan dengan meningkatkan kinerja pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, meningkatkan efektivitas pengawasan melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal maupun eksternal dan meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan serta peningkatan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif dan bertanggung jawab dengan melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, dan penilaian. Pengawasan merupakan unsur penting dalam rangka peningkatan pendayagunaan aparatur negara dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintah yang bersih, berwibawa dan akuntabel. Hasil pengawasan dalam kurun waktu 2019-2022 yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 101 Perkembangan Hasil Pengawasan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2022

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022
1.	PKPT (Pemeriksaan Reguler)	Obrik	94	168	177	500
2.	Pemeriksaan Khusus					
	1. Jumlah Pemeriksaan	Obrik	34	41	20	20
	2. Masalah yang terselesaikan	Obrik	34	41	20	20
3.	Pemeriksaan Kasus					
	a. Jumlah Pemeriksaan	Obrik	13	10	10	12
	b. Masalah yang terselesaikan	Obrik	13	10	10	12

Sumber: Inspektorat Kab. Bojonegoro, 2022.

Pemeriksaan reguler atau PKPT mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya disebabkan semakin besarnya APBD Kabupaten Bojonegoro yang mengalami peningkatan tiap tahun. Sementara itu pemeriksaan khusus dan pemeriksaan kasus mengalami penurunan hal tersebut menunjukkan aduan dari masyarakat maupun aparat penegak hukum semakin turun juga.

2.3.1.5.4. Bakesbangpol

Kondisi ketertiban umum di Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian oleh pemerintah. Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah, tentunya banyak hal yang bisa

mempengaruhi kondisi keamanan dan kenyamanan di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Dilihat dari indikator kinerja maka terlihat bahwa persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan berwawasan kebangsaan adalah berikut.

Tabel 2. 102 Capaian Indikator Ketertiban Umum Kabupaten Bojonegoro

No	Indikator	Capaian Kinerja		
		2020	2021	2022
1	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan berwawasan kebangsaan	45	90	92

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Bojonegoro, 2022.

Berdasarkan tabel di atas terjadi peningkatan persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan berwawasan kebangsaan, hal tersebut menunjukkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan khususnya ketertiban umum semakin meningkat.

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Aspek daya saing daerah merupakan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumberdaya manusia.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada didalam dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan nilai tambah bagi peningkatan daya saing daerah. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan aspek kemampuan ekonomi daerah dalam peranannya sebagai pendorong daya saing daerah adalah indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Indikator ini menggambarkan tingkat konsumsi rumah tangga atau seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi rumah tangga semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Salah satu komponen pengeluaran Rumah Tangga adalah pengeluaran Rumah Tangga non makanan, dari indikator ini dapat dilihat kecenderungan masyarakat

Kabupaten Bojonegoro untuk membelanjakan pendapatannya selain makanan cenderung di perumahan dan fasilitas rumah tangga serta aneka komoditas dan jasa.

Tabel 2. 103 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Per Kapita (Rp)	885.378,44	847.561,35	904.018	951.402	10.323

Sumber: Statistik Kesejahteraan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022, BPS Kab Bojonegoro.

Kemampuan ekonomi daerah juga dapat dilihat dari jumlah ekspor dan impor. Aktivitas ekspor Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan komoditas ekspor yaitu tembakau, daging bekicot, sono keling dan kerajinan.

Tabel 2. 104 Ekspor Impor Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2022

No	Uraian	Sat	2019	2020	2021	2022
	Ekspor					
1	Tembakau	US.\$	6.161.309	1.596.240	2.033.706	2.084.548,65
2	Daging Bekicot	US.\$	1.398.686		17.350.819	17.784.589,48
3	Sarang burung walet	US.\$	7.287.882	113.523.995	2.033.706	1.54.366.371,50
4	Kayu dan kayu olahan	US.\$	2.386.437		17.350.819	23.037.276,80
5	Produk Kerajinan (alas kaki & serat)	US.\$	6.755.245	8.854.775	1.502.796.460	53.603.719,80
6	Makanan dan Minuman	US.\$	28.863		22.475.392	23.149.653,76
7	Kosmetik	US.\$	53.284	97.162	52.296.312	53.603.719,80
8	Rempah-Rempah	US.\$				4.435.479,43
	Jumlah	US.\$	24.071.707	124.072.172	1.601.279.986	
	Impor					
1	Tembakau	Rp	304.475.371	16.701.677	0	0
2	Berbagai Produk Kimia	Rp	-	-	68.985.600	70.365.312
3	Mesin/Peralatan Listrik	Rp	-	-	2.051.666.668	2.092.700.001
4	Mesin-mesin / Pesawat Mekanik	Rp	-	-	30.849.505.473	31.466.495.582
5	Mainan	Rp	-	-	39.566.116	40.357.438
6	Jangat dan Kulit Merah	Rp	-	-	144.779.935	147.675.534
7	Alas Kaki	Rp	-	-	14.106.262	14.388.387
8	Kertas / Karton	Rp	-	-	3.726.256.178	3.800.781.302
9	Plastik dan Barang dari plastik	Rp	-	-	3.634.259.425	3.706.944.614
10	Kain ditenun berlapis	Rp	-	-	2.341.646.919	2.388.479.857
11	Kapas Gumpalan, Tali	Rp	-	-	2.231.698.819	2.276.332.795
12	Berbagai Barang Logam Dasar	Rp	-	-	1.399.600.261	1.427.592.266

No	Uraian	Sat	2019	2020	2021	2022
13	Kain Tenunan Khusus	Rp	-	-	1.019.383.396	1.039.771.064
14	Berbagai Barang Buatan Pabrik	Rp	-	-	798.646.435	814.619.364
	Jumlah		304.475.371	16.701.677	48.320.101.487	49.286.503.517

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja, Kab. Bojonegoro, 2022.

2.4.2. Fokus Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah dan infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di suatu wilayah. Semakin lengkap ketersediaan infrastruktur wilayah maka semakin kuat dalam menghadapi daya saing antar daerah.

Tabel 2. 105 Fasilitas Wilayah /Infrastruktur Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2021

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Kondisi Jalan Kabupaten (Km)					
- Baik	497.248	265.195	426.278	532.476	722.515
- Sedang	281.003	265.195	237.496	134.793	33.326
- Rusak	281.003	292.926	149.489	145.997	57.425
- Total	813.266	813.266	813.266	813.266	813.266
Kondisi Jembatan (buah)					
- Baik	876	795	862	612	880
- Sedang	364	116	103	482	454
- Rusak	7	408	357	310	240
- Total	1.247	1.319	1.322	1.404	1.574
- Waduk Besar (Jmlh Lokasi)	2	2	2	3	3
- Bendung/Dam (Jumlah lokasi)	332	348	351	361	
- Embung (Jumlah lokasi)	510	513	518	529	517

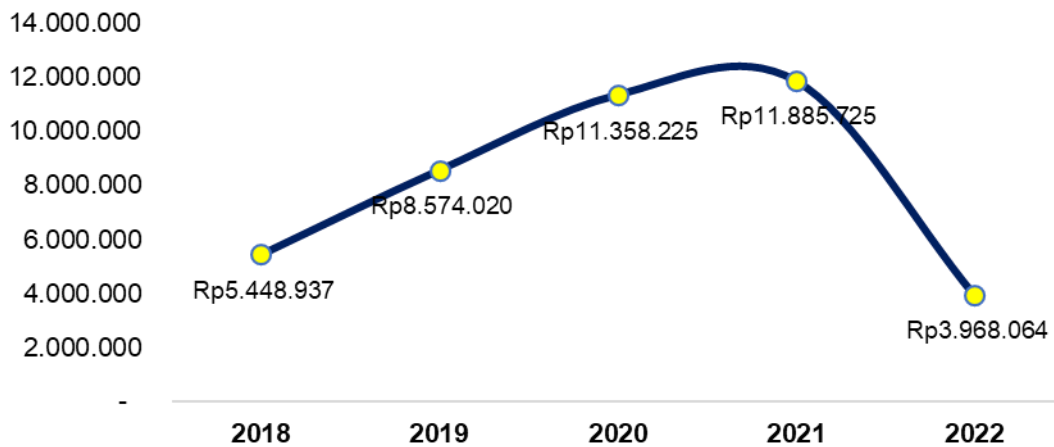
Sumber: LKPJ Bupati Bojonegoro Tahun 2021.

Pembangunan dan perbaikan jalan untuk meningkatkan aksesibilitas selalu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, sehingga kondisi jalan baik secara umum tiap tahun mengalami peningkatan pada tahun 2019 sepanjang 265.195 km meningkat pada tahun 2020 menjadi 426.278 km kemudian meningkat lagi tahun 2022 menjadi 722.515 km.

2.4.3. Fokus Iklim Investasi

Daya tarik investor untuk menanamkan modalnya sangat dipengaruhi faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi

perbankan. Iklim investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong berkembangnya investasi antara lain faktor keamanan dan ketertiban suatu wilayah dan kemudahan proses perijinan.



Gambar 2. 19 Jumlah Investasi (juta rupiah)

Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 jumlah investasi yang masuk ke Kabupaten Bojonegoro selalu mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2018 jumlah investasi yang masuk sebesar 5,448 trilyun kemudian tahun 2019 meningkat menjadi 8,574 trilyun dan 2020 meningkat lagi menjadi 11,358 trilyun serta 2021 meningkat menjadi 11,885. Sementara itu tahun 2022 turun menjadi 3,968 trilyun, hal tersebut karena untuk investasi sektor pertambangan data belum masuk.

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia dilihat dari sisi tenaga kerja dan pembangunan manusia. Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Peningkatan IPM di Kabupaten Bojonegoro setiap tahun dikarenakan ada kenaikan masing-masing pembentuknya yaitu UHH, HLS, RLS dan pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Sedangkan untuk tenaga kerja, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 678.571 jiwa pada tahun 2019 dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,56 dan angka ketergantungan penduduk Kabupaten Bojonegoro

selama beberapa tahun terakhir berkisar 43-44, sehingga diartikan bahwa 100 penduduk produktif menanggung 43 orang sampai 44 orang usia tidak produktif (usia muda dan usia tua).

Tabel 2. 106 Sumber Daya Manusia Kabupaten Bojonegoro

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,64	4,19	3,56	4,92	4,82	4,69
2	Angka ketergantungan penduduk	43,19	43,15	43,18	45,87		43,46
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,28	67,85	68,75	69,04	69,59	70,12
4	Umur Harapan Hidup	70,83	71,07	71,36	71,56	71,72	72,18
5	Harapan Lama Sekolah	12,34	12,35	12,36	12,39	12,68	12,84
6	Rata-rata lama sekolah	6,71	6,77	7,09	7,33	7,38	7,43
7	Pengeluaran per kapita (000)	9.553	9.926	10.265	10.121	10.220	10,320

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur dan BPS Kabupaten Bojonegoro, Update tahun 2022.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Bojonegoro dipengaruhi oleh kebijakan Nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 dan Provinsi Jawa Timur sesuai dokumen RKPD tahun 2023. Dimana tema RKP tahun 2023 fokus di bidang ekonomi yaitu *Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan* sedangkan arah kebijakan sektor perekonomian yaitu:

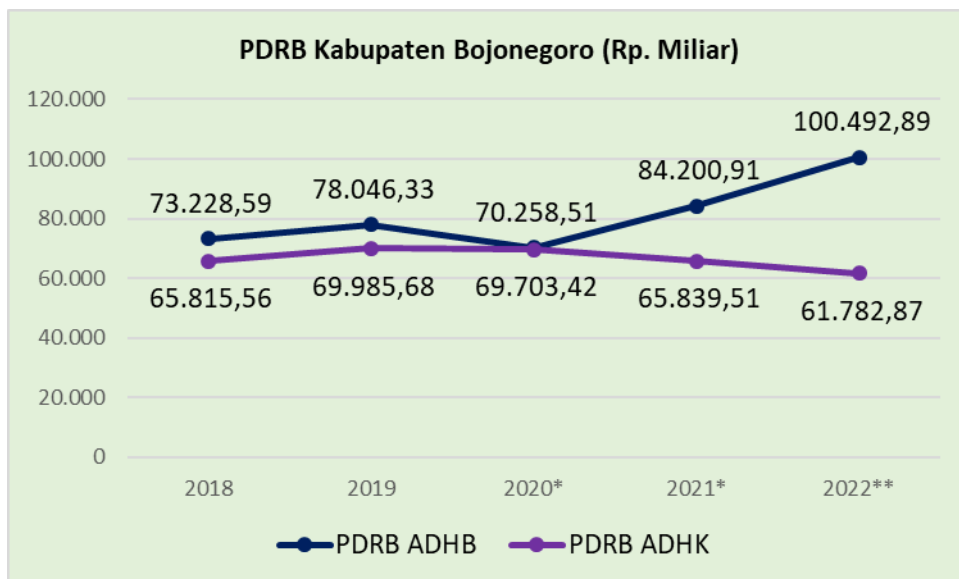
1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.
2. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*.
3. Mendorong pemulihan dunia usaha.
4. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.

Dari 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional tahun 2023 terdapat prioritas pada bidang ekonomi adalah (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan dan (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Sementara itu kebijakan sektor perekonomian Provinsi Jawa Timur dalam RKPD Tahun 2023 adalah sebagaimana tema RKPD yaitu *Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumberdaya Manusia untuk mendukung Daya Saing Daerah menyambut Era Industri Perdagangan dan Jasa berbasis Agro guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat*. Selanjutnya didalam 7 (tujuh) prioritas pembangunan Jawa Timur yang merupakan prioritas sektor ekonomi yaitu (1) pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata (2) penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur dan (3) peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi.

3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi

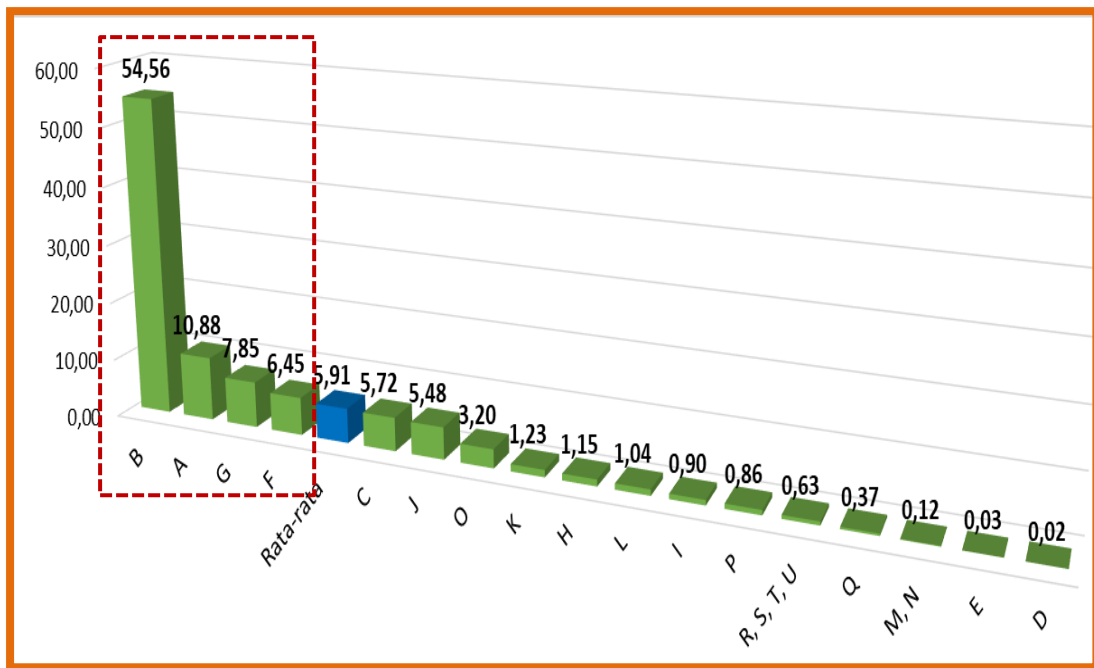
Kondisi perekonomian Kabupaten Bojonegoro selama tahun 2018 sampai dengan 2019 menunjukkan perkembangan yang positif, namun pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 menurun karena disebabkan dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2018, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) adalah Rp. 65.815,56 miliar dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp. 73.228,59 miliar. Kemudian meningkat di tahun 2019 menjadi Rp. 69.985,68 miliar (ADHK) dan Rp. 78.046,33 miliar (ADHB). Penurunan terjadi pada tahun 2020, yang mana penurunan PDRB ADHB cukup besar yaitu menjadi Rp. 70.258,51 miliar, dan PDRB ADHK turun sedikit menjadi Rp. 69.703,42 miliar. Secara berturut-turut PDRB ADHB mulai meningkat cukup besar sejak tahun 2021 dan 2022 yaitu menjadi Rp. 84.200,91 miliar dan Rp. 100.492,89 miliar. Namun berkebalikannya dengan PDRB ADHK yang cenderung menurun, pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing menjadi Rp. 65.839,51 miliar dan Rp. 61.782,87 miliar. PDRB ADHB meningkat tajam dari tahun ke tahun disebabkan oleh kenaikan harga Migas meskipun liftingnya turun dari tahun sebelumnya. Sektor ini merupakan salah satu sektor penyumbang terbesar PDRB. Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK selama lima tahun terakhir digambarkan dengan grafik berikut ini.



Sumber: Kabupaten Bojonegoro Dalam Angka Tahun 2023, BPS Kabupaten Bojonegoro, 2023.

**Gambar 3.1 Grafik Perbandingan PDRB ADHK dan ADHB
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 – 2022**

Masih seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2022 empat (4) besar lapangan usaha (LU) penyumbang PDRB Kabupaten Bojonegoro adalah (1) LU Pertambangan dan Penggalian (54,56%, dominan migas), (2) LU Pertanian Kehutanan dan Perikanan (10,88%), (3) LU Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (7,85%) dan (4) LU Kontruksi (6,45%). Perbandingan antara empat lapangan usaha dominan dengan 13 lapangan usaha lainnya disajikan pada gambar berikut ini.



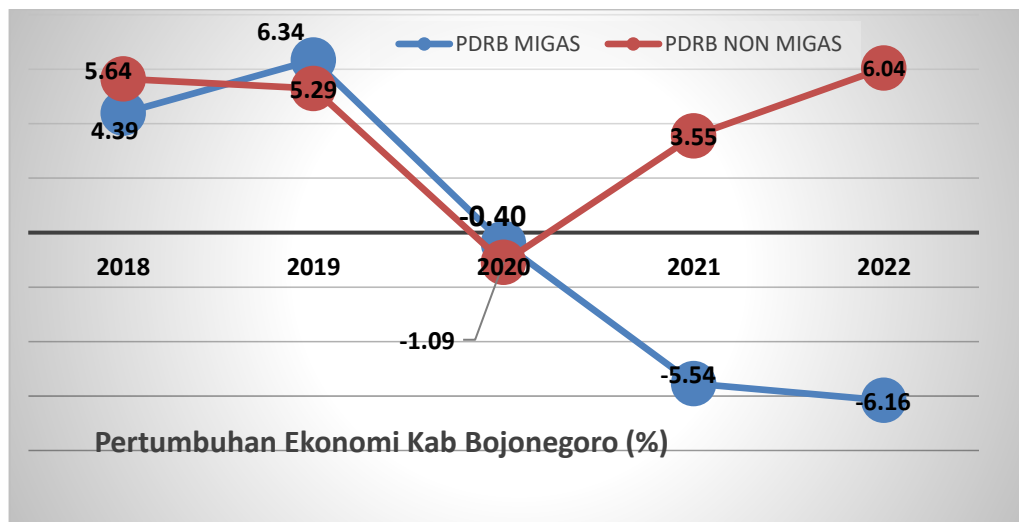
Sumber: Hasil Pengolahan Data, Kabupaten Bojonegoro Dalam Angka Tahun 2023, BPS Kabupaten Bojonegoro, 2023.

Gambar 3.2. Persentase Kontribusi Tiga Besar Sektor Lapangan Usaha PDRB ADHB Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022

3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Kabupaten Bojonegoro dalam menghitung pertumbuhan ekonomi menggunakan dua pendekatan yaitu pertumbuhan ekonomi dengan migas dan tanpa migas.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro selama tahun 2018 sampai dengan 2022 fluktuatif baik secara migas dan non migas. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi dengan migas sebesar 10,25%, tahun 2018 turun menjadi 4,39 dan kembali naik menjadi 6,34% ditahun 2019. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tanpa migas tahun 2017 sebesar 5,46% naik menjadi 5,63 % ditahun 2018 dan turun kembali pada tahun 2019 sebesar 5,29%. Sementara itu pertumbuhan ekonomi dengan migas Kabupaten Bojonegoro tahun 2020 dan 2021 mengalami kontraksi, hal tersebut karena pandemi covid 19. Tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 0,4% dan tahun 2021 terkontraksi tajam menjadi minus 5,54%. Sementara itu pertumbuhan ekonomi tanpa migas tahun 2020 terkontraksi sebesar minus 1,09% dan tahun 2021 naik tajam sebesar 3,55%. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi tanpa migas tumbuh sangat tinggi yaitu mencapai 6,04 persen, namun sebaliknya pertumbuhan dengan migas semakin anjlok yaitu turun (negative) menjadi -6,16 persen. Berikut grafik perbandingan pertumbuhan ekonomi dengan migas dan tanpa migas Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 sampai dengan 2022.

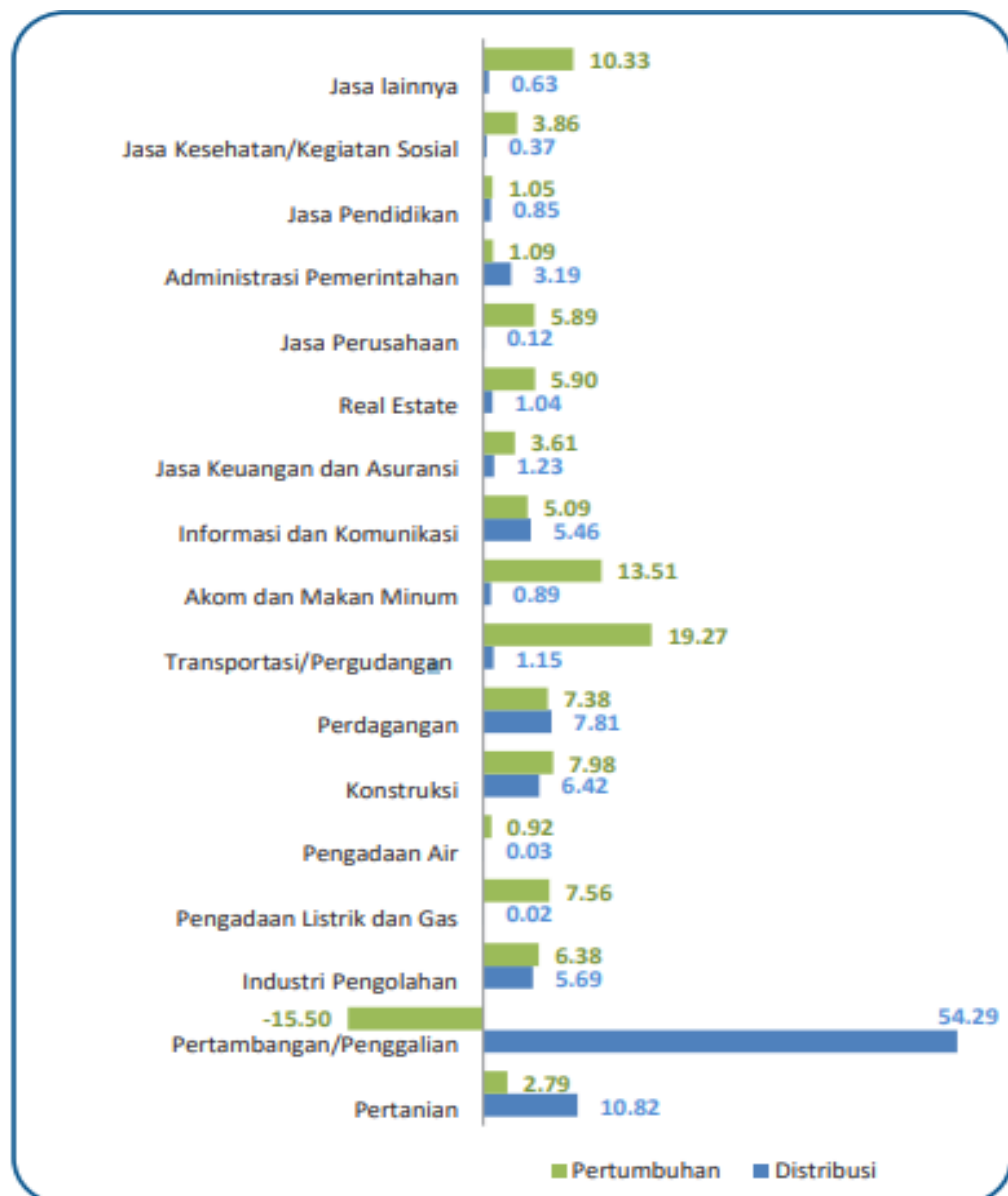


Sumber: Kabupaten Bojonegoro Dalam Angka Tahun 2023, BPS Kabupaten Bojonegoro, 2023.

Gambar 3.3. Grafik Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dengan Migas dan Tanpa Migas Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022

Struktur perekonomian Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 54,29 persen, diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 10,82 persen,

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,81 persen, Konstruksi sebesar 6,42 persen, serta Industri Pengolahan sebesar 5,69 persen, Informasi dan Komunikasi sebesar 5,46 persen. Peranan enam lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kabupaten Bojonegoro mencapai 90,49 persen. Sedangkan kategori lainnya mempunyai peranan dibawah 2%. Berikut ini gambaran sebaran lapangan usaha PDRB ADHK 2010 sebagai berikut:

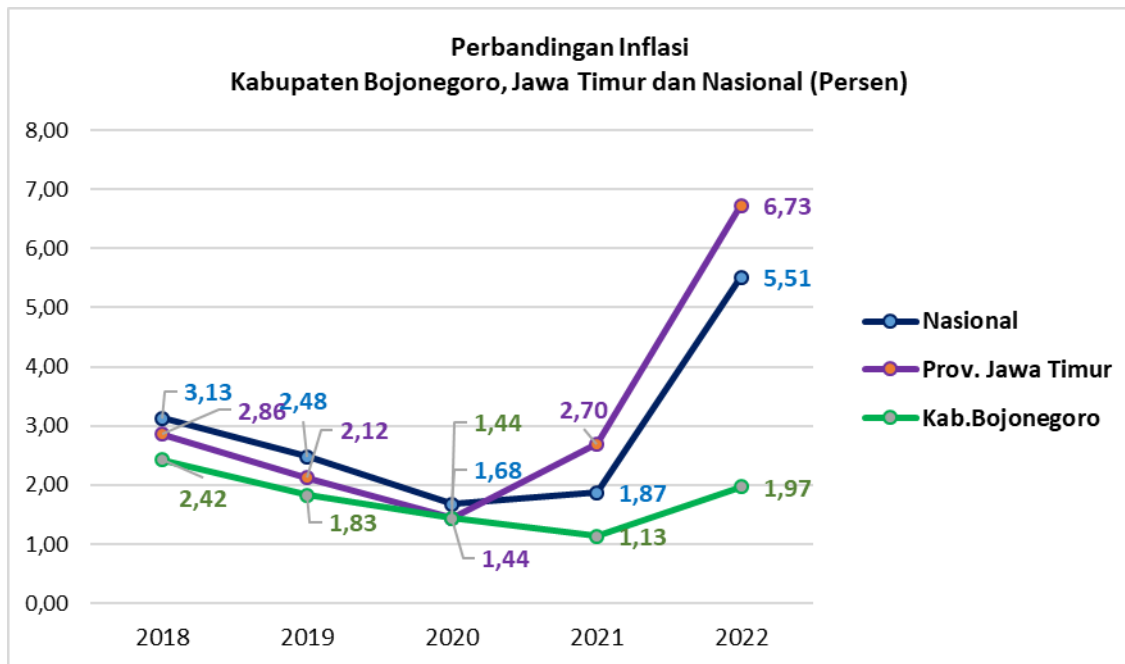


Sumber: Berita Resmi Statistik No.002/02/3522/Th.III, 28 Februari 2023

Gambar 3.4. Grafik Pertumbuhan dan Distribusi Lapangan Usaha PDRB ADHK Tahun 2022

3.1.3 Inflasi

Informasi inflasi dipakai sebagai tolok ukur untuk menjaga kestabilan perekonomian daerah, serta tingkat harga barang dan jasa di Kabupaten Bojonegoro. Secara umum inflasi Kabupaten Bojonegoro relatif stabil, dimana tidak terdapat gejolak harga yang signifikan. Pasokan barang dapat dicukupi baik dari kontribusi lokal maupun luar daerah. Komoditas yang masih membutuhkan pasokan dari luar daerah seperti telur, bawang putih, gula pasir. Pada saat perubahan cuaca ekstrim yang terjadi sejak tahun 2020 yang lalu, banyak komoditas yang mengalami keterlambatan waktu tanam. Sehingga pada triwulan III dan IV tahun 2021 pasokan sejumlah barang komoditas perlu diwaspadai, seperti cabe. Angka inflasi tahun 2020 sebesar 1,44%. Besaran angka inflasi tahun 2020 sebesar 1,44%, kemudian tahun 2021 turun menjadi 1,13%, serta naik pada tahun 2022 menjadi 1,97%. Tingkat inflasi Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat dalam grafik berikut:



Sumber : BPS, NPS Provinsi Jawa Timur dan LPJ Bupati Bojonegoro Tahun 2018-2022.

Gambar 3.5 Tingkat Inflasi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022

3.1.4 Angkatan Kerja

Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2022 menunjukkan peningkatan jumlah angkatan kerja, dimana tahun 2018 sejumlah 661.169 orang meningkat ditahun 2022 menjadi 755.603 orang. Akan tetapi pernah terjadi penurunan yaitu dari tahun 2020 ke 2021 menurun dari 737.001 orang menjadi 727.513 oang, hal tersebut di karenakan pandemi Covid 19. Tetapi pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 755.603 orang, sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022

Kegiatan Utama	2018	2019	2020	2021	2022
Angkatan kerja	661.169	704.639	737.001	727.513	755.603
Bukan angkatan kerja	323.803	285.743	302.408	289.005	308.526
Bekerja	633.437	678.571	695.746	692.456	803.000
- Laki-laki	385.969	406.487	343.203	466.146	538.000
- Perempuan	247.468	272.084	352.543	226.310	265.000
TPAK	67,13	71,15	74,60	71,84	72,16
TPT	4,19	3,56	4,92	4,82	4,69

Sumber: Keadaan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, BPS Provinsi Jawa Timur, 2023.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berkisar pada angka 4 persen, meski sempat turun pada tahun 2019 menjadi 3,56%. Pada masa pandemi Covid 19 tahun 2020 mengalami peningkatan tertinggi yaitu 4,92%, kemudian tahun berikutnya 2021 dan 2022 selalu turun menjadi 4,82% dan 4,69%.

3.1.5 Kemiskinan

Dalam periode tahun 2018-2022 jumlah penduduk miskin Kabupaten Bojonegoro menunjukkan tren menurun. Penurunan terjadi sebelum pandemi Covid 19 yaitu dari tahun 2018 ke 2019 dari 163.940 jiwa (13,16%) menjadi 154.640 jiwa (12,38%). Namun pada masa pandemi Covid 19 yaitu tahun 2020 naik menjadi 161.100 jiwa (12,87%). Kenaikan berlanjut lagi pada tahun 2021 menjadi 166.520 jiwa (13,27%). Setelah perekonomian pulih kembali pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin kembali turun menjadi 153.400 jiwa (12,21%). Perkembangan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan penduduk disajikan pada tabel berikut.

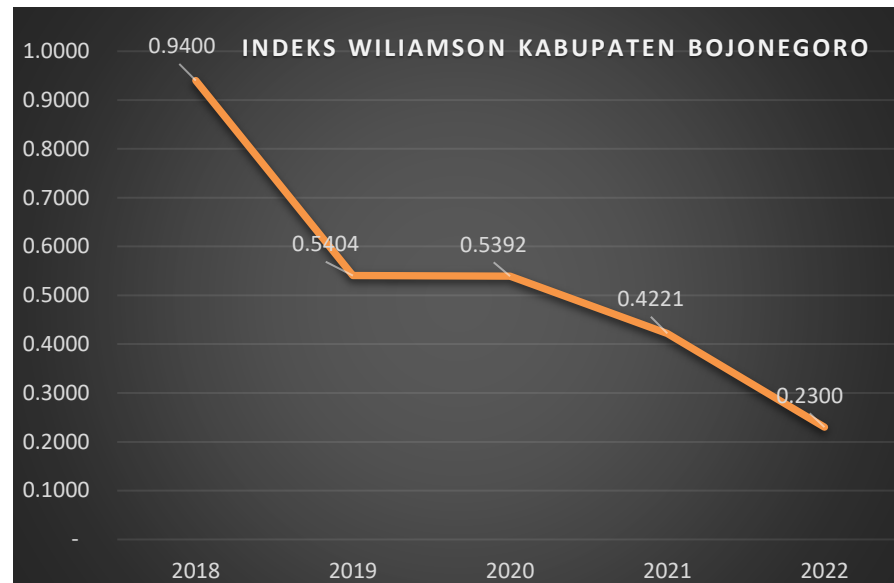
Tabel 3.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Penduduk Miskin	163.940	154.640	161.100	166.520	153.400
2	Tingkat Kemiskinan (%)	13,16	12,38	12,87	13,27	12,21

Sumber: Kabupaten Bojonegoro Dalam Angka Tahun 2023, BPS Kabupaten Bojonegoro, 2023.

3.1.6 Ketimpangan Regional

Ketimpangan regional atau kesenjangan antar wilayah diukur menggunakan Indeks Williamson (IW). Nilai IW berkisar antara 0 sampai dengan 1 dan semakin tinggi nilai IW menunjukkan ketimpangan antar wilayah yang semakin besar. Nilai IW Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2021 mengalami penurunan yang menunjukkan bahwa kinerja pembangunan ekonomi antara wilayah di Kabupaten Bojonegoro semakin merata.



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Bojonegoro, 2018 – 2022.

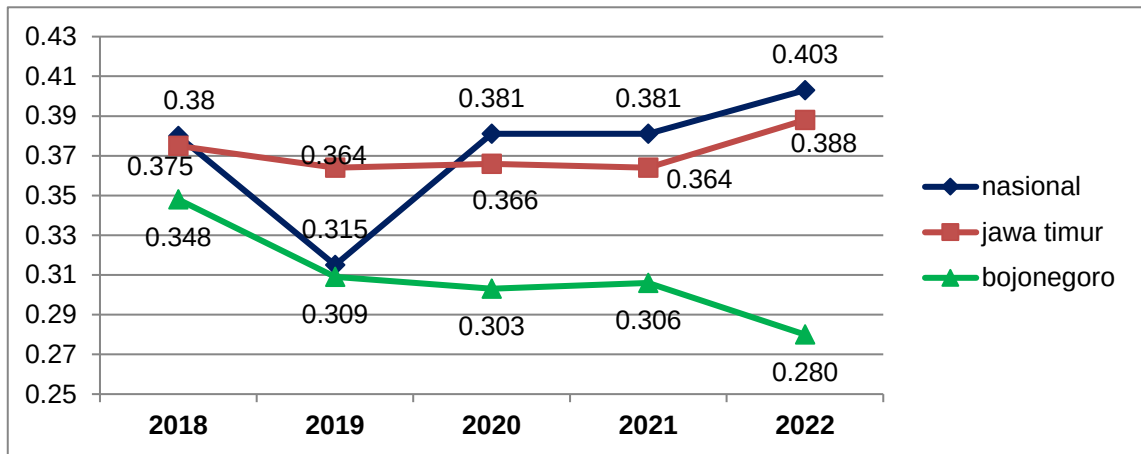
Gambar 3.6 Grafik Perkembangan Indek Wiliamson Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022

Dari gambar diatas terlihat ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Bojonegoro semakin tahun semakin menurun tahun 2018 sebesar 0,94 kemudian 2019 turun menjadi 0,5404 tahun 2020 turun lagi menjadi 0,5392 dan tahun 2021 menjadi 0,4221 terakhir tahun 2022 turun menjadi 0,2300.

3.1.7 Ketimpangan Pendapatan

Tingkat ketimpangan pendapatan ditunjukkan dengan Rasio Gini. Indeks Gini Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2018 sebesar 0,348 kemudian pada tahun 2019 menurun menjadi 0,309 turun lagi pada tahun 2020 menjadi 0,303 kemudian tahun 2021 karena covid-19 naik menjadi 0,306, namun dan tahun 2022 turun kembali menjadi 0,280. Bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur maupun Nasional, Indeks Gini Kabupaten Bojonegoro masih lebih baik. Tingkat ketimpangan menjadi masalah yang perlu dituntaskan bersama, ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan di suatu daerah dapat menimbulkan masalah sosial. Oleh sebab itu pemerintah harus mendistribusikan pendapatan keseluruhan daerah agar tidak terjadi ketimpangan, dengan

membangun infrastruktur dan memberdayakan masyarakat sekitarnya.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, Update 2022

Gambar 3.7 Indeks Gini Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022

3.1.8 Proyeksi Indikator Makro

Kondisi perekonomian Kabupaten Bojonegoro tahun 2023 sebagaimana kondisi Indonesia maupun dunia diperkirakan akan mengalami peningkatan daripada tahun 2021 dan 2022. Kuatnya Perekonomian Indonesia yang sudah terlihat di tahun 2022 dan berlanjut ke 2023 adalah bukti bahwa penanganan pandemi berbuah signifikan pada relatif cepatnya pemulihan ekonomi Indonesia. Kebijakan penanganan pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang efektif di 2021 dan diperkuat dengan fokus penciptaan tenaga kerja selain kesehatan dan perlindungan masyarakat di 2022 tentunya menjadi faktor penting.

Berikut ini proyeksi perkembangan beberapa indikator ekonomi makro tahun 2022 dan 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.3 Proyeksi Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 - 2023**

No	Indikator Makro Ekonomi	Kondisi Awal	Proyeksi
		2022 ¹	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi : • Dengan Migas (%) • Tanpa Migas (%)	-6,16 ² 6,04 ²	-5,00 – (-1,00) 5,50 – 6,00
2	Inflasi (%)	1,97 ³	2,00 – 2,35
3	TPT (%)	4,69 ¹	4,40 – 4,50
4	Tingkat Kemiskinan (%)	12,21 ¹	12,11 – 12,15
5	Indeks Gini (Skor/Poin)	0,28 ¹	0,275 – 0,280
6	Indeks Wiliamson (Skor/Poin)	0,2300 ²	0,4075 - 0,4100

Sumber: Hasil proyeksi, 2022.

1) BPS Provinsi Jawa Timur, update 2022.

2) BPS Kabupaten Bojonegoro, 2022.

3) Hasil Kajian Bappeda Kab. Bojonegoro Tahun 2022; LKPJ Bupati Bojonegoro, 2022.

3.1.9 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Prospek perekonomian Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional. Dimana diproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 antara 5,2-6,0 persen, Provinsi Jawa Timur diproyeksikan antara 5,16-5,74 persen sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro dengan migas sebagaimana tabel 3.3 diatas pada 2023 diperkirakan -5,00 sd -1,00 persen.

Sementara kondisi lingkungan nasional yang akan berpengaruh positif terhadap perekonomian Kabupaten Bojonegoro antara lain:

- 1) Kebijakan nasional dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Wilayah GKS+, BTS dan Lingkar Wilis, dimana Kabupaten Bojonegoro mendapat 5 (lima) proyek nasional seperti pembangunan Bendung Gerak Karang Nongko, Pembangunan Jalan tol Ngawi-Bojonegoro-Lamongan-Gresik, pengembangan SMKN 5, pembangunan SPAM dan pengendali banjir Sungai Bengawan Solo. Terkait kegiatan strategis nasional di Kabupaten Bojonegoro, terutama

pembangunan infrastruktur strategis seperti beroperasinya jalan tol Ngawi, Bojonegoro, Lamongan dan Gresik, dan penanganan banjir di wilayah Utara Kabupaten Bojonegoro akan memberikan pengaruh pada peningkatan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga;

- 2) Kebijakan nasional terkait penerimaan pajak, serta kemudahan investasi dan berusaha, akan mendorong pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan PMTB.

Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kabupaten Bojonegoro yaitu:

- a. Pemulihan ekonomi dan peningkatan pelayanan kesehatan akibat pandemi covid-19;
- b. Isu penguatan ketahanan pangan, energi, dan air dimana posisi Kabupaten Bojonegoro sebagai produsen pangan, harus disertai dengan kemampuan daerah dalam melakukan tertib niaga dan pengendalian distribusi pangan;
- c. Di sektor UMKM, dan pariwisata pengembangannya masih belum maksimal disamping terkait dengan kualitas bahan hasil UMKM yang masih belum memiliki daya saing, juga pengembangan sektor wisata yang masih belum optimal yang disebabkan kendala cuaca, letak geografis dan belum adanya modal transportasi yang layak sampai ke lokasi wisata. Upaya yang dilaksanakan yaitu dengan menyelenggarakan sejumlah even pariwisata dengan mengajak investor untuk pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Bojonegoro;
- d. Perlunya menciptakan ekonomi inklusif dengan penguatan UKM di Kabupaten Bojonegoro dengan pembangunan technopark peternakan yang terintegrasi dengan sektor pertanian dan kehutanan.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin kegiatan usaha dalam masyarakat dapat terselenggara dengan baik;
- b. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal secara gratis agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan;
- c. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian (revitalisasi pasar tradisional, perlindungan UKM) agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien;
- d. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, menyempurnakan sistem pengupahan, peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat;
- e. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, kerjasama antar daerah, mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor informal. Melalui kerjasama kemitraan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (program CSR) dari dunia usaha untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan lembaga keuangan mikro (LKM); dan
- f. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (*life skills*), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun nonfisik.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah lebih detail menyebutkan bahwa pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk

menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Berikut ini disajikan realisasi pendapatan tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 :

Tabel 3.4. Realisasi Pendapatan Tahun 2018-2022 dan Target Pendapatan Kabupaten Bojonegoro

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertum- buan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
4	PENDAPATAN DAERAH	4.823.752.241.464	4.769.828.177.734	4.165.075.649.836	5.904.101.073.580	5.767.284.724.355	6,41
4.1	Pendapatan Asli Daerah	425.167.970.431	561.251.499.956	720.914.033.084	955.640.728.380	804.005.013.048	19,29
4.1.1	Pajak Daerah	94.593.395.280	108.830.092.963	116.294.020.878	138.623.990.955	160.469.314.344	14,22
4.1.2	Retribusi Daerah	19.844.707.742	28.683.142.118	28.321.158.415	32.742.645.778	33.311.230.535	15,16
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	18.121.803.635	16.816.223.664	143.501.369.940	398.273.820.075	137.641.553.853	214,56
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	292.608.063.774	406.922.041.211	432.797.483.851	386.000.271.572	472.582.914.316	14,26
4.2	Pendapatan Transfer	3.979.345.024.460	3.728.671.462.278	2.960.763.434.107	4.783.858.759.040	4.896.427.553.388	9,26
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	3.814.660.800.562	3.522.411.681.988	2.754.943.427.535	4.578.724.111.629	4.700.349.821.884	9,85
4.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	251.636.029.601	202.380.620.388	446.935.974.159	893.348.174.455	671.716.839.386	44,08
4.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	2.281.171.868.831	1.973.193.312.507	1.101.238.658.565	2.136.831.262.072	2.418.712.905.490	12,38
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum	932.357.598.649	975.387.399.000	875.289.898.000	870.125.915.000	861.028.899.802	(1,82)
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	69.725.202.232	90.276.711.983	56.643.407.503	36.951.146.150	38.098.520.212	(9,86)
4.2.1.5	Dana Alokasi Khusus (Non Fisik)	279.770.101.249	281.173.638.110	274.835.489.308	253.408.748.752	337.402.239.167	(5,90)
4.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	17.250.000.000	33.175.993.000	63.247.800.000	388.057.865.200	373.390.417.827	173,18
4.2.2.1	Dana Insentif Daerah	0	0	0	25.924.063.000	14.636.752.000	(10,88)
4.2.2.2	Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0
4.2.2.3	Dana Penyesuaian	17.250.000.000	33.175.993.000	63.247.800.000	0	0	0
4.2.2.4	Dana Desa	0	0	0	362.133.802.200	358.753.665.827	(0,23)
4.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	147.434.223.898	173.083.787.290	142.572.206.572	205.134.647.411	196.077.731.504	9,81
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	147.434.223.898	173.083.787.290	142.572.206.572	205.134.647.411	182.848.759.504	8,20
4.2.3.2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provins	0	0	0	0	13.228.972.000	0
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	419.239.246.573	479.905.215.500	483.398.182.645	174.626.966.650	66.852.157.919	(27,60)
4.3.1	Pendapatan Hibah	283.519.573	0	0	0	0	0
4.3.3	Pendapatan Lainnya	418.955.727.000	479.905.215.500	483.398.182.645	174.626.966.650	66.852.157.919	(27,58)

Sumber : diolah dari LRA Kabupaten Bojonegoro, 2023

Dari tabel diatas bahwa realisasi pendapatan Kabupaten Bojonegoro dominan pada pendapatan transfer, dimana selama lima tahun terakhir rata-rata kontribusinya sebesar 79,53 persen dari total pendapatan, dimana tahun 2018 persinya sebesar 82,49 persen, tahun 2019 sebesar 78,17 persen, tahun 2020 sebesar 71,09 persen kemudian tahun 2021 sebesar 81,03 persen dan terakhir tahun 2022 sebesar 84,90 persen. Sangat kontras dengan kontribusi sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan dimana untuk sektor PAD rata-rata lima (5) tahun terakhir hanya menyumbang 13,60 persen, tahun 2018 sebesar 8,81 persen meningkat di tahun 2019 sebesar 11,77 persen, tahun 2020 meningkat tajam menjadi 17,31 persen tahun 2021 menurun menjadi 16,19 persen dan tahun 2022 menurun kembali menjadi 13,94 persen. Selengkapanya terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Persentase Komponen Pendapatan terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2018-2022

No	Komponen Pendapatan	% terhadap pendapatan Total				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pendapatan Asli Daerah	82,49	78,17	71,09	81,03	84,90
2	Pendapatan Transfer	8,81	11,17	17,31	16,19	13,94
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	8,69	10,06	11,61	2,96	1,16
	Total Pendapatan	100	100	100	100	100

Sumber: Bapenda Kab Bojonegoro 2023

Dengan melihat gambar di atas, dapat dilihat bahwa kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro masih rendah atau tingkat ketergantungan terhadap pihak luar/sumber dana eksternal masih sangat tinggi. Hal tersebut dikarenakan:

- 1) Pendapatan Asli Daerah masih rendah dikarenakan potensi yang dimiliki rendah. Sektor unggulan yang menjadi penopang PAD masih tertumpu pada penerimaan PBB P2 dan laba perusahaan, untuk jenis pajak dan retribusi yang lain seperti pajak hotel, restoran, reklame, parkir, dan lain-lain dalam tahap pertumbuhan relatif lambat dan masih memberikan kontribusi yang kecil
- 2) Pendapatan Asli Daerah masih rendah dikarenakan potensi yang dimiliki rendah. Sektor unggulan yang menjadi penopang PAD masih tertumpu

- pada Penerimaan PBB P2, untuk jenis pajak dan retribusi yang lain seperti pajak hotel, restoran, reklame, parkir, dan lain-lain dalam tahap pertumbuhan relatif lambat dan masih memberikan kontribusi yang kecil
- 3) Sistem pemungutan pendapatan daerah khususnya pajak dan retribusi yang sudah memanfaatkan teknologi informasi tetapi belum maksimal, sehingga potensi pendapatan belum seluruhnya dijadikan target pendapatan sehingga potential losses masih tinggi

Untuk meningkatkan kemandirian dan mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, arah kebijakan pendapatan daerah kabupaten Bojonegoro tahun 2024-2026, meliputi:

- 1) Pelaksanaan Intensifikasi dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan potensi yang ada dan pengembangan basis data;
- 2) Penataan regulasi termasuk pengaturan tarif pajak daerah dan retribusi daerah yang mendukung upaya peningkatan pelayanan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi, melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dan Sarpras pada Perangkat Daerah penghasil, termasuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manuasi aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah;
- 4) Peningkatan kinerja bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberikan dampak pada peningkatan bagi hasil laba BUMD terhadap PAD;
- 5) Peningkatan tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar menghasilkan pendapatan daerah, sehingga dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelayanan BLUD; dan
- 6) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah.

Beberapa inovasi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain:

- 1) SIKOWASDAL SISPADA (Sinergi Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Sikeudes untuk Pajak Daerah) yaitu perluasan data wajib pajak restoran dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atas

belanja makan dan minum dan belanja MBLB yang bersumber dari APBDesa) plus Dana BOS dan BOP PAUD.

- 2) SMART REPORT SYSTEM yaitu pengendalian atas pajak daerah terutama melalui H2H antara aplikasi SIMPADU dengan bank tempat pembayaran sebelas (11) mata pajak daerah.
- 3) E-SPPT yaitu Percepatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)-P2 bagi wajib pajak yang terhalang oleh batas dan waktu. Dimana wajib pajak dapat membayar di Bank Jatim, BRI, BNI dan post payment (Indomaret, Alfamart dan kantor pos) serta e.commerce (GoPay, OVO, Dana, Shoppe, Tokopedia dan blibli), sehingga wajib pajak yang terhalang batas jarak dan waktu masih bias tetap melaksanakan kewajiban pembayaran PBB-P2 darimanapun dan kapanpun.

Berdasarkan realisasi pendapatan daerah tahun 2018 sampai dengan tahun 2028, maka target pendapatan tahun 2023 dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2024-2026 adalah:

Tabel 3.6. Target Pendapatan 2023 dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2024-2026 Kabupaten Bojonegoro

No	Uraian	Target 2023	Proyeksi		
			2024	2025	2026
4	PENDAPATAN DAERAH	5.219.452.699.369	4.517.307.326.897	4.399.078.481.067	4.301.238.553.192
4.1	Pendapatan Asli Daerah	900.087.500.609	950.000.000.000	1.000.000.000.000	1.050.000.000.000
4.2	Pendapatan Transfer	4.259.295.367.980	3.491.853.678.471	3.322.870.296.157	3.174.268.286.433
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	3.749.463.018.513	3.391.628.078.147	3.221.642.439.830	3.072.028.151.543
4.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	611.780.577.000	617.898.382.770	624.077.366.598	630.318.140.264
4.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	1.840.156.992.513	1.063.307.038.587	870.038.189.875	696.907.859.087
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum	900.580.322.000	909.586.125.220	918.681.986.472	927.868.806.337
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	34.257.391.000	34.599.964.910	34.945.964.559	35.295.424.205
4.2.1.5	Dana Alokasi Khusus (Non Fisik)	362.687.736.000	366.314.613.360	369.977.759.494	373.677.537.089
4.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	410.599.082.000	399.921.953.30	403.921.172.833	407.960.384.561
4.2.2.1	DID	14.636.752.000	0	0	0
4.2.2.4	Dana Desa	395.962.330.000	399.921.953.30	403.921.172.833	407.960.384.561
4.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	99.233.267.467	100.225.600.324	101.227.856.327	102.240.134.890
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	99.233.267.467	100.225.600.324	101.227.856.327	102.240.134.890
4.2.3.2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	0	0	0	0
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	74.706.582.600	75.453.648.426	76.208.184.910	76.970.266.759
4.3.1	Dana Kapitasi JKN	74.706.582.600	75.453.648.426	76.208.184.910	76.970.266.759
4.3.3	Pendapatan Lainnya	0	0	0	0

Sumber :

Tahun 2023 APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023

Tahun 2024 sd 2026 Bapenda Tahun 2023

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah diarahkan mengedepankan **money follow program priority** yang akan memprioritaskan program/kegiatan wajib/mengikat (gaji pegawai, air minum, listrik, air bersih, dan sebagainya), kegiatan yang memprioritaskan pada aspek layanan dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas infrastruktur, pelestarian nilai budaya, dan program/ kegiatan prioritas yang mendukung fokus tematik (1) Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan; 2) Penurunan Ketimpangan Wilayah; 3) Kerjasama dan Kemitraan; dan 4) Pemulihan Ekonomi dan Sosial Dampak Pandemi Covid-19. Lebih lanjut belanja pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah mencukupi. Secara khusus kebijakan belanja juga diperuntukan untuk memenuhi program prioritas kabupaten yaitu pemenuhan 17 (tujuh belas) program prioritas. Arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan secara fokus pada pendekatan kewilayahan dengan mengedepankan lokus dan fokus pembangunan secara lebih jelas, serta memperhatikan kebutuhan investasi yang secara spesifik harus didekatkan dengan karakteristik wilayah, serta kebutuhan suatu wilayah, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi tematik pembangunan khususnya pada masing-masing kabupaten/kota secara administratif. Selain itu Belanja Daerah diutamakan untuk memenuhi mandatory spending yaitu belanja yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan mandatory spending ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1);
- 2) Besaran anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan);

3) Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 40 % (empat puluh persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah atau sesuai dengan ketentuan dari pemerintah.

Disisi lain belanja pembangunan tidak hanya memperhatikan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun juga harus memperhatikan anggaran yang bersumber dari APBN, kerjasama pemerintah dan swasta, peran CSR, dan sumber pendanaan lainnya dengan konsep pembangunan yang terintegrasi.

Adapun realisasi Belanja Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7. Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022

No	Uraian	Realisasi					% rata-rata Pertum- buhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Belanja Daerah	3.085.425.470.749,82	4.585.067.641.338,77	4.358.623.563.024,54	5.086.919.540.149,46	5.378.024.840.058,75	11,81
5.1	Belanja Operasi	1.821.101.063.687,90	2.096.286.212.017,39	2.354.456.423.229,59	2.559.680.300.899,57	2.733.410.910.443,45	9,62
5.1.01	Belanja Pegawai	1.017.533.334.032,98	1.058.724.416.043,02	1.036.375.543.632,55	1.003.863.956.327,00	1.036.828.196.739,00	0,42
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	671.762.552.372,5	857.025.938.441,377	1.093.719.879.018,04	1.015.098.124.613,00	1.148.704.227.576,25	9,40
5.1.03	Belanja Subsidi	75.600.000,00	0	0	0	120.310.958,00	0
5.1.04	Belanja Hibah	127.732.077.282,35	162.422.857.533,00	191.359.064.579,00	335.617.206.434,47	397.904.532.628,20	23,78
5.1.05	Belanja Bansos	3.997.500.000,00	18.113.000.000,00	33.001.936.000,00	205.101.013.525,00	149.924.582.200,00	42,54
5.2	Belanja Modal	601.338.047.080,92	1.304.758.303.126,38	1.392.814.495.385,95	1.619.932.427.856,10	1.261.895.110.368,69	11,47
5.02.01	Belanja Tanah	725.423.250,00	4.151.947.000,00	22.730.785.000,00	4.893.550.000,00	10.736.412.943,00	(36,46)
5.02.02	Belanja Peralatan dan Mesin	142.873.891.529,80	200.607.141.462,11	189.959.946.990,29	132.251.393.182,50	119.422.029.667,01	(7,80)
5.02.03	Belanja Gedung dan Bangunan	153.161.358.323,09	195.316.845.448,92	240.082.515.451,29	196.536.793.766,50	273.907.615.309,89	11,58
5.02.04	Belanja Jalan Irigasi dan Bangunan	286.469.922.122,91	877.712.795.837,56	923.594.123.094,29	1.280.245.863.870,06	851.796.373.770,79	12,47
5.02.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	17.368.341.855,12	24.739.335.657,79	14.101.335.650,08	6.004.827.037,04	273.907.615.309,89	(20,67)
5.02.05	Belanja Aset lainnya	739.110.000,00	2.230.237.720,00	2.345.789.200,00	0	6.002.246.278,00	42,95
5.3	Belanja tidak terduga	54.334.600,00	632.000.000,00	5.223.498.901,00	34.619.677.607,00	34.072.835.218,00	65,65
5.3.01	Belanja tidak terduga	54.334.600,00	632.000.000,00	5.223.498.901,00	34.619.677.607,00	34.072.835.218,00	65,65
5.4	Belanja Transfer	662.932.025.381,00	1.183.391.126.195,00	606.129.145.508,00	872.687.133.786,79	1.348.646.460.028,61	3,64
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	12.379.745.270,00	15.232.584.477,00	15.826.142.824	14.489.365.785,00	21.197.184.063,00	11,22
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	650.552.280.111,00	1.168.158.541.718,00	590.303.002.684,00	858.197.768.001,79	1.327.449.275.965,61	3,25

Sumber : diolah dari LRA Kabupaten Bojonegoro.

Dari tabel diatas secara umum realisasi belanja selama lima (5) tahun mengalami pertumbuhan yaitu 11,81 persen, hal tersebut terlihat dari capaian realisasi tiap tahun mengalami kenaikan kecuali tahun 2020 yang menurun dibandingkan tahun 2019 dikarenakan pandemi Covid 19 yang mengakibatkan beberapa program kegiatan tidak dapat berjalan sesuai rencana.

Tabel 3.8. Proposi Jenis Belanja Terhadap Total Belanja Daerah

No	Uraian	Proporsi Belanja (%)					Rata-rata
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Belanja Operasi	59,02	45,72	54,02	50,32	50,83	51,98
	Belanja Pegawai	32,98	23,09	23,78	19,73	19,28	23,77
	Belanja Barang Jasa	21,77	18,69	25,09	19,96	21,36	21,37
	Belanja Subsidi	0,002	0	0	0	0,002	0,00
	Belanja Hibah	4,41	3,54	4,39	6,60	7,40	5,21
	Belanja Bansos	0,13	0,40	0,76	4,03	2,79	1,62
2	Belanja Modal	19,49	28,46	31,96	31,85	23,46	27,07
	Belanja Tanah	0,02	0,09	0,52	0,10	0,20	0,19
	Belanja Peralatan dan Mesin	4,63	4,38	4,36	2,60	2,22	3,64
	Belanja Gedung dan Bangunan	4,96	4,26	5,51	3,86	5,09	4,74
	Belanja Jalan Irigasi dan Bangunan	9,28	19,14	21,19	25,1	15,84	18,12
	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,56	0,54	0,32	0,12	5,09	1,33
	Belanja Aset lainnya	0,002	0,005	0,005	0	0,11	0,05
3	Belanja tidak terduga	0,002	0,014	0,120	0,68	0,63	0,29
	Belanja tidak terduga	0,002	0,014	0,120	0,68	0,63	0,29
4	Belanja Transfer	21,49	25,81	13,91	17,16	25,08	20,69
	Belanja Bagi Hasil	0,40	0,33	0,36	0,28	0,39	0,36
	Belanja Bantuan Keuangan	21,08	25,48	13,54	16,87	24,68	20,33

Sumber : diolah dari LRA Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022

Dari total belanja daerah, proporsi terbesar masih didominasi oleh Belanja Pegawai meskipun masih dalam batas yang aman yaitu masih dibawah 30

persen dengan rata-rata 23,77 persen. Selama 5 (lima) tahun terakhir hanya pada tahun 2018 yang melebihi 30 persen yaitu 32,98 persen. Sementara itu belanja yang lain seperti belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer cenderung naik dan turun atau fluktuatif

Berdasarkan realisasi belanja tahun 2018-2022, maka target belanja 2023 dan proyeksi belanja daerah tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9. Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026

No	Uraian	Target 2023	Proyeksi Tahun		
			2024	2025	2026
1	2		3	4	5
5	Belanja Daerah	6.974.265.726.251	6.666.549.383.053	7.223.262.439.156	6.850.032.886.457
5.1	Belanja Operasi	3.191.250.509.290	3.577.279.828.867	3.603.265.869.880	3.484.558.190.078
5.1.01	Belanja Pegawai	1.509.057.312.507	1.546.933.745.320	1.585.453.338.953	1.625.089.672.427
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.284.357.239.284	1.321.946.895.168	1.322.729.194.387	1.324.909.652.434
5.1.03	Belanja Subsidi	4.500.000.000	0	0	0
5.1.04	Belanja Hibah	319.309.957.499	625.681.543.379	612.715.691.541	451.555.220.218
5.1.05	Belanja Bansos	74.026.000.000	82.717.645.000	82.367.645.000	83.003.645.000
5.2	Belanja Modal	2.471.092.604.617	1.700.158.410.159	2.070.608.922.147	2.114.891.317.000
5.2	Belanja Modal	2.471.092.604.617	1.700.158.410.159	2.070.608.922.147	2.114.891.317.000
5.3	Belanja tidak terduga	256.814.165.984	86.401.542.650	84.425.542.750	84.525.512.750
5.3.01	Belanja tidak terduga	256.814.165.984	86.401.542.650	84.425.542.750	84.525.512.750
5.4	Belanja Transfer	1.045.108.446.360	1.302.709.601.377	1.464.962.104.379	1.166.057.866.629
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	23.183.164.686	23.523.518.834	23.870.680.059	24.224.784.515
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.21.925.281.674	1.279.186.082.543	1.441.091.424.320	1.141.833.082.114

Sumber : 2023 APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023
2024-2026 Data diolah Bappeda Bojonegoro

Proyeksi belanja daerah dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai Tahun 2024 dan seterusnya diasumsikan meningkat dengan accress sebesar 2,5%. Nilai gaji dan tunjangan ASN dan P3K rekrutmen tahun 2024-2026 diasumsikan sama dengan jumlah ASN yang pensiun.
- 2) Belanja Barang dan Jasa diasumsikan selalu meningkat untuk mengantisipasi inflasi.
- 3) Belanja spesifik grant misalnya DAK, DBHCHT, BK Provinsi dan lain sebagainya diasumsikan sama dengan Tahun 2023.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Analisis pembiayaan memberikan gambaran mengenai selisih antara pendapatan yang diterima daerah secara agregat, dengan belanja yang merepresentasikan upaya perencanaan di daerah. Asumsi pembiayaan memiliki perbedaan yang signifikan dengan upaya perhitungan pendapatan dan pengeluaran. Pembiayaan bermaksud untuk menutup kekurangan (defisit) antara pendapatan dengan belanja pada tahun tersebut. Asumsi yang digunakan adalah pembiayaan tidak memiliki kepastian untuk naik atau turun dengan maksud pembiayaan dapat mencapai angka equilibrium yakni Rp. 0,-. Sesuai dengan tujuan dan maksud analisis pembiayaan daerah diupayakan dapat menutup kekurangan atas angka belanja yang melebihi pendapatan yang diterima daerah (asumsi defisit), maka SiLPA tahun berkenaan ditinjau dari efektivitas keuangan juga dapat difungsikan sebagai saving yang tidak diduga. Namun dalam hal perencanaan SiLPA yang tinggi menunjukkan adanya perencanaan/ pelaksanaan belanja yang kurang baik.

Untuk realisasi pada penerimaan pembiayaan di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami fluktuatif. Tahun 2018 sebesar Rp. 279.075.352.965,77,- tahun 2019 naik menjadi Rp. 2.018.047.974.917,07,- tahun 2020 meningkat menjadi Rp. 2.203.232.579.597,68 kemudian tahun 2021 turun kembali menjadi Rp. 2.010.515.528.368,95 dan terakhir tahun 2022 meningkat menjadi RP. 2.828.546.653.987,29.

Selama 5 tahun terakhir realisasi penerimaan pembiayaan hanya pada pos penggunaan SiLPA Perkembangan penerimaan pembiayaan daerah dan penerimaan kembali pinjaman daerah Kabupaten Bojonegoro selama 5 tahun terakhir disajikan dalam tabel 3.11 sebagaimana tabel terlampir.

Tabel 3.10. Realisasi SILPA Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	
6	Pembiayaan Daerah						
6	1 Penerimaan Pembiayaan	279.075.352.965,77	2.018.047.974.917,07	2.203.232.579.597,68	2.010.515.528.368,95	2.828.546.653.987,29	166,06
6	1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	279.075.352.965,77	2.017.401.981.889,80	2.202.650.984.706,49	2.009.684.666.409,63	2.827.697.335.440,83	166
6	1.5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.257.393.774,83	645.993.027,27	581.594.891,19	830.861.959,32	849.318.546,46	(3,38)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan						
6	2 Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0	0	
6	2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	
6	2.2 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0	0	0	0		
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0	0	
6	3 Saldo Anggaran Lebih	(2.017.369.163.880,15)	(2.202.634.379.093,61)	0			
6	3.4 Perubahan SAL	(2.017.369.163.880,15)	(2.202.634.379.093,61)	0			
	Pembiaayaan Netto	(2.017.369.163.880,15)	2.018.047.974.917,07	2.203.232.579.597,68	2.010.515.528.368,95	2.828.546.653.987,29	(39,73)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun (SILPA)	(2.017.369.163.880,15)	2.202.808.511.312,26	2.009.684.666.409,63	2.827.697.061.799,02	3.217.754.685.162,25	(40,87)

Sumber : BPKAD Kab Bojonegoro dan data diolah

Berdasarkan data pembiayaan di atas menunjukkan bahwa pembiayaan Kabupaten Bojonegoro mengalami pertumbuhan dengan rata-rata 166,06%. Adapun dukungan terbesar ada pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) merupakan komponen dominan pada penerimaan pembiayaan daerah dengan rata-rata persentase sebesar 166%.

Sementara itu berdasarkan target 2023 dan proyeksi pendapatan dan belanja selama tiga tahun kedepan, maka proyeksi pembiayaan tahun 2024-2026 adalah:

Tabel 3.11.
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026

No	Uraian	Target 2023	Proyeksi Tahun		
			2024	2025	2026
6	Pembiayaan Daerah				
6.1	Penerimaan Pembiayaan	2.254.813.026.882	2.624.541.835.273	3.324.183.958.089	3.048.794.333.265
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	2.254.813.026.882	2.684.750.774.383	3.324.183.958.089	3.048.794.333.265
	Penerimaan Pinjaman Daerah		0	0	0
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	500.000.000.000	500.000.000.000	535.508.718.227	500.000.000.000
	Penyertaan Modal PDAM	-	10.000.000.000	-	-
	Penyertaan Modal Perumda Pangan Mandiri	-	25.508.718.227	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan (Dana Abadi Pendidikan)	500.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000

Berdasarkan komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan mulai dari target 2023 dan proyeksi 2024-2026, berikut ringkasan pagu indikatif RPD Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut:

Tabel 3.12. Proyeksi Pagu Indikatif RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026

No	Uraian	Target 2023	Proyeksi		
			2024	2025	2026
4	PENDAPATAN DAERAH	5.219.452.699.369	4.517.307.326.897	4.399.078.481.067	4.301.238.553.192
4.1	Pendapatan Asli Daerah	900.087.500.609	950.000.000.000	1.000.000.000.000	1.050.000.000.000
4.2	Pendapatan Transfer	4.259.295.367.980	3.491.853.678.471	3.322.870.296.157	3.174.268.286.433
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	3.749.463.018.513	3.391.628.078.147	3.221.642.439.830	3.072.028.151.543
4.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	611.780.577.000	617.898.382.770	624.077.366.598	630.318.140.264
4.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	1.840.156.992.513	1.063.307.038.587	870.038.189.875	696.907.859.087
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum	900.580.322.000	909.586.125.220	918.681.986.472	927.868.806.337
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	34.257.391.000	34.599.964.910	34.945.964.559	35.295.424.205
4.2.1.5	Dana Alokasi Khusus (Non Fisik)	362.687.736.000	366.314.613.360	369.977.759.494	373.677.537.089
4.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	410.599.082.000	399.921.953.30	403.921.172.833	407.960.384.561
4.2.2.1	DID	14.636.752.000	0	0	0
4.2.2.4	Dana Desa	395.962.330.000	399.921.953.30	403.921.172.833	407.960.384.561
4.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	99.233.267.467	100.225.600.324	101.227.856.327	102.240.134.890
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	99.233.267.467	100.225.600.324	101.227.856.327	102.240.134.890
4.2.3.2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	0	0	0	0
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	74.706.582.600	75.453.648.426	76.208.184.910	76.970.266.759
4.3.1	Dana Kapitasi JKN	74.706.582.600	75.453.648.426	76.208.184.910	76.970.266.759
4.3.3	Pendapatan Lainnya	0	0	0	0
5	Belanja Daerah	6.974.265.726.251	6.666.549.383.053	7.223.262.439.156	6.850.032.886.457
5.1	Belanja Operasi	3.191.250.509.290	3.577.279.828.867	3.603.265.869.880	3.484.558.190.078
5.1.01	Belanja Pegawai	1.509.057.312.507	1.546.933.745.320	1.585.453.338.953	1.625.089.672.427
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.284.357.239.284	1.321.946.895.168	1.322.729.194.387	1.324.909.652.434
5.1.03	Belanja Subsidi	4.500.000.000	0	0	0

No	Uraian	Target 2023	Proyeksi		
			2024	2025	2026
5.1.04	Belanja Hibah	319.309.957.499	625.681.543.379	612.715.691.541	451.555.220.218
5.1.05	Belanja Bansos	74.026.000.000	82.717.645.000	82.367.645.000	83.003.645.000
5.2	Belanja Modal	2.471.092.604.617	1.700.158.410.159	2.070.608.922.147	2.114.891.317.000
5.2	Belanja Modal	2.471.092.604.617	1.700.158.410.159	2.070.608.922.147	2.114.891.317.000
5.3	Belanja tidak terduga	256.814.165.984	86.401.542.650	84.425.542.750	84.525.512.750
5.3.01	Belanja tidak terduga	256.814.165.984	86.401.542.650	84.425.542.750	84.525.512.750
5.4	Belanja Transfer	1.045.108.446.360	1.302.709.601.377	1.464.962.104.379	1.166.057.866.629
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	23.183.164.686	23.523.518.834	23.870.680.059	24.224.784.515
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.21.925.281.674	1.279.186.082.543	1.441.091.424.320	1.141.833.082.114
	Surplus (Defisit)	(1.754.813.026.882)	(2.149.242.056.156)	(2.824.183.958.089)	(2.548.794.333.265)
6	Pembiayaan				
6.1	Penerimaan Pembiayaan	2.254.813.026.882	2.684.750.774.383	3.324.183.958.089	3.048.794.333.265
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.254.813.026.882	2.684.750.774.383	3.324.183.958.089	3.048.794.333.265
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	500.000.000.000	500.000.000.000	535.508.718.227	500.000.000.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	500.000.000.000	500.000.000.000	535.508.718.227	500.000.000.000
	Dana Abadi Pendidikan	500.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000
	Penyertaan Modal PDAM	0	10.000.000.000	0	0
	Penyertaan Modal Perumda Pangan Mandiri	0	25.508.718.227	0	0
	Pembiayaan Netto	1.754.813.026.882	2.149.242.056.156	2.824.183.958.089	2.548.794.333.265
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0

3.2.4 Kerangka Pendanaan

Dalam kerangka pendanaan ini bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 3 (lima) tahun ke depan yang berakhir tahun 20263 sebagaimana periode RPD, serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah adalah dengan menghitung proyeksi pendapatan daerah sebagaimana pada tabel di atas ditambah dengan pencairan Dana Cadangan (jika ada) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya tabel di atas, sehingga menghasilkan angka proyeksi total penerimaan. Proyeksi total penerimaan dikurangi dengan pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama sehingga akan menghasilkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selama 3 tahun mendatang. Berikut proyeksi pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dan kapasitas riil kemampuan keuangan selama tahun 2024-2026 sebagai berikut :

Tabel 3.13. Proyeksi pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama selama tahun 2024-2026

No	Uraian	Target 2023	Proyeksi		
			2024	2025	2026
A	Total Belanja Wajib dan Mengikat	2.558.665.758.867	2.849.493.346.697	3.050.415.443.332	2.791.147.539.056
	Belanja Pegawai	1.509.057.312.507	1.546.783.745.320	1.585.453.338.953	1.625.089.672.427
	Belanja Subsidi	4.500.000.000	0	0	0
	Belanja Bagi Hasil Pajak	17.017.707.252,00	17.358.061.400,00	17.705.222.625,00	18.059.327.081,00
	Belanja Bagi Hasil Retribusi	6.165.457.434	6.165.457.434	6.165.457.434	6.165.457.434
	Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa	1.021.925.281.674	1.279.186.082.543	1.441.091.424.320	1.141.833.082.114
B	Total Realisasi Pembiayaan	500.000.000.000	500.000.000.000	535.508.718.227	500.000.000.000
	Pembentukan Dana Cadangan	500.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000
	Penyertaan Modal	0	0	35.508.718.227	0
	Total pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	3.058.665.758.867	3.349.493.346.697	3.585.924.161.559	3.291.147.539.056

Sumber: data diolah Bappeda

Tabel 3.14. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah selama tahun 2024-2026

No	Uraian	Target 2023	Proyeksi		
			2024	2025	2026
1	Pendapatan Daerah	5.219.452.699.369	4.517.307.326.897	4.399.078.481.067	4.301.238.553.192
	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	500.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.254.813.026.882	2.684.750.774.383	3.324.183.958.089	3.048.794.333.265
	Total Penerimaan	7.974.265.726.251	7.702.058.101.280	8.223.262.439.156	7.850.032.886.457
	Dikurangi :				
2	Total pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	3.058.665.758.867	3.349.493.346.697	3.585.924.161.559	3.291.147.539.056
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	4.915.599.967.384	4.352.564.754.583	4.637.338.277.597	4.558.885.347.401

Sumber: data diolah Bappeda

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi, serta isu strategis pembangunan jangka menengah merupakan langkah untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.

Pembangunan daerah diharapkan akan melakukan perubahan tingkat kesejahteraan secara sengaja dan terukur. Perencanaan daerah juga diharapkan dapat menepis ketidakpastian dalam proses tersebut. Suatu perencanaan diupayakan dapat memperkecil peluang munculnya ketidakpastian. Oleh karena itu, bab ini akan menjelaskan mengenai:

1. Permasalahan Pembangunan, dan
2. Isu-isu Strategis.

Dengan mengetahui hal-hal di atas diharapkan dapat menekan ketidakpastian dalam pembangunan jangka menengah daerah melalui adanya identifikasi permasalahan pembangunan, hal-hal yang menimbulkan ketidakpastian serta isu-isu strategis yang terjadi dan akan terjadi.

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Bojonegoro dapat dikategorikan menjadi permasalahan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Permasalahan kerawanan dan gangguan ketertiban umum serta keamanan dari kebencanaan

A. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

- Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program pemerintah sehingga masih banyak pelanggaran Perda.

- Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kebijakan pembangunan sehingga masih terjadi adanya protes/demo terkait penataan kawasan/sarana prasarana umum.

2. Permasalahan terkait peningkatan kinerja dan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik serta implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Hal ini berhubungan dengan permasalahan yang ada di masing-masing urusan sebagai berikut:

- A. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
 - Secara umum penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum terlaksana secara penuh, namun sudah ada sarana prasarana pendukung meskipun masih harus di lengkapi dan diperkuat sesuai standar kriteria SNI ISO/IEC 27001.
- B. Urusan Sekretariat Daerah
 - Belum optimalnya tata kelola kelembagaan, tata laksana serta akuntabilitas kinerja
 - Belum adanya SOP yang jelas di semua layanan pemerintahan dan pelayanan publik
- C. Urusan Inspektorat
 - Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
- D. Urusan Perencanaan
 - Masih kurangnya sinkronisasi dan konsistensi antar dokumen perencanaan
 - Belum tepatnya tolok ukur/indikator kinerja untuk mencapai tujuan yang diharapkan (belum berorientasi hasil)
- E. Urusan Keuangan
 - Belum optimalnya pemasukan pajak dan retribusi daerah
 - Belum optimalnya basis data sumber PAD
 - Menurunnya penerimaan daerah yang disebabkan harga minyak dunia anjlok.
- F. Urusan Kepegawaian
 - Rendahnya tingkat kompetensi dan profesionalisme aparatur
 - Belum terpenuhinya kebutuhan aparatur.

G. Urusan Perpustakaan

- Terbatasnya bahan pustaka di Perpustakaan.
- Belum optimalnya kegiatan yang mengarah pada pemahaman budaya literasi masyarakat.

H. Urusan Kearsipan

- Belum optimalnya OPD dan Pemdes yang menerapkan arsip secara baku.
- Penyimpanan arsip belum berbasis teknologi.
- Belum adanya gudang kearsipan yang layak.
- Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM Arsiparis.

I. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Masih adanya penduduk yang belum memiliki dokumen peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- Pelayanan untuk masyarakat belum optimal karena jarak dari tempat tinggal ke lokasi relatif jauh.
- Kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan masih kurang.
- Masih adanya penduduk yang belum memiliki dokumen peristiwa kependudukan dan peristiwa penting karena keterbatasan fisik untuk menjangkau unit layanan dan kurangnya pemahaman atas perlunya dokumen tersebut.

J. Urusan Perhubungan

- Sarana dan prasarana perhubungan kurang memadai
- Banyaknya perlintasan sebidang jalur kereta api yang belum terdapat Pos Jaga Lintasan ataupun Palang Pintu.
- Adanya beberapa ruas jalan yang masih sempit.
- Adanya perlengkapan jalan dan halte bus/angkutan yang kurang layak
- Kondisi alat pengujian kendaraan bermotor yang sudah tua dan tidak bisa difungsikan
- Belum adanya terminal barang (Cargo)

K. Urusan Komunikasi dan Informatika

- Masih kurangnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik
- Belum optimalnya keamanan data dan informasi pemerintah

L. Urusan Statistik

- Belum optimalnya pengelolaan data pemerintahan
- Belum terintegrasinya secara maksimal sumber data antara Badan Pusat Statistik dengan pemerintah.

3. Masih rendahnya dan belum meratanya kesejahteraan masyarakat, serta ketahanan pangan pada masyarakat berpenghasilan rendah

1) Masalah Kualitas Sumber Daya Manusia

Permasalahan terkait upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini berhubungan dengan permasalahan urusan-urusan sebagai berikut:

A. Urusan Pendidikan

- Belum meratanya akses dan mutu pendidikan khususnya di daerah pinggiran
- Masih minimnya kemampuan literasi dan pengembangan belajar
- Masih kurangnya tenaga pendidik baik dari kualitas maupun kuantitas
- Rendahnya tingkat kesejahteraan GTT

B. Urusan Kesehatan

- Belum optimalnya unit pelayanan sesuai dengan standar yang diharapkan;
- Tingginya tingkat antrian operasi;
- Belum terintegrasinya sistem informasi pelayanan kesehatan rumah sakit;
- Kurangnya pengetahuan dan informasi tentang kesehatan;
- Tingginya AKI AKB;
- Tingginya prevalensi stunting;
- Belum optimalnya pola hidup masyarakat bersih dan sehat.

C. Urusan Perdagangan

- Belum optimalnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB;
- Nilai Impor lebih besar dari ekspor sehingga menyebabkan defisit perdagangan.

D. Urusan Pangan

- Kurang optimalnya ketersediaan dan kualitas konsumsi terhadap

- Belum optimalnya pengembangan cadangan pangan di tingkat masyarakat.

E. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- Menurunnya prestasi pemuda, olahraga, dan kepramukaan
- Minimnya sarana dan prasarana pengembangan kepemudaan dan olahraga

F. Urusan Kebudayaan

- Masih kurangnya keikutsertaan pelaku budaya dan kesenian pada event-event budaya

G. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Masih rendahnya pola pikir mindset masyarakat tentang pendewasaan usia kawin dan dua anak cukup
- Masih rendahnya ketahanan ekonomi dan kesejahteraan keluarga

H. Urusan Kearsipan

- Belum optimalnya tata kelola kearsipan.
- SDM pengelola arsip yang masih minim sehingga menyebabkan belum optimalnya tata kelola arsip daerah.

4. Masalah Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak

Permasalahan terkait peningkatan keberpihakan terhadap perempuan, anak, penyandang difabel, dan kaum dhuafa/fakir miskin. Hal ini berhubungan dengan permasalahan urusan-urusan sebagai berikut:

A. Urusan Sosial

- Kurangnya akurasi data PMKS dan kemiskinan
- Terbatasnya aksesibilitas, sarana prasarana pelayanan menangani PMKS (PPKS) dan pemberdayaan partisipasi masyarakat (PSKS)

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Rendahnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak

5. Masalah pertumbuhan ekonomi dan peluang kerja

Permasalahan terkait upaya mengurangi pengangguran dan menciptakan peluang kerja. Hal ini berhubungan dengan permasalahan urusan-urusan sebagai berikut:

- A. Pertumbuhan ekonomi minus selama tiga tahun berturut-turut selama tahun 2020 – 2022, pertumbuhan ekonomi selalu menurun bahkan minus sampai sekitar 6 persen, khususnya PDRB dengan Migas.
- B. Urusan Tenaga Kerja
 - Penurunan tenaga kerja yang tertampung;
 - Keterbatasan jumlah lahan pekerjaan dibandingkan jumlah angkatan kerja;
 - Keterbatasan jumlah lahan pekerjaan dibandingkan jumlah angkatan kerja;
 - Ketidaksesuaian antara kebutuhan pasar kerja dengan kompetensi angkatan kerja;
 - Pandemi suatu penyakit membuat roda perekonomian mengalami dampak kejutan yang mengakibatkan lapangan kerja menjadi berkurang.
- C. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
 - Masih rendahnya jumlah koperasi sehat
- D. Urusan Perindustrian
 - Menurunnya unit usaha industri kimia, agro dan hasil hutan;
 - Menurunnya penyerapan tenaga kerja sektor industri kimia, agro dan hasil hutan;
 - Menurunnya pendapatan sektor industri kimia, agro dan hasil hutan;
 - Menurunnya nilai produksi sektor industri kimia, agro dan hasil hutan;
 - Masih banyak potensi alam hasil pangan yang belum diolah secara maksimal;
 - Rendahnya investasi di Bojonegoro, baik dari sisi nilai investasi maupun jumlah investor yang bergerak disektor industri.
- E. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - Belum optimalnya pembinaan pembangunan desa;
 - Rendahnya aparatur desa dalam pelayanan publik;
 - Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan masih rendah dan peran pendamping masih belum maksimal;
 - Masih kurangnya kesadaran serta sosialisasi tentang peran dan fungsi aparatur pemerintahan desa;

- Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Belum optimalnya pola pemikiran teamwork perangkat desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa.

6. Daya saing ekonomi daerah

Permasalahan upaya meningkatkan daya saing ekonomi. Hal ini berhubungan dengan permasalahan urusan-urusan sebagai berikut:

A. Urusan Kelautan dan Perikanan

- Sulitnya menyediakan benih ikan yang berkualitas;
- Tingginya biaya input produksi dan kenaikan harga ikan yang tidak seimbang;
- Belum termanaatkannya saluran air kota untuk edukasi budidaya ikan;
- Lemahnya kelembagaan/administrasi kelompok pengolahan dan pemasaran ikan;
- Rendahnya mutu hasil produk olahan ikan;
- Mahalnya harga pakan ikan.

B. Urusan Pariwisata

- Belum optimalnya promosi wisata;
- Menurunnya jumlah kunjungan wisata;
- Pembatasan kegiatan akibat pandemi covid-19.

C. Urusan Pertanian

- Masih kurang optimalnya produktivitas hasil pertanian;
- Belum efektifnya alur tata niaga pangan;
- Masih kurangnya sarana dan prasarana pertanian, termasuk penurunan luas serta tingkat kesuburan lahan pertanian;
- Mahalnya harga pupuk.

D. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

- Kurangnya identifikasi potensi hasil tambang sehingga kegiatan eksploitasi pertambangan belum dapat diberdayakan dengan optimal.

E. Urusan Perindustrian

- Masih kurang berkembangnya kualitas dan kuantitas industri;
- Belum optimalnya daya saing bidang industri;
- Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung perindustrian.

F. Urusan Penanaman Modal

- Belum optimalnya strategi peningkatan iklim investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja
- Kinerja investasi di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan nilai investasi antara tahun 2018 – 2021 menunjukkan terjadi fluktuasi nilai investasi dari tahun ke tahun. faktor eksternal yang paling berpengaruh adalah pada Tahun 2020-2021 situasi pandemic covid-19 yang berpengaruh pada perekonomian;

G. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Belum optimalnya pembangunan desa;
- Masih rendahnya pemahaman desa dalam membangun pedesaan untuk penanganan secara menyeluruh, terintegrasi, harus melibatkan 4 (empat) pilar pembangunan berbasis potensi ekonomi dan komoditi unggulan pedesaan;
- Masih besarnya jumlah penduduk miskin karena kurang berkembangnya usaha ekonomi produktif keluarga miskin yang disebabkan oleh terbatasnya akses dalam memanfaatkan sumberdaya pembangunan untuk mengembangkan usaha perekonomian;
- Masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif dan kreatif desa yang bertujuan meningkatkan pendapatan asli desa dengan memanfaatkan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) serta Badan Usaha Milik Desa (BumDes).

H. Urusan Perdagangan

- Masih kurangnya kecukupan produk lokal sehingga masih menggantungkan pada pasokan luar daerah;
- Rendahnya nilai ekspor daerah dalam bidang perdagangan karena masih masa awal pemulihan ekonomi.

7. Masalah pemerataan dan percepatan pembangunan infrastruktur antara desa dan kota, yang berbasis risiko bencana dan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)

Permasalahan terkait upaya pemerataan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini berhubungan dengan permasalahan urusan-urusan sebagai berikut:

A. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Rendahnya tingkat kualitas jalan belum menyesuaikan kondisi geografis di Kabupaten Bojonegoro;
- Minimnya akses penghubung jalan/jalan alternatif penghubung antar wilayah;
- Minimnya regulasi dan informasi penataan ruang;
- Walaupun dengan potensi air yang begitu besar namun Kabupaten Bojonegoro masih mengalami permasalahan kekurangan air irigasi disebabkan karena tingginya kehilangan air, Kesadaran petani untuk mematuhi Rencana Tata Tanam Global (RTTG) sangat rendah, kondisi infrastruktur dan pemakaian non irigasi
- Belum optimalnya capaian sarana dan prasarana perumahan dan permukiman (air minum, air limbah, drainase dan sanitasi)

B. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Masih tingginya angka rumah tidak layak huni;
- Belum seluruhnya masyarakat Kabupaten Bojonegoro terlayani air minum layak;
- Kurang memadainya kapasitas saluran drainase;
- Masih adanya kawasan kumuh perkotaan;
- Masih adanya wilayah permukiman dengan sarana dan prasarana yang belum memadai.

C. Urusan Lingkungan Hidup

- Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang belum memadai
- Kurangnya pengendalian pencemaran udara;

- Kurangnya pengelolaan persampahan;
- Adanya Perubahan iklim.

D. Urusan Pertanahan

- Masih banyaknya lahan/bidang tanah belum bersertifikat;

E. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat:

- Belum Optimalnya mitigasi dan sinergitas semua elemen dalam penanganan bencana;
- Pengurangan Risiko Bencana belum dilaksanakan secara menyeluruh;
- Cakupan wilayah layanan kebakaran yang luas;
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana pemadam dan penyelamatan.

4.2 ISU-ISU STRATEGIS

4.2.1 Isu Strategis Internasional

A. Pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*

SDGs merupakan langkah penting yang diambil dalam mendesak kebutuhan untuk mengakhiri kemiskinan serta untuk melindungi dan memulihkan keadaan bumi dan memastikan bahwa dalam proses mewujudkan semua itu, tidak ada siapapun, atau golongan manapun yang ketinggalan. Tujuan dan target SDGs merupakan rencana tindakan 15 tahun untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dalam tiga dimensi, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. SDGs dimaksudkan untuk mewujudkan hak asasi manusia bagi semua termasuk mencapai kesetaraan gender, pemberdayaan wanita, dan anak perempuan yang merupakan bagian tak terpisahkan pada tiga dimensi dalam pembangunan berkelanjutan. Semua elemen negara, serta seluruh pemerintah daerah di Indonesia harus turut berkontribusi dalam pencapaian SDGs di daerahnya masing-masing. Kabupaten Bojonegoro juga mendukung agenda SDGs. Adapun 17 Goals SDGs adalah:

1. *No Poverty* / Tanpa Kemiskinan

Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimanapun.

2. *Zero Hunger* / Tanpa Kelaparan

Menghilangkan Kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.

3. *Good Health and Well Being / Kehidupan Sehat dan Sejahtera*
Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
4. *Quality Education / Pendidikan Berkualitas*
Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. *Gender Equality / Kesenjaraan Gender*
Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
6. *Clean Water and Sanitation / Air Bersih dan Sanitasi Layak*
Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. *Affordable and Clean Energy / Energi Bersih dan Terjangkau*
Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua.
8. *Decent Work and Economic Growth / Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi*
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. *Industry, Innovation, and Infrastructure / Industri, Inovasi, dan Infrastruktur*
Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. *Reduced Inequality / Berkurangnya Kesenjangan*
Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara.
11. *Sustainable Cities and Communities / Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan*
Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
12. *Responsible Consumption and Production / Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab*
Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. *Climate Action / Penanganan Perubahan Iklim*
Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.

14. *Life Below Water* / Ekosistem Lautan

Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.

15. *Life on Land* / Ekosistem Daratan

Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

16. *Peace and Justice Strong Institutions* / Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, serta inklusif di semua tingkatan.

17. *Partnerships for The Goals* / Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan SDGs pada Tahun 2030 sebagaimana telah disepakati, tujuan-tujuan SDGs harus menjadi kerangka penyusunan dokumen perencanaan dan diwujudkan dalam dokumen penganggaran pusat maupun daerah. Kabupaten Bojonegoro mengusung isu strategis terkait dengan penghapusan kemiskinan ekstrem di tahun 2024. Selain itu peningkatan kualitas Pendidikan juga diimplementasikan dengan menjadikan indikator indeks Pendidikan sebagai indikator sasaran RPD. Demikian juga isu kesetaraan gender telah tertuang di RPD dengan indikator IPG. Pencapaian tujuan SDGs lainnya juga telah tercermin dalam IKU, IKD serta indikator yang tersebar dalam sasaran dan program di masing-masing renstra perangkat daerah.

Tabel 4.1. Relevansi Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Bojonegoro Berdasarkan Telaah SDGs yang Menjadi Kewenangan Kabupaten

No	Tujuan SDGs	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Provinsi	Isu Strategis Bojonegoro
1	Tanpa kemiskinan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk	Pertumbuhan & Pemerataan Ekonomi serta	Ekonomi Hijau (Green Economy And Environment)
	Tanpa kelaparan			

No	Tujuan SDGs	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Provinsi	Isu Strategis Bojonegoro
	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan yang Berkualitas	Kesejahteraan Masyarakat	Penguatan Ketahanan Pangan
	Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab			
2	Berkurangnya kesenjangan	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan		Percepatan Pembangunan Desa & Kota
	Kota dan komunitas berkelanjutan			
3	Kehidupan sehat dan sejahtera	Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing	Penanganan Pandemi Covid-19 & Pemulihan Ekonomi Jawa Timur	Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan & Kesehatan, Kemiskinan & Stunting)
	Pendidikan berkualitas			
	Kesetaraan gender			
4	Kemitraan untuk mencapai tujuan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Keagamaan dan Kebudayaan	Ekonomi Kreatif Dan Digitalisasi
5	Air bersih dan sanitasi layak	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan & Berkelanjutan	
	Industri, inovasi dan infrastruktur			
6	Energi bersih dan terjangkau	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim		Kebencanaan
	Penanganan perubahan iklim			
	Ekosistem laut			
	Ekosistem darat			

No	Tujuan SDGs	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Provinsi	Isu Strategis Bojonegoro
7	Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Memperkuat Stabilitas POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan & Reformasi Birokrasi Demokrasi Kewargaan	Implementasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

B. Revolusi Industri 4.0.

Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Teknologi digital juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya pendidikan melalui Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Teknologi digital juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya pendidikan melalui

C. Krisis Energi

Transisi energi yang tengah dilakukan Indonesia menjadi salah satu upaya menjaga ketahanan energi dan mewujudkan ekonomi hijau di Indonesia. Dalam perhelatan Presidensi G20 tahun 2022 lalu, Pemerintah juga telah menghasilkan sejumlah kerja sama pembiayaan dan investasi di sektor energi. Hal ini terlihat dari kerja sama *Partnership for Global Infrastructure and Investment*, *Asia Zero Emission Community (AZEC)*, *Just Energy Transition Partnership (JETP)*, dan *Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact*.

Transisi energi menjadi upaya sekaligus komitmen Pemerintah untuk mengantisipasi krisis energi ke depan, dan Pemerintah telah meningkatkan bauran sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23% di tahun 2025,

hingga 31% di tahun 2030. Pemerintah terus mendorong berbagai kebijakan di sektor energi, salah satunya biodiesel B35 yang akan diimplementasikan di bulan Februari nanti. Hingga pertengahan tahun 2022, tercatat kapasitas pembangkit listrik EBT telah mencapai 2.576 megawatt, atau meningkat sekitar 5% per tahunnya dalam lima tahun terakhir. Upaya tersebut masih perlu diakselerasi bersamaan dengan upaya lain dalam transisi energi, seperti transisi PLTU menjadi PLT non-fosil. Tantangan yang ada dalam upaya transisi energi adalah tantangan bersama antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Momentum Indonesia sebagai ketua pada ASEAN tahun ini (2023) juga perlu dimanfaatkan untuk bersama-sama mendorong peluang-peluang dalam sektor energi untuk penguatan ekonomi kawasan yang tumbuh cepat, inklusif, serta berkelanjutan. (Sumber : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Januari 2023).

D. Ketahanan Pangan

Kementerian Luar Negeri RI menilai angka krisis pangan cukup mengkhawatirkan. Diperkirakan 179 sampai 181 juta orang di 41 negara akan menghadapi krisis pangan. Namun ada hal yang lebih mengerikan lagi, adanya aspek yang sering luput dari perhatian, yakni krisis pupuk. Dampak krisis pupuk bagi ketahanan pangan ke depan, di tahun-tahun depan jika krisis pupuk ini tidak ditangani, maka tahun depan dampaknya akan dapat memicu krisis beras. (Sumber : Lemhannas RI, Oktober 2022).

Berbicara mengenai krisis beras, maka akan terkait dengan dua milyar orang yang sebagian tinggal di Asia. Itu bagian pertama bahwa inilah situasi dunia saat presidensi Indonesia dijalankan. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bahwa jumlah orang yang rawan pangan meningkat dua kali lipat hanya dalam 2 tahun. Efek dari situasi Ukraina dapat mendorong jumlah ini meningkat menjadi 323 juta orang.

Krisis pangan, energi, keuangan dengan cepat menjadi bagian dari realitas dunia dan Rusia serta Ukraina memiliki posisi yang cukup penting dalam rantai pasok pangan dan energi global. Sehingga, lonjakan harga pangan dan energi tidak dapat dihindari akibat perang antara Rusia dan Ukraina. Indeks harga pangan naik 20,8 persen dari tahun sebelumnya dan sempat mencapai titik tertinggi pada Maret 2022. Harga minyak mentah menembus angka 12USD per barel. Harga energi meningkat 50 persen dibanding tahun lalu. Di Eropa,

harga gas bahkan meningkat 10 kali lipat jika dibandingkan tahun 2022. Sementara pupuk dunia meningkat 2 kali lipat dibandingkan rata-rata sepuluh tahun belakangan ini.

E. Resesi Ekonomi

Perekonomian dunia diprediksi akan dihantam resesi tahun 2023, serta dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur

Bank Dunia dalam laporannya yang berjudul *"Is a Global Recession Imminent?"* memprediksi kemungkinan terjadinya resesi ekonomi global pada tahun 2023 mendatang. Prediksi tersebut, terasa semakin nyata dengan beberapa indikasi yang sudah mulai terjadi, seperti kenaikan suku bunga acuan secara agresif yang dilakukan bank sentral berbagai negara dalam upaya meredam laju inflasi.

Presiden menyatakan bahwa ketidakpastian global saat ini sangat mengkhawatirkan banyak negara, termasuk Indonesia. Akibat kenaikan harga energi hingga suku bunga acuan di berbagai negara, inflasi menjadi melonjak. Sudah terdapat 5 negara dengan lonjakan inflasi hingga di atas 80%. Sementara inflasi Indonesia per November 2022 mencapai 5,42% dan diprediksi tembus 6 persen di akhir tahun ini. Ancaman resesi dan perlambatan ekonomi global pada tahun 2023 bukanlah tantangan yang mudah, terutama akibat ketegangan geopolitik yang berimbas pada disrupsi rantai pasok global berpotensi berimbas pada perekonomian domestik. Disamping tantangan geopolitik dan resesi ekonomi tersebut, beliau mengatakan dunia juga menghadapi tantangan perubahan iklim yang akan sangat mempengaruhi keuangan negara, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat. (Sumber : KPBU, Kementerian Keuangan, Desember 2022)

Faktor pemicu terjadinya resesi

Beberapa faktor pemicu resesi ekonomi global yang dikhawatirkan akan terjadi tahun depan, yaitu:

1. Pandemi Covid-19, walaupun sudah mulai mereda dan banyak negara yang telah membebaskan warganya untuk beraktivitas seperti biasa. Namun pada saat meluasnya wabah Covid-19 pada awal tahun 2020 sampai dengan awal tahun ini, aktivitas ekonomi global menurun drastis. Setiap negara lebih fokus untuk menangani Covid-19 dan menerapkan pembatasan aktivitas, termasuk

aktivitas ekonomi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi secara global pun mengalami kontraksi. Pada saat yang sama, banyak negara melakukan proteksi atas hasil pangan untuk mengantisipasi wabah Covid-19 yang berkepanjangan dan berakibat pada meningkatnya harga pangan karena kurangnya suplai. Indonesia juga sempat mengalami resesi ekonomi pada akhir tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.

2. Perang Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak bulan Februari lalu, telah menghilangkan PDB global hingga USD2,8 triliun. Perang Rusia- Ukraina mengganggu rantai pasok global sehingga menimbulkan krisis terutama di sektor pangan dan energi, yang pada akhirnya mengakselerasi laju inflasi. Perang Rusia-Ukraina merupakan factor utama penyebab terjadinya resesi ekonomi global yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2023 mendatang.
3. Tingginya tingkat inflasi. Dalam laporan *World Economic Outlook* edisi Oktober 2022, International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan laju inflasi global mencapai 8,8% pada 2022 dan akan menurun pada tahun 2023 yaitu menjadi 6,5%. Inflasi Indonesia menurut Bank Indonesia diproyeksikan menurun dan kembali ke dalam sasaran $3,0 \pm 1\%$ pada 2023 dan $2,5 \pm 1\%$ pada 2024. Menyikapi hal ini, beberapa negara sudah menarik insentif moneter dan fiskalnya sebagai upaya mengatasi risiko dari inflasi yang terus meningkat.
4. Kenaikan suku bunga.

4.2.2 Isu Strategis Nasional

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan Kabupaten Bojonegoro antara lain adanya amanah kebijakan-kebijakan nasional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Isu strategis nasional dapat ditelaah dari dokumen RPJMN tahun 2020-2024. Isu-isu strategis nasional dalam RPJMN yang perlu dipertimbangkan sehingga selaras dengan kebijakan pembangunan kabupaten Bojonegoro tahun 2024-2026 antara lain:

- 1) Urgensi peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dan cenderung stagnan;
- 2) Permasalahan bidang tenaga kerja, investasi, dan perdagangan di Indonesia berakar dari lemahnya tata kelola pemerintahan dan institusi.

- 3) Penciptaan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia unggul untuk menyelesaikan permasalahan rendahnya akses dan kualitas pendidikan, capaian indikator kesehatan Indonesia yang masih rendah dan tertinggal dibandingkan negara sebanding, serta permasalahan karakter bangsa;
- 4) Infrastruktur masih terbatas yang diindikasikan oleh penurunan stok infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto, stok infrastruktur di bawah rata-rata internasional, tingginya biaya logistik serta kinerja infrastruktur logistik yang rendah;
- 5) Berbagai isu kewilayahan di Indonesia, seperti ketimpangan antar wilayah, konektivitas yang belum optimal, akses dan kualitas pelayanan dasar yang masih terbatas; ketergantungan APBD terhadap Dana Transfer yang tinggi, proses perizinan yang lama dan berbiaya tinggi, lemahnya pengelolaan urbanisasi, pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan peruntukannya, kepastian hukum dan penguasaan/pemanfaat atas tanah yang timpang, serta dominannya wilayah metropolitan Jakarta dalam perekonomian nasional dan tingginya gap dengan daerah lain di Indonesia;
- 6) Isu lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana;
- 7) isu politik, hukum, pertahanan dan keamanan yang meliputi belum kokohnya kelembagaan demokrasi, belum optimalnya pelaksanaan kebijakan luar negeri, penegakan hukum, serta kinerja kelembagaan birokrasi dan pelayanan publik.

Berdasarkan isu strategis nasional tersebut, maka implementasi keselarasannya dengan pembangunan daerah adalah memasukkannya dalam beberapa tujuan pembangunan.

Secara detail isu strategis juga dijabarkan pada poin-poin berikut:

A. Bidang Sosial, Budaya dan Agama

1. Mengurangi konflik sosial dalam pengelolaan SDA;
2. Peningkatan kualitas SDM dan karakter bangsa;
3. Pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah;
4. Penguatan Ideologi Pancasila serta persatuan dan kesatuan bangsa.

B. Bidang Ekonomi

1. Penguasaan SDA oleh negara untuk kesejahteraan rakyat;

2. Mengoptimalkan nilai tambah (Hilirisasi) dan pengelolaan pusat ekonomi;
3. Pengembangan SDM untuk mendukung industri;
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
5. Penelitian dan pengembangan untuk mendukung perekonomian;
6. Perlambatan ekonomi yang diakibatkan dampak pandemi COVID-19 sangat memukul seluruh sendi perekonomian;
7. Pengembangan dan pemberdayaan koperasi, peningkatan skala usaha mikro, dan revitalisasi pasar daerah.

C. Bidang IPTEK

1. Pengembangan keanekaragaman hayati (darat dan laut);
2. Pengembangan SDM handal berbasis IPTEK;
3. Pembentukan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah;
4. Pengembangan infrastruktur jaringan komputer dan pusat data;
5. Peningkatan pengelolaan informasi dan publikasi melalui berbagai media;
6. Peningkatan layanan keamanan informasi ISO 27001 pada pusat data.

D. Bidang Sarana dan Prasarana

1. Mendukung pusat-pusat pengembangan SDA;
2. Peningkatan sarana prasarana untuk SDM berkualitas;
3. Pengembangan industri transportasi (darat, laut, dan udara);
4. Peningkatan ketersediaan sarana prasarana di beberapa urusan, seperti urusan kesehatan, pendidikan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan sebagainya.

E. Bidang Politik

- Menghindari intervensi politik dalam pengelolaan SDA.

F. Bidang Hankam

1. Pengembangan industri pertahanan strategis;
2. Peningkatan penegakan pelanggaran ketertiban dan keamanan
3. Memberantas pembalakan liar, pencurian ikan, dan pertambangan liar.

G. Bidang Hukum dan Aparatur

1. Reformasi birokrasi pusat dan daerah;
2. Tingkat kompetensi dan sumber daya aparatur;

3. Penegakan hukum dan tata kelola dalam pengelolaan SDA.
- H. Bidang Wilayah dan Tata Ruang
 - Penetapan kawasan lindung dan budidaya.
- I. Bidang SDA dan Lingkungan Hidup
 1. Kestinambungan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup;
 2. Budaya sadar lingkungan;
 3. Peningkatan kemampuan lptek dalam pengelolaan SDA;
 4. Peran aktif masyarakat dalam pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan.

4.2.3 Isu- Isu Strategis Regional

Isu-isu strategis regional mengacu pada isu strategis Provinsi Jawa Timur yang dirumuskan dalam dokumen P-RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Timur mencakup 6 hal, antara lain: (1) Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Keagamaan dan Kebudayaan; (2) Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Serta Kesejahteraan Masyarakat; (3) Tata kelola Pemerintah dan Reformasi Birokrasi; (4) Demokrasi Kewargaan; (5) Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan; dan (6) Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Jawa Timur.

Dari keenam isu strategis tersebut, isu pertama, kedua, ketiga serta kelima telah diturunkan dalam tujuan pembangunan Kabupaten Bojonegoro tahun 2024-2026. Sedangkan isu strategis ke-6 tidak secara eksplisit disebutkan dalam tujuan pembangunan namun telah diturunkan dalam sasaran pembangunan dan tujuan renstra dari dinas kesehatan dengan memberikan perhatian kepada peningkatan kualitas Kesehatan masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Pada isu strategis keempat, diterjemahkan ke dalam penciptaan kondisi yang aman dan tertib, dimana masyarakat bebas berpendapat (sesuai konstitusi) dan dijamin keamanannya oleh pemerintah daerah. Implementasi hal tersebut dalam pembangunan telah terangkum dalam tujuan pembangunan pertama di Kabupaten Bojonegoro.

Selanjutnya isu-isu strategis regional dapat diamati pada penjabaran berikut:

A. Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

1. Pelayanan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia serta merupakan komponen variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Timur harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan di masa depan.

Adapun hal lainnya untuk menunjang pembangunan pendidikan, yaitu pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik, baik di tingkat SD maupun SMP, mengoptimalkan honorarium Guru Tidak Tetap (GTT), peningkatan kemampuan literasi dan pengembangan belajar, pengembangan diri siswa melalui kegiatan intra maupun ekstra sekolah, dan pengembangan sekolah rujukan, dimana sekolah didorong mempunyai keunggulan pada bidang tertentu.

2. Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

Pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Jawa Timur adalah pelayanan yang bersifat publik dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut, antara lain promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, AKI, AKB, kesehatan jiwa, serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya. Keseluruhan program pelayanan kesehatan masyarakat tersebut tentunya perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang sesuai standar, tersedianya fasilitas rujukan rumah sakit, serta mutu pelayanan kesehatan yang bermutu.

Pandemi COVID-19 mengubah program dan kegiatan pelayanan kesehatan yang ada. Program dan kegiatan difokuskan pada penanganan penyakit yang secara luas mengancam jiwa masyarakat. Refocusing dan realokasi anggaran diperuntukkan pada anggaran kesehatan. Besarnya anggaran sektor kesehatan diharapkan dapat

meningkatkan pencegahan dan penanganan pasien yang terdampak akibat pandemi.

Selain itu, terdapat beberapa hal penting yang membuat masyarakat merasakan manfaat dari pelayanan pemerintah pada bidang kesejahteraan sosial, antara lain adanya aksesibilitas sarana prasarana dan tenaga ahli dalam menangani PMKS (PPKS), pemberdayaan partisipasi PSKS, pemenuhan kebutuhan dasar anak dalam panti (LKSA), bantuan sosial terhadap korban bencana, adanya diklat/bimtek bagi Tagana dan Pelopor, dan penanganan masalah sosial yang timbul akibat COVID-19.

B. Kemiskinan, Pengangguran, dan Lapangan Kerja

1. Kemiskinan

Isu kemiskinan masih menjadi isu penting yang belum dapat terselesaikan sampai dengan saat ini. Kemiskinan seringkali dipahami sebagai rendahnya tingkat kesejahteraan, padahal kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang bersifat multidimensi dan sangat penting untuk ditangani melalui dukungan seluruh pemangku kepentingan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah selama ini untuk memberikan peluang pada masyarakat miskin untuk mengurangi kemiskinan. Kemiskinan terjadi akibat banyaknya keluarga yang ekonominya kurang baik, lapangan kerja yang masih kurang, pendidikan yang rendah, dan kurangnya keterampilan. Salah satu prasyarat keberhasilan pengentasan kemiskinan adalah dengan cara mengidentifikasi kelompok sasaran dan wilayah sasaran dengan tepat. Program pengentasan dan pemulihan nasib orang miskin tergantung dari langkah awal, yaitu ketetapan mengidentifikasi siapa yang dikatakan miskin dan dimana dia berada. Aspek dimana “si miskin” dapat ditelusuri melalui si miskin itu sendiri serta melalui pendekatan-pendekatan profil wilayah atau karakter geografis.

Adapun dampak COVID-19 terhadap kondisi kemiskinan disebabkan oleh banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) naik kemudian menjadikan angka kemiskinan ikut meningkat. Kondisi tersebut juga

mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dan sangat membutuhkan adanya dukungan, baik berbentuk moril maupun materiil dari seluruh pihak instansi/lembaga masyarakat.

2. Pengangguran dan lapangan kerja

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 sebesar 3,99 persen, dan pada tahun 2019 turun menjadi 3,92 persen. Namun, adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja yang masih tinggi akibat lesunya perekonomian. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 meningkat menjadi 5,84 persen.

Dalam meningkatkan penduduk yang bekerja, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan strategi, diantaranya melalui bursa tenaga terbuka dan online, serta menyiapkan tenaga kerja yang kompeten melalui pendidikan kejuruan dan lembaga pelatihan kerja. Dengan melihat kondisi tersebut maka penanganan pengangguran di Provinsi Jawa Timur berfokus pada upaya perlindungan, pemberdayaan, perluasan kesempatan kerja, dan lapangan usaha, serta peningkatan kualitas calon tenaga kerja melalui peningkatan kualitas prasarana sarana dan pengelola Balai Latihan Kerja (BLK), pendidikan yang berorientasi pasar kerja, pengembangan informasi pasar kerja, serta pengembangan wirausaha baru sektor UMKM berbasis sumber daya lokal termasuk kewirausahaan di kalangan pemuda.

Upaya penanganan pengangguran dilakukan secara terintegrasi dengan pembangunan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur sehingga dapat membuka lapangan kerja baru yang pada akhirnya aspek-aspek produktif tersebut diharapkan mampu menjamin keberlanjutan pasar tenaga kerja.

Pandemi penyakit membuat kontraksi perekonomian sehingga lapangan kerja menjadi berkurang. Pemerintah perlu membuat pelatihan kerja dan pendampingan usaha bagi masyarakat yang terdampak pandemi.

C. Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi

Untuk melihat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dapat dilihat dari besaran nilai PDRB atas dasar harga konstan karena pertumbuhan ekonomi ini benar-benar diakibatkan oleh perubahan jumlah barang dan jasa yang sudah bebas dari pengaruh harga (pertumbuhan riil). Pada tahun 2018 perekonomian Jawa Timur tumbuh 5,5 persen, kemudian pada tahun 2019 menjadi 5,52 persen, sedangkan pada tahun 2020 akibat pandemi covid-19 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur mengalami kontraksi atau tumbuh minus 2,39 persen.

Dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi daerah yang berkesinambungan dan menjaga kesejahteraan masyarakat maka sangat penting untuk menjaga tingkat inflasi. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan berfluktuasi memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, inflasi menggerus daya beli serta akan menyulitkan pelaku usaha di dalam mengkalkulasi biaya input produksi, dan secara makro dapat mengganggu kinerja pertumbuhan ekonomi. Pengendalian laju inflasi akan mampu menjaga serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah pada masa mendatang.

Ekonomi global diprediksi akan mengalami resesi akibat mengingat sebagian besar negara dengan perekonomian besar menjadi negara dengan dampak COVID-19 yang paling tinggi. Indonesia dan wilayah Provinsi Jawa Timur tidak luput dari kondisi di atas. Prediksi pertumbuhan ekonomi akan mengalami perlambatan bahkan bisa menjadi negatif. Oleh karena itu, penting untuk melakukan upaya-upaya menggerakkan ekonomi melalui belanja konsumsi masyarakat dan belanja pemerintah sebagai *multiplier* pertumbuhan ekonomi.

D. Infrastruktur dan Perhubungan

Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan terus diupayakan untuk mendukung kelancaran arus transportasi dan meningkatkan perekonomian daerah. Selain itu, peningkatan kualitas sarana dan prasarana irigasi terus diupayakan serta didukung oleh komitmen pimpinan daerah dalam ketersediaan air baku untuk mendukung

peningkatan produksi pertanian. Dengan tersedianya infrastruktur yang memadai merupakan salah satu faktor penting berjalannya proses pembangunan bagi suatu daerah yang dibersamai dengan peningkatan ketaatan terhadap regulasi penataan ruang.

Perkembangan sosial ekonomi dan masyarakat sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur seperti jalan dan jembatan sehingga lalu lintas barang dan jasa serta mobilitas faktor produksi meningkat. Infrastruktur juga merupakan faktor penting sebagai pendorong dan daya saing daerah. Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi. Untuk mewujudkan strategi pembangunan, dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan permukiman yang sehat, teratur, dan berwawasan lingkungan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

E. Perumahan, Pemukiman Kumuh, dan Persampahan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menguraikan bahwa setiap orang berhak untuk menempati, menikmati dan/atau memiliki tempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Berdasarkan hal ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mengupayakan pengendalian, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat terhadap perumahan dan permukiman kumuh serta layanan persampahan, berupa manajemen penanganan sampah dari sumber dan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang memadai guna meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuninya.

Dengan adanya peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh serta masalah persampahan di Provinsi Jawa Timur merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung program nasional pengentasan permukiman kumuh, yaitu Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh.

F. Reformasi Birokrasi

Abdi negara atau yang sekarang dikenal dengan nama Aparatur Sipil Negara (ASN) pada hakikatnya merupakan pelayan masyarakat. Sesuai

dengan apa yang dicita-citakan dan digariskan oleh UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka keberadaan ASN (Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat mutlak diperlukan. Sejalan dengan pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2014 memberikan tantangan kepada pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur untuk:

1. Pengelolaan dan penataan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang efektif dan efisien;
2. Pembinaan ASN yang melayani, disiplin, dan bersih;
3. Pengelolaan keuangan daerah dengan prioritas pemenuhan pelayanan dasar secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Sistem pengendalian pemerintah dapat dibagi menjadi pengendalian intern dan ekstern. Pengendalian intern, meliputi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/Pimpinan Lembaga; Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Sedangkan pengawas ekstern pemerintah seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), DPR dan DPRD (pengawasan politis), masyarakat (wasmas), dan lembaga peradilan (pengawasan yudikatif). Sistem Pengendalian Intern menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa

kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

4.2.4 Isu- Isu Strategis Kabupaten Bojonegoro

Isu strategis muncul ketika disuatu wilayah muncul permasalahan yang menyangkut kehidupan sebagian besar penduduk atau masyarakat di wilayah yang bersangkutan. Isu ini bersifat dinamis sehingga selalu berkembang sesuai dengan kondisi permasalahan masing-masing wilayah/daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah selalu berupaya untuk memprioritaskan penyelesaian setiap permasalahan yang menjadi isu strategis di daerahnya. Namun seringkali permasalahan yang menjadi isu strategis tersebut tidak atau belum bisa diselesaikan dalam kurun waktu masa kepemimpinan pemerintahan yang sedang/masih berjalan.

Berikut ini akan diuraikan dan dijelaskan isu-isu strategis daerah, baik isu strategis yang baru muncul pada masa berakhirnya pelaksanaan RPJMD 2018-2023 maupun isu strategis yang sebetulnya sudah ada sejak pelaksanaan RPJMD tersebut.

A. Kesatu : Percepatan Pembangunan Desa dan Kota

Infrastruktur merupakan prioritas pembangunan Kabupaten Bojonegoro dalam 4 tahun terakhir dan menjadi salah satu dari 17 program prioritas. Luasnya wilayah Kabupaten Bojonegoro mengharuskan pemerintah daerah menyusun perencanaan percepatan pembangunan sarana infrastruktur desa untuk mempermudah keterjangkauan akses dan sarana transportasi. Dalam 4 tahun terakhir sudah terbangun 513 km jalan kabupaten, dan Tahun 2023 nanti total jalan yang sudah terbangun sepanjang 663 km. Untuk jalan desa dari 1.380 km yang akan tertangani sampai Tahun 2023 sepanjang 627 km, sehingga sisa 753 km jalan desa menjadi prioritas RPD ke depan dalam program BKD. Selain jalan, pembangunan jembatan juga menjadi prioritas kabupaten yang akan dituangkan dalam dokumen RPD. Total jembatan kabupaten ada 1414 unit, sampai Tahun 2023 yang akan tertangani sejumlah 870 unit, sehingga masih ada 544 unit jembatan yang memerlukan perbaikan. Selain jembatan kabupaten, pemerintah kabupaten juga mulai melakukan perbaikan jembatan desa dan jembatan

gladak. Proposal yang sudah masuk di Dinas PUBMPR saat ini ada 474 jembatan yang memerlukan perbaikan. Selain sarana infrastruktur desa, penataan kota juga menjadi prioritas dalam dokumen RPD. Saat ini penataan wajah kota sudah dimulai, perbaikan pedestrian, pelebaran jalan, taman kota dan penataan saluran air. Sehingga dalam perencanaan 3 tahun ke depan ada keseimbangan dalam pembangunan kota dan desa.

B. Kedua : Implementasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan saat ini tidak terlepas dari penguasaan dan pemanfaatan teknologi. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro termasuk berkomitmen dalam implementasi pemerintahan berbasis elektronik, salah satunya dengan pengembangan Satu Data. Ke depan satu data diharapkan bisa menjadi bagian dari perumusan strategi dan kebijakan pemkab dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Salah satu sistem yang dikembangkan Kabupaten Bojonegoro termasuk dalam penanganan kemiskinan adalah perumusan program Data Mandiri Kemiskinan Daerah (Damisda). Data ini ke depan menjadi data dasar yang bisa dilakukan up date setiap saat dan menjadi data pensasaran program penanganan kemiskinan. Penerapan SPBE harus dilaksanakan di semua Perangkat Daerah dalam rangka percepatan layanan dan meningkatkan akurasi serta akuntabilitas program.

C. Ketiga : Penguatan Ketahanan Pangan

Isu ketahanan pangan sangat sesuai untuk diangkat di Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah agraris, dimana 39% penduduknya bekerja di sektor pertanian. Indikator utama dalam mengukur kinerja sektor pertanian adalah peningkatan produksi pertanian. Produksi pertanian pangan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 kemarin sejumlah 819.072 ton dan menjadi kabupaten ketiga penyumbang pangan terbesar di Provinsi Jawa Timur. Di tahun mendatang produksi pertanian harus ditingkatkan, apalagi Kabupaten Bojonegoro ditarget 87 ribu Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dari Kementerian ATR.

Pertimbangan kedua, sektor pertanian merupakan sektor yang menempati unggulan kedua dalam PDRB setelah migas. Dominasi migas sebesar 50% harus diimbangi dengan meningkatnya kontribusi sektor

lainnya. *Share* sektor pertanian sebesar 14% dan merupakan sektor yang memiliki daya saing apalagi sektor pertanian terbukti bertahan dari dampak pandemi, disaat sektor lain termasuk migas mengalami kontraksi. Tentunya peningkatan daya saing pertanian tidak bisa dilaksanakan dengan pertanian konvensional, melainkan harus dimaknai pembangunan pertanian secara modern dengan penerapan pola tanam dan penguasaan teknologi pertanian. Beberapa upaya peningkatan produksi pertanian yaitu:

1. Menerapkan modernisasi dan mekanisasi pertanian;
2. Meningkatkan kompetensi petani milenial;
3. Menerapkan pola tanam dengan peningkatan pemakaian pupuk organik yang diintegrasikan dalam PPM. Peningkatan pelatihan bagi petani untuk pembuatan pupuk organik dan budidaya perta;
4. Pemberdayaan BUMD Pangan dan BUMDesa pertanian dalam pembelian hasil pertanian bagi peningkatan NTP dan kestabilan harga produk pertanian;
5. Penataan sarana pengairan bagi irigasi pertanian (JUT, jitut jides, fungsi avoer, waduk dan embung).

D. Keempat : Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan, Kemiskinan dan Stunting)

Selain perumusan isu strategis di bidang infrastruktur, peningkatan kualitas SDM juga menjadi prioritas pemerintah kabupaten. IPM Kabupaten Bojonegoro setiap tahun mengalami peningkatan, walaupun masih kategori sedang. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan harus terus di dorong dalam rangka pencapaian IPM yang lebih baik atau masuk kategori tinggi. Usia harapan hidup masyarakat Bojonegoro terus menunjukkan peningkatan, pada Tahun 2021 UHH masyarakat Bojonegoro mencapai 71,72 tahun. Demikian juga dengan harapan lama sekolah mencapai 12,68 tahun dan untuk rata-rata lama sekolah mencapai 7,38 tahun. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat didukung dengan beberapa capaian program kesehatan seperti jangkauan kepesertaan jaminan kesehatan, peningkatan sarana pendukung indek kesehatan seperti program aladin, program jamban sehat dan pemenuhan air bersih. Peningkatan kualitas dan mutu layanan pendidikan juga di laksanakan dengan peningkatan sarana pendidikan,

peningkatan kesejahteraan guru pendidik, termasuk pengajuan tenaga pendidik dari PPPK. Mulai 2022 Pemkab Bojonegoro juga menginisiasi program Recognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi perangkat dan pegiat desa untuk jenjang pendidikan sarjana dan pasca sarjana. Tentunya komitmen peningkatan kualitas dan mutu SDM ini masih menjadi prioritas dalam RPD mendatang.

E. Kelima : Ekonomi Kreatif dan Digitalisasi

Dalam pelaksanaan pilar pembangunan ekonomi yang salah satunya pengembangan ekonomi kreatif. Pengembangan ekonomi kreatif sangat penting dalam rangka menciptakan daya saing daerah. Beberapa potensi dasar ekonomi kreatif yang bisa dikembangkan di Kabupaten Bojonegoro diantaranya:

1. Kerajinan kayu jati di Margomulyo, Kasiman dan Sukorejo;
2. Kerajinan batik motif jonegoronan;
3. Kerajinan anyaman pandan;
4. Kawasan pande besi ;
5. Industri tahu dan tempe;
6. Kawasan budaya samin Kecamatan Margomulyo;
7. Kawasan agroforestry Desa Klino Kecamatan Sekar.

Pengembangan ekonomi kreatif juga bisa menjadi wadah bagi generasi milenial untuk mengembangkan minat bakat seperti di bidang seni, fotografi, sinematografi dan digital marketing bagi pengembangan wirausaha muda.

F. Keenam : Kebencanaan

Kabupaten Bojonegoro merupakan kabupaten yang rawan akan bencana khususnya tanah longsor dan banjir. Secara topografi Kabupaten Bojonegoro merupakan kawasan hutan, namun adanya kerusakan alam mengakibatkan kawasan hutan tidak lagi bisa optimal sebagai penampung air hujan, dan pada saat musim penghujan berdampak pada bencana banjir dan longsor. Untuk mengurangi dampak bencana banjir dan longsor selain kegiatan reboisasi juga penataan kembali saluran air, normalisasi avoer, peningkatan fungsi waduk, embung dan perbaikan pompa air serta manajemen tata kelola persampahan. Perlunya disusun neraca dan tata

kelola air bagi pemenuhan kebutuhan pengairan dan alur pembuangan. Pemenuhan kebutuhan air juga dibutuhkan terkait pencegahan kekeringan.

Peran Pemerintah Daerah dalam Fase Penanggulangan Bencana:

- a. Kesiapsiagaan;
- b. Tanggap darurat;
- c. Rehabilitasi dan konstruksi.

Inovasi kebijakan pada Program Pembangunan Mitigasi Resiko Kebencanaan:

- a. Inisiasi Peraturan Daerah tentang Kebencanaan;
- b. Memperkuat SDM BPBD;
- c. Investasi Pengurangan Resiko Bencana;
- d. Kerjasama antar daerah penanggulangan bencana;
- e. Koordinasi dan kerjasama multi pihak;
- f. Lokalitas penanggulangan bencana.

G. Ketujuh : Ekonomi Hijau (*Green Economy And Environment*)

Konsep ekonomi hijau (*green economy*) merupakan salah satu konsep pembangunan sebagaimana tujuan dalam SDGs. Ekonomi hijau merupakan penyelarasan pembangunan 3 pilar yaitu pilar ekonomi, sosial dan lingkungan menuju pembangunan berkelanjutan. Saat ini isu energi merupakan salah satu isu krusial mengingat dunia saat ini sangat rentan dengan adanya krisis energi. Hal ini melatarbelakangi konsep bahwa peningkatan atau pertumbuhan ekonomi harus diiringi dengan perlindungan lingkungan termasuk penggunaan energi terbarukan. Beberapa indikator kinerja dalam ekonomi hijau yaitu:

1. Di bidang ekonomi diukur dengan peningkatan nilai tambah dan efisiensi pemakaian sumber daya;
2. Di bidang sosial diukur dengan peningkatan kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan;
3. Di bidang lingkungan diukur dengan penurunan dampak negatif dan penurunan timbunan limbah.

Ekonomi hijau dilaksanakan melalui beberapa sektor yaitu dibukanya investasi ramah lingkungan yang diharapkan akan menyerap tenaga kerja

yang selaras dengan semangat ekonomi hijau serta produksi dan ekonomi yang berkelanjutan dan gaya hidup yang ramah lingkungan.

Kabupaten Bojonegoro sangat berkomitmen dalam mendukung pelaksanaan ekonomi hijau. Hal yang melatarbelakanginya yaitu adanya kondisi topografi daerah yang rawan akan terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Konsep ekonomi hijau sangat sesuai untuk dilaksanakan dan menjawab isu kebencanaan. Saat ini penataan taman kota, perbaikan saluran air, drainase dan normalisasi gorong-gorong air serta pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) merupakan implementasi ekonomi hijau, dan isu ekonomi hijau masih akan diusung dalam perencanaan 3 tahun ke depan. Program yang telah dilakukan Pemkab Bojonegoro terkait ekonomi hijau:

1. Penyusunan dokumen lingkungan (KLHS dan Amdal/UKL/UPL)'
2. Pembangunan IPAL baik komunal/individu'
3. Program penurunan emisi gas rumah kaca (DKPP, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup)'
4. Konservasi lingkungan (RTH, reboisasi)'
5. Pengelolaan sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

5.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan yang merupakan penjabaran atau implementasi tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah..

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai tiga tahun ke depan. Sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro selama kurun waktu tiga tahun yang ingin dicapai sebagai berikut:

**Tabel 5.1. Jumlah Tujuan, Sasaran dan Indikator
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2024 – 2026**

Tujuan		Sasaran	
Tujuan Ke-	Jumlah Indikator	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator
Tujuan 1: Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman dan tertib	1	4	4
Tujuan 2: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, bertanggung jawab dan inovatif	1	6	10

Tujuan		Sasaran	
Tujuan Ke-	Jumlah Indikator	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator
Tujuan 3: Meningkatkan pemerataan kesejahteraan dan pembangunan manusia	3	10	12
Tujuan 4: Meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi	2	4	7
Tujuan 5: Meningkatkan percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah berbasis risiko dan pembangunan berkelanjutan	2	4	9
Jumlah	9	29	42

**Tabel 5.2. Tujuan dan Sasaran
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro**

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN / FORMULA PENGHITUNGAN	Satuan	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
					Realisasi 2022	Proyeksi Realisasi 2023	2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tujuan 1	Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman dan tertib	Indeks Rasa Aman	Komposit dari indek toleransi, indek ketentraman, indek keamanan dari bencana, Indeks pemenuhan kebutuhan sosial dan pengembangan diri (IBS KD)	indeks	-	-	72,71-73,54	73,27-73,88	73,92-74,21	73,92-74,21	Hasil survei	Pemerintah Kabupaten
Sasaran 1.1	Meningkatnya kesadaran kehidupan sosial masyarakat berlandaskan kearifan lokal	Indeks Toleransi Sosial (ITS)	Sikap saling menerima dan menghargai pendapat, pandangan, kepercayaan yang berbeda	indeks	-	-	B (73,00)	B (74,00)	B (74,50)	B (74,50)	Hasil survei	Bakesbangpol
Sasaran 1.2	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum (IKKU)	Persepsi rasa aman masyarakat terhadap kondisi ketentraman dan ketertiban umum IKKU = $\frac{\text{Jml GKKU}_n - \text{Jml GKKU}_{n-1}}{\text{Jml GKKU}_{n-1}} \times 100\%$ GKKU n = Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (GKKU) pada tahun ke n. GKKU n-1 = Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (GKKU) pada tahun sebelumnya (n-1)	indeks	68	76	76,50	77,00	77,50	77,50	OPD terkait	Satpol PP

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN / FORMULA PENGHITUNGAN	Satuan	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
					Realisasi 2022	Proyeksi Realisasi 2023	2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Sasaran 1.3	Meningkatnya rasa aman dari bencana	Indeks Keamanan dari Bencana	Persepsi rasa aman masyarakat terhadap risiko bencana IKB = $\text{Skor } Xi / \sum \text{Skor } X$ Xi : Skor hasil survei Faktor Keamanan Bencana	indeks	B (Aman)	B (Aman)	73,50 B (Aman)	74,00 B (Aman)	74,50 B (Aman)	74,50 B (Aman)	OPD terkait	BPBD, DAMKAR, Dinsos
Sasaran 1.4	Meningkatnya pemenuhan kesejahteraan sosial	Indeks pemenuhan kebutuhan sosial dan pengembangan diri (IBS KD)	Persepsi rasa aman masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan sosial dan pengembangan diri IBS KD = $\text{Skor } Xi / \sum \text{Skor } X$ Xi: Skor hasil survei Faktor pemenuhan kebutuhan sosial dan pengembangan diri	indeks	B (Aman)	B (Aman)	73,50 B (Aman)	74,00 B (Aman)	74,50 B (Aman)	74,50 B (Aman)	OPD terkait	Dinsos
Tujuan 2	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, bertanggung jawab dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	IRB menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.	indeks	64,14	65,55-68,65	68,95-70,12	69,75-71,54	71,25-72,80	71,25-72,80	Hasil Evaluasi dari KemenPAN RB	Pemerintah Kabupaten
Sasaran 2.1	Meningkatnya Inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Inovasi Daerah	Seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu	indeks	54,96	60,5	61,00	61,50	62,20	62,20	Hasil Evaluasi Kementerian dalam negeri	Diskominfo, Bappeda-Litbang, Setda

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN / FORMULA PENGHITUNGAN	Satuan	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
					Realisasi 2022	Proyeksi Realisasi 2023	2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Diukur dari indikator: Regulasi Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah, Dukungan Anggaran, Penggunaan IT, Bimtek Inovasi, Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD, Keterlibatan aktor inovasi, Pelaksana Inovasi Daerah, Jejaring Inovasi, Sosialisasi Inovasi Daerah, Pedoman Teknis, Kemudahan Informasi Layanan, Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan									
Sasaran 2.2	Meningkatnya kinerja ASN	Indeks Sistem Merit	Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah Diukur dari aspek: 1. Perencanaan Kebutuhan, 2. Pengadaan, 3. Pengembangan Karir, 4. Promosi dan Mutasi, 5. Manajemen Kinerja, 6. Penggajian, Penghargaan dan Disiplin, 7. Perlindungan dan Pelayanan, serta 8. Sistem Informasi	indeks	277,5	325	330	335	340	340	BKN	BKPP
		Indeks Profesionalitas ASN	Suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN $IP = IP \text{ Kualifikasi} + IP \text{ Kompetensi} + IP \text{ Kinerja} + IP \text{ Disiplin}$	indeks	53,18	58,00	63,00	67,00	71,00	71,00	OPD terkait	BKPP

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN / FORMULA PENGHITUNGAN	Satuan	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
					Realisasi 2022	Proyeksi Realisasi 2023	2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Sasaran 2.3	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten	nilai	70,05 (BB)	79 (BB)	81 (A)	82,5 (A)	83,5 (A)	83,5 (A)	OPD terkait	Inspektorat, Setda, Bappeda
		Opini BPK	Nilai Opini BPK atas LKPD	nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	LHP BPK	Inspektorat, BPKAD, Bapenda
		Indeks SPBE	Indeks SPBE diukur melalui 4 domain dan 8 aspek meliputi: Domain 1 – Kebijakan SPBE, meliputi: Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE Domain 2 – Tata Kelola SPBE, meliputi: Aspek 2 - Perencanaan Strategis Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE Domain 3 – Manajemen SPBE, meliputi: Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE Aspek 6 - Audit TIK Domain 4 – Layanan SPBE Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	indeks	2,65 (Baik)	2,85 (Baik)	3,00 (Baik)	3,10 (Baik)	3,20 (Baik)	3,20 (Baik)	Kementerian PAN-RB	Diskominfo, semua PD

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN / FORMULA PENGHITUNGAN	Satuan	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
					Realisasi 2022	Proyeksi Realisasi 2023	2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Sasaran 2.4	Meningkatnya keamanan informasi SPBE	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks KAMI merupakan suatu aplikasi untuk mengevaluasi tingkat kematangan, tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001:2009 serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi di suatu instansi pemerintah.	indeks	520	520	521	523	524	524	Kementerian Komonikasi dan Informasi RI	Diskominfo
Sasaran 2.5	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	hasil survei kepuasan masyarakat terhadap unit-unit pelayanan publik pemerintah IKM = Total dari nilai persepsi per unsur / Total unsur yang terisi	indeks	3,39	3,49	3,59	3,69	3,79	3,79	Hasil survei	Setda, Semua OPD
Sasaran 2.6	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. IPKD diukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi: a. kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; b. pengalokasian anggaran belanja dalam APBD; c. transparansi pengelolaan keuangan daerah; d. penyerapan anggaran; e. kondisi keuangan daerah; dan f. opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD	Indeks	-	-	55-70 (B)	55-70 (B)	75-100 (A)	75-100 (A)	Kementerian Dalam Negeri RI	BPKAD

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN / FORMULA PENGHITUNGAN	Satuan	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
					Realisasi 2022	Proyeksi Realisasi 2023	2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Sasaran 2.7	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Bebas dari KKN	Maturitas SPIP	Nilai maturitas SPIP-Terintegrasi yang dihitung berdasarkan 3 Komponen: Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, Pencapaian Tujuan	nilai	3,227	3,3	3,3	3,3	3,4	3,4	BPKP	Inspektorat, OPD terkait dan OPD pemangku 8 Area Intervensi MCP KPK
Tujuan 3	Meningkatkan pemerataan kesejahteraan dan pembangunan manusia	Indeks Pembangunan Manusia	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$ IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: 1. Umur panjang dan hidup sehat 2. Pengetahuan 3. Standar hidup layak	indeks	70.12	70,50-71,00	71,22-71,85	71,80-72,47	72,35-73,15	72,35-73,15	BPS	Pemerintah Kabupaten
		Tingkat Kemiskinan	$P_o = \frac{N_p}{N}$ Angka Kemiskinan yang dirilis BPS merupakan data makro dan merupakan hasil Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) yang menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah.	%	12.21	12,15-11,90	11,80-11,53	11,44-10,75	10,52-10,03	10,52-10,03	BPS	Pemerintah Kabupaten

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN / FORMULA PENGHITUNGAN	Satuan	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
					Realisasi 2022	Proyeksi Realisasi 2023	2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010	indeks	90,63	90,70- 90,95	90,91- 91,12	91,10- 91,25	91,21- 91,56	91,21- 91,56	BPS	Pemerintah Kabupaten
Sasaran 3.1	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	nilai	7,43	7,78	7,50	7,52	7,54	7,54	BPS	Dinas Pendidikan
		Harapan Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah	nilai	12,84	13,10	12,86	12,88	12,90	12,90		

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN / FORMULA PENGHITUNGAN	Satuan	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
					Realisasi 2022	Proyeksi Realisasi 2023	2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Sasaran 3.2	Meningkatnya kualitas kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian menurut Umur (Age Specific Death Rate/ ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat table kematian.	tahun	72,16	72,20	72,36	72,52	72,68	72,68	BPS	Dinas Kesehatan

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN / FORMULA PENGHITUNGAN	Satuan	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
					Realisasi 2022	Proyeksi Realisasi 2023	2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Sasaran 3.3	Meningkatnya tingkat hidup layak penduduk	Indeks Daya Beli/ Indeks Pengeluaran per Kapita	Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut	indeks	72,21	72,58	73,22	73,91	74,62	74,62	BPS	Pemerintah Kabupaten
		Inflasi	Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.	%	1.97	2,53-1,85	2,53-1,85	2,53-1,85	2,53-1,85	2,53-1,85	BPS	Pemerintah Kabupaten
Sasaran 3.4	Meningkatnya pembangunan pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 2 domain	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan alat ukur pembangunan pemuda di dua domain dasar yaitu, (1) partisipasi dan kepemimpinan, (2) lapangan dan kesempatan kerja	indeks	38,52	38,72	38,90	39,03	39,71	39,71	OPD terkait	Dinpora
Sasaran 3.5	Pemerataan Pendapatan Masyarakat dan ketimpangan antar wilayah	Indeks Gini	$GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_i - 1]$ Keterangan: f_i = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i . Y_i = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i .	indeks	0.28	0,27-0,26	0,26-0,25	0,25-0,24	0,24-0,23	0,24-0,23	BPS	Pemerintah Kabupaten
Sasaran 3.6	Meningkatnya perlindungan sosial	Persentase Perlindungan Sosial bagi bagi Rumah Tangga Miskin (PKH/KKS/KPS)	Jumlah Ruta peserta PKH, KKS,KPS, BPNT dibagi Jumlah Ruta sangat miskin dibagi 100	%	100	100	100	100	100	100	OPD terkait	Dinsos
Sasaran 3.7	Meningkatnya taraf hidup penduduk dan rumah tangga miskin	Persentase Keluarga miskin dan rentan memiliki usaha ekonomi	Jumlah keluarga miskin graduasi dibagi keseluruhan PKH kali 100	%	10	10	12	12	12	12	OPD terkait	Dinsos

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN / FORMULA PENGHITUNGAN	Satuan	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
					Realisasi 2022	Proyeksi Realisasi 2023	2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Sasaran 3.8	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	$IDG = 1/3 (I(par) + I(DM) + I inc-dis)$ Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.	indeks	56,24*	56,80	57,50	57,75	58,00	58,00	BPS	DP3AKB
Sasaran 3.9	Meningkatnya perlindungan terhadap anak	Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)	$Nilai\ kelembagaan + Nilai\ Kluster\ 1 + Nilai\ Kluster\ 2 + Nilai\ Kluster\ 3 + Nilai\ Kluster\ 4 + Nilai\ 5 + Nilai\ Dekala/Kelana$	nilai	609	650	700	750	800	800	Kementrian PPA	DP3AKB
Sasaran 3.10	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indek ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah Indeks ini disusun dari tiga dimensi yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan, dan pemanfaatan pangan.	indeks	83,55	83,75	85,2	85,6	86	86	Badan Pangan Nasional	DKPP
Tujuan 4	Meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan pertumbuhan ekonomi tanpa migas (PDRB tanpa Migas) $GE\ Tanpa\ Migas = DDPDRB\ Tanpa\ Migas\ ke\ t / PDRB\ Tanpa\ Migas\ ke\ t-1$	%	6.04	6,15-6,23	6,16-6,72	6,65-7,18	7,10-7,71	7,10-7,71	BPS	Pemerintah Kabupaten

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN / FORMULA PENGHITUNGAN	Satuan	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
					Realisasi 2022	Proyeksi Realisasi 2023	2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		TPT	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pekerja Tidak Penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja	%	4.69	4,62-4,57	4,48-4,26	4,21-3,97	3,88-3,51	3,88-3,51	BPS	Pemerintah Kabupaten
Sasaran 4.1	Meningkatnya peluang kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja kali 100	%	72,16	73	73,05	73,12	73,20	73,20	OPD terkait	Disperinaker
Sasaran 4.2	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Ekonomi Kreatif	Laju Pertumbuhan Usaha Ekonomi Kreatif	Jumlah Usaha ekraf pada tahun n dikurangi jumlah usaha ekraf pada tahun n-1 dibagi jumlah usaha ekraf pada tahun n-1 dikalikan 100	%	-	-	2,5	5,0	7,5	7,5	OPD terkait	Disbudpar
Sasaran 4.3	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Realisasi Investasi	Jumlah realisasi investasi perusahaan yang baru berdiri ditambah pengembangan investasi perusahaan yang sudah berdiri / menghitung Jumlah total dalam satu tahun	nilai	9,8		7,6	7,7	7,8	7,8	OPD terkait	DPMPTSP
Sasaran 4.4	Meningkatkan PDRB sektor unggulan daerah	NTP	Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan.	nilai	106.1	106,5-106,8	106,5-107	107,1-107,5	107,3-107,8	107,3-107,8	BPS	DKPP

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN / FORMULA PENGHITUNGAN	Satuan	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
					Realisasi 2022	Proyeksi Realisasi 2023	2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pertumbuhan PDRB sektor pertanian dalam arti luas	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari sektor pertanian dalam arti luas Jumlah kontribusi PDRB sektor Pertanian dalam arti luas dibagi Jumlah total PDRB x 100%	%	8,07	10,18	10,78	11,38	11,98	11,98	BPS	DKPP, Disnakkan
		Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan perindustrian	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari sektor perdagangan perindustrian Jumlah kontribusi PDRB sektor perdagangan perindustrian dibagi Jumlah total PDRB x 100%	%	7,38	7,87	7,95	8,2	8,5	8,5	BPS	Disdangkopum
		Pertumbuhan PDRB pariwisata	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari sektor pariwisata Jumlah kontribusi PDRB sektor Pariwisata dalam arti luas dibagi Jumlah total PDRB tanpa migas x 100%	%	13,51	2,11	2,21	2,31	2,42	2,42	BPS	Disbudpar

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN / FORMULA PENGHITUNGAN	Satuan	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
					Realisasi 2022	Proyeksi Realisasi 2023	2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tujuan 5	Meningkatkan percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah berbasis risiko dan pembangunan berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah Terdapat 6 unsur utama untuk mengukur IKLI: (Ketersediaan Fisik (availability), Kualitas Fisik (quality), Kesesuaian (Appropriateness), Efektivitas Pemanfaatan (Utility), Penyerapan tenaga kerja (job creation), Kontribusi pada perekonomian	indeks	-	-	2,99	3,025	3,059	3,059	Perangkat daerah terkait	Pemerintah Kabupaten
		Indeks Williamson	IW : $\sqrt{\frac{\sum (Y_i - Y)^2 f_i / n}{Y}}$ IW = Nilai Indeks Williamson, Y _i = PDRB per kapita Kab i, Y = PDRB per kapita rata-rata Prov; f _i = Jumlah penduduk Kab i,	indeks	0.23	0,22-0,20	0,21-0,19	0,18-0,16	0,15-0,12	0,15-0,12	BPS/hasil kajian bapedda	Pemerintah Kabupaten
Sasaran 5.1	Meningkatnya pemerataan dan keseimbangan infrastruktur antar wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	IKLI khusus Infrastruktur Jalan dan Jembatan melalui survey dan pembobotan	indeks	-	3,55	3,60	3,65	3,70	3,70	OPD terkait	DPUBMPR

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN / FORMULA PENGHITUNGAN	Satuan	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
					Realisasi 2022	Proyeksi Realisasi 2023	2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Perumahan, Permukiman dan Keciaptakaryaan	Nilai Komposit dari Aspek Layanan Infrastruktur Permukiman dan Keciaptakaryaan	indeks	1,88	2,28	2,30	2,33	2,35	2,35	OPD terkait	DPKPCK
		Indek Kepuasan Layanan Infrastruktur Perhubungan	Nilai Komposit dari Aspek Layanan Infrastruktur Perhubungan	indeks	-	-	3,0644	3,0952	3,1260	3,1260	OPD terkait	DISHUB
		Indeks Kinerja Irigasi	Bobot penilaian komponen sistem irigasi berdasarkan ketentuan Permen PUPR No 12 Tahun 2015. Ada 6 indikator indeks kinerja, antara lain: (1) Indikator prasarana fisik, dengan bobot bagian 45% (2) Indikator produktivitas tanam, dengan bobot bagian 15% (3) Indikator sarana penunjang, dengan bobot bagian 10% (4) Indikator organisasi personalia, dengan bobot bagian 15% (5) Indikator dokumentasi, dengan bobot bagian 5% Indikator P3A/GP3A/IP3A, dengan bobot bagian 10%	indeks	79,95	80	81	82	83	83	OPD terkait	DPUSDA
		Indeks Desa Membangun	Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu : Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/ Lingkungan.	indeks	0,7898	0,8088	0,8537	0,8731	0,8827	0,8827	Kemendesa	DPMD

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN / FORMULA PENGHITUNGAN	Satuan	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
					Realisasi 2022	Proyeksi Realisasi 2023	2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Sasaran 5.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan menurunnya Emisi Karbon	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$KLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$ Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan	indeks	68,25	68,31	68,37	68,47	68,56	68,56	OPD terkait	DLH
Sasaran 5.3	Meningkatnya kualitas penanganan kebencanaan daerah	Indeks Risiko Bencana Kabupaten (IRBK)	(Bahaya X Kerentanan) : Kapasitas Perhitungan Indeks Bahaya dan Indeks Kerentanan ditentukan oleh BNPB Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya.	indeks	84,39	84	82	80	78	78	OPD terkait	BPBD
		IKD (Indeks Kapasitas Daerah)	Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	indeks	0,59	0,6	0,61	0,62	0,63	0,63		
Sasaran 5.4	Meningkatnya ketaatan pembangunan dan kegiatan penduduk terhadap kebijakan tata ruang	Persentase kualitas penataan Ruang	Merupakan persentase dokumen rencana tata ruang yang disusun + % ketaatan terhadap RTRW dibagi 2 dikali 100	%	88,30	85	88	89	90	90	OPD terkait	DPUBMPR

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1 STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memerlukan rumusan sistematis Strategi dan Arah Kebijakan serta Program Pembangunan Daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan penghubung antara target kinerja tujuan dan sasaran dengan target kinerja program, sehingga diharapkan pencapaian target kinerja program akan memberikan hasil pada kinerja sasaran dan dampak pada kinerja tujuan. Penentuan strategi sangat menentukan keberhasilan dari realisasi program dan kegiatan. Salah satu cara penentuan strategi adalah dengan menggunakan analisis SWOT yaitu menganalisis aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari daerah tersebut. Analisis SWOT yang dilakukan dalam hal ini adalah dengan menganalisis masing-masing tujuan dan sasaran sesuai isu strategis yang menjadi acuan dalam perumusan strategi pembangunan. Berikut ini disajikan hasil analisis SWOT.

Tabel 6.1. Perumusan Strategi Tujuan Ke 1

Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weaknesses)	Strategi
Adanya Peraturan Daerah yang menjadi landasan peraturan	Belum maksimalnya perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi korban konflik yang terjadi di masyarakat	- Peningkatan komitmen pemerintah serta peran masyarakat dalam menjaga kondusifitas daerah - Peningkatan kerjasama antar komponen masyarakat dalam penegakan peraturan perundang-undangan
Kesempatan (Opportunity)	Threat (Ancaman)	Strategi
Masih adanya peluang meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program pemerintah	Masih terjadinya konflik kemasyarakatan seperti konflik antar umat beragama yang kadang masih terjadi di masyarakat	Peningkatan Kesadaran Bermasyarakat dan berdemokrasi

Tabel 6.2. Perumusan Strategi Tujuan Ke 2

Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weaknesses)	Strategi
- Adanya kemauan dan motivasi tinggi dari pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya - Adanya program dan kegiatan untuk merealisasikan target-target kinerja yang akan dicapai	- Belum optimalnya komitmen dan pemahaman ASN tentang tata kelola kelembagaan, tata laksana serta akuntabilitas - Belum optimalnya pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaporan sampai pertanggungjawaban - Masih kurangnya sinkronisasi dan konsistensi dalam Perencanaan dan - Penganggaran yang dilakukan oleh OPD - Masih rendahnya kompetensi SDM - Masih rendahnya pelaksanaan - Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	- Peningkatan kemampuan ASN dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja - Pelaksanaan pembinaan secara berkala dan berkelanjutan tentang tata kelola keuangan dan pelaporan keuangan serta akselerasi tindak lanjut hasil pemeriksaan - Peningkatan keterkaitan konsistensi dokumen perencanaan dan inovasi daerah - Peningkatan kompetensi dan produktivitas ASN - Peningkatan pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik
Kesempatan (Opportunity)	Threat (Ancaman)	Strategi
- Adanya inovasi pelayanan melalui perkembangan teknologi komunikasi dan informasi - Adanya pemutakhiran peraturan	- Tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang berkualitas	- Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik - Peningkatan kemampuan adaptasi dalam mengadopsi pemutakhiran peraturan

Tabel 6.3. Perumusan Strategi Tujuan Ke 3

Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weaknesses)	Strategi
- Adanya kebijakan yang memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan - Adanya program dan kegiatan pemerintah untuk meningkatkan prestasi olahraga - Adanya kebijakan pemerintah terhadap keperpihakan kepada masyarakat miskin, perempuan dan anak - Adanya program dan kegiatan untuk merealisasikan target kinerja pemerintah	- Belum meratanya akses dan mutu pendidikan di daerah pinggiran - Masih rendahnya angka harapan hidup (AHH) - Pembinaan pemuda, olah raga dan kepramukaan kurang maksimal - Belum terpenuhinya perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak - Rendahnya pemahaman PSKS dalam menangani PMKS serta rendahnya daya dukung sarana prasarana - Masih terdapatnya anak dari keluarga miskin yg belum melanjutkan sekolah	- Peningkatan kualitas dan akses layanan dasar pendidikan - Peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan - Peningkatan pembinaan atlet yang berprestasi - Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak - Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak

Kesempatan (Opportunity)	Threat (Ancaman)	Strategi
- Adanya dukungan dari Pemerintah, swasta dan mitra kerja dalam pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk	- Kurangnya kesiapan pengembangan kapasitas dan kualitas penduduk di era bonus demografi, yang disebabkan oleh masih rendahnya pendewasaan usia kawin serta belum memiliki mindset dua anak cukup	- Pengendalian pertumbuhan penduduk tumbuh seimbang - Peningkatan daya beli masyarakat
- Adanya upaya optimalisasi ketersediaan dan kualitas konsumsi terhadap pentingnya keberagaman pangan dan gizi bagi keluarga - Adanya kesadaran stakeholders berdonasi uang dan tenaga seperti NGO dan yayasan peduli, perusahaan melalui dana CSR nya dan bantuan masyarakat langsung	- Perdagangan dalam negeri yang belum efisien sehingga menyebabkan harga kebutuhan pokok tidak stabil - Kondisi pandemi COVID- 19 menghambat pembangunan manusia yang berkualitas - Adanya motivasi terselubung dari penerima bantuan untuk terus menerima bantuan	- Peningkatan kualitas hidup PMKS dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial

Tabel 6.4. Perumusan Strategi Tujuan Ke 4

Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weaknesses)	Strategi
- Ada program-program pemerintah dalam pembinaan usaha masyarakat dan koperasi - Adanya insentif usaha bagi usaha kecil dan dana bagi desa dapat menjadi stimulus penggerak	- Perlu adanya penguatan kelembagaan serta pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, yang disebabkan oleh kurangnya modal, pemasaran, inovasi dan kualitas produk. - Perlunya peningkatan kapasitas kemampuan pengetahuan, ketrampilan SDM dalam pengelolaan manajerial, tata kelola organisasi dan pengembangan bisnis koperasi dan usaha mikro - Masih perlunya pembinaan terhadap aparatur dan lembaga desa - Masih adanya kerentanan pangan	- Pembinaan pelaku usaha mikro dan industri kreatif Meningkatkan peran usaha mikro dan koperasi dalam aktivitas ekonomi Penguatan kelembagaan koperasi - Peningkatan pemberdayaan dan penguatan lembaga ekonomi desa dan lembaga kemasyarakatan desa Peningkatan ketersediaan dan pemantapan penanganan kerentanan pangan melalui revitalisasi SKPG
- Adanya kebijakan dan program pemerintah daerah - Adanya konsentrasi pengembangan ekonomi unggulan daerah	- Belum optimalnya produktivitas perikanan karena tingginya biaya input produksi - Belum optimalnya pengolahan hasil pertanian - Belum optimalnya pengembangan pariwisata	- Peningkatan produksi dan produktivitas hasil usaha perekonomian - Peningkatan potensi pariwisata - Peningkatan pendapatan petani

	- Masih rendahnya daya saing bidang industri - Rendahnya nilai ekspor daerah	
Kesempatan (Opportunity)	Threat (Ancaman)	Strategi
- Adanya dukungan dari sektor industri dan lapangan usaha dalam kebutuhan tenaga kerja - Berkembangnya lapangan usaha baru membutuhkan lapangan kerja baru	- Rendahnya daya saing tenaga kerja - Bertambahnya angka pengangguran akibat pandemi COVID-19 - Tingginya angka pengangguran dan adanya perselisihan hubungan industrial; - Keterbatasan jumlah lapangan pekerjaan dibandingkan jumlah angkatan kerja; - Minimnya semangat entrepreneurship untuk menciptakan lapangan kerja baik formal maupun informal	- Peningkatan jaringan informasi bursa kerja dan pelatihan tenaga kerja
- Adanya peluang dari semua tingkat stakeholders untuk mendorong investasi - Adanya upaya pengembangan kawasan terpadu dan komprehensif	- Kompetisi dari kabupaten atau kota lainnya dalam hal daya tarik investasi daerah masing-masing - Pengembangan kawasan yang belum terintegrasi - Pariwisata dan kegiatan ekonomi terhambat akibat adanya pembatasan sosial selama pandemi COVID- 19	- Peningkatan kemudahan investasi - Peningkatan pengembangan kawasan ekonomi pedesaan dan kawasan agropolitan - Peningkatan pendapatan daerah melalui laba BUMD

Tabel 6.5. Perumusan Strategi Tujuan Ke 5

Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weaknesses)	Strategi
- Adanya program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten dalam mendanai pembangunan Infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup	- Rendahnya tingkat kualitas jalan belum menyesuaikan kondisi geografis di Kabupaten Bojonegoro; - Minimnya akses penghubung jalan/ jalan alternatif penghubung antar wilayah - Minimnya regulasi dan informasi penataan ruang - Ketersediaan air baku belum mencukupi kebutuhan - Kondisi sarana dan prasarana irigasi banyak yang rusak - Masih tingginya keberadaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Bojonegoro	- Peningkatan intensitas dan interaksi antar wilayah - Peningkatan kekuatan jalan dengan pengecoran - Pembangunan penampung air (embung, waduk) Konservasi sumber daya air - Peningkatan kualitas - Perumahan dan permukiman layak huni

Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weaknesses)	Strategi
	- Tidak sinkronnya database rumah tidak layak huni dengan data BDT - Masih terbatasnya pengelolaan air limbah - Masih adanya wilayah-wilayah yang belum terlayani air bersih	
Kesempatan (Opportunity)	Threat (Ancaman)	Strategi
- Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan merupakan - isu strategis internasional, nasional maupun provinsi - Semakin banyak masyarakat yang peduli akan ketersediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat - Adanya kewajiban bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pemenuhan CSR	- Kurangnya kesadaran petani terhadap perawatan saluran serta daya rusak air yang cukup tinggi; - Laju kerusakan SDA dan lingkungan hidup tidak sebanding dengan usaha pengendalian, pemulihan dan pengelolaan yang di lakukan, sehingga mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan - Volume sampah di TPA yang terus meningkat, sehingga melebihi daya tampung TPA	- Peningkatan kecukupan air untuk pertanian - Peningkatan daya dukung lingkungan melalui peningkatan kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan serta peningkatan sistem pengelolaan persampahan

Berdasarkan hasil analisis SWOT, maka dihasilkan strategi berdasarkan situasi dan kondisi yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Strategi tersebut kemudian diikuti dengan Arah Kebijakan yang tepat, maka pelaksanaan Program Pembangunan di Kabupaten Bojonegoro dalam lima tahun ke depan diharapkan akan memiliki fokus yang jelas, terarah dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

**Tabel 6.6. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2024 – 2026**

NO	TUJUAN/ INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman dan tertib Indikator: Indeks Rasa Aman	Sasaran 1. Meningkatnya kesadaran kehidupan sosial masyarakat berlandaskan kearifan lokal	1) Meningkatkan pendampingan intensif kepada masyarakat	1. Meningkatkan kesadaran hubungan sosial masyarakat 2. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan perilaku sosial secara intensif
			2) Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan konflik	1. Meningkatkan peran serta masyarakat 2. Membentuk dan mengoptimalkan lembaga sosial masyarakat dalam pencegahan dan penanganan konflik sosial
		Sasaran 2. Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	1) Peningkatan pengendalian pelanggaran trantibum melalui penegakan perda/perkada	1. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan trantibum 2. Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum 3. Meningkatkan ketrampilan dan keahlian aparat dalam mengendalikan dan menjaga trantibum

NO	TUJUAN/ INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			2) Peningkatan layanan perlindungan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP	1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM satpol PP dalam menjalankan fungsi dan tugasnya
		Sasaran 3. Meningkatnya rasa aman dari bencana	1) Peningkatan sarana dan prasarana pecegahan dan penanganan bencana	1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana mitigasi bencana 2. Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana mitigasi bencana
			2) Pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana	1. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap mitigasi bencana 2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana
		Sasaran 4. Meningkatnya pemenuhan kesejahteraan sosial	1) Pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah 2) Memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat	1. Meningkatkan kemampuan sosial ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah 2. Meningkatkan perlindungan sosial kepada masyarakat
2	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih,	Sasaran 1.	1) Peningkatan akses layanan publik berbasis TIK	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana layanan publik berbasis TIK

NO	TUJUAN/ INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	transparan, bertanggung jawab dan inovatif Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah		2. Meningkatkan kompetensi aparatur prasarana layanan publik berbasis TIK
			2) Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi pembangunan	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi pembangunan dengan sistem elektronik/digital (SPBE)
		Sasaran 2. Meningkatnya kinerja ASN	1) Peningkatan kompetensi sumber daya ASN sesuai dengan tugas pokok fungsinya	1. Meningkatkan kinerja, disiplin dan kompetensi serta <i>reward</i> dan <i>punishmen</i> ASN
		Sasaran 3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1) Peningkatkan kualitas tata kelola administrasi serta asset daerah	1. Meningkatkan pengelolaan tata administrasi dan asset daerah dengan sistem elektronik (SPBE)
		Sasaran 4. Meningkatnya keamanan informasi SPBE	1) Peningkatan perangkat keamanan SPBE	1. Meningkatkan sarana prasarana pendukung SPBE 2. Meningkatkan perangkat lunak dan keras SPBE disetiap seluruh pengguna 3. Meningkatkan kompetensi pengelola SPBE
		Sasaran 5. Meningkatnya kinerja pelayanan publik	1) Peningkatkan kualitas layanan publik	1. Meningkatkan sarana prasarana layanan publik 2. Mengevaluasi dan menerapkan standar pelayanan publik yang prima

NO	TUJUAN/ INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				3. Menerapkan <i>reward</i> dan <i>punishmen</i> bagi ASN dan OPD layanan public
		Sasaran 6. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	1) Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi penganggaran daerah	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi penganggaran daerah dengan sistem elektronik/digital (SPBE)
		Sasaran 7. Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Bebas dari KKN	1. Peningkatan kualitas Birokrasi	2. Meningkatkan Birokrasi menuju Birokrasi yang Bersih dan Bebas dari KKN 3. Menerapkan <i>reward</i> dan <i>punishmen</i> OPD
3.	Meningkatkan pemerataan kesejahteraan dan pembangunan manusia 1. Indikator 3.1: Indeks Pembangunan Manusia 2. Indikator 3.2: Tingkat Kemiskinan 3. Indikator 3.3: Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Sasaran 1. Meningkatnya kualitas pendidikan	1) Optimalisasi layanan akses Pendidikan bagi masyarakat	4. Mengevaluasi dan meningkatkan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan
			2) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	1. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan 2. Mengevaluasi dan meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan 3. Meningkatkan tata administrasi dan layanan pendidikan dengan SPBE
			1) Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan jenjang PAUD, SD dan SMP.	1. Memberikan <i>reward</i> dan <i>punishmen</i> bagi tenaga pendidik dan kependidikan yang berprestasi

NO	TUJUAN/ INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			2) Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan jenjang PAUD, SD, dan SMP terkait dengan kompetensi	1. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berbasis TIK/SPBE 2. Memberikan beasiswa bagi guru untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan
			3) Peningkatan akses pendidikan bagi anak usia sekolah	1. Penyediaan dana abadi pendidikan
		Sasaran 2. Meningkatnya kualitas kesehatan	1) Peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana prasarana, dan sistem layanan kesehatan masyarakat.	1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana, serta sistem layanan kesehatan masyarakat.sesuai SPM Bidang Kesehatan 2. Meningkatkan tata administrasi dan layanan kesehatan dengan SPBE
		Sasaran 3. Meningkatnya tingkat hidup layak penduduk	1) Memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap harga sebagai upaya stimulasi stabilisaasi daya beli masyarakat	1. Meningkatkan sistem informasi harga dan stok bahan kebutuhan (barang/jasa) yang banyak dibutuhkan masyarakat 2. Pengembangan jaringan distribusi kebutuhan pokok
			2) Peningkatan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah	1. Meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pokok

NO	TUJUAN/ INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Sasaran 4. Meningkatnya pembangunan pemuda	1) Optimalisasi keikutsertaan pemuda untuk berkompetisi pada berbagai level terutama nasional dan internasional	1. Pengiriman pemuda dalam berbagai kompetisi tingkat regional, nasional dan internasional 2. Penyediaan dana bagi kompetisi pemuda 3. Peningkatan kemampuan pemuda sesuai dengan kompetensi prestasinya
			2) Peningkatan layanan terhadap pemuda untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai event yang produktif terutama terkait kewirausahaan	1. Meningkatkan kemampuan dan jiwa pemuda dalam berwirausaha 2. Meningkatkan kemampuan permodalan pemuda wirausahawan 3. Memfasilitasi pemuda wirausahawan dalam event-event wirausaha
		Sasaran 5. Pemerataan Pendapatan Masyarakat dan ketimpangan antar wilayah	1) Peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah	1. Meningkatkan jumlah pelaku usaha mikro dan kecil dari golongan masyarakat berpenghasilan rendah 2. Meningkatkan kapasitas berusaha bagi masyarakat berpenghasilan rendah
			1) Pentargetan angka penurunan kemiskinan yang optimis	1. Menetapkan target angka kemiskinan yang optimis 2. Meningkatkan pelaksanaan program-program penurunan kemiskinan

NO	TUJUAN/ INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			2) Sinkronisasi program penurunan kemiskinan antar Perangkat Daerah pengampu sehingga memiliki kelompok sasaran yang sama	1. Meningkatkan koordinasi data dan sinergi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan 2. Meningkatkan sinergi antar Perangkat Daerah dalam menjalankan sistem DAMISDA
		Sasaran 6. Meningkatnya perlindungan sosial	1) Peningkatan layanan perlindungan sosial kepada PPKS berdasarkan pemutakhiran data yang lengkap dan akurat.	1. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi, pemberdayaan dan perlindungan sosial
			2) Peningkatan kualitas program pendampingan/ pemberdayaan terhadap PPKS	3) Melakukan evaluasi dan meningkatkan program pendampingan/pemberdayaan bagi PPKS
		Sasaran 7. Meningkatnya taraf hidup penduduk dan rumah tangga miskin	1) Sinkronisasi program antara pusat, daerah dan antar PD terkait pemberdayaan usaha ekonomi pada PPKS	1. Melakukan sinkronisasi program antara pusat, daerah dan antar PD terkait pemberdayaan usaha ekonomi pada PPKS
		Sasaran 8. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	1) Peningkatan kualitas akses layanan pengaduan masyarakat terkait dengan kasus kekerasan terhadap perempuan	1. Meningkatkan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan (PUG)
			2) Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap	1. Meningkatkan kesadaran peran serta masyarakat dan keluarga dalam

NO	TUJUAN/ INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			perlindungan perempuan melalui efektivitas penyelenggaraan program/kegiatan pendampingan/penyuluhan	perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan
		Sasaran 9. Meningkatnya perlindungan terhadap anak	1) Peningkatan kualitas akses layanan pengaduan masyarakat terkait dengan kasus kekerasan/eksploitasi terhadap anak	1. Meningkatkan sarana dan sarana pengawasan dan pengaduan terhadap kasus anak (PUHA) 1. Membangun kelembagaan yang kuat dalam perlindungan anak
			2) Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak melalui efektivitas penyelenggaraan program/kegiatan pendampingan/penyuluhan	2. Meningkatkan kesadaran peran serta masyarakat dan keluarga dalam perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap anak
		Sasaran 10. Meningkatnya ketahanan pangan daerah	3) Peningkatan ketersediaan sarana prasarana yang mendukung kemandirian pangan	3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana kemandirian pangan yang merata 4. Meningkatkan akses distribusi pangan
			4) Peningkatan cadangan pangan melalui penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	1. Meningkatkan ketersediaan dan memantapkan penanganan kerentanan pangan melalui revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan Gizi (SKPG)

NO	TUJUAN/ INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
4	Meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi 1. Indikator 4.1. : Pertumbuhan Ekonomi 2. Indikator 4.2. : Tingkat Pengangguran Terbuka	Sasaran 1. Meningkatnya peluang kesempatan kerja	1) Peningkatan peluang kesempatan kerja baru	1. Mengembangkan calon wirausahawan baru bagi kelompok angkatan kerja yang belum bekerja 2. Mengembangkan usaha mikro, kecil dan ekonomi kreatif dengan sasaran kelompok pengangguran
			2) Peningkatan kompetensi angkatan kerja yang belum bekerja	1. Meningkatkan kompetensi dan ketrampilan para pengangguran dan penduduk usia kerja yang tidak melanjutkan pendidikan
		Sasaran 2. Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Ekonomi Kreatif	Peningkatan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif melalui Pelatihan Berwirausaha, pendampingan dalam menjalankan Usaha, dan Penyediaan Pasar untuk hasil usaha	1. Meningkatkan jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif 2. Meningkatkan kompetensi dan ketrampilan pelaku usaha ekonomi kreatif 3. Meningkatkan sarana prasarana usaha ekonomi kreatif
		Sasaran 3. Meningkatnya investasi daerah	1) Peningkatan Daya Tarik Investasi Daerah Melalui Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang kondusif	1. Meningkatkan infrastruktur pendukung investasi/usaha 2. Memberikan payung hukum yang jelas kepada investor 3. Meningkatkan kemudahan berusaha
		Sasaran 4. Meningkatkan PDRB sektor unggulan daerah	2) Peningkatan Daya Saing investasi daerah melalui pengawasan dan pembinaan serta koordinasi pengendalian	1. Meningkatkan perangkat pengawasan dan pembinaan serta koordinasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal

NO	TUJUAN/ INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			pelaksanaan penanaman modal	
5	Meningkatkan percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah berbasis risiko dan pembangunan berkelanjutan 1. Indikator 5.1: Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur 2. Indikator 5.2: Indeks Williamson	Sasaran 1. Meningkatnya pemerataan dan keseimbangan infrastruktur antar wilayah	1. Mewujudkan keseimbangan Infrastruktur antar wilayah melalui perencanaan dan pembangunan wilayah yang berimbang antara desa-kota serta antar kawasan diseluruh wilayah	1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur kewilayahan di perdesaan 2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur ekonomi di perdesaan 3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perkotaan untuk memantapkan <i>smart city</i>
		Sasaran 2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan menurunnya Emisi Karbon	2. Menjaga kualitas lingkungan hidup dari kerusakan akibat dampak negatif kegiatan masyarakat	1. Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan pengelolaan atas kegiatan yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup
			3. Peningkatan ketaatan pembangunan dan kegiatan penduduk terhadap kebijakan tata ruang melalui Pengembangan Permukiman serta serta Penataan Bangunan Dan Lingkungan sesuai ketentuan	1. Mengevaluasi dan meningkatkan kualitas perangkat pengendalian pemanfaatan ruang 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan tata ruang wilayah 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat/pelaku usaha/institusi terhadap pembangunan berbasis risiko bencana

NO	TUJUAN/ INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Sasaran 3. Meningkatnya kualitas penanganan kebencanaan daerah	4. Peningkatan Risiko Bencana Kabupaten dan Kapasitas Daerah	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bencana
		Sasaran 4. Meningkatnya ketaatan pembangunan dan kegiatan penduduk terhadap kebijakan tata ruang	5. Peningkatan tingkat Kepatuhan Tata Ruang	1. Meningkatkan ketaatan masyarakat/pelaku usaha/institusi terhadap kebijakan tata ruang

6.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Arah Kebijakan merupakan pedoman yang mengarahkan Rumusan Strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun periode RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026. Arah kebijakan akan mengarahkan pilihan-pilihan strategi yang akan menjadi tema fokus penanganan permasalahan yang hendak diselesaikan dalam setiap tahunnya setiap periode tahunan selama tiga tahun sehingga memiliki kesinambungan untuk setiap periode dalam tujuan dan sasaran. Tema arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

**Tabel 6.7 Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 – 2026**

Arah Kebijakan Pembangunan (Tema)		
Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Berkelanjutan dalam rangka Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pengembangan Ketersediaan dan Kualitas SDM serta Optimalisasi Penataan Kawasan	Konektivitas Wilayah dan <i>Green Economy</i> melalui Pengembangan Pariwisata

Dalam rangka mencapai Tujuan, Sasaran dan melaksanakan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, maka disusun Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026, dengan mendasarkan pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Rumusan Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 6.8 Rumusan Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2024-2026**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Program Prioritas			Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Kode	Program	Indikator	
1	Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman dan tertib		1. Indeks Rasa Aman				Pemerintah Kabupaten
		1. Meningkatnya kesadaran kehidupan sosial masyarakat berlandaskan kearifan lokal	1. Indeks Toleransi Sosial (ITS)	4.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Tingkat capaian penerima pelayanan kesejahteraan masyarakat	Setda-Kesra
				8.01.05.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Prosentase pembinaan masyarakat tentang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	Bakesbangpol
		2. Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	2. Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum (IKKU)	1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase respon pengendalian potensi pelanggaran	Satpol PP
						Persentase penanganan gangguan trantibum	
						Persentase penegakan perda/ perkada	
		3. Meningkatnya rasa aman dari bencana	3. Indeks Keamanan dari Bencana	1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	BPBD

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Program Prioritas			Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Kode	Program	Indikator	
				1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Prosentase kejadian kebakaran yang ditangani sesuai waktu tanggap	Damkar
						Prosentase warga masyarakat yang mampu melakukan tindakan pencegahan/penanganan awal kebakaran	
						Prosentase Jumlah gedung dengan proteksi kebakaran sesuai standar	
		4. Meningkatnya pemenuhan kesejahteraan sosial	4. Indeks pemenuhan kebutuhan sosial dan pengembangan diri (IBS KD)	1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Dinsos
				1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang sudah berhasil di rehab	Dinsos
				1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang difasilitasi rehabilitasi	Dinsos
2	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, bertanggung jawab dan inovatif		1. Indeks Reformasi Birokrasi			Presentase Keluarga Masyarakat Fakir Miskin yang dibantu	Pemerintah Kabupaten
		1. Meningkatnya Inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Indeks Inovasi Daerah	5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Jumlah Dokumen penelitian/perencanaan terkait inovasi daerah	Bappeda-Litbang

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Program Prioritas			Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Kode	Program	Indikator	
		2. Meningkatnya kinerja ASN	2. Indeks Sistem Merit	5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Prosentase layanan administrasi kepegawaian sesuai time response	BKPP
			3. Indeks Profesionalitas ASN	5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Prosentase layanan administrasi kepegawaian sesuai time response	BKPP
		3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	4. Nilai SAKIP	6.1.2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut Evaluasi Kinerja OPD	Inspektorat
				6.1.3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase OPD yang meningkat nilai SAKIP	Inspektorat
				4.01.01.2	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang melaporkan capaian kinerja tepat waktu	Setda-Bag. Organisasi
				4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase realisasi pelaksanaan program opd sesuai target	Setda- Bag. Administrasi Pembangunan
				5.01.02	Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Prosentase tersedianya komponen sistem pembangunan SPBE	Bappeda

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Program Prioritas			Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Kode	Program	Indikator	
			5. Opini BPK	5.2.2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai ketentuan	BPKAD
						Persentase OPD yang menyerap Anggaran sesuai dengan target yang ditetapkan	
						Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	
				6.1.2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase OPD yang menindaklanjuti LHP	Inspektorat
						Persentase temuan berulang	
					Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase Capaian penerimaan pajak daerah (non PBB dan non BPHTB) yang dikelola	Bapenda
						Persentase Capaian penerimaan pajak daerah PBB dan BPHTB yang dikelola	
						Persentase Capaian Penerimaan Dana Perimbangan dan PAD non Pajak	

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Program Prioritas			Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Kode	Program	Indikator	
			6. Indeks SPBE			Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Pengawasan, Pengendalian, Kerjasama dan Sosialisasi Pajak Daerah	
				4.1.2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase Penataan Administrasi Pemerintahan	
				4.1.2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase Penataan Administrasi Pemerintahan	
				2.16.2	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Cakupan publikasi informasi melalui media cetak dan media elektronik	
				2.16.3	Program Aplikasi Informatika	Cakupan pemanfaatan aplikasi informatika oleh Perangkat Daerah	
						Persentase Jaminan Kualitas Layanan TIK (Service Level Agreement)	
				2.21.2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral pada Portal Satu Data	

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Program Prioritas			Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Kode	Program	Indikator	
		4. Meningkatnya keamanan informasi SPBE	7. Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Cakupan pengamanan informasi perangkat daerah	Diskominfo
		5. Meningkatnya kinerja pelayanan publik	8. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil diproses sesuai regulasi	Setda-Bag. Pengadaan Barang dan Jasa
		6. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	9. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan laporan pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	BPKAD
		7. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan bebas dari KKN	10 Maturitas SPIP	4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Nilai kualitas pengadaan barang dan jasa	Setda-Bag. Pengadaan Barang dan Jasa
					Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Dumas tuntas dan kasus hukum	Inspektorat
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai MCP	
						Persentase OPD dengan Nilai Kematangan MR >15	

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Program Prioritas			Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Kode	Program	Indikator	
3	Meningkatkan pemerataan kesejahteraan dan Pembangunan manusia		1. Indeks Pembangunan Manusia				Pemerintah Kabupaten
			2. Tingkat Kemiskinan				
			3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)				
		1. Meningkatnya kualitas pendidikan	1. Rata-rata Lama Sekolah 2. Harapan Lama Sekolah	1.1.2	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase lembaga yang nilai literasi mencapai nilai kompetensi minimum	Dinas Pendidikan
						Persentase lembaga yang nilai numerasi mencapai nilai kompetensi minimum	
						Persentase lembaga pendidikan dasar yang terakreditasi minimal B	
						Persentase PAUD dan lembaga pendidikan nonformal yang terakreditasi/sesuai standar	
						Persentase sarana prasarana dengan kondisi baik	
		2. Meningkatnya kualitas kesehatan	3. Angka Harapan Hidup (AHH)	1.2.2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase terpenuhinya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Program Prioritas			Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Kode	Program	Indikator	
				1.2.4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
				1.2.5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan	
		3. Meningkatnya tingkat hidup layak penduduk	4. Indeks Daya Beli/ Indeks Pengeluaran Per Kapita	2.9.2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase terkelolanya Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	DKPP
				2.9.3	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKPP
				2.9.4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Kerawanan Pangan yang ditangani	DKPP
				1.6.4	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase terlaksananya pemenuhan Rehabilitasi Sosial	Dinsos

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Program Prioritas			Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Kode	Program	Indikator	
				1.6.5	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase penduduk yang terpenuhi kebutuhan pangannya sesuai standar	Dinsos
			5. Inflasi	2.09.02	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka Kecukupan Energi (AKE)	DKPP
						Angka Kecukupan Protein (AKP)	DKPP
						Persentase Lumbung Pangan Terkategori Baik	DKPP
				3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Sarana Pertanian yang disediakan dan dikembangkan	DKPP
				3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana Pertanian yang disediakan dan dikembangkan	DKPP
				3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase upaya pengendalian Kesehatan	Disnakkan
				3.30.03	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase pelaksanaan pemantauan ketersediaan barang pokok dan penting	Disdagkopum

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Program Prioritas			Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Kode	Program	Indikator	
		4.Meningkatnya pembangunan pemuda	6. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)		Program Pengembangan Ekspor	Persentase pelaksanaan nilai ekspor	Setda
				4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase pelaksanaan pengelolaan Perekonomian Dan Pembangunan	
				2.19.02	Program Pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang meningkat kapasitasnya	Dinpora
				2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase organisasi kepramukaan yang memenuhi standar kualifikasi	Dinpora
				2.19.03	Program Pengembangan kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase keikutsertaan Atlet dalam kejuaran	Dinpora
`		5. Pemerataan Pendapatan Masyarakat dan ketimpangan antar wilayah	7. Indeks Gini				Pemerintah Kabupaten
		6. Meningkatnya perlindungan sosial	8. Persentase Perlindungan Sosial bagi bagi Rumah Tangga Miskin (PKH/KKS/KPS)	1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang sudah berhasil direhab	Dinsos
						Presentase Keluarga Masyarakat Fakir Miskin yang dibantu	

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Program Prioritas			Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Kode	Program	Indikator	
		7. Meningkatnya taraf hidup penduduk dan rumah tangga miskin	9. Cakupan Keluarga miskin dan rentan memiliki pekerjaan atau kegiatan usaha	1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang difasilitasi rehabilitasi Persentase Keluarga Masyarakat Fakir Miskin yang dibantu	Dinsos
		8. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	10. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	2.14.03	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase peserta KB Aktif MKJP	DP3AKB
				2.08.02	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase lembaga yang melaksanakan pengarusutamaan gender	DP3AKB
				2.08.03	Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	DP3AKB
		9. Meningkatnya perlindungan terhadap anak	11. Kecamatan Layak Anak (KLA)	2.08.07	Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	DP3AKB
				2.08.06	Pemenuhan Hak Anak	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	
		10. Meningkatnya ketahanan pangan daerah	12. Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka Kecukupan Energi (AKE)	DKPP
						Angka Kecukupan Protein (AKP)	DKPP

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Program Prioritas			Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Kode	Program	Indikator	
						Persentase Lumbung Pangan Terkategori Baik	DKPP
				2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rawan Pangan	DKPP
				2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang aman	DKPP
4	Meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi		1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Tingkat Pengangguran Terbuka				Pemerintah Kabupaten
		1. Meningkatnya peluang kesempatan kerja	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang terdidik/terlatih	Disperinaker
				2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Disperinaker
				2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase Fasilitas Sarana Hubungan Industrial dan Kelengkapan Persyaratan Kerja	Disperinaker
				2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	Disperinaker
		2. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi digital	2. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) - Pada Kegiatan Ekonomi	2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Persentase penyediaan sistem informasi digital bagi kegiatan ekonomi masyarakat	Diskominfo

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Program Prioritas			Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Kode	Program	Indikator	
		pada kegiatan ekonomi	/ ICT Development Index				
			3. Persentase pelaku usaha berbasis sistem digital/online (UMK Go Digital)	2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Persentase penyediaan sistem informasi digital bagi UMK	Diskominfo
				3.26.5	Program Pengembangan UMKM	Persentase pelaksanaan upaya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif mendapatkan failitas pengembangan Usaha menjadi usaha Kecil	Disdagkopum
		3. Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Ekonomi Kreatif	4. Laju Pertumbuhan Usaha Ekonomi Kreatif	3.26.5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaksanaan upaya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Disbudpar
		4. Meningkatnya investasi daerah	5. Pertumbuhan Nilai Investasi (Realisasi Investasi)	2.18.02	Program pengembangan iklim penanaman modal	Jumlah unit usaha yg memperoleh fasilitas kemudahan Penanaman modal	DPMPTSP
			6. Nilai Realisasi Investasi	2.18.03	Program promosi penanaman modal	Jumlah promosi yang dilaksanakan	DPMPTSP
				2.18.04	Program pelayanan penanaman modal	Jumlah ajuan Perizinan yang lengkap persyaratannya	DPMPTSP
				2.18.05	Program Pengendalian	Jumlah Pelaku usaha yang terverifikasi data dan	DPMPTSP
					Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengawasan penanaman modal	
				2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem	Jumlah data yang diproses	DPMPTSP

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Program Prioritas			Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Kode	Program	Indikator	
					Informasi Penanaman Modal		
		5. Meningkatkan PDRB sektor unggulan daerah	7. NTP				Pemerintah Kabupaten
				2.09.02	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka Kecukupan Energi (AKE)	DKPP
						Angka Kecukupan Protein (AKP)	DKPP
						Persentase Lumbung Pangan Terkategori Baik	DKPP
		8. PDRB sektor pertanian dalam arti luas		3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Sarana Pertanian yang disediakan dan dikembangkan	DKPP
				3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana Pertanian yang disediakan dan dikembangkan	DKPP
				3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase upaya pengendalian Kesehatan	DISNAKKAN
		9. PDRB sektor perdagangan perindustrian		2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang mendapat fasilitas pemberdayaan UMKM	Disdangkopum
		10. PDRB pariwisata				Persentase seni budaya yang dilestarikan	Disbudpar

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Program Prioritas			Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Kode	Program	Indikator	
					Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase seni budaya lokal yang mengikuti event	
5	Meningkatkan percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah berbasis risiko dan pembangunan berkelanjutan	1. Meningkatnya pemerataan dan keseimbangan infrastruktur antar wilayah	1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur				Pemerintah Kabupaten
			2. Indeks Williamson				
			1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase infrastruktur kebinamargaan dalam kondisi mantap	DPUBMPR
			2. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Perumahan, Permukiman dan Keciaptakarya	1.03.09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	DPKPCK
			3. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Perhubungan	2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio tersedianya infrastruktur perhubungan yang sesuai standart	Dishub
			4. Indeks Kinerja Irigasi	1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Pengembangan Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	DPUSDA
						Persentase fungsi saluran pembuang (sungai/kali/avfour) dalam kondisi baik	
						Persentase pembinaan kelembagaan HIPPA/GHIPPA	
			5. Indeks Desa Membangun	2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga	Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan	DPMD

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Program Prioritas			Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Kode	Program	Indikator	
					Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	yang terlibat dalam perencanaan pembangunan	
		2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan menurunnya Emisi Karbon	6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	DLH
					Program Pengendalian Pencemaran	Persentase titik pantau yang memenuhi baku mutu kualitas air dan udara	DLH
						Persentase luasan lahan yang direhabilitasi	
					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase luas RTH yang berfungsi baik	DLH
					Program Pengendalian Bahan Berbahaya	Persentase persetujuan yang sudah memenuhi rincian teknis limbah B3	DLH
					Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)		
					Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan	Persentase pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang terlaksana	DLH

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Program Prioritas			Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Kode	Program	Indikator	
					Lingkungan Hidup (PPLH)		
					Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase kelompok masyarakat yang telah memiliki rencana aksi yang aktif melakukan gerakan peduli lingkungan hidup	DLH
					Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menerima penghargaan	DLH
					Program Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah yang terkelola	DLH
					Program Penanganan Bencana	Persentase upaya Penanganan Bencana	BPBD
		7. Indeks Risiko Bencana Kabupaten (IRBK)		1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Dinsos
				3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penanganan dan penanggulangan bencana	DKPP
						Jumlah luas lahan yang mendapatkan fasilitas penanggulangan bencana pertanian	DKPP

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Program Prioritas			Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Kode	Program	Indikator	
						Rasio luas lahan serangan OPT yang tertangani (luas serangan OPT yang dapat ditangani / total luas serangan OPT)	DKPP
						Rasio luas DPI yang tertangani (luas terkena DPI yang dapat ditangani / total luas terkena DPI)	DKPP
					Program Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	Persentase ternak sapi betina peserta AUTS	DISNAKKAN
		8. IKD (Indeks Kapasitas Daerah)		1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	BPBD
		7. Meningkatnya ketaatan pembangunan dan kegiatan penduduk terhadap kebijakan tata ruang	9. Persentase Tingkat Kepatuhan Tata Ruang	1.3.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang tersusun	DPUBMPR

6.3 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan, maka disusun program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2024 – 2026, berdasarkan isu strategis daerah.

Berbagai program Perangkat Daerah yang telah disesuaikan dengan Program Prioritas pembangunan sesuai tujuan dan sasaran sebagaimana disampaikan di atas merupakan Program Prioritas guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah dalam RPD. Selanjutnya, tabel Program setiap Perangkat Daerah sesuai urusan akan disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 6. 9 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2024 – 2026**

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.318.524.248 .528		1.205.186.84 8.973		1.221.254.67 7.710		1.251.205.32 3.750		3.677.646.85 0.432	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Nilai asesmen literasi : Dasar	95,5	96	263.731.081.4 48	96,50	250,318,466. 416	97,00	240.052.589. 015	97,5	242.665.925. 502	97,5	733.036.980. 932	Dinas Pendidikan
	Persentase Nilai asesmen numerik : Dasar	65,00	66,00		68,00		69,00		70		70		
	Persentase Nilai survey karakter : Berkembang	95,00	96,00		67,00		67,50		69		69		
	Persentase lembaga pendidikan dasar yang terakreditasi minimal B	94,00	95,44		96,50		97,00		97,5		97,5		
	Persentase PAUD dan lembaga pendidikan nonformal yang terakreditasi/se suai standar	37,25	40.25		45.00		46.00		47		47		
	Persentase sarana prasarana dengan kondisi baik	76,74	78,96		84,00		85,00		89,00		89,00		
Porgram Pengembangan Kurikulum	Jumlah sekolah yang menerapkan kurikulum			0	710	880.545.200	710	913.970.550	710.00	933.773.969. 00	710	2.728.289.71 9	Dinas Pendidikan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
	muatan lokal jenjang SD												
	Jumlah sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal jenjang SMP				108								
Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai standar kompetensi dan pengembangann ya	50	55	55.024.437.26 0	60	41.641.797.2 60	65	41.641.797.2 60	70	41.641.797.2 60	70	124.925.391. 780	Dinas Pendidikan
	Persentase guru dan tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal D IV/ S1 dan bersertifikasi	82	85		86		88		90		90		
	Rasio pendidik dan tenaga kependidikan - peserta didik	75	80		83		85		88		89		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	999.768.729.820	100	912.346.040.097	100	938.646.320.885	100	965.963.827.019	100	2.816.956.188.001	Dinas Pendidikan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.153.628.948.443		1.136.699.147.313		1.219.955.341.065		1.253.327.142.773		3.610.293.376.152	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				519.336.290.737		457.386.709.102		489.746.388.058		468.237.633.099		1.415.370.730.259	Dinas Kesehatan
	Persentase calon pengantin wanita yang mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi sesuai standar	91,13 %	92 %		93 %		94 %		95 %		95%		
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	63,44%	100%		100%		100%		100%		100%		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	70,44%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Desa yang melaksanakan edukasi kesehatan ibu hamil, bersalin, dan keluarga dengan balita	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Desa yang melaksanakan P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase bayi baru lahir usia 0-28 hari mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	70,51%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	76,44%	100%		100%		100%		100%		100%		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	60%		65%		73%		80%				
	Persentase Penduduk Peserta JKN Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah	33,91%	30%		30%		30%		30%		30%		
	Persentase Pemberian Rekomendasi ijin Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Fasilitas Pelayanan Penunjang Kesehatan, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mengajukan rekomendasi ijin	100%	100%		100%		100%		100%		100%		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Fasilitas Pelayanan Penunjang Kesehatan, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dilakukan monitoring dan evaluasi	80%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Fasilitas Kesehatan yang hasil monitoring pengukuran INM-nya ditindaklanjuti	90%	95%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Fasilitas kesehatan rujukan yang dilakukan fasilitasi penyiapan perumusan dan pelaksanaan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
	kesehatan rujukan												
	Persentase Orang terduga Tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	91%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	58,37%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	87,38%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapatkan pelayanan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
	kesehatan sesuai standar												
	Persentase Orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	91,29%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%		100%		100.00%		100%		100%		
	Persentase Penderita Pneumonia balita yang mendapatkan penanganan sesuai standar	62,61%	65%		65%		65%		65%		65%		
	Persentase Penderita diare yang mendapatkan penanganan sesuai standar	70%	90%		90%		90%		90%		90%		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
	Prevalensi kasus kusta < 1/10.000 penduduk	<1/ 10.000	<1/ 10.000		<1/ 10.000		<1/ 10.000		<1/ 10.000		<1/ 10.000		
	Persentase Penderita DBD yang mendapatkan penanganan sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Angka Kesakitan Malaria 1/1.000 penduduk beresiko	0,27/ 1000	<1/ 1.000		<1/ 1.000		<1/ 1.000		<1/ 1.000		<1/ 1.000		
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan khusus (gilut dan indera)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				7.546.100.660		800.783.000		800.783.000		800.783.000		2.714.094.000	Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
	Persentase Puskesmas dengan Sumberdaya Manusia Kesehatan sesuai standar	85%	85%		85%		85%		85%		85%		
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				280.846.313		280.846.313		280.846.313		280.846.313		842.538.939	Dinas Kesehatan
	Persentase fasilitas kesehatan dengan ketersediaan obat sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase fasilitas kesehatan dengan ketersediaan alat kesehatan sesuai standar	60%	75%		80%		90%		92%		95%		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				4.293.653.669		4.293.653.669		4.293.653.669		4.293.653.669		12.880.961.007	Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
	Persentase Fasyankes yang menyediakan layanan promosi kesehatan kategori cukup	70%	70%		75%		80%		85%		85%		
	Persentase Anak SD usia 10-12 tahun dan ASN yang dilakukan pengukuran kebugaran	20%	20%		20%		20%		20%		20%		
	Persentase Warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	68,84%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	94%	100%		100%		100%		100%		100%		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
	Persentase Warga Negara usia 15 - 59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	67,50%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Desa /Kelurahan Siaga yang difasilitasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Desa dengan Jumlah UKBM aktif ≥ 4	80%	83%		85%		90%		90%		90%		
	Persentase Pos UKK yang difasilitasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
	Persentase TPM yang memenuhi syarat dan diberikan sertifikat	84%	84%		84%		84%		84%		84%		
	Persentase PIRT yang memenuhi syarat	80%	80%		80%		80%		80%		80%		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kabupaten/KOTA	Persentase layanan umum Perangkat Daerah (PD) yang tersedia sesuai mutu dan kebutuhan	100%	100%	115.529.800.2 19	100%	143.851.990. 524	100%	147.145.523. 424	100%	154.372.311. 205	100%	445.369.825. 153	Dinas Kesehatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	352.492.629.4 10	100%	342.503.565. 755	100%	377.011.307. 932	100%	412.258.431. 552	100%	1.131.773.30 5.239	RSUD Sosodoro Djatikoesoem o
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - rata capaian kegiatan penunjang urusan	100%	100%	75.888.608.69 8	100%	63.537.365.8 06	100%	69.617.695.7 09	100%	75.627.626.0 00	100%	208.782.687. 515	RSUD Sumberrejo

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
	pemerintahan daerah												
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Kelengkapan sarana kesehatan di RS sesuai standart	73,76%	85%	1.754.088.103		0		0		0		0	RSUD Sumberrejo
	Kelengkapan prasarana kesehatan di RS sesuai standart	82.93%	100%										
	Kelengkapan alat kesehatan di RS sesuai standart	73%	50%										
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	0	0	76.506.930.634	100%	81.632.970.229	100%	87.210.415.763	100%	93.291.103.128	100%	262.134.489.121	RSUD Padangan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata - rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	0	0	-	100%	29.646.480.400	100%	30.253.804.420	100%	30.891.494.642	100%	90.791.779.462	RSUD Kepohbaru
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Kelengkapan sarana kesehatan di RS sesuai standart	0	0%	-	100%	12.764.782.515		13.594.922.777	100%	13.273.260.165	100%	39.632.965.457	RSUD Kepohbaru
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				2.572.833.082.907		1.685.307.701.270		2.013.965.838.502		1.868.701.512.645		5.567.975.052.417	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	16.051.174.980	100%	15.920.205.230	100%	16.493.669.630	100%	17.455.394.901	100%	49.869.269.761	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	42.003.375.714	100%	46.471.486.028	100%	46.965.074.520	100%	47.452.013.012	100%	140.888.573.560	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	10.628.853.81 7	100%	15.046.959.2 50	100%	17.293.409.8 68	100%	16.364.366.7 66	100%	48.704.735.8 84	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	Presentase infrastruktur kebinamargaan dalam kondisi mantap (kondisi baik + kondisi sedang)	86,75% (perkiraan sementara dan masih proses perhitunga n)	92,95%	1.577.409.135 .185	94%	824.741.345. 154	96%	1.209.450.01 2.712	98%	996.822.783. 009	98%	3.031.014.14 0.875	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga kerja jasa konstruksi yang kompeten	68% (perkiraan sementara dan masih proses perhitunga n)	70%	4.049.518.800	72,00%	5.701.508.91 0	74,00%	5.542.833.30 0	76,00%	3.298.986.06 0	76,00%	14.543.328.2 70	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG	Jumlah dokumen penataan ruang yang tersusun	4 dokumen	7 dokumen	4.528.399.400	5 dokumen	1.725.840.60 0	2 dokumen	1.422.366.20 0	1 dokumen	1.533.866.20 0	14 dokumen	4.682.073.00 0	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengembangan pengelolaan jaringan irigasi dalam kondisi baik	100%	100%	526.247.990.4 19	100%	423.776.218. 028	100%	179.102.792. 771	100%	308.468.766. 553	100%	911.347.777. 352	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga dengan akses air minum	22,20%	22,76%	14.539.128.00 0	23,39%	153.916.024. 640	24,02%	136.961.434. 886	24.66%	92.007.299.2 35	24,66%	382.884.758. 762	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi dasar	89,94%	90,24	12.936.615.54 2	90,70%	19.254.793.4 80	91,15%	19.298.471.4 15	91,61%	19.342.586.1 29	91,61%	57.895.851.0 24	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase sarana dan prasarana sistem drainase yang memadai	40,67%	47,10%	136.629.673.5 50	53,73%	92.661.070.1 09	60,35%	154.401.250. 000	66,98%	79.431.250.0 00	66,98%	326.493.570. 109	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan gedung aparatur dan publik yang layak fungsi	76,70%	77,62%	227.581.877.5 00	78,64%	86.092.249.8 41	79,78%	227.034.523. 200	81,03%	286.524.200. 780	81,03%	599.650.973. 821	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNY A	Persentase jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	87,01%	87,08%	227.340.000		0		0		0		-	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karva

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				21.313.608.810		81.314.000.000		95.059.000.000		98,570,000,000		274.943.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pembangunan dan Pembangunan Perumahan	-	3,40%	3.499.998.810	6.80%	500.000.000	10.21%	500.000.000	13.61%	500,000,000	13.61%	1.500.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah layak huni yang tersedia	82,34%	83,79%	11.463.290.000	92.67%	20.374.000.000	97.11%	20.374.000.000	100%	20.374.000.000	100%	61.122.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase rumah yang terfasilitasi PSU	21,45%	43,34%	-	65,27%	4.170.000.000	87,21%	3.170.000.000	100%	3.606.000.000	100%	10.946.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase jalan lingkungan permukiman, PJU dan PJL yang berfungsi baik	39,44%	39,69%	6.350.320.000	42,31%	56.270.000.000	44,93%	71.015.000.000	47,55%	74.090.000.000	47,55%	201.375.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				41.622.548.065		54.185.531.038		49.999.624.476		55.159.395.128		159.344.550.642	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	4.949.854.708	100%	7.077.850.005	100%	7.670.632.325	100%	7.656.132.325	100%	22.404.614.655	BPBD
Program Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana (IRB)		83 skor	1.663.630.660	82 skor	2.879.879.520	81 skor	3.069.261.680	80 skor	2.989.331.680		8.938.472.880	BPBD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	6.963.609.155	100%	6.863.609.155	100%	6.681.001.755	100%	6.742.965.555	100%	20.287.576.465	Satpol PP
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum				10.625.510.075		19.095.881.342		11.457.258.500		13.279.186.152		43.832.325.994	Satpol PP
	Persentase respon pengendalian pelanggaran	71%	75%		79%		83%		87%		87%		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
	Persentase penanganan gangguan trantibum sesuai kebutuhan	91%	93%		95%		97%		100%		100%		
	Persentase penegakan perda/perkada	72%	67%		66%		63%		60%		60%		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	95%	100%	5.360.677.017	100%	8.935.957.566	100%	12.276.266.766	100%	15.646.575.966	100%	36.858.800.298	Dinas Damkar dan Penyelamatan
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANG AN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Prosentase penanganan kejadian kebakaran dan penyelamatan yang ditangani sesuai waktu tanggap/Respo ntime	98%	93%	12.059.266.450	94%	9.332.353.450	94%	8.845.203.450	95%	8.845.203.450	95%	27.022.760.350	Dinas Damkar dan Penyelamatan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				65.240.764.449		66.433.074.189		67.083.074.189		67.283.074.189		200.799.222.567	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capian kegiatan penunjang urusan	100%	100%	5.850.764.274	100%	8.399.832.961	100%	8.416.402.961	100%	8.416.402.961	100%	25.232.638.883	Dinas Sosial

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
	pemerintah daerah												
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSM dan TKSK yang aktif	60%	65%	1.695.279.700	65%	1.550.979.000	65%	1.550.979.000	65%	1.550.979.000	65%	4.652.937.000	Dinas Sosial
	Persentase Lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	60%	65%		65%		65%		65%		65%		
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang sudah berhasil di rehab	70%	75%	4.257.801.663	75%	3.932.595.352	75%	4.591.025.352	75%	4.816.025.352	75%	13.339.646.056	Dinas Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase anak terlantar yang berhasil terlindungi dan terjamin (reunifikasi)	0,95	100%	51.011.310.280	100%	50.757.236.512	100%	50.732.236.512	100%	50.707.236.512	100%	152.196.709.536	Dinas Sosial
	Persentase Keluarga Masyarakat Fakir Miskin yang di bantu	75%	80%		80%		80%		80%		80%		
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang terpenuhi	100%	100%	2.042.308.400	100%	1.414.130.232	100%	1.414.130.232	100%	1.414.130.232	100%	4.242.390.696	Dinas Sosial

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
	kebutuhan dasarnya												
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persetrnase kebutuhan pemeliharaan dan pengamanan TMP dan makam leluhur yang terpenuhi	80%	90%	383.300.132	90%	378.300.132	90%	378.300.132	90%	378.300.132	90%	1.134.900.396	Dinas Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				6.954.697.673		7.292.321.150		7.494.189.000		7.868.900.000		22.655.410.150	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Persentase capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	5.452.731.323	100%	5.796.663.150	100%	6.102.247.000	100%	6.407.359.000	100%	18.306.269.150	Dinas Perindustrian dan tenaga Kerja
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang terdidik/terlatih	78%	75%	1.299.143.600	75%	880.968.000	75%	925.017.000	75%	971.268.000	75%	2.777.253.000	Dinas Perindustrian dan tenaga Kerja

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	87%	85.03%	90.622.750	85.75%	214.630.000	86.01%	225.362.000	86.42%	236.631.000	86.42%	676.623.000	Dinas Perindustrian dan tenaga Kerja
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Fasilitas Sarana Hubungan Industrial dan Kelengkapan Persyaratan Kerja	100%	100%	112.200.000	100%	230.060.000	100%	241.563.000	100%	253.642.000	100%	725.265.000	Dinas Perindustrian dan tenaga Kerja
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja			0	100%	170.000.000		0		0	100%	170.000.000	Dinas Perindustrian dan tenaga Kerja
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				10.373.303.337		13.370.564.641		13.784.805.418		14.134.832.130		41.290.202.189	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase pelayanan umum perangkat daerah yang tersedia sesuai mutu dan kebutuhan	100%	100%	7.085.559.087	100%	9.361.044.592	100%	9.769.079.611	100%	10.114.247.789	100%	29.244.371.992	Dinas P3AKB

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase lembaga yang melaksanakan pengarusutama an gender	65%	68%	135.215.580	70%	204.750.624	71%	206.712.568	72%	208.685.372	72%	620.148.564	Dinas P3AKB
Program Peningkatan kualitas keluarga	Persentase kepala rumah tangga perempuan rentan yang memiliki keterampilan usaha	60.00%	70.00%	85.165.740	70.50%	135.165.740	70.55%	135.165.740	70.60%	135.165.740	70.60%	405.497.220	Dinas P3AKB
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase data gender dan anak yang terpenuhi sesuai standar	60.00%	75.00%	96.555.600	75.50%	50.208.912	75.55%	50.208.912	75.60%	50.208.912	75,60%	150.626.736	Dinas P3AKB
Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	100%	100%	1.971.902.800	100%	2.467.872.800	100%	2.469.368.300	100%	2.469.368.300	100%	7.406.609.400	Dinas P3AKB
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	100%	100%	37.024.150	100%	37.024.150	100%	37.024.150	100%	37.024.150	100%	111.072.450	Dinas P3AKB

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	80%	90%	961.880.380	82.50%	1.114.497.823	85%	1.117.246.137	87,50%	1.120.131.867	87,50%	3.351.875.827	Dinas P3AKB
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				618.739.200		676.529.120		744.182.260		814.655.050		2.235.366.430	
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka Kecukupan Energi (AKE)	2,132	2,133	393.671.350	2,134	430.440.170	2,135	473.484.250	2,136	517.186.810	2,136	1.421.111.230	DKPP
	Angka Kecukupan Protein (AKP)	57.1	57,3		57.5		57,8		58		58		
	Persentase Lumbung Pangan Terkategori Baik	25%	25%		25%		25%		26%		26%		
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rawan Pangan	12%	11,50%	100.436.500	11%	109.817.120	10,50%	120.798.930	10%	132.745.130	10%	363.361.180	DKPP
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang aman	90%	92%	124.631.350	92%	136.271.830	94%	149.899.080	94%	164.723.110	94%	450.894.020	DKPP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				503.016.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		750.000.000	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa tanah yang terfasilitasi	100%	100.00%	503.016.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	750.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				34.623.944.23 8		42.018.471.3 25		50.987.971.6 97		42.193.558.9 36		135.200.001. 958	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	100%	100%	858.130.982	100%	534.000.419	100%	528.695.161	100%	381.437.706	100%	1.444.133.28 6	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase lokasi pencegahan, penganggu- an dan pemulihan pencemaran / kerusakan lingkungan hidup	100%	100%	787.822.800	100%	1.449.581.32 3	100%	1.352.904.29 5	100%	1.392.514.08 1	100%	4.194.999.69 9	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas RTH yang berfungsi baik	100%	100%	11.930.499.81 7	100%	12.584.550.0 00	100%	12.459.650.0 00	100%	12.459.550.0 00	100%	37.503.750.0 00	Dinas Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase persetujuan yang sudah memenuhi rincian teknis limbah B3	100%	100%	36.418.400	100%	38.428.400	100%	37.428.400	100%	35.928.400	100%	111.785.200	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang terlaksana dalam satu tahun	100%	100%	184.968.432	100%	216.568.432	100%	221.568.432	100%	226.568.432	100%	664.705.296	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Prosentase kelompok masyarakat yang telah memiliki rencana aksi yang aktif melakukan gerakan peduli lingkungan hidup	51,85%	55,17%	226.257.000	68%	339.385.500	72%	373.324.050	76%	410.656.455	76%	1.123.366.005	Dinas Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkunagn hidup yang menerima penghargaan	52%	54%	133.218.250	70%	146.540.075	73%	161.194.083	75%	177.313.491	75%	485.047.649	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kot a yang tertangani	100%	100%	49.936.416	100%	56.536.416	100%	56.536.416	100%	56.536.416	100%	169.609.248	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah yang terkelola	100%	100%	4.944.083.554	100%	10.880.263.712	100%	19.949.348.712	10000%	11.122.263.712	100%	41.951.876.136	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	15.472.608.587	100%	15.772.617.048	100%	15.847.322.148	10000%	15.930.790.243	100%	47.550.729.439	Dinas Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				12.607.899.606		16.929.326.093		17.689.576.093		18.592.549.913		53.211.452.099	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan umum perangkat daerah yang tersedia sesuai mutu dan kebutuhan	96,21%	100%	9.141.837.466	100%	12.783.461,763	100%	13.793.711.763	100%	14.364.847.296	100%	40.942.020.822	Dinas Catatan Sipil dan Kependuduka n
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan KTP elektronik	96,76%	100%	614.914.900	100%	811.865.890	100%	811.865.890	100%	1.102.459.185	100%	2.726.190.965	Dinas Catatan Sipil dan Kependuduka n
	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Penerbitan KIA	37,56%	40%		40%		45%		45%		43%		
Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan akta kelahiran anak (usia 0 - 18 tahun)	93,73%	100%	278.464.000	100%	444.489.850	100%	444.489.850	100%	466.714.343	100%	1.355.694.043	Dinas Catatan Sipil dan Kependuduka n
	Persentase Penerbitan Akta Kematian	35%	35%		35%		40%		40%		38%		
Program Pengelolaan Informasi	Persentase Penyelesaian Data Penduduk Bermasalah	100%	100%	2.572.683.240	100%	2.889.508.590	100%	2.639.508.590	100%	2.658.529.090	100%	8.187.546.270	Dinas Catatan Sipil dan Kependuduka n

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
Administrasi Kependudukan													
	Jumlah Kerjasama Pemanfaatan Data	7	10		12		12		14		14		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				24.371.371.434		35.828.907.367		36.905.590.724		37.652.518.577		110.387.016.669	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	16.258.761.204	100%	24.878.494.067	100%	24.949.930.661	100%	24.954.258.514	100%	74.782.683.243	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
Program Penataan Desa	Persentase Desa yang terbuka aksesnya	100%	100%	378.900.500	100%	532.385.900	100%	530.652.913	100%	555.652.913	100%	1.618.691.726	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa dengan kerja sama aktif	100%	100%	33.643.000	100%	394.095.000	100%	413.799.750	100%	413.799.750	100%	1.221.694.500	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi pemerintahan desa	100%	100%	6.228.835.000	100%	9.022.282.400	100%	9.988.162.400	100%	10.705.762.400	100%	29.716.207.200	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa yang berdaya dari sisi ekonomi dan teknologi tepat guna	100%	100%	1.471.231.730	100%	1.001.650.000	100%	1.023.045.000	100%	1.023.045.000	100%	3.047.740.000	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				17.304.382.476		18.501.870.576		18.471.042.053		18.473.623.365		55.446.535.994	
Program Pengendalian Penduduk	Persentase desa dan institusi pendidikan formal/non formal siaga kependudukan aktif dalam kegiatan pengendalian penduduk	100%	100%	1.004.966.600	100%	1.005.094.700	100%	1.005.222.800	100%	1.005.350.900	100%	3.015.668.400	Dinas P3AKB
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase peserta KB Baru	100%	100%	2.498.124.143	100%	2.499.124.143	100%	2.499.124.143	100%	2.499.124.143	100%	7.497.372.429	Dinas P3AKB
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang ikut kelompok bina ketahanan dan	76,50%	77%	7.195.988.793	79,50%	7.195.988.793	82,50%	7.200.032.170	85%	7.202.485.382	85%	21.598.506.345	Dinas P3AKB

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
	pemberdayaan ekonomi keluarga												
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase peserta KB Aktif MKJP	21,85	22%	6.605.302.940	22,05%	7.801.662.940	22,45%	7.766.662.940	22,75%	7.766.662.940	22,75%	23.334.988.820	Dinas P3AKB
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				24.126.791.755		51.124.963.626		41.221.069.915		51.715.105.002		144.061.138.543	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	10.562.875.185	100%	14.472.035.150	100%	14.497.801.510	100%	15.937.330.388	100%	44.907.167.048	Dinas perhubungan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio tersedianya infrastruktur perhubungan yang sesuai standart	81.60%	82.42%	13.539.680.770	83.24%	36.625.734.876	84.07%	26.701.582.125	84.91%	35.756.088.334	84.91%	99.083.405.335	Dinas perhubungan
Program Pengelolaan Pelayaran	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan alat keselamatan	61.22%	61.83%	24.235.800	62.45%	27.193.600	63.07%	21.686.280	63.70%	21.686.280	63.70%	70.566.160	Dinas perhubungan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
	pelayanan sesuai standart												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				14.378.887.629		19.261.199.397		14.969.338.658		14.825.123.658		49.055.661.713	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase layanan umum Komunikasi dan Informatika yang tersedia sesuai mutu dan kebutuhan	100%	100%	6.753.582.909	100%	7.342.384.977	100%	7.202.467.608	100%	7.505.600.608	100%	22.050.453.193	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Desa/Kelurahan penerima informasi dan komunikasi publik	100%	100%	3.344.889.370	-	7.132.389.370	-	2.409.436.000	-	2.409.436.000	100%	11.951.261.370	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Cakupan publikasi informasi dalam media cetak maupun elektronik	-	-	-	80%		85%		90%		90%		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD yang telah memiliki sistem informasi sesuai standar	100%	100%	4.280.415.350	-	4.786.425.050	-	5.357.435.050	-	4.910.087.050	100%	15.053.947.150	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Cakupan pemanfaatan aplikasi informatika oleh Perangkat Daerah	-	-	-	100%		100%		100%		100%		
	Persentase Jaminan Kualitas Layanan TIK (SLA)	-	-	-	73%		75%		77%		77%		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI UKM				2.513.844.055		3.297.245.301		4.921.250.795		2.997.457.760		11.215.953.856	
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Aspek Permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen efisiensi, akuiditas kemandirian dan pertumbuhan Koperasi serta		96%	221.069.590	98%	227.718.127	100%	275.004.351.98	100%	375.975.805	100%	878.698.284	Dinas Perdagangan Koperasi dan UM

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
	jati diri Koperasi.												
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan perilaku SDM Koperasi		98%	356.971.965	100%	306.962755	100%	443.234.140	100%	583.332.265	100%	1.333.529.160	Dinas Perdagangan Koperasi dan UM
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Produktifitas nilai tambah penguatan kelembagaan, penataan manajemen dan restrukturisasi usaha koperasi	93,28%	95%	54.981.000	98%	62.128.530	100%	69.801.133	100%	90.438.388	100%	222.368.051	Dinas Perdagangan Koperasi dan UM
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang Mendapat Fasilitas Pemberdayaan UMKM	29.02%	100%	1.798.067.500	100%	2.629.951.299	100%	3.772.302.374	100%	1.307.762.352	100%	7.710.016.026	Dinas Perdagangan Koperasi dan UM
Program Pengembangan UMKM	Persentase Unit Usaha yang Mendapatkan Fasilitas Pengembangan Usaha menjadi Usaha Kecil	25.14%	100%	82.754.000	100%	70.484.588	100%	360.908.795	100%	639.948.950	100%	1.071.342.334	Dinas Perdagangan Koperasi dan UM

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				7.800.290.406		9,927,393,454		9.766.192.269		10.382.006.625		30.075.592.348	
Program pelayanan penanaman modal	Jumlah ajuan Perizinan yang lengkap persyaratannya	12.582 Ijin	18.551 ijin	1.206.720.504	19.850 ijin	2,073,984,000	19.850 ijin	1.708.281.500	19.850 ijin	1.750.289.500	59.550 ijin	5.532.555.000	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu
Program pengembangan iklim penanaman modal	Jumlah unit usaha yg memperoleh fasilitasi kemudahan Penanaman modal	1 fasilitas	1 fasilitas penanam an modal	429.321.950	1 fasilitas penanam an modal	659,373,000	1 fasilitas penanam an modal	241.529.000	1 fasilitas penanam an modal	255.934.000	3 fasilitas penanam an modal	1.156.836.000	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu
Program promosi penanaman modal	Jumlah promosi yang dilaksanakan	3 media promosi	3 media promosi	249.653.250	3 media promosi	590,653,250	3 media promosi	595.653.250	3 media promosi	600.653.250	9 media promosi	1.786.959.750	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku usaha yang terverifikasi data dan pengawasan penanaman modal	196 orang	196 orang	313.110.000	196 orang	313,110,000	196 orang	313.110.000	196 orang	313.110.000	588 orang	939.330.000	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah data yang diproses	24 buku	24 buku	144.568.000	24 buku	154,687,000	24 buku	165.515.000	24 buku	177.101.000	72 buku	497.303.000	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yg sesuai kebutuhan	13 layanan	13 layanan	5.456.916.702	13 layanan	6.135.586.204	13 layanan	6.742.103.519	13 layanan	7.284.918.875	39 layanan	20.162.608.598	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				35.462.226.893		29.127.148.129		35.398.170.026		35.795.012.491		100.320.330,646	
Program Pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang memiliki kapasitas unggul	100%	100%	1.449.452.748	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	900.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase organisasi kepramukaan yang dibina	100%	100%	400.000.000	100%	300.000.000	100%	350.000.000	100%	300.000.000	100%	950.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
Program Pengembangan kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlet yang berprestasi Tingkat Daerah	100%	100%	20.150.345.000	100%	19.191.597.527	100%	25.405.596.905	100%	25.402.550.029	100%	69.999.744.461	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Pelayanan Umum dinas yang berhasil diselesaikan	100%	100%	13.462.429.145	100%	9.335.550.602	100%	9.342.573.121	100%	9.792.462.462	100%	28.470.586.185	Dinas Pemuda dan Olahraga
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				222.893.500		234.039.000		245.741.000		258.028.000		737.808.000	
PROGRAM PENYELENGGAR AAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data dan statistik sektoral yang dikelola dengan baik	100%	100%	222.893.500	100%	234.039.000	100%	245.741.000	100%	258.028.000	100%	737.808.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral pada Portal Satu Data	-	-	-	100%		100%		100%		100%		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				341.908.000		601.908.000		601.908.000		601.908.000		1.805.724.000	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase OPD yang datanya terlindungi sistem pengamanan	100%	100%	341.908.000	100%	601.908.000	100%	601.908.000	100%	601.908.000	100%	1.805.724.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Cakupan pengamanan informasi perangkat daerah	-	-	-	65%		70%		75%		75%		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				12.620.904.835		15.101.859.205		15.841.104.415		17.221.136.263		48.164.099.882	
Program : Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase koleksi museum yang dikelola dan dipelihara	80%	82%	313.979.000	-	313.979.000	-	314.892.400	-	395.295.712	-	1.024.167.112	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Persentase koleksi museum sebagai wisata edukasi	-	-		82%		84%		86%		86%		
Program : Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase seni budaya yang dilestarikan	75%	85%	1.348.704.000	-	2.922.155.686	-	3.480.428.523	-	4.433.836.349	-	10.836.420.558	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Persentase pelaku seni budaya lokal yang mengikuti event	-	-		85%		87%		89%		89%		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
Program : Pembinaan Sejarah	Persentase SDM sejarah yang dibina	78%	82%	95.658.300	-	95.658.300	-	95.658.300	-	95.658.300	-	286.974.900	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Persentase SDM sejarah yang aktif dalam seminar	-	-		82%		84%		86%		86%		
Program : Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan	80%	82%	142.645.000	-	148.854.190	-	149.712.332	-	307.197.948	-	605.764.470	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Persentase cagar budaya sebagai tujuan wisata	-	-		82%		84%		86%		86%		
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	10.719.918.535	100%	11.621.212.028,74	100%	11.800,412,860.01	100%	11,989,147,953.02	100%	35.410.772.841,77	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				5.085.597.819		5.452.011.722		5.739.261.627		5.966.944.632		17.158.217.981	
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	4.681.800.833	100%	5.022.439.710	100%	5.282.854.358	100%	5.426.936.318	100%	15.732.230.386	Dinas Perpustakaan dan Arsip

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
Program : Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang dibina	26.55%	6.20%	403.796.986	7,14%	429.572.012	8%	456.407.269	8.64%	540.008.314	8,64%	1.425.987.595	Dinas Perpustakaan dan Arsip
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				852.202.793		832.329.962		903.592.429		986.378.957		2.722.301.348	
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	315.796.764	100%	308.796.764	100%	308.796.764	100%	308.797.000	100%	926.390.528	Dinas Perpustakaan dan Arsip
Program : Pengelolaan Arsip	Persentase PD yg mengelola arsip yg sesuai ketentuan	17%	20,60%	282.800.981	24,1	284.508.700	27,50	297.801.281	31,03	321.000.000	31,03	903.309.981	Dinas Perpustakaan dan Arsip
Program : Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Perlindungan Arsip	92	100%	253.605.048	100%	239.024.498	100%	296.994.384	100%	356.581.957	100%	892.600.839	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	Persentase Penyelamatan Restorasi Arsip	100%	100%		70%		80%		85%		85%		Dinas Perpustakaan dan Arsip
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				14.656.911.672		16.294.443.611		16,345,633,335		16.469.452.331		49.563.860.032	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	13.842.925.672	100%	13.605.107.961	100%	13.675.368.085	100%	13.757.722.081	100%	41.492.528.882	Dinas peternakan dan Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	1.144 ton	1.144 ton	87.555.500	1.178 ton	209.882.750	1.214 ton	212.180.250	1.250 ton	214.592.250	3.642 ton	636.655.250	Dinas peternakan dan Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	5.083 ton	5.083 ton	572.634.500	5.235 ton	2.068.232.400	5.393 ton	2.042.827.000	5.554 ton	2.080.642.000	16.182 ton	6.191.701.400	Dinas peternakan dan Perikanan
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah ikan yang diolah	1.063 ton	1.063 ton	153.796.000	1.095 ton	411.220.500	1.128 ton	415.258.000	1.162 ton	416.496.000	3385ton	1.242.974.500	Dinas peternakan dan Perikanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				5.580.897.737		5.350.624.404		6.373.775.067		6.698.620.711		18.423.020.182	
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase promosi wisata melalui event seni dan budaya	85%	85%	2.673.482.150	-	1.136.894.564	-	2.003.307.151	-	1.902.617.050	-	5.042.818.764	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Persentase event unggulan	-	-		100%		100%		100%		100%		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase produk/karya lokal yang bersertifikat	100%	84%	556.911.950	-	573.062.397	-	578.793.021	-	607.732.672	-	1.759.588.089	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Persentase legalitas karya/produk pelaku ekonomi kreatif	-	-		86%		88%		90%		90%		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik wisata yang memenuhi standar	75%	85%	1.807.044.637	-	2.961.440.273	-	2.366.400.494	-	2.509.415.604	-	7,837.256.371	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Persentase destinasi wisata unggulan	-	-		85%		86%		87%		87%		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang terbina	80%	85%	543,459,000	-	679,227,171	-	1.425.274.402	-	1.678.855.386	-	3.783.356.959	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Persentase keterlibatan pelaku ekraf dalam event		-		85%		86%		87%		87%		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				61.593.724.973		285.557.453. 564		290.021.971, 411		267.172.805. 832		842.752.230. 807	
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah produktifitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan			13.539.063.070		31.526.638.7 00		43.018.014.2 60		45.958.384.1 00		120.503.037. 060	DKPP
	~ Produktifitas Padi	5,63	5,75		5,90		6,05		6,15		6,15		DKPP
	~ Produktivitas bawang merah	9,00	9,02		9,04		9,06		9,08		9,08		DKPP
	~ Produktifitas Tembakau	1,38	1,39		1,40		1,41		1,42		1,42		DKPP
	Rasio kecukupan pupuk (pupuk tersedia (subsidi+non subsidi) / Kebutuhan pupuk)	0.5	53%		0,55		0,57		0,59		0,59		DKPP
	Rasio ketersediaan alsintan (ketersediaan alsintan/kebutu han alsintan)	0.46	47%		0,48		0,49		0,6		0,6		DKPP
	Rasio penyediaan benih berlabel												DKPP
	~ Padi	37,5	40,1		41,5		42,7		43,7		43,7		DKPP

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
	~ Bawang Merah	0,24	0,26		0,32		0,38		0,44		0,44		DKPP
	~ Tembakau	15,5	15,8		15,8		15,8		15,8		15,8		DKPP
													DKPP
Prog. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rasio luas lahan terairi	15,41	17,50	9.655.171.150	19,58	86.243.787.050	21,67	93.930.565.300	23,75	98.033.944.770	23,75	278.208.297.120	DKPP
	Rasio JUT yang terbangun	54,88	65,53		68,28		71,03		73,77		73,77		DKPP
	Persentase penanganan dan penanggulanga n bencana	100%	100%		100%		100%		100%		100%		DKPP
													DKPP
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah luas lahan yang mendapatkan fasilitas penanggulanga n bencana pertanian	17.930	17.500	1,029,212,400	18.000	1,767,875,010	19.000	1,944,662,520	20.000	2,136,976,720	20.000	5,849,514,250	DKPP
	Rasio luas lahan serangan OPT yang tertangani (luas serangan OPT yang dapat ditangani / total	0,5	0,60		0,65		0,70		0,75		0,75		DKPP

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
	luas serangan OPT)												
	Rasio luas DPI yang tertangani (luas terkena DPI yang dapat ditangani / total luas terkena DPI)	0,10	0,15		0,2		0,25		0,30		0,30		DKPP
Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kelas kemampuan kelompok tani			10.192.547.23 8		138.800.146. 660		121.754.771. 260		91.160.488.5 90		351.715.406. 510	DKPP
	~ Pemula	9,6	9		9		8,4		7,8		7,8		DKPP
	~ Lanjut	71,3	74		71,4		71,8		72		72		DKPP
	~ Madya	18,4	16		19		19,1		19,4		19,4		DKPP
	~ Utama	0,7	1		0,7		0,8		0,8		0,8		DKPP
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	24.897.791.30 3	100%	25.117.267.6 67	100%	26.749.606.4 70	100%	27.168.570.7 46	100%	79,035,444,8 83	DKPP

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase sarana pakan dan bibit yang disediakan	2%	2%	576.860.700	4%	640.054.500	6%	809.023.000	8%	839.835.000	8%	2,288,912,500	Dinas Pernakan dan perikanan
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase kelompok pembibit sapi PO	41%	41%	97.464.300	42%	74.769.500	43%	77.383.000	44%	80.310.000	44%	232,462,500	Dinas Pernakan dan perikanan
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase ternak besar yang sehat	95,2%	95,5%	1.356.528.812	95,5%	1.174.797.477	95.5%	1.519.335.101	95.5%	1.566.190.906	95.5%	4,260,323,484	Dinas Pernakan dan perikanan
	Persentase ternak kecil yang sehat	97%	97%	-	97%	-	97%	-	97%	-	97%	-	Dinas Pernakan dan perikanan
	Persentase ternak unggas yang sehat	97%	97%	-	97%	-	97%	-	97%	-	97%	-	Dinas Pernakan dan perikanan
	Persentase penanggulang an kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Dinas Pernakan dan perikanan
	Persentase peningkatan penyediaan	1%	1%	-	1%	-	1%	-	1%	-	5%	-	Dinas Pernakan dan perikanan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
	produk hewan yang ASUH												
Prog. Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	Persentase ternak sapi betina peserta AUTS	1.4%	1,4%	79.825.000	1,4%	67.317.000	1.5%	69,370,500	1.6%	71,581,000	1.6%	208,268,500	Dinas Peternakan dan perikanan
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kkelompok tani ternak yang dibina	9%	18%	169.261.000	18%	144.800.000	19%	149,240,000	20%	156,524,000	20%	450,564,000	Dinas Peternakan dan perikanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				13.749.325.242		15.205.108.576		15,650,482,783		20.092.850.835		50,948,442,194	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pelayanan Umum Penunjang Urusan PD	74%	100%	7,426,596,060	100%	7,740,486,621.42	100%	8,157,802,021.94	100%	10.549.997.881,85	100%	26,448,286,525	Dinas Perdagangan Koperasi dan UM
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase perusahaan yang Mendapatkan Perizinan dan Pendaftaran yang Berbasis OSS	0%	100%	24,576,500	100%	57.425.280	100%	64.483.804	100%	89.512.949,20	100%	211,422,033	Dinas Perdagangan Koperasi dan UM
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sektor Perdagangan Besar dan	28%	90%	4,793,983,865	93%	6,275,394,971.95	97%	6,099,475,796.76	100%	7.152.833.520,25	100%	19.527.704.289	Dinas Perdagangan Koperasi dan UM

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
	Eceran : Reparasi Mobil dan Sepeda Motor												
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Pelaksanaan Pemantauan Ketersediaan Barang Pokok dan Penting		100%	1,015,620,700	100%	57,818,000	100%	64.583.804	100%	554.340.855.94	100%	676.742.660	Dinas Perdagangan Koperasi dan UM
Program Pengembangan Ekspor	Persentase Ekspor di Kab. Bojonegoro	44%	100%	202.986.418	100%	302,928,146.47	100%	344.042.387,50	100%	442.070.633,80	100%	1.089.041.168	Dinas Perdagangan Koperasi dan UM
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Bertanda Sah	88%	100%	104.760.216	100%	175,642.048	100%	239.911.750	100%	439.193.275.20	100%	854.747.073	Dinas Perdagangan Koperasi dan UM
Program Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase UMKM yang Mengikuti Kegiatan Promosi, Pemasaran, Pameran dan Pembinaan	5%	100%	180.801.483	100%	595.413.508.22	100%	680.183.219.13	100%	864.901.718.66	100%	2.140.498.446	Dinas Perdagangan Koperasi dan UM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				277.300.330		766.478.000		542.303.000		569.420.000		1.878.201.000	
PROGRAM PERENCANAAN DAN	Persentase IKM Binaan	48%	50%	193.694.080	50%	678,691,000	50%	450,126,000	50%	472,633,000	50%	1,601,450,000	Dinas Perindustrian

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
PEMBANGUNAN INDUSTRI	yang sesuai standart mutu												dan Tenaga Kerja
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang ditindaklanjuti	100%	100%	31.500.000	100%	33,075,000	100%	34,729,000	100%	36,466,000	100%	104,270,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Industri yang masuk SIINAS	17%	20%	52.106.250	22%	54.712.000	24%	57,448,000	26%	60,321,000	26%	172.481.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
SEKRETARIAT DAERAH				103.587.254.6 40		117.921.161. 155		117.886.944. 468		118.398.996. 653		354.207.102.27 6	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase belanja produk dalam negeri (P3DN)	73%	75%	25.164.216.92 1	77%	19,695,990,9 65	79%	23.434.330.2 25	81%	22,224,978,6 69	81%	65,355,299,8 59	Bagian Umum
	Persentase dokumen kelengkapan SAKIP yang tersusun sesuai standar	90%	82%	23.837.933.833	94%	25,024,009,0 35	96%	26,281,322,0 50.50	98%	27,595,388,1 53	98%	78,900,719,2 39	Bagian Umum

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
	Persentase OPD yang melaporkan capaian kinerja tepat waktu	90%	92%	441.953.458	94%	451.105.753	96%	468.818.211. 86	98%	488.988.670	98%	1.408.912.635	Bagian Organisasi
	Jumlah rekomendasi monitoring dan evaluasi yang dihasilkan	63%	92%	493.349.523	94%	497.836.849	96%	504.840.792	98%	512.194.931	98%	1.514.872.572	Bagian Organisasi
	Persentase efektivitas pelayanan keprotokolan pimpinan daerah	85%	90%	4.312.169.000	92%	3.845.387.000	93%	4.996.887.000	94%	5.212.227.000	94%	14.054.501.0 00	Bagian Prokopim
Program Perekonomian dan Pembangunan	Nilai kualitas pengadaan barang & jasa	64,50%	70%	411.708.000	72%	513.708.000	74%	539.468.400	75%	566.516.820	75%	1.619.693.220	Bagian PBJ
	Persentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil diproses sesuai regulasi	95%	96%	719.190.000	97%	761.790.000	98%	800.029.500	99%	840.000.000	99%	2.401.819.500	Bagian PBJ
	Persentase pembinaan dan pengkoordinasi an Pengelolaan BUMD dan BLUD yang dievaluasi	90%	94%	667.375.500	95%	200.210.500	96%	202.735.500	97%	208.035.500	97%	610.981.500	Bagian Perekonomian SDA

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
	Persentase tindak lanjut atas pelaksanaan koordinasi bidang TPID, Ekonomi Mikro, Pertanian, Pangan, Tenaga kerja, Pertambangan, Lingkungan Hidup dan Survey Sumber air tanah	90%	92%	576.520.000	93%	500.587.000	94%	505.887.000	95%	696.470.000	95%	1.702.944.000	Bagian Perekonomian SDA
	Persentase realisasi pelaksanaan program opd sesuai target	-	90%	543.775.150	92%	698.750.963	94%	743.124.883	95%	757,681,127	95%	2.199.556.973	Bagian Adm Pembangunan
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tingkat capaian penerima pelayanan kesejahteraan masyarakat	88%	86%	42.919.363.500	87%	62.677.696.000	89%	55.919.510.000	90%	55,664,046,000	90%	174.261.252.000	Bagian Kesra
	Prosentase usulan Produk Hukum Daerah yang difasilitasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan	68%	70%	1.630.635.000	72%	1.684.913.450	74%	1.747.356.483	76%	1,812,703,640	76%	5.244.973.573	Bagian Hukum

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
	Persentase dokumen LPPD yang disusun sesuai standard	80%	85%	1.436.312.180	90%	893.147.808	92%	1.267.796.661	94%	1,368,670,272	94%	3.529.614.741	Bagian Pemerintahan
	Persentase pengelolaan batas wilayah yang terselesaikan	0%	0%	-	15%	476.027.832	17%	474.837.761	20%	451.095.872	20%	1.401.961.465	Bagian Pemerintahan
Program Pengelolaan Perbatasan	Persentase pengelolaan batas wilayah yang terselesaikan	11%	13%	432.752.575	0%	-	0%	-	0%	-	13%	-	Bagian Pemerintahan
SEKRETARIAT DPRD				67.649.633.118		66.120.087.158		66.847.188.995		70.444.881.237		203.412.157.390	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	90%	90%	39.226.800.771	90%	39.955.739.243	90%	39.912.101.180	90%	39.880.492.630	90%	119.748.333.053	Sekretariat Dewan
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Prosentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu	12%	11%	28.422.832.347	12%	26.164.347.915		26.935.087.815		30.564.388.607	12%	83.663.824.337	Sekretariat Dewan
	Prosentase rekomendai hasil pengawasan yang	80%	80%		85%		87%		90%		90%		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
	disampaikan sesuai ketentuan												
PERENCANAAN				9.948.036.910		11.101.328.598		11.647.777.670		12.128.397.680		34.877.503.948	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	6.293.904.528	100%	7.021.501.635	100%	7.288.413.641	100%	7.778.734.326	100%	22.088.649.602	Bappeda
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi	100%	100%	1.323.742.976	100%	1.259.386.773	100%	1.554.884.777	100%	1.217.094.414	100%	4.031.365.964	Bappeda
	Persentase tahapan penyusunan dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu dan sesuai regulasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase PD yang dimonev sesuai ketentuan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan Renstra PD Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kesejahteraan Masyarakat terhadap RPJMD	100%	100%	2.330.389.406	100%	2.820.440.190	100%	2.804.479.252	100%	3.132.568.940	100%	8.757.488.382	Bappeda
	Persentase keselarasan Renja PD Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kesejahteraan Masyarakat terhadap RKPD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase keselarasan Renstra PD Bidang Infrastruktur, Kewilayahan dan Ekonomi terhadap RPJMD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase keselarasan Renja PD Bidang Infrastruktur, Kewilayahan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
	dan Ekonomi terhadap RKPD												
KEUANGAN				1.155.338.435 .622		1.418.518.84 6.490		1.581.023.65 6.040		1.284.030.32 9.103		4.283.572.83 1.633	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase layanan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan	100%	100%	7.577.588.721	100%	9.541.731.257	100%	9.144.254.103	100%	9.191.947.309	100%	27.877.932.6 69	BPKAD
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai ketentuan	100%	100%	1.132.334.724 .512	100%	1.393.126.24 6.280	100%	1.555.729.46 2.806	100%	1.258.004.69 5.706	100%	4.206.860.40 4.792	BPKAD
	Persentase OPD yang menyerap Anggaran sesuai dengan target yang ditetapkan	100%	100%		100%		100%		100%		100%	-	BPKAD
	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%	-	BPKAD

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang menyampaikan laporan pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	80%	80%	1.678.577.915	85%	1.697.503.339	85%	1.744.778.476	85%	1.781.917.400	85%	5.224.199.215	BPKAD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Rata-rata Capian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	9.542.297.390	100%	10.063.506.328	100%	10.521.695.430	100%	11.119.155.188	100%	31.704.356.946	Bapenda
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengawasan, pengendalian, kerjasama dan sosialisasi Pajak Daerah	100%	100%	4.205.247.084	100%	4.089.859.286	100%	3.883.465.225	100%	3.932.613.500	100%	11.905.938.011	Bapenda
	Persentase capaian penerimaan Pajak Daerah (non PBB dan non BPHTB) yang dikelola	126%	100%		100%		100%		100%		100%	-	
	Persentase capaian penerimaan	117%	100%		100%		100%		100%		100%	-	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
	PBB dan BPHTB yang dikelola												
	Persentase capaian penerimaan PAD non Pajak	93%	100%		100%		100%		100%		100%	-	
KEPEGAWAIAN				14.731.268.131		15.036.679.983		15.579.107.199		16.042.885.824		46.658.673.007	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Prosentase peningkatan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	7.762.474.861	100 %	7.927.180.955	100 %	8.200.684.188	100 %	8.441.221.635	100 %	24.569.086.779	BKPP
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Prosentase layanan administrasi kepegawaian sesuai time response	100 %	100 %	2.555.619.730	100 %	2.642.813.049	100 %	2.762.903.553	100 %	2.875.847.763	100 %	8.281.564.365	BKPP
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Presentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai standar	100 %	100 %	4.413.173.540	100 %	4.466.685.979	100 %	4.615.519.458	100 %	4.725.816.426	100 %	13.808.021.863	BKPP
PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N				1.189.981.000		1.472.319.252		1.524.456.000		1.583.182.000		4.579.957.252	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil kajian capaian indikator makro yang di tindak lanjuti perangkat daerah	100%	100%	1.189.981.000	100%	1.472.319.252	100%	1.524.456.000	100%	1.583.182.000	100%	4.579.957.252	Bappeda
	Persentase usulan kajian OPD yang ditindak lanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Jumlah Inovasi dan teknologi yang diterapkan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													
Inspektorat				14.845.420.421		17.179.743.859		17.796.481.969		18.438.000.758		53.414.226.585	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Rata-rata Capian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	11.920.783.892	100%	14.128.875.503	100%	14.593.070.195	100%	15.074.418.396	100%	43.796.364.095	Inspektorat
PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN	Prosentase tindak lanjut evaluasi kinerja OPD	80%	80%	1.315.755.646	84%	1.361.543.428	88%	1.429.620.599,72	90%	1.501.101.629,70	90%	4.292.265.658	Inspektorat

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Prosentase OPD yang meningkat nilai SAKIP	75%	79%	1.608.880.883	81%	1.689.324.927	83%	1.773.791.17 3,51	86%	1.862.480.73 2,18	86%	5.325.596.833	
	Nilai MCP	94,63%	95%		95%		95%	-	95%		95%	-	
	Prosentase OPD dengan nilai kematangan MR > 15	16%	21%		24%		28%	-	32%		32%	-	
	Prosedur ketersediaan kebijakan prosedur pengawasan yang relevan dengan leveling	100%	100%		100%		100%	-	100%		100%	-	
UNSUR KEWILAYAHAN				111.882.471.9 33		119.112.527. 676		122.807.682. 577		127.024.439. 329		368.944.649. 581	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Rata-rata Capian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	85.136.873.553	100%	90.297.466.8 18	100%	93.870.611.9 58	100%	97.862.092.6 19	100%	282.030.171. 395	28 Kecamatan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100%	100%	10.028.018.120	100%	11.575.882.5 86	100%	11.802.974.6 10	100%	11.980.612.1 84	100%	35.359.469.3 80	28 Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan	100%	100%	15.679.863.310	100%	15.905.498.7 30	100%	15.768.700.1 21	100%	15.782.298.5 21	100%	47.456.497.3 72	28 Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	100%	100%	374.585.040	100%	485.892.797	100%	498.060.059	100%	511.182.756	100%	1.495.135.612	28 Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase pemerintahan desa yang dibina dan diawasi	100%	100%	663.131.910	100%	847.786.745	100%	867.335.829	100%	888.253.249	100%	2.603.375.823	28 Kecamatan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				15.308.961.671		77.958.189.875		15.962.436.321		15.962.436.321		109.883.062.517	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	5.268.790.171	100%	5.256.142.668	100%	5.273.029.990	100%	5.343.380.953	100%	15.872.553.611	Bakesbangpol
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Prosentase Kesadaran masyarakat tentang Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	90%	90%	203.558.000	90%	213.735.900	90%	224.422.695	90%	235.643.830	90%	673.802.425	Bakesbangpol
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Prosentase pemuda yang memiliki kapasitas unggul	0	0%	-	100%	1.122.798.148	100%	1.178.938.055	100%	1.237.884.958	100%	3.539.621.161	Bakesbangpol
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui pendidikan Politik Dan	Prosentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik	92%	90%	8.441.092.500	92%	69.276.157.279	94%	7.766.279.903	95%	7.551.726.111	95%	84.594.163.293	Bakesbangpol

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
Pengembangan Etika Serta Budaya Politik													
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase Ormas yang memiliki legalitas hukum serta Pemberdayaan Organisasi Kemayarakatan	97%	90%	328.039.000	92%	968.499.780	94%	342.866.773	95%	358.056.619	95%	1.669.423.172	Bakesbangpol
	Usulan Hibah Ormas (Pagar Nusa, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia dan Perkumpulan Pamong Seni Budaya Indonesia)												
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Prosentase tokoh masyarakat yang mengikuti pembinaan dan Pengembangan Masyarakat tentang Ketahanan Ekonomi.	70%	80%	290.222.700	80%	304.733.835	82%	319.970.527	84%	335.969.053	84%	960.673.415	Bakesbangpol

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA			TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								OPD
		Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
		REALISASI KINERJA	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	TARGET KINERJA	Rp	
	Sosial Budaya dan Agama												
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Danfasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah potensi konflik yang terdeteksi/ditem ukan	9	700%	777.259.300	7	816.122.265. 00	700	856.928.378. 00	700	899.774.797. 00	700	2.572.825.44 0	Bakesbangpol
				6.974.265.726 .251		6.666.549.38 3.053		7.223.262.43 9.156		6.850.032.88 6.457		20.740.610.7 84.421	

BAB VII

KERANGKA PENDANAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan rumusan arah kebijakan dan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan berdasarkan Strategi Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai target kinerja tujuan dan sasaran yang direncanakan untuk tiga tahun ke depan.

Perumusan arah kebijakan dan Program-program Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar maupun non pelayanan dasar serta urusan pilihan, dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah berdasarkan Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan.

Pagu indikatif program, yaitu jumlah dana yang dialokasikan untuk mendanai program prioritas pembangunan tahunan juga diuraikan dalam bab ini. Sumber pendanaan adalah dari kapasitas riil keuangan dan belanja daerah. Program-program prioritas yang telah disertai dengan pagu indikatif ini kemudian menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis perangkat daerah.

Penentuan strategis tidaknya suatu urusan adalah berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya.

Dalam hal suatu urusan atau program/kegiatan telah ditetapkan untuk bersifat strategis, maka intensitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan akan lebih tinggi bila dibandingkan yang bersifat operasional. Anggaran untuk urusan atau program/kegiatan yang bersifat strategis pun harus diprioritaskan terlebih dahulu. Hal ini karena strategis diartikan sebagai jangkauan pengaruh yang sangat luas dan kepentingan penyelenggaraan yang sangat tinggi.

Penanggung jawab kinerja suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, adalah Kepala OPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala OPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan.

Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategis, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Oleh karena itu, walaupun terdapat prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung program pembangunan daerah, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan.

Kerangka pendanaan pembangunan daerah dan program perangkat daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2024-2026 dikelompokkan dalam urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah baik urusan wajib maupun pilihan. Nomenklatur program pembangunan daerah yang digunakan di Kabupaten Bojonegoro berbeda dari tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021-2023. Perubahan nomenklatur program dari tahun 2019 ke tahun 2020 dilakukan dengan menyesuaikan nomenklatur jabatan eselon 3 untuk program, sedangkan perubahan dari tahun 2020 ke tahun 2021 menyesuaikan nomenklatur dari Permendagri 90 Tahun 2019. Kemudian dalam RPD tahun 2024-2026 ini berpedoman pada nomenklatur program dan kegiatan menurut Kepmendagri 050-5889 Ta. 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 7.1. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 – 2023

Kode	Rincian	Realisasi APBD					Target
		2018	2019	2020	2021	2022	2023*
4	PENDAPATAN DAERAH						
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	425.167.970.431	561.251.499.956	720.914.033.084	955.640.728.380	804.005.013.048	900.087.500.609
4.2	Pendapatan Transfer	3.979.345.024.460	3.728.671.462.278	2.960.763.434.107	4.783.858.759.040	4.896.427.553.388	4.259.295.367.980
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	419.239.246.573	479.905.215.500	483.398.182.645	174.626.966.650	66.852.157.919	74.706.582.600
	Jumlah Pendapatan	4.823.752.241.464	4.769.828.177.734	4.165.075.649.836	5.904.101.073.580	5.767.284.724.355	5.219.452.699.369
5	BELANJA						
5.1	Belanja Operasi	1.821.101.063.687,90	2.096.286.212.017,39	2.354.456.423.229,59	2.559.680.300.899,57	2.733.410.910.443,45	3.191.250.509.290
5.2	Belanja Modal	601.338.047.080,92	1.304.758.303.126,38	1.392.814.495.385,95	1.619.932.427.856,10	1.261.895.110.368,69	2.471.092.604.617
5.3	Belanja Tak Terduga	54.334.600,00	632.000.000,00	5.223.498.901,00	34.619.677.607,00	34.072.835.218,00	256.814.165.984
5.4	Belanja Transfer	662.932.025.381,00	1.183.391.126.195,00	606.129.145.508,00	872.687.133.786,79	1.348.646.460.028,61	1.045.108.446.360
	Jumlah Belanja	3.085.425.470.749,82	4.585.067.641.338,77	4.358.623.563.024,54	5.086.919.540.149,46	5.378.024.840.058,75	6.974.265.726.251
	Surplus/Defisit	1.738.326.770.714,18	184.760.536.395,23	(193.547.913.188,54)	817.181.533.430,54	389.259.884.296,25	(1.754.813.026.882,00)
6.	PEMBIAYAAN						
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	279.075.352.965,77	2.018.047.974.917,07	2.203.232.579.597,68	2.010.515.528.368,95	2.828.546.653.987,29	2.254.813.026.882
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	277.817.959.190,94	2.017.401.981.889,80	2.202.650.984.706,49	2.009.684.666.409,63	2.827.697.335.440,83	2.254.813.026.882
6.1.2.	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.257.393.774,83	645.993.027,27	581.594.891,19	830.861.959,32	849.318.546,46	0
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0	0	500.000.000.000
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	500.000.000.000
6.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0	0	0	0		
6.3	Saldo Anggaran Lebih	(2.017.369.163.880,15)	(2.202.634.379.093,61)	0	0		
	Perubahan SAL	(2.017.369.163.880,15)	(2.202.634.379.093,61)	0	0		
	Pembiayaan Netto	(2.017.369.163.880,15)	2.018.047.974.917,07	2.203.232.579.597,68	2.010.515.528.368,95	2.828.546.653.987,29	1.754.813.026.882
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun (SiLPA)	(2.017.369.163.880,15)	2.202.808.511.312,26	2.009.684.666.409,63	2.827.697.061.799,02	3.217.754.685.162,25	0

Sumber : BPKAD Kab Bojonegoro dan data diolah

**Tabel 7.2. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2024 – 2026**

Kode	Komponen	APBD 2023	Rencana Anggaran		
			2024	2025	2026
4	PENDAPATAN DAERAH	5.219.452.699.369	4.517.307.326.897	4.399.078.481.067	4.301.238.553.192
5	BELANJA	6.974.265.726.251	6.666.549.383.053	7.223.262.439.156	6.850.032.886.457
	SURPLUS (DEFISIT)	(1.754.813.026.882)	(2.149.242.056.156)	(2.824.183.958.089)	(2.548.794.333.265)
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	2.254.813.026.882	2.624.541.835.273	3.324.183.958.089	3.048.794.333.265
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	2.254.813.026.882	2.684.750.774.383	3.324.183.958.089	3.048/794.333.265
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	500.000.000.000	500.000.000.000	535.508.718.227	500.000.000.000
	Penyertaan Modal PDAM	-	10.000.000.000	-	-
	Penyertaan Modal Perumda Pangan Mandiri	-	25.508.718.227	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan (Dana Abadi Pendidikan)	500.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000
	Pembiayaan Netto	1.754.813.026.882	2.149.242.056.156	2.824.183.958.089	2.548.794.333.265
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0	0	0	0

Tabel 7.3. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD			Target Kinerja Program (K) dan Pendanaan (Rp)								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					1.318.524.248.528		1.205.186.848.973		1.221.254.677.710		1.251.205.323.750		3.677.646.850.432	
	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Nilai asesmen literasi : Dasar	%	95,50	96	263.731.081.448	96,50	250.318.466.416	97	240.052.589.015	97,50	242.665.925.502	97,50	733.036.980.932	Dinas Pendidikan
		Persentase Nilai asesmen numerik : Dasar	%	65	66		68		69		70		70		
		Persentase Nilai survey karakter : Berkembang	%	95	96		67		67,50		69		69		
		Persentase lembaga pendidikan dasar yang terakreditasi minimal B	%	94	95,44		96,50		97		97,50		97,50		
		Persentase PAUD dan lembaga pendidikan nonformal yang terakreditasi/sesuai standar	%	37,25	40,25		45		46		47		47		
		Persentase sarana prasarana dengan kondisi baik	%	76,74	78,96		84		85		89		89		
	Program Pengembangan Kurikulum	Jumlah sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal jenjang SD	Unit				710	880.545.200	710	913.970.550	710	933.773.969	2.130	2.728.289.719	Dinas Pendidikan
		Jumlah sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal jenjang SMP	Unit				108						108		

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD			Target Kinerja Program (K) dan Pendanaan (Rp)								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai standar kompetensi dan pengembangannya	%	50	55	55.024.437.260	60	41.641.797.260	65	41.641.797.260	70	41.641.797.260	70	124.925.391.780	Dinas Pendidikan
		Persentase guru dan tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal D IV/ S1 dan bersertifikasi	%	82	85		86		88		90		90		
		Rasio pendidik dan tenaga kependidikan - peserta didik	%	75	80		83		85		88		88		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	999.768.729.820	100	912.346.040.097	100	938.646.320.885	100	965.963.827.019	100	2.816.956.188.001	Dinas Pendidikan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.153.628.948.443		1.136.699.147.313		1.219.955.341.065		1.253.327.142.773		3.610.293.376.152	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase calon pengantin wanita yang mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi sesuai standar	%	91,13	92	519.336.290.737	93	457.386.709.102	94	489.746.388.058	95	468.237.633.099	95	1.415.370.730.259	Dinas Kesehatan
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	63,44	100		100		100		100		100		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD			Target Kinerja Program (K) dan Pendanaan (Rp)								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	70,44	100		100		100		100		100		
		Persentase Desa yang melaksanakan edukasi kesehatan ibu hamil, bersalin, dan keluarga dengan balita	%	100	100		100		100		100		100		
		Persentase Desa yang melaksanakan P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi)	%	100	100		100		100		100		100		
		Persentase bayi baru lahir usia 0-28 hari mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	70,51	100		100		100		100		100		
		Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	76,44	100		100		100		100		100		
		Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	60	60		65		73		80		80		
		Persentase Penduduk Peserta JKN Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPUP) dan Bukan	%	33,91	30		30		30		30		30		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD			Target Kinerja Program (K) dan Pendanaan (Rp)								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pekerja (BP) Pemerintah Daerah													
		Persentase Pemberian Rekomendasi ijin Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Fasilitas Pelayanan Penunjang Kesehatan, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mengajukan rekomendasi ijin	%	100	100		100		100		100		100		
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Fasilitas Pelayanan Penunjang Kesehatan, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dilakukan monitoring dan evaluasi	%	80	100		100		100		100		100		
		Persentase Fasilitas Kesehatan yang hasil monitoring pengukuran INM-nya ditindaklanjuti	%	90	95		100		100		100		100		
		Persentase Fasilitas kesehatan rujukan yang dilakukan fasilitasi penyiapan perumusan dan pelaksanaan kesehatan rujukan	%	100	100		100		100		100		100		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD			Target Kinerja Program (K) dan Pendanaan (Rp)								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase Orang terduga Tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	91	100		100		100		100		100		
		Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	58,37	100		100		100		100		100		
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	87,38	100		100		100		100		100		
		Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100		100		100		100		100		
		Persentase Orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	%	91,29	1		100		100		100		100		
		Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100		100		100		100		100		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD			Target Kinerja Program (K) dan Pendanaan (Rp)								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase Penderita Pneumonia balita yang mendapatkan penanganan sesuai standar	%	62,61	65		65		65		65		65		
		Persentase Penderita diare yang mendapatkan penanganan sesuai standar	%	70	90		90		90		90		90		
		Prevalensi kasus kusta < 1/10.000 penduduk	1/10.000 penduduk	<1/10.000	<1/10.000		<1/10.000		<1/10.000		<1/10.000		<1/10.000		
		Persentase Penderita DBD yang mendapatkan penanganan sesuai standar	%	100	100		100		100		100		100		
		Angka Kesakitan Malaria 1/1.000 penduduk beresiko	1/1.000 penduduk	0,27/1000	<1/1.000		<1/1.000		<1/1.000		<1/1.000		<1/1.000		
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan khusus (gilut dan indera)	%	100	100		100		100		100		100		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan Sumberdaya Manusia Kesehatan sesuai standar	%	85	85	7.546.100.660	85	800.783.000	85	800.783.000	85	800.783.000	85	2.714.094.000	Dinas Kesehatan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan	Persentase fasilitas kesehatan dengan	%	100	100	280.846.313	100	280.846.313	100	280.846.313	100	280.846.313	100	842.538.939	Dinas Kesehatan

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD			Target Kinerja Program (K) dan Pendanaan (Rp)									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Makanan Minuman	ketersediaan obat sesuai standar														
		Persentase fasilitas kesehatan dengan ketersediaan alat kesehatan sesuai standar	%	60	75		80		90		92		92			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Fasyankes yang menyediakan layanan promosi kesehatan kategori cukup	%	70	70	4.293.653.669	75	4.293.653.669	80	4.293.653.669	85	4.293.653.669	85	12.880.961.007	Dinas Kesehatan	
		Persentase Anak SD usia 10-12 tahun dan ASN yang dilakukan pengukuran kebugaran	%	20	20		20		20		20		20			
		Persentase Warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	68,84	100		100		100		100		100			
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	94	100		100		100		100		100			
		Persentase Warga Negara usia 15 - 59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	%	67,50	100		100		100		100		100			

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD			Target Kinerja Program (K) dan Pendanaan (Rp)								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	%	100	100		100		100		100		100		
		Persentase Desa /Kelurahan Siaga yang difasilitasi	%	100	100		100		100		100		100		
		Persentase Desa dengan Jumlah UKBM aktif ≥ 4	%	80	83		85		90		90		90		
		Persentase Pos UKK yang difasilitasi	%	100	100		100		100		100		100		
		Persentase TPM yang memenuhi syarat dan diberikan sertifikat	%	84	84		84		84		84		84		
		Persentase PIRT yang memenuhi syarat	%	80	80		80		80		80		80		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	115.529.800.219	100	143.851.990.524	100	147.145.523.424	100	154.372.311.205	100	445.369.825.153	Dinas Kesehatan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	352.492.629.410	100	342.503.565.755	100	377.011.307.932	100	412.258.431.552	100	1.131.773.305.239	RSUD Sosodoro Djatikoesoemo

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD			Target Kinerja Program (K) dan Pendanaan (Rp)								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	75.888.608.698	100	63.537.365.806	100	69.617.695.709	100	75.627.626.000	100	208.782.687.515	RSUD Sumberrejo
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Kelengkapan sarana kesehatan di RS sesuai standart	%	73,76	85	1.754.088.103		-		-		-		-	RSUD Sumberrejo
		Kelengkapan prasarana kesehatan di RS sesuai standart	%	82,93	100										
		Kelengkapan alat kesehatan di RS sesuai standart	%	73	50										
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	76.506.930.634	100	81.632.970.229	100	87.210.415.763	100	93.291.103.128	100	262.134.489.121	RSUD Padangan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	%	0	0	-	100	29.646.480.400	100	30.253.804.420	100	30.891.494.642	100	90.791.779.462	RSUD Kepohbaru
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan	Persentase Kelengkapan sarana kesehatan di RS sesuai standart	%	0	0	-	100	12.764.782.515	100	13.594.922.777	100	13.273.260.165	100	39.632.965.457	RSUD Kepohbaru

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD			Target Kinerja Program (K) dan Pendanaan (Rp)									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Upaya Kesehatan Masyarakat															
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					2.572.833.082.907		1.685.307.701.270		2.013.965.838.502		1.868.701.512.645		5.567.975.052.417		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	16.051.174.980	100	15.920.205.230	100	16.493.669.630	100	17.455.394.901	100	49.869.269.761	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	42.003.375.714	100	46.471.486.028	100	46.965.074.520	100	47452013012	100	140.888.573.560	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	10.628.853.817	100	15.046.959.250	100	17.293.409.868	100	16.364.366.766	100	48.704.735.884	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	
	Program Penyelenggaraan Jalan	Presentase infrastruktur kebinamargaan dalam kondisi mantap (kondisi baik + kondisi sedang)	%	86,75	92,95	1.577.409.135.185	94	824.741.345.154	96	1.209.450.012.712	98	996.822.783.009	98	3.031.014.140.875	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga kerja jasa konstruksi yang kompeten	%	68	70	4.049.518.800	72	5.701.508.910	74	5.542.833.300	76	3.298.986.060	76	14.543.328.270	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah dokumen penataan ruang yang tersusun	dokumen	4	7	4.528.399.400	5	1.725.840.600	2	1.422.366.200	1	1.533.866.200	8	4.682.073.000	Dinas PU Bina Marga dan	

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD			Target Kinerja Program (K) dan Pendanaan (Rp)								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase pengembangan pengelolaan jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	100	100	526.247.990.419	100	423.776.218.028	100	179.102.792.771	100	308.468.766.553	100	911.347.777.352	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Presentase rumah tangga dengan akses air minum	%	22,20	22,76	14.539.128.000	23,39	153.916.024.640	24,02	136.961.434.886	24,66	92.007.299.235	24,66	382.884.758.762	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi dasar	%	89,94	90,24	12.936.615.542	90,70	19.254.793.480	91,15	19.298.471.415	91,61	19.342.586.129	91,61	57.895.851.024	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Presentase sarana dan prasarana sistem drainase yang memadai	%	40,67	47,10	136.629.673.550	53,73	92.661.070.109	60,35	154.401.250.000	66,98	79.431.250.000	66,98	326.493.570.109	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio bangunan gedung aparatur dan publik yang layak fungsi	%	76,70	77,62	227.581.877.500	78,64	86.092.249.841	79,78	227.034.523.200	81,03	286.524.200.780	81,03	599.650.973.821	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	%	87,01	87,08	227.340.000	0	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD			Target Kinerja Program (K) dan Pendanaan (Rp)								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					21.313.608.810		81.314.000.000		95.059.000.000		98.570.000.000		274.943.000.000	
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Pembangunan dan Pembangunan Perumahan	%	0	3,40	3.499.998.810	6,80	500.000.000	10,21	500.000.000	13,61	500.000.000	13,61	1.500.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
	Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni yang tersedia	%	82,34	83,79	11.463.290.000,0	92,67	20.374.000.000,0	97,11	20.374.000.000,0	100	20.374.000.000,0	100	61.122.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase rumah yang terfasilitasi PSU	%	21,45	43,34	-	65,27	4.170.000.000	87,21	3.170.000.000	100	3.606.000.000	100	10.946.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
	Program Pengembangan Permukiman	Persentase jalan lingkungan permukiman, PJU dan PJL yang berfungsi baik	%	39,44	36,69	6.350.320.000	42,31	56.270.000.000	44,93	71.015.000.000	47,55	74.090.000.000	47,55	201.375.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					41.622.548.065		54.185.531.038		49.999.624.476		55.159.395.128		159.344.550.642	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	4.949.854.708	100	7.077.850.005	100	7.670.632.325	100	7.656.132.325	100	22.404.614.655	BPBD

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD			Target Kinerja Program (K) dan Pendanaan (Rp)								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Poin		83	1.663.630.660	82	2.879.879.520	81	3.069.261.680	80	2.989.331.680	80	8.938.472.880	BPBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	6.963.609.155	100	6.863.609.155	100	6.681.001.755	100	6.742.965.555	100	20.287.576.465	Satpol PP
	Program Peningkatan Ketertaman dan Ketertiban Umum	Posentase respon pengendalian pelanggaran	%	71	75	10.625.510.075	79	19.095.881.342	83	11.457.258.500	87	13.279.186.152	87	43.832.325.994	Satpol PP
		Persentase penanganan gangguan trantibum sesuai kebutuhan	%	91	93		95		97		100		100		
		Presentase penegakan perda/perkada	%	72	67		66		63		60		60		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	5.360.677.017	100	8.935.957.566	100	12.276.266.766	100	15.646.575.966	100	36.858.800.298	Dinas Damkar dan Penyelamatan
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase penanganan kejadian kebakaran dan penyelamatan yang ditangani sesuai waktu tanggap/Respontime	%	98	93	12.059.266.450	94	9.332.353.450	94	8.845.203.450	95	8.845.203.450	95	27.022.760.350	Dinas Damkar dan Penyelamatan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					65.240.764.449		66.433.074.189		67.083.074.189		67.283.074.189		200.799.222.567	
	Program Penunjang	Rata-rata capaian kegiatan penunjang	%	100	100	5.850.764.274	100	8.399.832.961	100	8.416.402.961	100	8.416.402.961	100	25.232.638.883	Dinas Sosial

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD			Target Kinerja Program (K) dan Pendanaan (Rp)								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	urusan pemerintah daerah													
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSM dan TKSK yang aktif	%	60	65	1.695.279.700	65	1.550.979.000	65	1.550.979.000	65	1.550.979.000	65	4.652.937.000	Dinas Sosial
		Persentase Lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	%	60	65		65		65		65		65		
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang sudah berhasil di rehab	%	70	75	4.257.801.663	75	3.932.595.352	75	4.591.025.352	75	4.816.025.352	75	13.339.646.056	Dinas Sosial
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase anak terlantar yang berhasil terlindungi dan terjamin (reunifikasi)	%	95	100	51.011.310.280	100	50.757.236.512	100	50.732.236.512	100	50.707.236.512	100	152.196.709.536	Dinas Sosial
		Persentase Keluarga Masyarakat Fakir Miskin yang di bantu	%	75	80		80		80		80		80		
	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	2.042.308.400	100	1.414.130.232	100	1.414.130.232	100	1.414.130.232	100	4.242.390.696	Dinas Sosial
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase kebutuhan pemeliharaan dan pengamanan TMP dan makam leluhur yang terpenuhi	%	80	90	383.300.132	90	378.300.132	90	378.300.132	90	378.300.132	90	1.134.900.396	Dinas Sosial
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD			Target Kinerja Program (K) dan Pendanaan (Rp)									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					6.954.697.673		7.292.321.150		7.494.189.000		7.868.900.000		22.655.410.150		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	5.452.731.323	100	5.796.663.150	100	6.102.247.000	100	6.407.359.000	100	18.306.269.150	Dinas Perindustria n dan tenaga Kerja	
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang terdidik/terlatih	%	78	75	1.299.143.600	75	880.968.000	75	925.017.000	75	971.268.000	75	2.777.253.000	Dinas Perindustria n dan tenaga Kerja	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	87	85,03	90.622.750	85,75	214.630.000	86,01	225.362.000	86,42	236.631.000	86,42	676.623.000	Dinas Perindustria n dan tenaga Kerja	
	Program Hubungan Industrial	Persentase Fasilitas Sarana Hubungan Industrial dan Kelengkapan Persyaratan Kerja	%	100	100	112.200.000	100	230.060.000	100	241.563.000	100	253.642.000	100	725.265.000	Dinas Perindustria n dan tenaga Kerja	
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%			-	100	170.000.000		-		-	100	170.000.000	Dinas Perindustria n dan tenaga Kerja	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					10.373.303.337		13.370.564.641		13.784.805.418		14.134.832.130		41.290.202.189		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	7.085.559.087	100	9.361.044.592	100	9.769.079.611	100	10.114.247.789,0	100	29.244.371.992	Dinas P3AKB	

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD			Target Kinerja Program (K) dan Pendanaan (Rp)								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase lembaga yang melaksanakan pengarusutamaan gender	%	65	68	135.215.580	70	204.750.624	71	206.712.568	72	208.685.372	72	620.148.564	Dinas P3AKB
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase kepala rumah tangga perempuan rentan yang memiliki keterampilan usaha	%	60	70	85.165.740	70,50	135.165.740	70,55	135.165.740	70,60	135.165.740	70,60	405.497.220	Dinas P3AKB
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase data gender dan anak yang terpenuhi sesuai standar	%	60	75	96.555.600	75,50	50.208.912	75,55	50.208.912	75,60	50.208.912	75,60	150.626.736	Dinas P3AKB
	Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	%	100	100	1.971.902.800	100	2.467.872.800	100	2.469.368.300	100	2.469.368.300	100	7.406.609.400	Dinas P3AKB
	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	%	100	100	37.024.150	100	37.024.150	100	37.024.150	100	37.024.150	100	111.072.450	Dinas P3AKB
	Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	%	80	90	961.880.380	82,50	1.114.497.823	85	1.117.246.137	87,50	1120131867	87,50	3.351.875.827	Dinas P3AKB
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					618.739.200		676.529.120		744.182.260		814.655.050		2.235.366.430	
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka Kecukupan Energi (AKE)	Kkal	2.132	2.133	393.671.350	2.134	430.440.170	2.135	473.484.250	2.136	517.186.810	2.136	1.421.111.230	DKPP
		Angka Kecukupan Protein (AKP)	gram	57,10	57,30		57,50		57,80		58		58		

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD			Target Kinerja Program (K) dan Pendanaan (Rp)								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase Lumbung Pangan Terkategori Baik	%	25	25		25		25		26		26		
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rawan Pangan	%	12	11,50	100.436.500	11	109.817.120	10,50	120.798.930	10	132.745.130	10	363.361.180	DKPP
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang aman	%	90	92	124.631.350	92	136.271.830	94	149.899.080	94	164.723.110	94	450.894.020	DKPP
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					503.016.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		750.000.000	
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase sengketa tanah yang terfasilitasi	%	100	100	503.016.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	750.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					34.623.944.238		42.018.471.325		50.987.971.697		42.193.558.936		135.200.001.958	
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	%	100	100	858.130.982	100	534.000.419	100	528.695.161	100	381.437.706	100	1.444.133.286	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase lokasi pencegahan, penganggulan dan pemulihan pencemaran / kerusakan lingkungan hidup	%	100	100	787.822.800	100	1.449.581.323	100	1.352.904.295	100	1.392.514.081	100	4.194.999.699	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase luas RTH yang berfungsi baik	%	100	100	11.930.499.817	100	12.584.550.000	100	12.459.650.000	100	12.459.550.000	100	37.503.750.000	Dinas Lingkungan Hidup

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD			Target Kinerja Program (K) dan Pendanaan (Rp)								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase persetujuan yang sudah memenuhi rincian teknis limbah B3	%	100	100	36.418.400	100	38.428.400	100	37.428.400	100	35.928.400	100	111.785.200	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang terlaksana dalam satu tahun	%	100	100	184.968.432	100	216.568.432	100	221.568.432	100	226.568.432	100	664.705.296	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LingkunganHidup Untuk Masyarakat	Persentase kelompok masyarakat yang telah memiliki rencana aksi yang aktif melakukan gerakan peduli lingkungan hidup	%	51,85	55,17	226.257.000	68	339.385.500	72	373.324.050	76	410.656.455	76	1.123.366.005	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkunagn hidup yang menerima penghargaan	%	52	54	133.218.250	70	146.540.075	73	161.194.083	75	177.313.491	75	485.047.649	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH	%	100	100	49.936.416	100	56.536.416	100	56.536.416	100	56.536.416	100	169.609.248	Dinas Lingkungan Hidup

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD			Target Kinerja Program (K) dan Pendanaan (Rp)									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Kabupaten/Kota yang tertangani														
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah yang terkelola	%	100	100	4.944.083.554	100	10.880.263.712	100	19.949.348.712	100	11.122.263.712	100	41.951.876.136	Dinas Lingkungan Hidup	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	15.472.608.587	100	15.772.617.048	100	15.847.322.148	100	15.930.790.243	100	47.550.729.439	Dinas Lingkungan Hidup	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					12.607.899.606		16.929.326.093		17.689.576.093		18.592.549.913		53.211.452.099		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	%	96,21	100	9.141.837.466	100	12.783.461.763	100	13.793.711.763	100	14.364.847.296	100	40.942.020.822	Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan	
	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan KTP elektronik	%	96,76	100	614.914.900	100	811.865.890	100	811.865.890	100	1.102.459.185	100	2.726.190.965	Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan	
		Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	%	100	100		100		100		100		100			
		Persentase Penerbitan KIA	%	37,56	40		40		45		45		45			
	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan akta kelahiran anak (usia 0 - 18 tahun)	%	93,73	100	278.464.000	100	444.489.850	100	444.489.850	100	466.714.343	100	1.355.694.043	Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan	
		Persentase Penerbitan Akta Kematian	%	35	35		35		40		40		40			

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD			Target Kinerja Program (K) dan Pendanaan (Rp)								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyelesaian Data Penduduk Bermasalah	%	100	100	2.572.683.240	100	2.889.508.590	100	2.639.508.590	100	2.658.529.090	100	8.187.546.270	Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan
		Jumlah Kerjasama Pemanfaatan Data	paket	7	10		12		12		14		38		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						24.371.371.434		35.828.907.367		36.905.590.724		37.652.518.577		110.387.016.669	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	16.258.761.204	100	24.878.494.067	100	24.949.930.661	100	24.954.258.514	100	74.782.683.243	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Penataan Desa	Persentase Desa yang terbuka aksesnya	%	100	100	378.900.500	100	532.385.900	100	530.652.913	100	555.652.913	100	1.618.691.726	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa dengan kerja sama aktif	%	100	100	33.643.000	100	394.095.000	100	413.799.750	100	413.799.750	100	1.221.694.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa tertib administrasi pemerintahan desa	%	100	100	6.228.835.000	100	9.022.282.400	100	9.988.162.400	100	10.705.762.400	100	29.716.207.200	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa yang berdaya dari sisi ekonomi dan teknologi tepat guna	%	100	100	1.471.231.730	100	1.001.650.000	100	1.023.045.000	100	1.023.045.000	100	3.047.740.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD			Target Kinerja Program (K) dan Pendanaan (Rp)								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					17.304.382.476		18.501.870.576		18.471.042.053		18.473.623.365		55.446.535.994	
	Program Pengendalian Penduduk	Persentase desa dan institusi pendidikan formal/non formal siaga kependudukan aktif dalam kegiatan pengendalian penduduk	%	100	100	1.004.966.600	100	1.005.094.700	100	1.005.222.800	100	1.005.350.900	100	3.015.668.400	Dinas P3AKB
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Persentase peserta KB Baru	%	100	100	2.498.124.143	100	2.499.124.143	100	2.499.124.143	100	2.499.124.143	100	7.497.372.429	Dinas P3AKB
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase keluarga yang ikut kelompok bina ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga	%	76,50	77	7.195.988.793	79,50	7.195.988.793	82,50	7.200.032.170	85	7.202.485.382	85	21.598.506.345	Dinas P3AKB
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Persentase peserta KB Aktif MKJP	%	21,85	22	6.605.302.940	22,05	7.801.662.940	22,45	7.766.662.940	22,75	7.766.662.940	22,75	23.334.988.820	Dinas P3AKB
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					24.126.791.755		51.124.963.626		41.221.069.915		51.715.105.002		144.061.138.543	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	10.562.875.185	100	14.472.035.150	100	14.497.801.510	100	15.937.330.388	100	44.907.167.048	Dinas perhubungan
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan	Rasio tersedianya infrastruktur	%	81,60	82,42	13.539.680.770	83,24	36.625.734.876	84,07	26.701.582.125	84,91	35.756.088.334	84,91	99.083.405.335	Dinas perhubungan

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD			Target Kinerja Program (K) dan Pendanaan (Rp)									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Angkutan Jalan (Llaj)	perhubungan yang sesuai standart														
	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase penyediaan dan pemeliharaan alat keselamatan pelayanan sesuai standart	%	61,22	61,83	24.235.800	62,45	27.193.600	63,07	21.686.280	63,70	21.686.280	63,70	70.566.160	Dinas perhubungan	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					14.378.887.629		19.261.199.397		14.969.338.658		14.825.123.658		49.055.661.713		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	6.753.582.909	100	7.342.384.977	100	7.202.467.608	100	7.505.600.608	100	22.050.453.193	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Desa/Kelurahan penerima informasi dan komunikasi publik	%	100	100	3.344.889.370	0	7.132.389.370	0	2.409.436.000	0	2.409.436.000	0	11.951.261.370	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Cakupan publikasi informasi dalam media cetak maupun elektronik	%	0	0	-	80		85		90		90			
	Program Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang telah memiliki sistem informasi sesuai standar	%	100	100	4.280.415.350	0	4.786.425.050	0	5.357.435.050	0	4.910.087.050	0	15.053.947.150	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Cakupan pemanfaatan aplikasi informatika oleh Perangkat Daerah	%	0	0	-	100		100		100		100			
		Persentase Jaminan Kualitas Layanan TIK (SLA)	%	0	0	-	73		75		77		77			

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD			Target Kinerja Program (K) dan Pendanaan (Rp)								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI UKM					2.513.844.055		3.297.245.301		4.921.250.795		2.997.457.760		11.215.953.856	
	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase Aspek Permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen efisiensi, akuiditas kemandirian dan pertumbuhan Koperasi serta jati diri Koperasi.	%		96	221.069.590	98	227.718.127,65	100	275.004.351,98	100	375.975.805	100	878.698.284	Dinas Perdagangan Koperasi dan UM
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan perilaku SDM Koperasi	%		98	356.971.965	100	306.962.755,33	100	443.234.140,44	100	583.332.265	100	1.333.529.160	Dinas Perdagangan Koperasi dan UM
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Produktifitas nilai tambah penguatan kelembagaan, penataan manajemen dan restrukturisasi usaha koperasi	%	93,28	95	54.981.000	98	62.128.530	100	69.801.133,24	100	90.438.388	100	222.368.051	Dinas Perdagangan Koperasi dan UM
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (Umkm)	Persentase UMKM yang Mendapat Fasilitas Pemberdayaan UMKM	%	29,02	100	1.798.067.500	100	2.629.951.299,62	100	3.772.302.374,22	100	1.307.762.352	100	7.710.016.026	Dinas Perdagangan Koperasi dan UM
	Program Pengembangan Umkm	Persentase Unit Usaha yang Mendapatkan Fasilitas Pengembangan Usaha menjadi Usaha Kecil	%	25,14	100	82.754.000	100	70.484.588,80	100	360.908.795,22	100	639.948.950	100	1.071.342.334	Dinas Perdagangan Koperasi dan UM

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD			Target Kinerja Program (K) dan Pendanaan (Rp)								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					7.800.290.406		9.927.393.454		9.766.192.269		10.382.006.625		30.075.592.348	
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlahajuan Perizinan yang lengkap persyaratannya	Izin	12.582	18.551	1.206.720.504	19.850	2.073.984.000	19.850	1.708.281.500	19.850	1.750.289.500	59.550	5.532.555.000	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah unit usaha yg memperoleh fasilitasi kemudahan Penanaman modal	Unit	1	1	429.321.950	1	659.373.000	1	241.529.000	1	255.934.000	3	1.156.836.000	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu
	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah promosi yang dilaksanakan	Kali/buah	3	3	249.653.250	3	590.653.250	3	595.653.250	3	600.653.250	9	1.786.959.750	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku usaha yang terverifikasi data dan pengawasan penanaman modal	Orang	196	196	313.110.000	196	313.110.000	196	313.110.000	196	313.110.000	588	939.330.000	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah data yang diproses	Buku	24	24	144.568.000	24	154.687.000	24	165.515.000	24	177.101.000	72	497.303.000	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	5.456.916.702	100	6.135.586.204	100	6.742.103.519	100	7.284.918.875	100	20.162.608.598	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD			Target Kinerja Program (K) dan Pendanaan (Rp)								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					35.462.226.893		29.127.148.129		35.398.170.026		35.795.012.491		100.320.330.646	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang memiliki kapasitas unggul	%	100	100	1.449.452.748	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	900.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase organisasi kepramukaan yang dibina	%	100	100	400.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	300.000.000	100	950.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlet yang berprestasi Tingkat Daerah	%	100	100	20.150.345.000	100	19.191.597.527	100	25.405.596.905	100	25.402.550.029	100	69.999.744.461	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	13.462.429.145	100	9.335.550.602	100	9.342.573.121	100	9.792.462.462	100	28.470.586.185	Dinas Pemuda dan Olahraga
			%												
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					222.893.500		234.039.000		245.741.000		258.028.000		737.808.000	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data dan statistik sektoral yang dikelola dengan baik	%	100	100	222.893.500	100	234.039.000	100	245.741.000	100	258.028.000	100	737.808.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral pada Portal Satu Data	%	0	0	-	100		100		100		100		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					341.908.000		601.908.000		601.908.000		601.908.000		1.805.724.000	

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD			Target Kinerja Program (K) dan Pendanaan (Rp)								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase OPD yang datanya terlindungi sistem pengamanan	%	100	100	341.908.000	100	601.908.000	100	601.908.000	100	601.908.000	100	1.805.724.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Cakupan pengamanan informasi perangkat daerah	%	0	0	-	65		70		75		75		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					12.620.904.835		15.101.859.205		15.841.104.415		17.221.136.263		48.164.099.882	
	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase koleksi museum yang dikelola dan dipelihara	%	80	82	313.979.000		313.979.000		314.892.400		395.295.712		1.024.167.112	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase koleksi museum sebagai wisata edukasi	%				82		84		86		86		
	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase seni budaya yang dilestarikan	%	75	85	1.348.704.000		2.922.155.686		3.480.428.523		4.433.836.349		10.836.420.558	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase pelaku seni budaya lokal yang mengikuti event	%				85		87		89		89		
	Program Pembinaan Sejarah	Persentase SDM sejarah yang dibina	%	78	82	95.658.300		95.658.300		95.658.300		95.658.300		286.974.900	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase SDM sejarah yang aktif dalam seminar	%				82		84		86		86		
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan	%	80	82	142.645.000		148.854.190		149.712.332		307.197.948		605.764.470	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD			Target Kinerja Program (K) dan Pendanaan (Rp)									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Persentase cagar budaya sebagai tujuan wisata	%				82		84		86		86			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	%	100	100	10.719.918.535	100	11.621.212.028,74	100	11.800.412.860,01	100	11.989.147.953,02	100	35.410.772.841,77	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					5.085.597.819		5.452.011.722		5.739.261.627		5.966.944.632		17.158.217.981		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	4.681.800.833	100	5.022.439.710	100	5.282.854.358	100	5.426.936.318	100	15.732.230.386	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang dibina	%	26,55	6,20	403.796.986	7,14	429.572.012	8,64	456.407.269	9	540.008.314	9	1.425.987.595	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					852.202.793		832.329.962		903.592.429		986.378.957		2.722.301.348		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	315.796.764	100	308.796.764	100	308.796.764	100	308.797.000	100	926.390.528	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
	Program Pengelolaan Arsip	Persentase PD yg mengelola arsip yg sesuai ketentuan	%	17	20,60	282.800.981	24,10	284.508.700	27,50	297.801.281	31,03	321.000.000	31,03	903.309.981	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Perlindungan Arsip	%	92	100	253.605.048	100	239.024.498	100	296.994.384	100	356.581.957	100	892.600.839	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		Persentase Penyelamatan Restorasi Arsip	%	100	100		70		80		85		85		Dinas Perpustaka	

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD			Target Kinerja Program (K) dan Pendanaan (Rp)								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															an dan Arsip
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					14.656.911.672		16.294.443.611		16.345.633.335		16.469.452.331		49.563.860.032	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	13.842.925.672	100	13.605.107.961	100	13.675.368.085	100	13.757.722.081	100	41.492.528.882	Dinas peternakan dan Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	1.144	1.144	87.555.500	1.178	209.882.750	1.214	212.180.250	1.250	214.592.250	3.642	636.655.250	Dinas peternakan dan Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	5.083	5.083	572.634.500	5.235	2.068.232.400	5.393	2.042.827.000	5.554	2.080.642.000	16.182	6.191.701.400	Dinas peternakan dan Perikanan
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah ikan yang diolah	Ton	1.063	1.063	153.796.000	1.095	411.220.500	1.128	415.258.000	1.162	416.496.000	3.385	1.242.974.500	Dinas peternakan dan Perikanan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					5.580.897.737		5.350.624.404		6.373.775.067		6.698.620.711		18.423.020.182	
	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase promosi wisata melalui event seni dan budaya	%	85	85	2.673.482.150		1.136.894.564		2.003.307.151		1.902.617.050		5.042.818.764	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase event unggulan	%				100		100		100		100		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD			Target Kinerja Program (K) dan Pendanaan (Rp)								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase produk/karya lokal yang bersertifikat	%	100	84	556.911.950		573.062.397		578.793.021		607.732.672		1.759.588.089	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase legalitas karya/produk pelaku ekonomi kreatif	%				86		88		90		90		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik wisata yang memenuhi standar	%	75	85	1.807.044.637		2.961.440.273		2.366.400.494		2.509.415.604		7.837.256.371	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase destinasi wisata unggulan	%				85		86		87		87		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang terbina	%	80	85	543.459.000		679.227.171		1.425.274.402		1.678.855.386		3.783.356.959	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase keterlibatan pelaku ekraf dalam event	%				85		86		87		87		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					61.593.724.973		285.557.453.564		290.021.971.411		267.172.805.832		842.752.230.807	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah produktifitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan				13.539.063.070		31.526.638.700		43.018.014.260		45.958.384.100	-	120.503.037.060	DKPP
		- Produktifitas Padi	Ton/ Ha	5,63	5,75		5,90		6,05		6,15		6,15		DKPP

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD			Target Kinerja Program (K) dan Pendanaan (Rp)								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		- Produktivitas bawang merah	Ton/ Ha	9	9,02		9,04		9,06		9,08		9,08		DKPP
		- Produktifitas Tembakau	Ton/ Ha	1,38	1,39		1,40		1,41		1,42		1,42		DKPP
		Rasio kecukupan pupuk (pupuk tersedia (subsidi+non subsidi) / Kebutuhan pupuk)	%	0,50	0,53		0,55		0,57		0,59		0,59		DKPP
		Rasio ketersediaan alsintan (ketersediaan alsintan/kebutuhan alsintan)	%	0,46	0,47		0,48		0,49		0,60		0,60		DKPP
		Rasio penyediaan benih berlabel													DKPP
		- Padi	%	37,50	40,10		41,50		42,70		43,70		43,70		DKPP
		- Bawang Merah	%	0,24	0,26		0,32		0,38		0,44		0,44		DKPP
		- Tembakau	%	15,50	15,80		15,80		15,80		15,80		15,80		DKPP
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rasio luas lahan terairi	%	15,41	17,50	9.655.171.150	19,58	86.243.787.050	21,67	93.930.565.300	23,75	98.033.944.770	23,75	278.208.297.120	DKPP
		Rasio JUT yang terbangun	%	54,88	65,53		68,28		71,03		73,77		73,77		DKPP
		Persentase penanganan dan penanggulangan bencana	%	100	100		100		100		100		100		DKPP

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD			Target Kinerja Program (K) dan Pendanaan (Rp)								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah luas lahan yang mendapatkan fasilitas penanggulangan bencana pertanian	Ha	17.930	17.500	1.029.212.400	18.000	1.767.875.010	19.000	1.944.662.520	20.000	2.136.976.720	57.000	5.849.514.250	DKPP
		Rasio luas lahan serangan OPT yang tertangani (luas serangan OPT yang dapat ditangani / total luas serangan OPT)	%	0,50	0,60		0,65		0,70		0,75		0,75		DKPP
		Rasio luas DPI yang tertangani (luas terkena DPI yang dapat ditangani / total luas terkena DPI)	%	0,10	0,15		0,20		0,25		0,30		0,30		DKPP
	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kelas kemampuan kelompok tani				10.192.547.238		138.800.146.660		121.754.771.260		91.160.488.590		351.715.406.510	DKPP
		- Pemula	%	9,60	9		9		8,40		7,80		7,80		DKPP
		- Lanjut	%	71,30	74		71,40		71,80		72		72		DKPP
		- Madya	%	18,40	16		19		19,10		19,40		19,40		DKPP
		- Utama	%	0,70	1		0,70		0,80		0,80		0,80		DKPP
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	24.897.791.303	100	25.117.267.667	100	26.749.606.470	100	27.168.570.746	100	79.035.444.883	DKPP

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD			Target Kinerja Program (K) dan Pendanaan (Rp)								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase sarana pakan dan bibit yang disediakan	%	2	2	576.860.700	4	640.054.500	6	809.023.000	8	839.835.000	8	2.288.912.500	Dinas Peternakan dan perikanan
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase kelompok pembibit sapi PO	%	41	41	97.464.300	42	74.769.500	43	77.383.000	44	80.310.000	44	232.462.500	Dinas Peternakan dan perikanan
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase ternak besar yang sehat	%	95,20	95,50	1.356.528.812	95,50	1.174.797.477	95,50	1.519.335.101	95,50	1.566.190.906	95,50	4.260.323.484	Dinas Peternakan dan perikanan
		Persentase ternak kecil yang sehat	%	97	97	-	97	-	97	-	97	-	97	-	Dinas Peternakan dan perikanan
		Persentase ternak unggas yang sehat	%	97	97	-	97	-	97	-	97	-	97	-	Dinas Peternakan dan perikanan
		Persentase penanggulangan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas Peternakan dan perikanan
		Persentase peningkatan penyediaan produk hewan yang ASUH	%	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	Dinas Peternakan dan perikanan
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase ternak sapi betina peserta AUTS	%	1,40	1,40	79.825.000	1,40	67.317.000	1,50	69.370.500	1,60	71.581.000	1,60	208.268.500	Dinas Peternakan dan perikanan

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD			Target Kinerja Program (K) dan Pendanaan (Rp)								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kkelompok tani ternak yang dibina	%	9	18	169.261.000	18	144.800.000	19	149.240.000	20	156.524.000	20	450.564.000	Dinas Peternakan dan perikanan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					13.749.325.242		15.205.108.576		15.650.482.783		20.092.850.835		50.948.442.194	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	7.426.596.060	100	7.740.486.621,42	100	8.157.802.021,94	100	10.549.997.881,85	100	26.448.286.525	Dinas Perdagangan n Koperasi dan UM
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase perusahaan yang Mendapatkan Perizinan dan Pendaftaran yang Berbasis OSS	%		100	24.576.500	100	57.425.280	100	64.483.804	100	89.512.949,20	100	211.422.033	Dinas Perdagangan n Koperasi dan UM
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sektor Perdagangan Besar dan Eceran : Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	28	90	4.793.983.865	93	6.275.394.971,95	97	6.099.475.796,76	100	7.152.833.520,25	100	19.527.704.289	Dinas Perdagangan n Koperasi dan UM
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Pelaksanaan Pemantauan Ketersediaan Barang Pokok dan Penting	%		100	1.015.620.700	100	57.818.000	100	64.583.804	100	554.340.855,94	100	676.742.660	Dinas Perdagangan n Koperasi dan UM
	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Ekspor di Kab. Bojonegoro	%	44	100	202.986.418	100	302.928.146,47	100	344.042.387,50	100	442.070.633,80	100	1.089.041.168	Dinas Perdagangan n Koperasi dan UM
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Presentase Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Bertanda Sah	%	88	100	104.760.216	100	175.642.048	100	239.911.750	100	439.193.275,20	100	854.747.073	Dinas Perdagangan n Koperasi dan UM

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD			Target Kinerja Program (K) dan Pendanaan (Rp)									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase UMKM yang Mengikuti Kegiatan Promosi, Pemasaran, Pameran dan Pembinaan	%	5	100	180.801.483	100	595.413.508,22	100	680.183.219,13	100	864.901.718,66	100	2.140.498.446	Dinas Perdagangan dan Koperasi dan UM	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					277.300.330,0		766.478.000,0		542.303.000,0		569.420.000,0		1.878.201.000,0		
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM Binaan yang sesuai standart mutu	%	48	50	193.694.080	50	678.691.000	50	450.126.000	50	472.633.000	50	1.601.450.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Izin Usaha Industri yang ditindaklanjuti	%	100	100	31.500.000	100	33.075.000	100	34.729.000	100	36.466.000	100	104.270.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Data Industri yang masuk SIINAS	%	17	20	52.106.250	22	54.712.000	24	57.448.000	26	60.321.000	26	172.481.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
	SEKRETARIAT DAERAH					103.587.254.640		117.921.161.155		117.886.944.468		118.398.996.653		354.207.102.276		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	25.164.216.921	100	19.695.990.965	100	23.434.330.225	100	22.224.978.669	100	65.355.299.859	Bagian Umum	
		Persentase dokumen kelengkapan SAKIP yang tersusun sesuai standar	%	90	82	23.837.933.833	94	25.024.009.035	96	26.281.322.050,50	98	27.595.388.153	98	78.900.719.239	Bagian Umum	

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD			Target Kinerja Program (K) dan Pendanaan (Rp)								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase OPD yang melaporkan capaian kinerja tepat waktu	%	90	92	441.953.458	94	451.105.753	96	468.818.211,86	98	488.988.670	98	1.408.912.635	Bagian Organisasi
		Jumlah rekomendasi monitoring dan evaluasi yang dihasilkan	%	63	92	493.349.523	94	497.836.849	96	504.840.792	98	512.194.931	98	1.514.872.572	Bagian Organisasi
		Persentase efektivitas pelayanan keprotokolan pimpinan daerah	%	85	90	4.312.169.000	92	3.845.387.000	93	4.996.887.000	94	5.212.227.000	94	14.054.501.000	Bagian Prokopim
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Nilai kualitas pengadaan barang & jasa	%	64,50	70	411.708.000	72	513.708.000	74	539.468.400	75	566.516.820	75	1.619.693.220	Bagian PBJ
		Persentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil diproses sesuai regulasi	%	95	96	719.190.000	97	761.790.000	98	800.029.500	99	840.000.000	99	2.401.819.500	Bagian PBJ
		Persentase pembinaan dan pengkoordinasian Pengelolaan BUMD dan BLUD yang dievaluasi	%	90	94	667.375.500	95	200.210.500	96	202.735.500	97	208.035.500	97	610.981.500	Bagian Perekonomian SDA
		Persentase tindak lanjut atas pelaksanaan koordinasi bidang TPID, Ekonomi Mikro, Pertanian, Pangan, Tenaga kerja, Pertambangan, Lingkungan Hidup	%	90	92	576.520.000	93	500.587.000	94	505.887.000	95	696.470.000	95	1.702.944.000	Bagian Perekonomian SDA

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD			Target Kinerja Program (K) dan Pendanaan (Rp)								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		dan Survey Sumber air tanah													
		Persentase realisasi pelaksanaan program opd sesuai target	%		90	543.775.150	92	698.750.963	94	743.124.883	95	757.681.127	95	2.199.556.973	Bagian Adm Pembangun an
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tingkat capaian penerima pelayanan kesejahteraan masyarakat	%	88	86	42.919.363.500	87	62.677.696.000	89	55.919.510.000	90	55.664.046.000	90	174.261.252.000	Bagian Kesra
		Persentase usulan Produk Hukum Daerah yang difasilitasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan	%	68	70	1.630.635.000	72	1.684.913.450	74	1.747.356.483	76	1.812.703.640	76	5.244.973.573	Bagian Hukum
		Persentase dokumen LPPD yang disusun sesuai standard	%	80	85	1.436.312.180	90	893.147.808	92	1.267.796.661	94	1.368.670.272	94	3.529.614.741	Bagian Pemerintah an
		Persentase pengelolaan batas wilayah yang terselesaikan	%			-	15	476.027.832	17	474.837.761	20	451.095.872	20	1.401.961.465	Bagian Pemerintah an
	Program Pengelolaan Perbatasan	Persentase pengelolaan batas wilayah yang terselesaikan	%	11	13	432.752.575		-		-		-		-	Bagian Pemerintah an
	SEKRETARIAT DPRD					67.649.633.118		66.120.087.158		66.847.188.995		70.444.881.237		203.412.157.390	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	39.226.800.771	100	39.955.739.243	100	39.912.101.180	100	39.880.492.630	100	119.748.333.053	Sekretariat Dewan

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD			Target Kinerja Program (K) dan Pendanaan (Rp)								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Daerah Kabupaten/Kota														
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dprd	Persentase produk hukum yang berhasil ditetapkan tepat waktu	%	12	11	28.422.832.347	12	26.164.347.915	14	26.935.087.815	16	30.564.388.607	16	83.663.824.337	Sekretariat Dewan
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan	%	80	80		85		87		90		90		
	PERENCANAAN					9.948.036.910		11.101.328.598		11.647.777.670		12.128.397.680		34.877.503.948	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	6.293.904.528	100	7.021.501.635	100	7.288.413.641	100	7.778.734.326	100	22.088.649.602	Bappeda
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi	%	100	100	1.323.742.976	100	1.259.386.773	100	1.554.884.777	100	1.217.094.414	100	4.031.365.964	Bappeda
		Persentase tahapan penyusunan dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu dan sesuai regulasi	%	100	100		100		100		100		100		
		Persentase PD yang dimonev sesuai ketentuan	%	100	100		100		100		100		100		
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Persentase keselarasan Renstra PD Bidang Pemerintahan,	%	100	100	2.330.389.406	100	2.820.440.190	100	2.804.479.252	100	3.132.568.940	100	8.757.488.382	Bappeda

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD			Target Kinerja Program (K) dan Pendanaan (Rp)								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pembangunan Daerah	Pembangunan Manusia, dan Kesejahteraan Masyarakat terhadap RPJMD													
		Persentase keselarasan Renja PD Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kesejahteraan Masyarakat terhadap RKPD	%	100	100		100		100		100		100		
		Persentase keselarasan Renstra PD Bidang Infrastruktur, Kewilayahan dan Ekonomi terhadap RPJMD	%	100	100		100		100		100		100		
		Persentase keselarasan Renja PD Bidang Infrastruktur, Kewilayahan dan Ekonomi terhadap RKPD	%	100	100		100		100		100		100		
	KEUANGAN					1.155.338.435.622		1.418.518.846.490		1.581.023.656.040		1.284.030.329.103		4.283.572.831.633	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	7.577.588.721	100	9.541.731.257	100	9.144.254.103	100	9.191.947.309	100	27.877.932.669	BPKAD
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyusun	%	100	100	1.132.334.724.512	100	1.393.126.246.280	100	1.555.729.462.806	100	1.258.004.695.706	100	4.206.860.404.792	BPKAD

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD			Target Kinerja Program (K) dan Pendanaan (Rp)								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		RKA sesuai ketentuan													
		Persentase OPD yang menyerap Anggaran sesuai dengan target yang ditetapkan	%	100	100		100		100		100		100		BPKAD
		Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	%	100	100		100		100		100		100		BPKAD
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan laporan pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	%	80	80	1.678.577.915	85	1.697.503.339	85	1.744.778.476	85	1.781.917.400	85	5.224.199.215	BPKAD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	9.542.297.390	100	10.063.506.328	100	10.521.695.430	100	11.119.155.188	100	31.704.356.946	Bapenda
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengawasan, pengendalian, kerjasama dan sosialisasi Pajak Daerah	%	100	100	4.205.247.084	100	4.089.859.286	100	3.883.465.225	100	3.932.613.500	100	11.905.938.011	Bapenda
		Persentase capaian penerimaan Pajak Daerah (non PBB dan non BPHTB) yang dikelola	%	126	100		100		100		100		100	-	
		Persentase capaian penerimaan PBB	%	117	100		100		100		100		100	-	

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD			Target Kinerja Program (K) dan Pendanaan (Rp)								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		dan BPHTB yang dikelola													
		Persentase capaian penerimaan PAD non Pajak	%	93	100		100		100		100		100	-	
	KEPEGAWAIAN					14.731.268.131		15.036.679.983		15.579.107.199		16.042.885.824		46.658.673.007	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	7.762.474.861	100	7.927.180.955	100	8.200.684.188	100	8.441.221.635	100	24.569.086.779	BKPP
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian sesuai time response	%	100	100	2.555.619.730	100	2.642.813.049	100	2.762.903.553	100	2.875.847.763	100	8.281.564.365	BKPP
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Presentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai standar	%	100	100	4.413.173.540	100	4.466.685.979	100	4.615.519.458	100	4.725.816.426	100	13.808.021.863	BKPP
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					1.189.981.000		1.472.319.252		1.524.456.000		1.583.182.000		4.579.957.252	
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase rekomendasi hasil kajian capaian indikator makro yang di tindak lanjuti perangkat daerah	%	100	100	1.189.981.000	100	1.472.319.252	100	1.524.456.000	100	1.583.182.000	100	4.579.957.252	Bappeda
		Persentase usulan kajian OPD yang ditindak lanjuti	%	100	100		100		100		100		100		
		Jumlah Inovasi dan teknologi yang diterapkan	%	100	100		100		100		100		100		
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN														

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD			Target Kinerja Program (K) dan Pendanaan (Rp)								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Inspektorat					14.845.420.421		17.179.743.859		17.796.481.969		18.438.000.758		53.414.226.585	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	11.920.783.892	100	14.128.875.503	100	14.593.070.195	100	15.074.418.396	100	43.796.364.095	Inspektorat
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut evaluasi kinerja OPD	%	80	80	1.315.755.646	84	1.361.543.428	88	1.429.620.599,72	90	1.501.101.629,70	90	4.292.265.658	Inspektorat
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang meningkat nilai SAKIP	%	75	79	1.608.880.883	81	1.689.324.927	83	1.773.791.173,51	86	1.862.480.732,18	86	5.325.596.833	
		Nilai MCP	%	94,63	95		95		95	-	95		95	-	
		Persentase OPD dengan nilai kematangan MR > 15	%	16	21		24		28	-	32		32	-	
		Prosedur ketersediaan kebijakan prosedur pengawasan yang relevan dengan leveling	%	100	100		100		100	-	100		100	-	
	UNSUR KEWILAYAHAN					111.882.471.933		119.112.527.676		122.807.682.577		127.024.439.329		368.944.649.581	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	85.136.873.553	100	90.297.466.818	100	93.870.611.958	100	97.862.092.619	100	282.030.171.395	28 Kecamatan
	Program Penyelenggaraan	Persentase urusan pemerintahan	%	100	100	10.028.018.120	100	11.575.882.586	100	11.802.974.610	100	11.980.612.184	100	35.359.469.380	28 Kecamatan

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD			Target Kinerja Program (K) dan Pendanaan (Rp)								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemerintahan dan Pelayanan Publik	sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan													
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan	%	100	100	15.679.863.310	100	15.905.498.730	100	15.768.700.121	100	15.782.298.521	100	47.456.497.372	28 Kecamatan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	%	100	100	374.585.040	100	485.892.797	100	498.060.059	100	511.182.756	100	1.495.135.612	28 Kecamatan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang dibina dan diawasi	%	100	100	663.131.910	100	847.786.745	100	867.335.829	100	888.253.249	100	2.603.375.823	28 Kecamatan
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					15.308.961.671		77.958.189.875		15.962.436.321		15.962.436.321		109.883.062.517	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	5.268.790.171	100	5.256.142.668	100	5.273.029.990	100	5.343.380.953	100	15.872.553.611	Bakesbangpol
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kesadaran masyarakat tentang Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	%	90	90	203.558.000	90	213.735.900	90	224.422.695	90	235.643.830	90	673.802.425	Bakesbangpol

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD			Target Kinerja Program (K) dan Pendanaan (Rp)								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang memiliki kapasitas unggul	%	0	0	-	100	1.122.798.148	100	1.178.938.055	100	1.237.884.958	100	3.539.621.161	Bakesbangpol
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik	%	92	90	8.441.092.500	92	69.276.157.279	94	7.766.279.903	95	7.551.726.111	95	84.594.163.293	Bakesbangpol
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang memiliki legalitas hukum serta Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	%	97	90	328.039.000	92	968.499.780	94	342.866.773	95	358.056.619	95	1.669.423.172	Bakesbangpol
		Usulan Hibah Ormas (Pagar Nusa, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia dan Perkumpulan Pamong Seni Budaya Indonesia)	%												
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase tokoh masyarakat yang mengikuti pembinaan dan Pengembangan Masyarakat tentang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	%	70	80	290.222.700	80	304.733.835	82	319.970.527	84	335.969.053	84	960.673.415	Bakesbangpol

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja	Satu an	Kondisi Kinerja pada Awal RPD			Target Kinerja Program (K) dan Pendanaan (Rp)								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Danfasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah potensi konflik yang terdeteksi/ ditemukan	Kas us	9	7	777.259.300	7	816.122.265	7	856.928.378	7	899.774.797	21	2.572.825.440	Bakesbangpol
						6.974.265.726.251		6.606.340.443.942		7.137.597.575.157		6.845.764.872.457		20.590.468.967.311	

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bojonegoro periode tahun 2024-2026 tercermin dari capaian indikator kinerja makro yang ditetapkan. Pertumbuhan ekonomi secara inklusif diharapkan akan terus berkembang dalam proses pembangunan di Kabupaten Bojonegoro selama tahun 2024–2026.

Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan, maka dipilihlah Indikator Kinerja makro dan target capaian selama tiga tahun ke depan yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 8. 1 Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 – 2026

No	Uraian	Satuan	Kondisi Awal RPD		Target Rencana		
			Realisasi				
			2022	2023**	2024	2025	2026
1	Indeks Rasa Aman	indeks	-	-	72,71-73,54	73,27-73,88	73,92-74,21
2	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	64.14	65,55-68,65	68,95-70,12	69,75-71,54	71,25-72,80
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	70.12	70,50-71,00	71,22-71,85	71,80-72,47	72,35-73,15
4	Indeks Pembangunan Gender	indeks	90.63	90,70-90,95	90,91-91,12	91,10-91,25	91,21-91,56
5	Tingkat Kemiskinan	%	12.21	12,15-11,90	11,80-11,53	11,44-10,75	10,52-10,03
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4.69	4,62-4,57	4,48-4,26	4,21-3,97	3,88-3,51
7	Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas (%)	%	6.04	6,15-6,23	6,16-6,72	6,65-7,18	7,10-7,71
8	Inflasi	%	1.97	2,53-1,85	2,53-1,85	2,53-1,85	2,53-1,85
9	Indeks Gini	indeks	0.28	0,27-0,26	0,26-0,25	0,25-0,24	0,24-0,23
10	Indeks Williamson	indeks	0.23	0,22-0,20	0,21-0,19	0,18-0,16	0,15-0,12
11	NTP	nilai	106.1	106,5-106,8	106,5-107	107,1-107,5	107,3-107,8

** proyeksi data diolah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Pj. kepala daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian kinerja indikator yang ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2024-2026 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan atau capaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tersebut secara rinci disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 8. 2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 – 2026

NO.	ASPEK INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR
			2022	2023**	2024	2025	2026	
	ASPEK KESEJAHTERAAN							
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1	Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas (%)	%	6.04	6,15-6,23	6,16-6,72	6,65-7,18	7,10-7,71	7,10-7,71
2	Inflasi	%	1.97	2,53-1,85	2,53-1,85	2,53-1,85	2,53-1,85	2,53-1,85
3	Indeks Gini	indeks	0.28	0,27-0,26	0,26-0,25	0,25-0,24	0,24-0,23	0,24-0,23
4	Indeks Williamson	indeks	0.23	0,22-0,20	0,21-0,19	0,18-0,16	0,15-0,12	0,15-0,12
5	NTP	nilai	106.1	106,5-106,8	106,5-107	107,1-107,5	107,3-107,8	107,3-107,8
	Kesejahteraan Sosial							
1	Tingkat Kemiskinan	%	12.21	12,15-11,90	11,80-11,53	11,44-10,75	10,52-10,03	10,52-10,03
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	70.12	70,50-71,00	71,22-71,85	71,80-72,47	72,35-73,15	72,35-73,15
3	Angka Harapan Hidup	tahun	72,16	72,20	72,36	72,52	72,68	72,68
4	Rata-rata lama sekolah	tahun	7,43	7,45	7,50	7,52	7,54	7,54
5	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,84	12,84	12,86	12,88	12,90	12,90
6	Pengeluaran per Kapita disesuaikan	Rp.	10.323.000	10.423.000	10.523.000	10.623.000	10.723.000	10.723.000
7	Indeks Pembangunan Gender	indeks	90.63	90,70-90,95	90,91-91,12	91,10-91,25	91,21-91,56	91,21-91,56

NO.	ASPEK INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR
			2022	2023**	2024	2025	2026	
8	Indeks Pemberdayaan Gender	56,14	56,24*	56,80	57,50	57,75	58,00	58,00
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4.69	4,62-4,57	4,48-4,26	4,21-3,97	3,88-3,51	3,88-3,51
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	72.16	72.26	72.36	72.46	72.56	72.56
11	Jumlah Organisasi Kesenian	Kelompok	363	368	373	378	383	383
12	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	buah	4	4	4	4	4	4
13	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	buah	2	2	2	2	2	2
	ASPEK PELAYANAN UMUM							
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)							
	SD	%	107,41	107,26	107,43	107,44	107,45	107, 45
	SMP	%	98,84	99,31	99,31	99,32	99,33	99,33
	PAUD	%	97,86	97,87	98,45	98,46	98,47	98,48
2	Angka Partisipasi Murni (APM)							
	SD	%	99,84	99,85	99,86	99,87	99,88	99, 88
	SMP	%	99,3	98,68	98,71	98,72	98,73	98, 75
3	AKI	Per 100.000 KH	73,24	68,24	63,24	58,24	52,55	52,55
4	AKB	per 1.000 KH	5,12	4,82	4,53	4.23	4,27	4,27

NO.	ASPEK INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR
			2022	2023**	2024	2025	2026	
5	Prevalensi Stunting	%	2,76	2,66	2,56	2,45	2, 50	2, 50
6	Persentase Tingkat Ketaatan Tata Ruang	%	88,30	88,40	88,50	89.60	89.71	89.71
7	Nilai Kinerja Infrastruktur Permukiman dan keciptakaryaan	%	72,09	72,19	72,29	72,39	72,49	72,49
8	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	%	79,95	80,95	81,95	82,95	83,95	83,95
9	Prosentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak	%	60,72	60,92	61,12	61,32	61,52	61,52
10	Angka PPKS	Orang	115.726	130.726	145.726	160.726	175.726	175.726
11	Cakupan Keluarga miskin dan rentan memiliki usaha ekonomi	%	74	80	85	90	95	95
12	Indeks Resiko Bencana	indeks	84,39	83	82	81	80	80
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	68,25	72,00	75,00 (Baik)	78,00 (Baik)	80,00 (Baik)	80,00 (Baik)
14	Jumlah Koperasi Aktif	Buah	748	758	768	778	788	798
15	Jumlah Lahan Bersertifikat	Bidang	88.594	89.491	100.234	110.978	121.722	121.722
16	Realisasi Investasi (Triliun)	Triliun	8.57	11.36	7.00	7.10	7.20	7.20
17	Indeks SPBE	Indeks	2,65	3.51	3.6	3.7	3.8	3.8
18	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	96,5	97	97,5	98	98,5	98,5
19	Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	100	98	100	100	100	100

NO.	ASPEK INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR
			2022	2023**	2024	2025	2026	
20	Prosentase Pemasangan rambu-rambu	%	100	100	100	100	100	100

** proyeksi data diolah

BAB IX

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 dilakukan berdasarkan hasil penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bojonegoro sampai dengan tahun 2025, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2023, RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional serta regulasi yang berlaku.

9.1 CATATAN PENTING

Dokumen RPD ini merupakan penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan Daerah yang disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif dan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas.

Pendekatan teknokratik adalah pendekatan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui proses Konsultasi Publik, *Focus Group Discussion* (FGD).

Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan secara berjenjang di daerah hingga nasional, serta dengan penyelarasan kebijakan dan program nasional dan provinsi.

9.2. PEDOMAN TRANSISI

Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan setelah RPD berakhir. Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kabupaten Bojonegoro, maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

1. RKPD dan Renja PD

Penyusunan RKPD dan Renja PD tahun pertama pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih mengacu kepada RPD Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Tahun 2024-2026 serta berpedoman kepada peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan RKPD, RKP, RPJMD dan RKPD Provinsi Jawa Timur. RKPD tersebut harus menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam RPD Tahun 2024-2026. Selanjutnya, RKPD yang dimaksud digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD.

2. Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPD Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan sasaran RPD yang menjadi tujuan perangkat daerah.

9.3 KAIDAH PELAKSANAAN

Dokumen RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Bupati Bojonegoro berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 kepada masyarakat;
- b. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro agar melaksanakan program-program yang tercantum dalam RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 dengan sebaik-baiknya, dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung

pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan pada RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026;

- c. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPD Tahun 2024-2026.
- d. Penjabaran lebih lanjut untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
- e. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pengendalian terhadap penjabaran RPD Tahun 2024-2026 ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- f. RPD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, dan selanjutnya RKPD merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selanjutnya, untuk menjamin pencapaian tujuan, sasaran dan program/kegiatan yang telah di susun, maka pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, *stakeholders* dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026.

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19690405 198809 2 001

